

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Bab I PENDAHULUAN

Sejarah Bondowoso bermula dengan adanya pengembangan wilayah kekuasaan Besuki ke arah Selatan pada Tahun 1789 oleh Menteri Anom Abhiseka Mas Astruno. Pada Tahun 1794 dalam usaha memperluas wilayah beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dengan diangkatnya beliau sebagai Demang di daerah yang baru dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno atau yang biasa dikenal dengan Raden Bagus Assra.

Perkembangan Bondowoso dari hari ke hari semakin meningkat dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau hari Selasa Kliwon tanggal 25 Syawal 1234 H, Adipati Besuki R. Aryo Prawirodiningrat sebagai orang yang memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda, dalam rangka memantapkan strategi politiknya menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, ditandai penyerahan Tombak Tunggul Wulung.

Secara struktur wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berada di wilayah bagian Timur Jawa Timur.

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada 113048'10"-113048'26" Bujur Timur dan 7050'10"-7056'41" Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.560,10 km² atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

- 1) Bagian Utara : Kabupaten Situbondo.
- 2) Bagian Selatan : Kabupaten Jember.
- 3) Bagian Timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
- 4) Bagian Barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terletak di Jl. Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, memiliki 23 Kecamatan 10 Kelurahan 209 Desa serta dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah terbagi : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten, Sekretariat DPRD, 7 Badan, 12 Bagian, 16 Dinas, Inspektorat, RSUD dr. H. Koesnadi, BUMD PDAM dan BUMD PT Bondowoso Gemilang.

Kemudian ketentuan perundang-undangan yang melandasi Kegiatan Operasional Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 9) serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 64).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati selaku pengelola keuangan daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas akuntansi berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Bondowoso dimulai pada Tahun 2002, dimana Tahun 2021 merupakan tahun ketujuh penerapan basis akrual penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disusun dengan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basic Accounting*) dalam upaya menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

- 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1993 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 Nomor 4 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso

- Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 9);
 56. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluwarsa;
 57. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso;
 58. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 34);
 59. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 60);
 60. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 64);
 61. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 70);
 62. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 59);
 63. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 118);
 64. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 64); dan
 65. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1 Pendapatan - LRA;
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Transfer
	5.1.4 Surplus/(Defisit)
	5.1.5 Pembiayaan Netto
	5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
	5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
	5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan
	5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
	5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
	5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
	5.3 Neraca
	5.3.1 Aset
	5.3.2 Kewajiban
	5.3.3 Ekuitas
	5.4 Laporan Operasional
	5.4.1 Pendapatan – LO
	5.4.2 Beban

- 5.4.3 Surplus/ Defisit dari Operasi
- 5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 5.4.6 Pos Luar Biasa
- 5.4.7 Surplus/ Defisit LO
- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Kas
 - 5.5.6 Saldo Akhir Kas Total
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit LO
 - 5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir
- 5.7 Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
BAB VII Penutup

Bab II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan Per kapita
3. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)
4. Angka Kemiskinan
5. Angka Pengangguran
6. Indeks Pembangunan Manusia

Adapun capaian indikator kinerja makro adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi

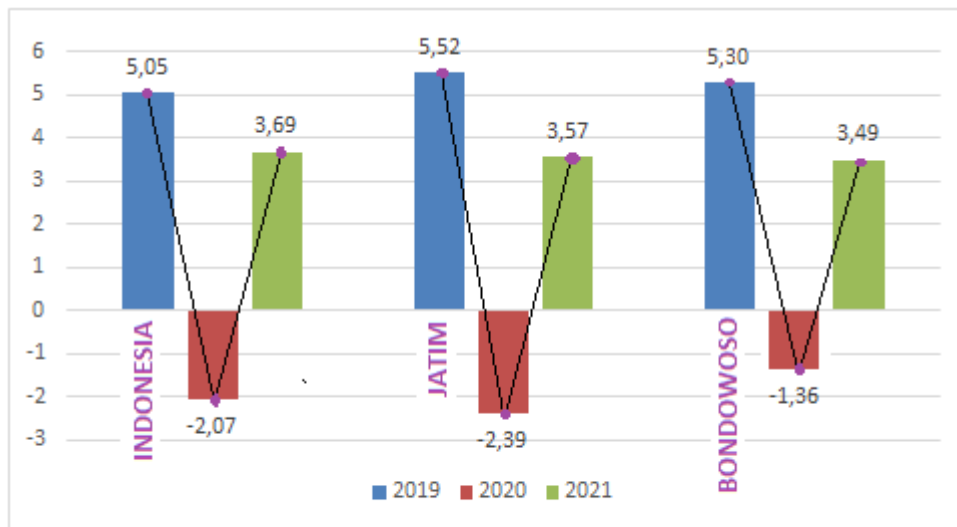
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$.4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Angka ini merupakan usaha terbaik pemerintah setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal I dan pelambatan di kuartal III akibat meningkatnya angka infeksi Covid-19 di Tanah Air. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih dalam kisaran target pemerintah yaitu antara 3,5 persen sampai dengan 4,0 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Perbaikan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah, dan peningkatan konsumsi dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh positif pada angka 3,57 persen setelah tahun 2020 mengalami kontraksi 2,33 persen. Pemulihan perekonomian Jawa Timur selama tahun 2021 didorong oleh adanya pelonggaran aktivitas sehingga meningkatkan permintaan dan konsumsi. Realisasi APBD Tahun 2021 meningkat pada belanja barang dan jasa (4,7%) serta belanja modal (35,3%). Belanja bantuan sosial naik 64% karena adanya realisasi bantuan penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.

Adanya peningkatan ekspor luar negeri Jawa Timur terutama pada ekspor barang, diantaranya adalah perhiasan, tembaga, kayu dan barang dari kayu, dan bahan kimia organik serta ditunjang peningkatan impor luar negeri memberikan sinyal atas perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tahun 2021. Selain itu seiring meningkatnya beberapa komoditi utama di Jawa Timur seperti mesin-mesin, besi dan baja, pupuk, plastik dan barang dari plastik dan sebagainya.

Perbaikan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur berimbas kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Nilai total PDRB Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 mencapai Rp21.052,23 milyar meningkat dari tahun 2020 yang mencapai Rp19.935,59 Milyar. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua sektor ekonomi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi meningkat pada angka 3,49 persen pada tahun 2021 meskipun kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung. Selama kurun waktu 3 tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi yang dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Perekonomian Bondowoso tumbuh secara positif dari 5,30 persen pada tahun 2019 menurun mencapai angka -1,36 persen bertepatan dengan merebaknya Covid-19 pada tahun 2020 dan meningkat kembali



Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi 2019-2021

menjadi 3,49 persen pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan fiskal serta dukungan pemerintah daerah.

Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2021 diketahui sebesar 21.052,23 miliar rupiah dan PDRB menurut harga konstan tahun 2021 sebesar 13.921,65 miliar rupiah.

Tabel 2 - 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.802,12	5.946,49	6.204,93	3.682,96	3.729,46	3.818,35
2	Pertambangan dan Penggalian	388,31	373,69	388,06	269,79	252,97	257,49
3	Industri Pengolahan	4.630,56	4.762,09	5.140,41	3.224,57	3.235,13	3.358,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,47	8,59	9,01	6,78	6,78	6,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	13,77	14,50	15,68	10,91	11,35	12,06
6	Konstruksi	1.918,21	1.822,06	1.852,41	1.175,34	1.103,62	1.107,78

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	3.065,57	2.879,94	3.136,50	2.234,87	2.050,86	2.182,66
8	Transportasi dan Pergudangan	146,86	141,96	158,08	106,27	101,09	113,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,80	125,73	132,78	100,51	82,23	84,00
10	Informasi dan Komunikasi	1.023,25	1.110,70	1.188,01	899,76	974,90	1.041,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	573,74	575,49	596,56	396,98	395,12	399,27
12	Real Estat	226,83	238,22	243,67	168,73	173,40	175,91
13	Jasa Perusahaan	76,93	73,42	76,35	50,50	46,84	47,61
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	682,33	697,42	697,89	448,57	437,46	440,13
15	Jasa Pendidikan	693,87	724,71	741,71	505,75	518,54	529,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,45	156,88	167,71	107,66	116,62	121,78
17	Jasa Lainnya	323,76	283,69	302,49	250,52	215,39	224,39
	Jumlah	19.868,81	19.935,59	21.052,23	13.640,46	13.451,77	13.921,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso masih sangat tergantung pada sektor pertanian karena sektor ini masih menjadi penyumbang paling besar terhadap total PDRB 2021 yaitu sebesar 29,47 persen (Rp6.204,93 milyar), angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,36 persen dari tahun 2020, sektor industri pengolahan menempati urutan kedua dengan andil sebesar 24,42 persen (Rp5.140,41 milyar), mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen. Sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada urutan ketiga sebesar 14,90 persen (Rp3.136,50 milyar), sektor ini mengalami penurunan sebesar 0,45 persen dari tahun 2020. Sedangkan sumbangan terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,04 persen (Rp 9,01 Milyar).

Tabel 2 - 2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3,15%	2,49%	4,35%	1,21%	1,26%	2,38%
2	Pertambangan dan Penggalian	4,93%	-3,76%	3,84%	2,44%	-6,24%	1,79%
3	Industri Pengolahan	10,94%	2,84%	7,94%	8,62%	0,33%	3,81%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07%	1,37%	4,94%	5,83%	0,09%	2,34%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	6,47%	5,26%	8,16%	4,72%	3,96%	6,31%
6	Konstruksi	7,52%	-5,01%	1,67%	5,91%	-6,10%	0,38%
7	Perdagangan	9,05%	-6,06%	8,91%	6,33%	-8,23%	6,43%

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda						
8	Transportasi dan Pergudangan	10,84%	-3,33%	11,35%	8,31%	-4,87%	12,37%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,84%	-17,18%	5,61%	7,97%	-18,18%	2,15%
10	Informasi dan Komunikasi	9,06%	8,55%	6,96%	7,58%	8,35%	6,85%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,12%	0,31%	3,66%	3,97%	-0,47%	1,05%
12	Real Estat	7,73%	5,02%	2,29%	5,32%	2,77%	1,44%
13	Jasa Perusahaan	9,15%	-4,56%	3,99%	6,27%	-7,26%	1,65%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10,96%	2,21%	0,07%	3,83%	-2,48%	0,61%
15	Jasa Pendidikan	9,48%	4,45%	2,35%	7,69%	2,53%	2,14%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06%	10,14%	6,90%	6,38%	8,32%	4,43%
17	Jasa Lainnya	7,56%	-12,37%	6,62%	6,44%	-14,02%	4,18%
	Jumlah	7,40%	0,34%	5,60%	5,29%	-1,36%	3,49%

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, semua kategori mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan 12,37 persen, pertumbuhan kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 6,85 persen sementara kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di urutan ketiga dengan 6,43 persen. Selanjutnya yang mengalami laju pertumbuhan terendah ditempati oleh lapangan usaha kategori konstruksi yang mencapai 0,38 persen, sektor kategori lain mengalami kenaikan dan penurunan cukup bervariasi.

2. PDRB perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2 - 3 PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – 2021

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun		
		2019	2020	2021
1	ADHB (Rp)	25.614.000	25.685.198,89	27.041.170,20
2	ADHK (Rp)	17.585.000	17.331.383,39	20.305.031,86

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2021 sedangkan PDRB ADHK perkapita penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang mengalami kontraksi akan berpengaruh pada tingkat produksi dan distribusi komoditi yang ada pada sektor PDRB.

Kondisi ini akan memberikan pengaruh kepada tingkat produksi pelaku usaha yang mengalami penurunan sehingga tingkat capaian PDRB per kapita akan menurun dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian PDRB per kapita masyarakat dan menyesuaikan target pencapaian PDRB per kapita untuk tahun berikutnya.

3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

Tabel 2 - 4 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 2019-2021

No	Uraian	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	Gini Rasio	0,302	0,329	0,334

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini (Gini Ratio) sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan menjadi 0,334. Selama pandemi tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan khususnya pada lapisan bawah sehingga tingkat pengeluaran semakin kecil. Peningkatan angka rasio gini berkorelasi dengan peningkatan angka kemiskinan.

4. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur darisisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2 - 5 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2021

No	Uraian	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	Tingkat kemiskinan (%)	13,33	14,17	14,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bondowoso, 2022

Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang meningkat pada level 14,73% dengan adanya pandemi Covid-19. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso bertambah sebanyak 4,93 ribu jiwa dari 110,24 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 115,18 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 4,47 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,95 persen, dari 14,17 persen pada Maret 2020 menjadi 14,73 persen pada Maret 2021.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Sakernas Agustus 2021, tingkat pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso mencapai 4,46 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 73,89 persen. Meningkatnya pengangguran merupakan dampak nyata dari pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2 - 6 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2021

No	Rincian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Usia Kerja	615.757	628.608	632.700
2	Angkatan Kerja	466.822	472.018	467.488
3	Bukan angkatan Kerja	148.935	156.590	165.212
4	Bekerja	453.025	452.545	446.653
5	Pengangguran Terbuka	13.797	19.473	20.835
6	Tingkat pengangguran Terbuka	2,96%	4,13%	4,46%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,81%	75,09%	73,89%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2017-2020

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat selama masa pandemi Covid-19 terdapat sebanyak 20.835 orang di Kabupaten Bondowoso yang menganggur meningkat sebanyak 1.362 orang dari tahun 2020 atau bertambah 6,99%. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami peningkatan dari 4,13% pada tahun 2020 menjadi 4,46% di tahun 2021.

Tabel 2 - 7 Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso tahun 2019-2021

No	Jenis Pekerjaan	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	Pertanian	125.555	218.713	204.486
2	Industri	49.096	91.676	87.302
3	Jasa	278.374	142.156	154.865
	Jumlah	453.025	452.545	446.653

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2021

Selama kondisi pandemi Covid-19, justru jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dan industri pengolahan (khususnya UMKM) mengalami penurunan namun kedua sektor ini masih menjadi penyumbang dalam penyediaan lapangan kerja. Sektor jasa yang mengalami penurunan terbesar jumlah tenaga kerja pada tahun 2020, mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu dari 142.156 orang menjadi 154.865 orang di tahun 2021. Hal ini menunjukkan intervensi program – program pembangunan pada sektor pertanian dan UMKM masih mampu memberikan peluang dan kesempatan kerja kepada masyarakat selama pandemi Covid-19. Sedangkan pada sektor jasa, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak positif dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja pada sektor ini.

6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2019-2021 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2 - 8 Perkembangan IPM Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Indek pembangunan Manusia (IPM)	66,09	66.43	66,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso secara konsisten mengalami kemajuan selama periode 2019-2021. Dari 66,09 (2019) meningkat menjadi 66,59 (2021) atau selama periode tersebut tumbuh 0,24 persen.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Dengan melihat capaian masing-masing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing.

Tabel 2 - 9 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	66,55 th	66,74 th	66,89 th
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,27 th	13,28 th	13,29 th
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,71 th	5,93 th	5,94 th
4	Pengeluaran per Kapita (Rp000,00)	10.665,00	10.610,00	10.690,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Selama periode 2019 hingga 2020, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,74 tahun, meningkat 0,15 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,29 tahun, meningkat 0,01 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 5,94 tahun, juga meningkat 0,01 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2010) telah mencapai Rp10,690 juta, meningkat Rp80 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai kebijakan yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan terutama peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan anggaran Tahun 2021 untuk pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bondowoso sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui upaya penertiban pemungutan pajak serta memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah;
2. Melakukan rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur yang potensial serta mendukung sektor perekonomian;
3. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;

4. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Pengawasan obyek pajak pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidental (pagelaran musik, pertandingan olah raga, dan lain-lain);
6. Pembinaan wajib pajak dalam penyelesaian masalah data obyek dan subyek pajak;
7. Penetapan pengenaan pajak dan retribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang;
8. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak;
9. Melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
10. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
11. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
12. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah; dan
13. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual.

B. Dana Perimbangan

Kebijakan dana perimbangan tahun 2021 yaitu:

1. Berperan serta secara aktif terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya yang berupa pendapatan bagi hasil bagi daerah;
2. Menetapkan target pajak / bukan pajak yang diaplikasikan dalam realisasi pajak secara optimal; dan
3. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

D. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang terukur dengan memperhatikan setiap belanja yang dikeluarkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan

anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran belanja daerah selalu diperhatikan beberapa hal yang menjadi arah kebijakan belanja daerah antara lain:

1. Memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang;
2. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah;
3. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat;
4. Menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun dari pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
5. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat; dan
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran daerah.

E. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan guna mengatasi defisit belanja daerah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan optimalisasi pengeluaran pembiayaan guna menjaga kesinambungan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Tahun 2021 melaksanakan peningkatan prioritas pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan urusan kearsipan.

Kemudian urusan pilihan mencakup urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan urusan transmigrasi. Serta urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan.

2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan

Pencapaian target kinerja APBD – Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 - 10 Pencapaian Target Kinerja APBD – Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Trend
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.787.209.962,00	223.136.567.608,59	104,86	222.657.296.673,72	0,22
3	Pendapatan Pajak Daerah	41.547.542.000,00	35.114.763.839,00	84,52	30.580.807.590,96	14,83
4	Pendapatan Retribusi Daerah	20.109.953.528,00	14.367.036.052,00	71,44	18.316.717.235,00	(21,56)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	100,00	4.203.394.607,40	1,35
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146.869.635.045,00	169.394.688.328,14	115,34	169.556.377.240,36	(0,10)
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.676.211.773.660,00	1.729.631.641.136,14	103,19	1.649.796.915.925,00	4,84
8	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.315.080.460.413,00	1.323.758.092.095,00	100,66	1.264.055.581.233,00	4,72
9	Dana Bagi Hasil	113.237.482.036,00	142.767.234.998,00	126,08	99.407.048.031,00	43,62
10	Dana Alokasi Umum	843.159.769.000,00	843.159.769.000,00	100,00	851.793.800.000,00	(1,01)
11	Dana Alokasi Khusus - Fisik	157.146.533.000,00	136.481.721.719,00	86,85	312.854.733.202,00	(56,38)
12	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	201.536.676.377,00	201.349.366.378,00	99,91	0,00	0,00
13	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	273.759.249.000,00	273.759.249.000,00	100,00	256.120.568.000,00	6,89
14	Dana Insentif Daerah	37.542.241.000,00	37.542.241.000,00	100,00	19.903.560.000,00	88,62
15	Dana Desa	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00	100,00	236.217.008.000,00	0,00
16	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	87.372.064.247,00	132.114.300.041,14	151,21	129.620.766.692,00	1,92
17	Pendapatan Bagi Hasil	76.328.325.890,00	121.070.561.684,00	158,62	93.730.423.692,00	29,17
18	Bantuan Keuangan	11.043.738.357,00	11.043.738.357,14	100,00	35.890.343.000,00	(69,23)
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	100,00	69.302.860.000,00	46,58
20	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	69.302.860.000,00	(100,00)
21	Pendapatan Lainnya	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	98,31	0,00	0,00
22	JUMLAH PENDAPATAN	1.992.329.562.622,00	2.054.350.628.524,73	103,11	1.941.757.072.598,72	5,80

Dari pencapaian target kinerja pendapatan daerah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum realisasi pendapatan tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang disebabkan kebijakan pemerintah terkait pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa target kinerja Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Dapat dijelaskan bahwa mekanisme pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Pajak hiburan dan pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak dengan sistem *self assessment*. Selanjutnya pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assesment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Belanja

Pencapaian target kinerja APBD – Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 - 11 Pencapaian Target Kinerja APBD – Belanja

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Trend
1	BELANJA					
2	BELANJA OPERASI	1.542.806.227.456,00	1.410.349.479.042,56	91,41	1.380.731.057.346,40	2,15
3	Belanja Pegawai	841.075.659.477,00	799.417.410.997,00	95,05	752.196.941.707,00	6,28
4	Belanja Barang dan Jasa	516.299.761.254,00	444.016.600.988,70	86,00	554.882.853.239,40	(19,98)
5	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00	0,00
6	Belanja Hibah	137.205.528.275,00	130.514.844.220,06	95,12	70.135.598.600,00	86,09
7	Belanja Bantuan Sosial	47.042.114.650,00	35.217.459.036,80	74,86	2.332.500.000,00	1.409,86
8	BELANJA MODAL	227.661.304.718,00	196.554.645.695,81	86,34	227.251.278.052,52	(13,51)
9	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	109.123.644.065,00	95.221.279.024,00	87,26	104.183.050.562,00	(8,60)
10	Belanja Modal - Bangunan dan Gedung	48.954.344.213,00	42.446.436.867,21	86,71	70.038.377.021,89	(39,40)
11	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.663.470.295,00	51.677.563.443,60	83,81	43.648.432.279,63	18,40
12	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	7.093.846.145,00	7.025.222.811,00	99,03	8.409.927.669,00	(16,47)
13	Belanja Modal - Aset Lainnya	826.000.000,00	184.143.550,00	22,29	971.490.520,00	(81,05)
14	BELANJA TAK TERDUGA	2.877.383.079,00	1.006.063.700,00	34,96	226.620.000,00	343,94
15	Belanja Tak Terduga	2.877.383.079,00	1.006.063.700,00	34,96	226.620.000,00	343,94
16	JUMLAH BELANJA	1.773.344.915.253,00	1.607.910.188.438,37	90,67	1.608.208.955.398,92	(0,02)
17	BELANJA TRANSFER					
18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.154.754.200,00	4.154.754.200,00	100,00	2.915.741.954,00	42,49
19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.010.995.353,00	100,00	2.323.144.234,00	(13,44)
20	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.725.867.316,00	349.725.867.316,00	100,00	343.933.199.524,00	1,68
21	JUMLAH TRANSFER	355.891.616.869,00	355.891.616.869,00	100,00	349.172.085.712,00	1,92
22	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.129.236.532.122,00	1.963.801.805.307,37	92,23	1.957.381.041.110,92	0,33
23	SURPLUS/DEFISIT	(136.906.969.500,00)	90.548.823.217,36	166,14	(15.623.968.512,20)	(679,55)
24	PEMBIAYAAN					
25	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	100,02	152.530.938.011,77	(10,15)
26	Penggunaan SiLPA	136.906.969.500,00	136.906.969.499,57	100,00	152.497.813.011,77	(10,22)
27	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	139.318.500,00	0,00	33.125.000,00	320,58
28	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEMBIAYAAN NETTO	136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	100,10	152.530.938.011,77	(10,15)
31	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	227.595.111.216,93	0,00	136.906.969.499,57	66,24

Bab III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas mulai Tahun 2015. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah meliputi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. H. Koesnadi dan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS). Hal ini yang mendasari ditetapkannya Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dari sisi pembiayaan, APBD Tahun 2021 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.992.329.562.622,00 dan terealisasi sebesar Rp2.054.350.628.524,73 atau sebesar 103,11%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.941.757.072.598,72, realisasi pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp112.593.555.926,01 atau 5,80% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja dan transfer untuk tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan sebesar Rp2.129.236.532.122,00 dan terealisasi sebesar Rp1.963.801.805.307,37 atau sebesar 92,23%. Dibandingkan dengan realisasi pada

tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.957.381.041.110,92 realisasi belanja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.420.764.196,45 atau sebesar 0,33%.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun Anggaran 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintah Daerah yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah sebagai berikut. :

Tabel 3 - 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi dan Organisasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
I) PENDAPATAN DAERAH	1.992.329.562.622,00	2.054.350.628.524,73	103,11
1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar	148.698.664.190,00	166.846.534.876,16	112,20
a) Kesehatan	148.537.000.000,00	166.771.499.526,16	112,28
- DINAS KESEHATAN	13.000.000.000,00	7.289.285.200,00	56,07
- RUMAH SAKIT UMUM DR. H. KOESNADI	135.537.000.000,00	159.482.214.326,16	117,67
b) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.664.190,00	75.035.350,00	46,41
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.664.190,00	75.035.350,00	46,41
2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	6.499.652.283,00	6.837.654.352,00	105,20
a) Pangan	26.829.945,00	20.237.600,00	75,43
- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	26.829.945,00	20.237.600,00	75,43
b) Lingkungan Hidup	4.377.298.250,00	4.088.682.000,00	93,41
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	4.377.298.250,00	4.088.682.000,00	93,41
c) Komunikasi dan Informatika	171.400.000,00	188.786.173,00	110,14
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	171.400.000,00	188.786.173,00	110,14
d) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.545.381.000,00	1.532.303.147,00	99,15
- DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.545.381.000,00	1.532.303.147,00	99,15
e) Penanaman Modal	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05
- DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05
3) Urusan Pilihan	567.239.165,00	525.234.117,00	92,59
a) Pariwisata	181.036.000,00	133.947.750,00	73,99
- DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	181.036.000,00	133.947.750,00	73,99
b) Pertanian	386.203.165,00	391.286.367,00	101,32
- DINAS PERTANIAN	386.203.165,00	391.286.367,00	101,32
4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.836.564.006.984,00	1.880.141.205.179,57	102,37
a) Keuangan	1.836.564.006.984,00	1.880.141.205.179,57	102,37
- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.795.016.464.984,00	1.845.026.441.340,57	102,79
- BADAN PENDAPATAN DAERAH	41.547.542.000,00	35.114.763.839,00	84,52
II) BELANJA DAERAH	2.129.236.532.122,00	1.963.801.805.307,37	92,23
1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.243.116.279.466,00	1.136.042.841.943,10	91,39
a) Pendidikan	621.738.807.045,00	592.750.747.940,27	95,34
- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	621.738.807.045,00	592.750.747.940,27	95,34
b) Kesehatan	427.748.843.270,00	370.210.523.044,88	86,55
- DINAS KESEHATAN	199.166.606.027,00	163.964.051.564,03	82,33
- RUMAH SAKIT UMUM DR. H. KOESNADI	228.582.237.243,00	206.246.471.480,85	90,23
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.450.811.748,00	122.241.265.032,95	88,29
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.396.456.748,00	110.212.401.032,95	87,20
- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.054.355.000,00	12.028.864.000,00	99,79
d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.822.384.261,00	28.134.742.846,00	94,34

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.822.384.261,00	28.134.742.846,00	94,34
e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.474.193.882,00	17.245.671.756,00	88,56
- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.313.387.700,00	7.586.359.278,00	91,25
- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.160.806.182,00	9.659.312.478,00	86,55
f) Sosial	5.881.239.260,00	5.459.891.323,00	92,84
- DINAS SOSIAL	5.881.239.260,00	5.459.891.323,00	92,84
2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	137.279.063.836,00	119.132.654.404,56	86,78
a) Tenaga Kerja	2.842.166.700,00	2.625.241.223,00	92,37
- DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2.842.166.700,00	2.625.241.223,00	92,37
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.957.894.050,00	2.494.451.130,00	84,33
- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.957.894.050,00	2.494.451.130,00	84,33
c) Pangan	4.018.143.940,00	3.804.480.032,90	94,68
- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	4.018.143.940,00	3.804.480.032,90	94,68
d) Pertanahan	259.786.510,00	248.617.401,00	95,70
- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	259.786.510,00	248.617.401,00	95,70
e) Lingkungan Hidup	19.802.445.860,00	18.873.868.408,00	95,31
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	19.802.445.860,00	18.873.868.408,00	95,31
f) Administrasi Kependudukan dan Capil	7.012.087.000,00	5.989.448.559,00	85,42
- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.012.087.000,00	5.989.448.559,00	85,42
g) Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.905.845.100,00	17.638.127.172,00	93,29
- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.905.845.100,00	17.638.127.172,00	93,29
h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.928.175.550,00	4.949.112.761,00	55,43
- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8.928.175.550,00	4.949.112.761,00	55,43
i) Perhubungan	23.730.912.235,00	22.946.636.459,00	96,70
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	23.730.912.235,00	22.946.636.459,00	96,70
j) Komunikasi dan Informatika	12.625.500.930,00	11.680.336.221,00	92,51
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.625.500.930,00	11.680.336.221,00	92,51
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.747.778.800,00	15.294.320.548,66	67,23
- DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.747.778.800,00	15.294.320.548,66	67,23
l) Penanaman Modal	4.193.086.800,00	3.732.527.644,00	89,02
- DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.193.086.800,00	3.732.527.644,00	89,02
m) Kepemudaan dan Olah Raga	3.602.210.400,00	3.591.288.100,00	99,70
- DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.602.210.400,00	3.591.288.100,00	99,70
n) Statistik	310.922.300,00	297.965.300,00	95,83
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	310.922.300,00	297.965.300,00	95,83
o) Persandian	165.670.500,00	164.200.900,00	99,11
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	165.670.500,00	164.200.900,00	99,11
p) Kebudayaan	816.274.614,00	775.021.000,00	94,95
- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	816.274.614,00	775.021.000,00	94,95
q) Perpustakaan	4.081.496.047,00	3.756.901.445,00	92,05

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
- DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.081.496.047,00	3.756.901.445,00	92,05
r) Kearsipan	278.666.500,00	270.110.100,00	96,93
- DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	278.666.500,00	270.110.100,00	96,93
3) Urusan Pilihan	58.156.044.730,00	55.068.393.447,31	94,69
a) Kelautan dan Perikanan	3.500.487.000,00	3.424.079.082,85	97,82
- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.500.487.000,00	3.424.079.082,85	97,82
b) Pariwisata	14.665.064.400,00	13.711.654.013,00	93,50
- DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	14.665.064.400,00	13.711.654.013,00	93,50
c) Pertanian	33.755.905.180,00	32.016.971.725,66	94,85
- DINAS PERTANIAN	33.755.905.180,00	32.016.971.725,66	94,85
d) Perdagangan	642.185.700,00	602.711.450,00	93,85
- DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	642.185.700,00	602.711.450,00	93,85
e) Perindustrian	5.592.402.450,00	5.312.977.175,80	95,00
- DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.592.402.450,00	5.312.977.175,80	95,00
4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	690.685.144.090,00	653.557.915.512,40	94,62
a) Administrasi Pemerintahan	88.546.224.571,00	80.270.678.299,00	90,65
- SEKRETARIAT DAERAH	88.546.224.571,00	80.270.678.299,00	90,65
b) Pengawasan	6.489.593.746,00	6.147.548.786,00	94,73
- INSPEKTORAT	6.489.593.746,00	6.147.548.786,00	94,73
c) Perencanaan	9.719.610.150,00	8.627.433.589,00	88,76
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.719.610.150,00	8.627.433.589,00	88,76
d) Keuangan	457.503.769.585,00	446.538.186.397,00	97,60
- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	446.982.669.226,00	438.127.012.810,00	98,02
- BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.521.100.359,00	8.411.173.587,00	79,95
e) Kepegawaian	9.522.477.290,00	7.928.353.078,00	83,26
- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9.522.477.290,00	7.928.353.078,00	83,26
f) Pendidikan dan Pelatihan	1.109.353.650,00	1.053.415.625,00	94,96
- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.109.353.650,00	1.053.415.625,00	94,96
g) Penelitian dan Pengembangan	472.983.300,00	367.670.800,00	77,73
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	472.983.300,00	367.670.800,00	77,73
h) Sekretariat DPRD	43.199.178.646,00	33.858.707.854,00	78,38
- SEKRETARIAT DPRD	43.199.178.646,00	33.858.707.854,00	78,38
i) Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	65.564.265.802,00	60.348.584.690,40	92,04
- KECAMATAN BONDOWOSO	13.472.618.700,00	12.587.765.857,00	93,43
- KECAMATAN TAMANAN	2.306.248.002,00	2.060.200.146,00	89,33
- KECAMATAN TENGGARANG	3.832.458.300,00	3.619.351.475,00	94,44
- KECAMATAN TEGALAMPEL	3.875.952.200,00	3.446.980.653,00	88,93
- KECAMATAN CURAHDAMI	3.519.511.400,00	3.249.805.631,00	92,34
- KECAMATAN WRINGIN	2.160.586.900,00	1.987.098.831,00	91,97
- KECAMATAN PAKEM	1.622.682.700,00	1.388.665.384,00	85,58
- KECAMATAN BINAKAL	2.190.822.000,00	2.071.086.598,40	94,53
- KECAMATAN MAESAN	2.544.794.300,00	2.224.612.458,00	87,42
- KECAMATAN GRUJUGAN	2.260.998.700,00	2.119.888.454,00	93,76
- KECAMATAN PUJER	2.129.030.400,00	2.048.364.894,00	96,21
- KECAMATAN WONOSARI	2.327.441.200,00	2.132.731.616,00	91,63
- KECAMATAN SUKOSARI	1.956.397.600,00	1.806.113.421,00	92,32
- KECAMATAN TLOGOSARI	2.094.949.100,00	1.973.113.307,00	94,18
- KECAMATAN TAPEN	2.171.832.500,00	2.074.432.963,00	95,52
- KECAMATAN SUMBER WRINGIN	2.098.216.600,00	1.914.379.868,00	91,24
- KECAMATAN PRAJEKAN	2.217.333.100,00	2.118.610.043,00	95,55
- KECAMATAN KLABANG	2.380.046.900,00	2.276.325.725,00	95,64
- KECAMATAN CERMEE	2.312.179.200,00	2.139.711.714,00	92,54
- KECAMATAN IJEN	1.793.207.800,00	1.600.650.590,00	89,26

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
- KECAMATAN TAMAN KROCOK	1.887.589.500,00	1.783.926.141,00	94,51
- KECAMATAN JAMBESARI DARUSSHOLAH	2.069.016.000,00	1.733.910.993,00	83,80
- KECAMATAN BOTOLINGGO	2.340.352.700,00	1.990.857.928,00	85,07
j) Kesatuan Bangsa dan Politik	8.557.687.350,00	8.417.336.394,00	98,36
- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.557.687.350,00	8.417.336.394,00	98,36

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Penerimaan pendapatan daerah secara umum telah mencapai target yang direncanakan sebesar 104,86%. Salah satunya pencapaian penerimaan pendapatan masih terdapat hambatan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pendapatan Pajak Daerah pencapaian realisasinya sebesar 84,52% dan Pendapatan Retribusi Daerah pencapaian realisasinya sebesar 71,44%. PAD merupakan potensi pendapatan yang dapat dikelola secara luas oleh pemerintah daerah. Hambatan yang muncul menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelesaikannya dan sekaligus menjadikannya peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan sesuai potensi daerah yang dimiliki.

Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih adanya subyek pajak daerah yang menunda/menghindari ketentuan pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
2. Akurasi data wajib pajak dan retribusi serta pengembangan terhadap objek pajak dan retribusi perlu untuk ditingkatkan dengan terus melakukan updating data guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
3. Melakukan kajian terhadap kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD;
4. Penyusunan naskah akademik penyesuaian tarif, rincian obyek, prosedur / sistem pemungutan dan ketentuan umum lainnya, pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi langsung kepada wajib pajak atau melalui media elektronik, baliho, spanduk, dan lain lain. Serta penyelesaian permasalahan perpajakan daerah dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberikan penghargaan kepada aparatur pemungut pajak daerah yang berprestasi;
6. Melakukan kegiatan pemuktahiran data obyek dan subyek pajak dan Retribusi daerah dengan survei zona nilai tanah dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak secara bertahap;
7. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut melalui pembinaan, diklat teknis dan fungsional serta studi banding/lapang tentang sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan pengawasan secara berkala pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

9. Meningkatkan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan sumber sumber pendapatan daerah.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan dan sistem pemungutan berbasis Tehnologi Informasi (TI), pajak dan retribusi daerah;
11. Perlunya peningkatan kinerja dan tanggungjawab petugas pemungut dalam pengelolaan sumber PAD; dan
12. Melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi atau kebijakan di atasnya serta dapat terus mengikuti perkembangan jaman khususnya dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terdapat beberapa permasalahan yaitu belum adanya kepastian perhitungan dana perimbangan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pemerintah daerah harus memperhitungkan secara cermat pengalokasian dalam perencanaannya.

Kemudian penyerapan belanja pada tahun 2021 sebesar 90,67% masih perlu ditingkatkan dengan melakukan penajaman kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah perlu didorong dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan target belanja sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Selanjutnya penyerapan belanja transfer pada tahun 2021 sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja transfer dalam membiayai pembangunan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan keuangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah. Sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan OPD, kemudian dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan entitas akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Dinas Pertanian
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Inspektorat
27. Kecamatan Bondowoso
28. Kecamatan Tamanan
29. Kecamatan Tenggarang
30. Kecamatan Tegalampel
31. Kecamatan Curahdami
32. Kecamatan Wringin

33. Kecamatan Pakem
34. Kecamatan Binakal
35. Kecamatan Maesan
36. Kecamatan Grujugan
37. Kecamatan Pujer
38. Kecamatan Wonosari
39. Kecamatan Sukosari
40. Kecamatan Tlogosari
41. Kecamatan Tapen
42. Kecamatan Sumber Wringin
43. Kecamatan Prajekan
44. Kecamatan Klabang
45. Kecamatan Cermee
46. Kecamatan Ijen
47. Kecamatan Taman Krocok
48. Kecamatan Jambesari Darussholah
49. Kecamatan Botolinggo
50. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan-pernyataan di dalam kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis Akruwal atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akruwal.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu basis akruwal untuk penyusunan laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas sedangkan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akruwal baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas; dan

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akruwal, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Neraca

A. Pengukuran Aset

1. Pengukuran aset lancar, adalah sebagai berikut :

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
5. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Laporan Realisasi Anggaran

A. Pengukuran Pendapatan

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang diterima; dan
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

B. Pengukuran Belanja

1. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan; dan
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Kabupaten Bondowoso mulai Tahun Anggaran 2016 sehingga saldo dana BOS akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima BLUD dan digunakan

langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;

3. Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD;
4. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;
5. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD;
6. Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD); dan
8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran

1. Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran;
2. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD;
3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD);
4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
6. Pendapatan dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian

1. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan daerah;
2. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah-LRA;
 - b. Pendapatan Transfer-LRA; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA;
3. Pendapatan Asli Daerah–LRA, Transfer–LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

dengan basis kas dalam mata uang rupiah serta rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

4. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

B. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*); dan
 - c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
4. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Pendapatan Non Operasional;
5. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan dan pad dari hasil eksekusi jaminan;
 - a. PAD melalui penetapan terdiri dari :
 - 1) *Official Assesment*

Yaitu kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan, misalnya pendapatan pajak reklame; Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;

2) *Self Assesment*

Yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut; Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan; Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP);

b. PAD tanpa penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Retribusi, Penerimaan Jasa

Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pendapatan telah diterima;

c. PAD dari hasil eksekusi jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya; Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan; Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan;

6. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/Provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut kecuali DAU; Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali terdapat dokumen yang sah dari pemerintah yang mengakui adanya utang dana transfer kepada daerah maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakuinya sebagai pendapatan transfer; Dokumen dari pemerintah tersebut dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan surat pemberitahuan;

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur transfer disampaikan entitas penyalur sebelum Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan laporan keuangan; Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan; Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso setelah laporan keuangan diterbitkan; Apabila terjadi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut;

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan; Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan; Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang; Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa;

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi; Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta;

Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diakui sebagai pendapatan; Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

7. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya; Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan; Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut; Untuk itu pengakuan pendapatan hibah

dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah;

8. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya; Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima;

9. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;

Pengukuran

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

1. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan Transfer-LO diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan transfer-LO dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang Ekuitas.
5. Lebih salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan *transfer*.

Penyajian

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

A. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pembelian BBM kendaraan dinas.
4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya penyusutan atau amortisasi.
5. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;

- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso maka pengakuan beban terdiri dari:
- a. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran LS; dan
 - b. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran UP/GU/TU.
7. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan adanya dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU diakui berdasarkan adanya bukti- bukti pengeluaran kas yang berasal dari uang persediaan dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
 - 1) Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/OPD.
 - 2) Untuk alasan kepraktisan, beban langganan daya dan jasa dapat diakui ketika dibayarkan dan untuk tagihan yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan diakui sebagai beban bersamaan dengan pengakuan utang belanja/beban.
 - c. Beban Persediaan
 - 1) Beban persediaan diakui sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
 - 2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
 - 3) Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan untuk alasan kepraktisan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban yaitu dengan mencatat akun “Beban Persediaan” setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, namun pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun “Beban Persediaan” ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi pada tahun anggaran yang berkenaan.
 - d. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban

- bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- e. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - f. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
 - g. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
 - h. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode yang sudah ditetapkan.
 - i. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
 - j. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui oleh pihak yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa;

- e. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
2. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat kas telah dikeluarkan:
 - a. Dari RKUD; atau
 - b. Oleh bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
 - c. Oleh OPD langsung dari pendapatan yang belum disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima pendapatan wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah;
 - d. Untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah.
2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari RKUD, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
3. Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk belanja-LS yang dibayar pada akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
4. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
5. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.

6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui pada saat :
 - a. Kas telah dikeluarkan dari Rekening kas BLUD; dan
 - b. Kas telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BLUD dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya;
2. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU; dan
3. Belanja dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian

1. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
3. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai	xxx
- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx
- Subsidi	xxx
- Hibah	xxx
- Bantuan Sosial	xxx
 - b. Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap	xxx
- Belanja Aset Lainnya	xxx
- Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
4. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
5. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|-----|
| - Pelayanan Umum | xxx |
| - Pertahanan | xxx |
| - Ketertiban dan Keamanan | xxx |
| - Ekonomi | xxx |
| - Perlindungan Lingkungan Hidup | xxx |
| - Perumahan dan Permukiman | xxx |
| - Kesehatan | xxx |
| - Pariwisata dan Budaya | xxx |
| - Agama | xxx |
| - Pendidikan | xxx |
| - Perlindungan sosial | xxx |
7. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
9. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
10. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang atau lebih dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.

2. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

Terdapat jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan/menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

1. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengukuran

1. Pengeluaran Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah.
2. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4.5 Perolehan Dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/ Daerah/ Kemitraan Dan Unit Operasi Lainnya

Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.

Hal-hal yang diungkapkan adalah :

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi :

1. Saldo Kas pada BUD
Saldo Kas pada BUD yang merupakan kas pemerintah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berupa Saldo Rekening Kas Umum Daerah.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan per tanggal neraca. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari SiLPA.
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SiLPA.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan
Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan

berasal dari uang persediaan dapat berbentuk bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per tanggal neraca; atau Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ketiga dan belum disetorkan per tanggal neraca; atau pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran.

5. Kas di BLU

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian dari pemerintah dan tidak terpisahkan dari kekayaan daerah, termasuk didalamnya adalah saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLUD. Oleh karenanya, setelah proses konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

6. Setara kas.

Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

Pengakuan

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :
 - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.
4. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
6. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

Pengukuran

1. Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.
2. Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Apabila penerimaan/pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam rekening mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan/pengeluaran kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank bermata uang rupiah, maka

- jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.
5. Jika pada penerimaan transfer diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan.
 6. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu.

Penyajian

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset nonlancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau.
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengakuan Piutang Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Piutang Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pemberian Pinjaman
Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Piutang Penjualan Kredit
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Piutang Kemitraan
Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- d. Pemberian Fasilitas/Jasa
Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang Yang Berasal Dari Transfer Antar Pemerintahan

Dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil ini diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif

jumlah yang menjadi bagian daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Dana Alokasi Umum

Di antara bentuk dana transfer, dapat dikatakan DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.

Transfer Lainnya

Selain ketiga jenis transfer di atas, pemerintah dalam setiap tahunnya dapat mengeluarkan kebijakan transfer yang lain. Ada dua kemungkinan mekanisme penyaluran, pertama bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan tambahan dan kedua bertahap dengan persyaratan tertentu.

Piutang transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah pusat karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan piutang atau utang dari pemerintah pusat dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan menteri atau laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah pusat apabila akan mengakui piutang atau utang transfer.

Bagi Hasil Dari Provinsi

Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Piutang bagi hasil dari provinsi diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah provinsi karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan utang dari pemerintah provinsi dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan gubernur atau laporan keuangan pemerintah

provinsi yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah provinsi apabila akan mengakui piutang transfer.

Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah yang bersangkutan atau aturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah tersebut. Dalam hal demikian terjadi, besar kemungkinan pelaksanaan transfer didasarkan pada realisasi pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah penghasil/pemungut. Mekanisme demikian sama dengan yang diterapkan untuk pelaksanaan transfer DBH oleh pemerintah pusat ke daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi bagian daerah penerima yang belum ditransfer. Jika nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah penerima belum ditransfer seluruhnya hingga akhir periode laporan keuangan, maka berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku atau syarat lainnya yang sah jumlah yang belum ditransfer tersebut diakui sebagai piutang transfer antar daerah.

Piutang Karena Kerugian Daerah

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundangan yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah oleh atasan langsung pegawai negeri kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh atasan langsung (pimpinan) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Piutang Karena Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan dan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Nilai Bersih Piutang Yang Dapat Direalisasikan

Piutang yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) (NRV).

Untuk menyajikan piutang sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang

Kualitas piutang adalah kemungkinan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas piutang digolongkan sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada setiap akhir periode akuntansi ditentukan sebagai berikut:

- a. 0% (nol per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 30% (tiga puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas kurang lancar;
- c. 70% (tujuh puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas diragukan; dan
- d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berlaku untuk piutang pokok dan bunga yang ditimbulkannya. OPD dan/atau SKPKD wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang yang menjadi tanggungjawabnya.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar di muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Apabila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pencatatan transaksi beban dibayar di muka menggunakan pendekatan beban dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk

membawa akun beban ke nilai beban yang merupakan kewajiban pada tahun berjalan. Atas beban yang telah diakui dari kas yang dikeluarkan tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun beban dibayar dimuka.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan namun belum menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penyajian

Beban Dibayar di Muka disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui jika telah terjadi pengeluaran definitif dari rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengukuran

Investasi non permanen dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Penyajian

1. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas;
2. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
3. Dana Bergulir yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
4. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir; dan
5. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir.

Kualitas Dana Bergulir

1. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
2. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

3. Kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.
4. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan.

Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir

1. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
2. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
3. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir.
4. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan :
 - a. 0% (nol perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas lancar;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas kurang lancar;
 - c. 70% (tujuh puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas diragukan; dan
 - d. 100% (Seratus perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas macet.

Pemberhentian Pengakuan Dana Bergulir

Dalam keadaan belum ada Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang, maka pelaksanaan penghapusan Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Pengakuan

1. Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pencatatan persediaan pada kartu persediaan dilakukan setiap kali terjadi perolehan dan pengeluaran persediaan;
3. Pada akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi/penghitungan fisik persediaan (*stock opname*) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan;
4. Kartu persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan;
5. Jika terdapat selisih antara kartu persediaan dengan hasil *stock opname* yang disebabkan persediaan hilang, usang, kedaluwarsa atau rusak dan selisih tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban persediaan;
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah abnormal, maka selisih persediaan ini dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah;
7. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan;
8. Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*); dan
9. Persediaan dalam kondisi kedaluwarsa, rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO);
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;

5. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
7. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
8. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
9. Pengukuran pemakaian persediaan (*use of goods*) dihitung dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik kemudian hasilnya dikalikan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO; dan
10. Pengukuran persediaan pada akhir periode pelaporan dihitung dengan cara saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

Penyajian

1. Beban Persediaan disajikan pada Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Persediaan disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar; Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan; Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah

komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar; Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi jangka pendek menggunakan metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan; Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;

2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
3. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
4. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek- proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
6. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya;
7. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;
8. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
9. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying value) investasi tersebut;
10. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium;
11. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional; dan
12. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

1. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
 - a. Metode biaya
Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan

tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas
Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan:
 - 1) Dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan,
 - 2) Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
2. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
 3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.
2. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan ditambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

3. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
6. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.
8. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

1. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

B. Aset Tetap

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

C. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nilai rupiah pengeluaran belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).

Apabila salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Perolehan Aset Tetap pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.

Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.

Perolehan Aset Tetap melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

E. Akuntansi Tanah

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Atau pada kasus lain, dimungkinkan terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pernyataan kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso,

namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf bila digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

F. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

G. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

H. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat;
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- e. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan

(*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

I. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

J. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

K. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja disebut sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran modal (*capital expenditure*) harus ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (*carrying amount*). Nilai buku

aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap tiga tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun keenam adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama tujuh tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama tujuh tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah empat tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya (*revenue expenditure*).

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Perbedaan antara *capital expenditure* dan *revenue expenditure* selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari batasan minimal pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset dan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat; dan/atau
- b. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan

- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).

Terkait dengan paragraf diatas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis sepuluh tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada tahun ketujuh pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan tiga tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari sepuluh tahun menjadi tujuh tahun;
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;
- c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal;
- d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.

Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan tanaman.

Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang *extracomptable*.

L. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

M. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai sisanya tetapi nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Perbaikan aset tetap yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi Renovasi, Restorasi dan Overhaul.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Dalam hal perbaikan aset tetap, OPD selaku pengguna barang dapat mengajukan usulan perubahan masa manfaat kepada pejabat pengelola aset daerah dengan tembusan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

N. Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya

Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan;
Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.; dan
- b. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Misalnya penyusunan neraca awal per 31 Desember 2005, pada Tahun 2008 untuk pertama kalinya diterapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan lima tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 - 1 Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Untuk Pertama Kalinya

Tahun Perolehan (Awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2008 (sebelum penyusutan)
2003	90.000.000,00
2005	125.000.000,00
2006	150.000.000,00
2007	160.000.000,00
2008	180.000.000,00

O. Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk Tahun 2008 (1 tahun) saja, yaitu :

Tabel 4 - 2 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Perolehan (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	$4=(20\% \times 2)$
2008	180.000.000,00	5	36.000.000,00

P. Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4 - 3 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Awal (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2008	Penyusutan Per tahun	Penyusutan Tahun 2008		
				Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	$4 = (20\% \times 2)$	$5=3 \times 4$	$6=4$	$7=5+6$
2005	125.000.000,00	3	25.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00
2006	150.000.000,00	2	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
2007	160.000.000,00	1	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	64.000.000,00
Jumlah	435.000.000,00			167.000.000,00	87.000.000,00	254.000.000,00

Q. Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada Tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - 4 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

tahun Neraca Awal (Akhir tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (tahun)	Masa Manfaat antara Neraca awal s.d 1 Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008 (tahun Pertama)		
					Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4	5=(30% x 2)	6=4x5	7=5	8=6+7
2005	90.000.000,00	3	2	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

R. Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari Bupati.

S. Aset Yang Mengalami Perubahan Klasifikasi Sebagai Dampak Dari Perubahan Kebijakan Akuntansi

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya telah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset tetap lainnya berupa peralatan olah raga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama tidak disusutkan. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - 5 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Telah Habis

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	0	0	-	-	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	3	28.000.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(84.000.000,00)		

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih

besar dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat disesuaikan di kebijakan golongan aset yang baru dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - 6 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Besar Dari Kebijakan Akuntansi Di Golongan Aset Yang Baru

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	5	45	1.680.000,00	75.600.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	5	16.800.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(8.400.000,00)		

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih kecil dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat sesuai sisa masa manfaat yang ada dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 1975 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - 7 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Kecil Dari Kebijakan Akuntansi

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	47	3	1.680.000,00	5.040.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	4	3	12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
Koreksi Ekuitas				(30.960.000,00)		

T. Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.

Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.

Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000,00 dan masa manfaat tujuh tahun telah disusutkan lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00 Aset tersebut ditukar dengan satu unit gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000,00 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000,00. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

U. Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok

Penghitungan penyusutan untuk aset yang jenisnya banyak tapi nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil, misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya, sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.

Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-

rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

V. Koreksi Kesalahan Pencatatan

Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap:

- a. Aset Tetap; dan/atau
- b. Akumulasi Penyusutan; dan/atau
- c. Beban Penyusutan; dan/atau
- d. Ekuitas.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Aset Tetap, akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai:

- a. Beban Penyusutan dalam LO;
- b. Aset Tetap dalam Neraca;
- c. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
- d. Perubahan Ekuitas dalam LPE.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan yang disajikan sebagai:

- a. Beban Penyusutan dalam LO; dan
- b. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.

W. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas.

X. Akuntansi Aset Tetap Lainnya - Renovasi

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya;
- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan;
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional; dan
- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Y. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Z. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

AA. Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen yang dipindahkan ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap dari Bupati.

Penyajian

Aset Tetap yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.

Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) Pelepasan;
- 2) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 3) Mutasi aset tetap lainnya; dan
- 4) Penambahan.

Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat yang terdiri dari Tabel 4.8 Masa Manfaat I dan Tabel 4.9 Masa Manfaat II sebagaimana tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.

- 1) Tabel 4.8 Masa Manfaat I merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan dan berlaku untuk perolehan aset tetap pada tahun kedua dan selanjutnya.

Tabel 4 - 8 Masa Manfaat I

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sarung	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	

KODE				URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	3	1	Bangunan Gedung	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2	Monumen	
1	3	3	2	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	
1	3	3	3	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	1	Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	1	Jembatan	50
1	3	4	2	Bangunan Air	
1	3	4	2	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3	Instalasi	
1	3	4	3	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	Instalasi Lain	5
1	3	4	4	Jaringan	
1	3	4	4	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	Jaringan Gas	30

2) Tabel 4.9 Masa Manfaat II merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan yang menambah masa manfaat suatu aset tetap, yang mulai diberlakukan pada saat kebijakan akuntansi ini diterapkan.

Tabel 4 - 9 Masa Manfaat II

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 41% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Komputer			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Komputer Unit	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Sumur	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	0% s.d 25%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Sar	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Rambu - Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah	Renovasi	0% s.d 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Raga			
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 65% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jalan, Irigasi, dan Jembatan			
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 5%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	Renovasi	> 0% s.d 100%	5
Dalam Renovasi	Overhaul		

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, pernyataan kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut :

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
3. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
4. Apabila sebagian dari Aset Tetap yang dibangun telah selesai dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan; dan
6. Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Penyajian

KDP disajikan sebagai bagian dari aset tetap pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pengakuan

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Batas minimal kapitalisasi Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dan nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung amortisasi.

Adapun tabel masa manfaat Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4 - 10 Masa Manfaat Aktiva Tak Berwujud

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	5			ASET LAINNYA	
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	Goodwill	20
1	5	3	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	5	3	03	Hak Cipta	20
1	5	3	04	Paten	20
1	5	3	05	Software	5

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditor sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian

Kewajiban disajikan pada pos kewajiban di neraca yang rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah kas yang diterima dari pihak lain namun bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan daerah, karena belum ada penyerahan barang/jasa yang merupakan hak dari pihak lain.

Pengakuan

Pendapatan diterima dimuka diakui karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan pendapatan dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun pendapatan ke nilai pendapatan yang merupakan hak pemda pada tahun berjalan. Atas pendapatan yang telah diakui dari kas yang diterima tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima dimuka adalah sebesar nilai barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.19 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan LRA adalah:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	1.992.329.562.622,00	2.054.350.628.524,73	1.941.757.072.598,72

Selama tahun 2021 realisasi Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp2.054.350.628.524,73. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp112.593.555.926,01 atau 5,80% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.941.757.072.598,72. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 1 Rincian Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	212.787.209.962,00	223.136.567.608,59	104,86	222.657.296.673,72
2	Pendapatan Transfer	1.676.211.773.660,00	1.729.631.641.136,14	103,19	1.649.796.915.925,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	98,31	69.302.860.000,00
Jumlah		1.992.329.562.622,00	2.054.350.628.524,73	103,11	1.941.757.072.598,72

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	212.787.209.962,00	223.136.567.608,59	222.657.296.673,72

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar Rp479.270.934,87 atau 0,22%. Peningkatan tersebut khususnya pada jenis Pendapatan Pajak Daerah.

Tabel 5 - 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Daerah	41.547.542.000,00	35.114.763.839,00	84,52	30.580.807.590,96
2	Retribusi Daerah	20.109.953.528,00	14.367.036.052,00	71,44	18.316.717.235,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	100,00	4.203.394.607,40
4	Lain-lain PAD yang Sah	146.869.635.045,00	169.394.688.328,14	115,34	169.556.377.240,36
Jumlah		212.787.209.962,00	223.136.567.608,59	104,86	222.657.296.673,72

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	41.547.542.000,00	35.114.763.839,00	30.580.807.590,96

Pemungutan Pajak Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp35.114.763.839,00 atau 84,52% dari anggaran sebesar Rp41.547.542.000,00 dengan obyek pendapatan pajak sebagai berikut:

Tabel 5 - 3 Rincian Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.138.140.018,00	706.656.835,00	62,09	663.747.507,00
2	Pajak Restoran	3.442.623.077,00	3.027.371.917,00	87,94	2.337.739.432,00
3	Pajak Hiburan	32.312.125,00	24.377.900,00	75,45	34.483.800,00
4	Pajak Reklame	1.016.669.420,00	1.222.924.141,00	120,29	1.079.351.872,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00	11.439.546.682,00	88,00	11.539.635.648,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
6	Pajak Parkir	124.504.000,00	75.027.250,00	60,26	89.583.900,00
7	Pajak Air Tanah	186.292.000,00	194.652.003,00	104,49	186.028.866,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.001.360,00	1.080.000,00	6,35	28.576.330,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.090.000.000,00	11.135.040.318,00	69,20	9.224.149.467,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	7.288.086.793,00	112,12	5.397.510.768,96
Jumlah		41.547.542.000,00	35.114.763.839,00	84,52	30.580.807.590,96

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Reklame merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 120,29%. Sementara itu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 6,35%.

Tabel 5 - 4 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
1	Pajak Hotel	Peraturan Bupati Nomor 1F Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Self Assessment</i>
2	Pajak Restoran	Peraturan Bupati Nomor 1 G Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak restoran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Self Assessment</i>
3	Pajak Hiburan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 H Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Self Assessment</i>
4	Pajak Reklame	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 B Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Official Assessment</i>
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Self Assessment</i>
6	Pajak Parkir	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 C Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun	<i>Self Assessment</i>

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
7	Pajak Air Tanah	2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Keputusan Bupati Nomor 188.45/80/430.6.2/2013 tentang nilai perolehan air untuk menghitung pajak air tanah di Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 D Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Official Assessment</i>
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 E Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Self Assessment</i>
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Official Assessment</i>
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	<i>Self Assessment</i>

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
 - a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
 - b) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel;
 - c) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
 - d) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan

- e) Realisasi Pajak Hotel tahun 2021 adalah sebesar Rp706.656.835,00 atau 62,09% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.138.140.018,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 5 Rincian Pajak Hotel

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.138.140.018,00	706.656.835,00	62,09	663.747.507,00
	Jumlah	1.138.140.018,00	706.656.835,00	62,09	663.747.507,00

Realisasi Pajak Hotel tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp431.483.183,00 atau kurang 37,91% dari target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga tingkat okupansi hotel mengalami penurunan.

- 2) Pajak Restoran
- Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
 - Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman;
 - Objek pajak restoran adalah fasilitas penyewa makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/ food court, toko roti/ bakery, jasa boga katering, stand makanan dan minuman insidental;
 - Tarif Pajak Restoran untuk omset diatas Rp200.000,00 per hari sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjualan; dan
 - Realisasi Pajak Restoran tahun 2021 adalah sebesar Rp3.027.371.917,00 atau 87,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.442.623.077,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 6 Rincian Pajak Restoran

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.442.623.077,00	3.027.371.917,00	87,94	2.337.739.432,00
	Jumlah	3.442.623.077,00	3.027.371.917,00	87,94	2.337.739.432,00

Realisasi Pajak Restoran tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp415.251.160,00 atau kurang 12,06% dari target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga tingkat kunjungan konsumen restoran mengalami penurunan .

- 3) Pajak Hiburan
- Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
 - Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan;
 - Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan;
 - Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :
 - Tontonan film;
 - Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

4. Pameran;
 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 6. Sirkus, akrobat dan sulap;
 7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
 8. Pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 10. Pertandingan olahraga.
- e) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar :
1. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 4. Pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 6. Sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 7. Permainan bilyar, golf, dan boling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 8. Pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 10. Pertandingan olahraga. ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- f) Realisasi Pajak Hiburan tahun 2021 adalah sebesar Rp24.377.900,00 atau 75,45% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.312.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 7 Rincian Pajak Hiburan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	32.312.125,00	24.377.900,00	75,45	17.783.800,00
Jumlah		32.312.125,00	24.377.900,00	75,45	34.483.800,00

Realisasi Pajak Hiburan tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp7.934.225,00 atau kurang 24,55% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kunjungan tempat hiburan permainan anak mengalami penurunan.

- 4) Pajak Reklame
- a) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - b) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
 - c) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;

- d) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 e) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame tahun 2021 adalah sebesar Rp1.222.924.141,00 atau 120,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.016.669.420,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 8 Rincian Pajak Reklame

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.016.669.420,00	1.222.924.141,00	120,29	1.079.351.872,00
Jumlah		1.016.669.420,00	1.222.924.141,00	120,29	1.079.351.872,00

Realisasi Pajak Reklame tahun 2021 melebihi target sebesar Rp206.254.721,00 atau lebih 20,29% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya intensifikasi penagihan serta optimalisasi kinerja Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 5) Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik;
 - Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
 - Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
 - Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud diatas meliputi seluruh pembangkit listrik; dan
 - Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2021 adalah sebesar Rp11.439.546.682,00 atau 88,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp13.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 9 Rincian Pajak Penerangan Jalan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00	11.439.546.682,00	88,00	11.539.635.648,00
Jumlah		13.000.000.000,00	11.439.546.682,00	88,00	11.539.635.648,00

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2021 kurang dari target Rp1.560.453.318,00 atau kurang 12,00% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait diskon tarif listrik yang diperpanjang hingga Desember 2021 karena penerapan PPKM level IV di wilayah Jawa – Bali.

- 6) Pajak Parkir - LRA
- Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan;
 - Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;
 - Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya;

- d) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 e) Realisasi Pajak Parkir tahun 2021 adalah sebesar Rp75.027.250,00 atau 60,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp124.504.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 10 Rincian Pajak Parkir

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Parkir	124.504.000,00	75.027.250,00	60,26	89.583.900,00
Jumlah		124.504.000,00	75.027.250,00	60,26	89.583.900,00

Realisasi Pajak Parkir tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp49.476.750,00 atau hanya mencapai 39,74% dari target yang telah ditetapkan salah satunya dikarenakan menurunnya penerimaan pajak parkir dari RS Dr. H. Koesnadi selama kondisi pandemi Covid-19 akibat pembatasan jumlah penjenguk pasien.

- 7) Pajak Air Tanah
- Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - Objek pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah, adalah :
 - Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
 - Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2021 adalah sebesar Rp194.652.003,00 atau 104,49% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp186.292.000,00.

Tabel 5 - 11 Rincian Pajak Air Tanah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	186.292.000,00	194.652.003,00	104,49	186.028.866,00
Jumlah		186.292.000,00	194.652.003,00	104,49	186.028.866,00

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2021 melebihi target sebesar Rp8.360.003,00 atau lebih 4,49% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya intensifikasi penagihan serta optimalisasi kinerja Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;
 - Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan

- e) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.080.000,00 atau 6,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp17.001.360,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 12 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pasir dan kerikil	0,00	0,00	0,00	28.576.330,00
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	17.001.360,00	1.080.000,00	6,35	0,00
Jumlah		17.001.360,00	1.080.000,00	6,35	28.576.330,00

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp15.921.360,00 atau kurang 93,65% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih karena dampak Covid-19.

- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
 - Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan;
 - Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
 - digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 - Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,13% dan 0,2% .

$$\text{NJOP} < 1 \text{ Milyar} : 0,13\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOP TKP})$$

$$\text{NJOP} > 1 \text{ Milyar} : 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOP TKP})$$
NJOP TKP sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sebesar Rp11.135.040.318,00 atau 69,20% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.090.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 13 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.090.000.000,00	11.135.040.318,00	69,20	9.224.149.467,00
Jumlah		16.090.000.000,00	11.135.040.318,00	69,20	9.224.149.467,00

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp4.954.959.682,00 atau kurang 30,80% dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih karena dampak Covid-19.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak;
- b) Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan;
- c) Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d) Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus); dan
- e) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2021 adalah sebesar Rp7.288.086.793,00 atau 112,12% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 14 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	BPHTB - Pemindahan Hak	6.500.000.000,00	7.288.086.793,00	112,12	5.397.510.768,96
Jumlah		6.500.000.000,00	7.288.086.793,00	112,12	5.397.510.768,96

- f) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2021 melebihi target sebesar Rp788.086.793,00 atau lebih 12,12% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya dan terintegrasinya aplikasi e-BPHTB dengan PPAT dan Pusdatin Badan Pertanahan Nasional yang memudahkan masyarakat untuk menghitung dan membayar BPHTB.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	20.109.953.528,00	14.367.036.052,00	18.316.717.235,00

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp14.367.036.052,00 atau 71,44% dari anggaran sebesar Rp20.109.953.528,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 15 Retribusi Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	18.605.256.250,00	12.640.108.020,00	67,94	16.176.415.943,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.125.954.190,00	719.282.600,00	63,88	1.333.577.929,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05	806.723.363,00
Jumlah		20.109.953.528,00	14.367.036.052,00	71,44	18.316.717.235,00

Dari tabel di atas, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 266,05%. Sementara itu Retribusi Jasa Usaha merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 63,88%. Rincian Retribusi Daerah selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	18.605.256.250,00	12.640.108.020,00	16.176.415.943,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2021 sebesar Rp12.640.108.020,00 atau 67,94% dari anggaran sebesar Rp18.605.256.250,00 dengan obyek Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

Tabel 5 - 16 Obyek Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Kesehatan Pelayanan	13.000.000.000,00	7.289.285.200,00	56,07	10.645.984.132,00
2	Retribusi Persampahan/ Kebersihan Pelayanan	119.108.000,00	123.295.000,00	103,52	163.320.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.884.076.000,00	3.719.919.000,00	95,77	3.817.933.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.078.758.000,00	1.095.554.647,00	101,56	1.053.584.355,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	370.814.250,00	242.668.000,00	65,44	289.252.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	2.500.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	167.386.173,00	111,59	203.842.456,00
Jumlah		18.605.256.250,00	12.640.108.020,00	67,94	16.176.415.943,00

Tabel 5 - 17 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
1	Retribusi Kesehatan Pelayanan	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Retribusi Persampahan/ Kebersihan Pelayanan	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	Retribusi Pelayanan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran, Los, dan Kios) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pelayanan pasar dihitung berdasarkan jenis pelayanan, luas, jangka waktu pemakaian tempat dan kelas pasar. - Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, luas, lokasi dan tahun pembuatan dari pemakaian kekayaan daerah. - Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, lokasi, jangka waktu dan frekuensi

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
			penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	- Tarif ke lokasi kakus sebesar Rp250.000,00. - 50% dari hasil penarikan Retribusi dipergunakan untuk honor petugas. - Jarak dari kota di daerah ke luar kota ditambah biaya transportasi sebesar Rp2.500,00 per kilometer, pulang pergi.
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

- a) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di puskesmas, dan UPT Labkesda, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat;
- b) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi, penjamin atau institusi yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh RSU, Puskesmas, UPT. Labkesda dan Rumah Sakit khusus Paru;
- c) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian serta pelayanan penunjang lainnya di RSU, di puskesmas, UPT Labkesda dan rumah sakit khusus paru dikecualikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- d) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- e) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar Rp7.289.285.200,00 atau 56,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp13.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 18 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13.000.000.000,00	7.289.285.200,00	56,07	10.645.984.132,00
	Jumlah	13.000.000.000,00	7.289.285.200,00	56,07	10.645.984.132,00

Realisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp5.710.714.800,00 atau kurang 43,93% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat utang klaim pelayanan pasien Non Maskin dan utang klaim pelayanan pasien SJP kemudian terjadi penurunan jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas sehingga PAD tidak mencapai target.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

- a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di bidang Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- b) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah;
- c) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya;
- d) Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Perumahan/rumah tangga sebesar Rp1.000,00/bulan;
 2. Perusahaan Pemerintah/swasta sebesar Rp5.000,00/bulan;
 3. Hotel :
 - Hotel berbintang sebesar Rp50.000,00/bulan ;
 - Hotel melati sebesar Rp20.000,00/bulan;
 4. Restoran :
 - Restoran Talam Kencana sebesar Rp10.000,00/bulan;
 - Restoran Talam Selaka sebesar Rp7.500,00/bulan;
 - Restoran Talam Gangsa sebesar Rp5.000,00/bulan;
 5. Toko-toko, grosir, biro travel jasa angkutan Rp5.000,00/bulan ;
 6. Sekolah sebesar Rp3.000,00/bulan;
 7. Perguruan Tinggi sebesar Rp5.000,00/bulan;
 8. Toko dan Pedagang yang ada dalam pasar pemerintah daerah dan swasta sebesar Rp6.000,00/bulan;
 9. Toko-toko yang ada dalam pasar desa sebesar Rp6.000,00/bulan;
 10. Pedagang Kecil sebesar Rp1.000,00/hari;
 11. Pedagang Musiman Kecil sebesar Rp2.000,00/hari;
 12. Pedagang Musiman Besar sebesar Rp5.000,00/hari;
 13. Wilayah pemakaman sebesar Rp100.000,00/prosesi;
- e) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2021 adalah sebesar Rp123.295.000,00 atau 103,52% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp119.108.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 19 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	119.108.000,00	123.295.000,00	103,52	163.320.000,00
Jumlah		119.108.000,00	123.295.000,00	103,52	163.320.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2021 lebih dari target sebesar Rp4.187.000,00 atau lebih 3,52% dari target yang telah ditetapkan.

- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di bidang pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
 - Parkir di tempat umum :
 - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ditetapkan Rp2000,00 sekali parkir;
 - Bus dan Truk Engkel ditetapkan Rp4.000,00 sekali parkir;
 - Truk Gandengan dan sejenisnya ditetapkan Rp5.000,00 sekali parkir.; dan
 - Sepeda Motor ditetapkan Rp1.000,00 sekali parkir.
 - Parkir tahunan berlangganan (khusus kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso/Khusus Nomor Polisi Bondowoso) untuk satu jenis kendaraan setiap tahun adalah sebagai berikut:
 - Sepeda Motor ditetapkan Rp25.000,00/tahun;
 - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ditetapkan Rp50.000,00/tahun; dan
 - Bus dan Truk dan Tronton ditetapkan Rp75.000,00/tahun.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2021 adalah sebesar Rp3.719.919.000,00 atau 95,77% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.884.076.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.884.076.000,00	3.719.919.000,00	95,77	3.817.933.000,00
Jumlah		3.884.076.000,00	3.719.919.000,00	95,77	3.817.933.000,00

Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp164.157.000,00 atau kurang 4,23% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat di area publik.

- 4) **Retribusi Pelayanan Pasar**
- a) **Retribusi pelayanan pasar** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. **Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
 - b) **Subjek retribusi pelayanan pasar** adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. **Subjek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah;
 - c) **Objek retribusi pelayanan pasar** adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan khusus disediakan untuk pedagang, penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. **Objek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan** adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan pertokoan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - d) **Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013; dan
 - e) **Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021** adalah sebesar Rp1.095.554.647,00 atau 101,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.078.758.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 21 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	627.720.000,00	524.008.500,00	83,48	523.335.500,00
2	Retribusi Los	115.480.000,00	151.028.900,00	130,78	144.973.300,00
3	Retribusi Kios	335.558.000,00	420.517.247,00	125,32	385.275.555,00
Jumlah		1.078.758.000,00	1.095.554.647,00	101,56	1.053.584.355,00

Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 lebih dari target sebesar Rp16.796.647,00 atau lebih 1,56% dari target dikarenakan adanya penerimaan setoran piutang sewa Los dan Kios.

- 5) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
- a) **Pengujian kendaraan bermotor** adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) **Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor** adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - c) **Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor** adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d) **Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** ditetapkan sebesar :
Besarnya retribusi pengujian berkala (kendaraan lama) ;

1. Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat Bruto (JBB) kurang dari 3.500 kg sebesar Rp60.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya jasa uji sebesar Rp30.000,00
 - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp70.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya jasa uji sebesar Rp40.000,00
 - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
3. Kendaraan gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp80.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya jasa uji sebesar Rp50.000,00
 - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
4. Biaya numpang uji kendaraan bermotor.
 - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp65.000,00
 - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp75.000,00
5. Biaya rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor.
 - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp40.000,00
 - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp50.000,00
 - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp60.000,00
6. Biaya rekomendasi mutasi keluar kendaraan bermotor.
 - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp80.000,00
 - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp90.000,00
 - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp100.000,00
7. Biaya rekomendasi mutasi masuk kendaraan bermotor.
 - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp20.000,00
 - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp30.000,00
 - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp40.000,00
8. Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditentukan, dikenakan biaya jasa uji dan biaya keterlambatan uji.
9. Kendaraan yang telah didaftarkan pengujiannya tetapi tidak datang dengan alasan yang sah, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya jasa uji dan biaya keterlambatan uji.

Besarnya retribusi uji pertama (kendaraan baru berdasarkan pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi) kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp70.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya jasa uji sebesar Rp40.000,00
 - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp80.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya jasa uji sebesar Rp50.000,00
 - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
3. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp90.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya jasa uji sebesar Rp60.000,00
 - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
- e) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021 adalah sebesar Rp242.668.000,00 atau 65,44% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp370.814.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 22 Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	370.814.250,00	242.668.000,00	65,44	289.252.000,00
Jumlah		370.814.250,00	242.668.000,00	65,44	289.252.000,00

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp128.146.250,00 atau kurang 34,56% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan berkurangnya pengguna jasa uji kelayakan kendaraan sehingga berpengaruh pada perolehan retribusi .

- 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- a) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan pelayanan fasilitas Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:
 1. Besarnya tarif didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya;
 2. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
 - Unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
 3. Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
 - Tarif ke lokasi kakus sebesar Rp250.000,00;
 - 50% dari hasil penarikan Retribusi dipergunakan untuk honor petugas; dan
 - Jarak dari kota di daerah ke luar kota ditambah biaya transportasi sebesar Rp2.500,00 per kilometer, pulang pergi.
 - e) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2021 adalah sebesar Rp2.000.000,00 atau 80,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 23 Rincian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	2.500.000,00
Jumlah		2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	2.500.000,00

Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp500.000,00 atau kurang 20,00% dari target dikarenakan masyarakat cenderung menggunakan jasa swasta.

- 7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;
 - Subyek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi;
 - Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
 - Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh; dan
 - Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2021 adalah sebesar Rp167.386.173,00 atau 111,59% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 24 Rincian Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	167.386.173,00	111,59	203.842.456,00
Jumlah		150.000.000,00	167.386.173,00	111,59	203.842.456,00

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2021 melebihi dari target sebesar Rp17.386.173,00 atau lebih 11,59% dari target dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun lalu.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	1.125.954.190,00	719.282.600,00	1.333.577.929,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 sebesar Rp719.282.600,00 atau 63,88% dari anggaran sebesar Rp1.125.954.190,00 dengan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

Tabel 5 - 25 Obyek Retribusi Jasa Usaha

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.159.190,00	141.785.350,00	28,35	761.513.700,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	303.844.000,00	274.969.500,00	90,50	297.721.251,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	146.765.000,00	168.580.000,00	114,86	155.590.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	170.161.000,00	133.947.750,00	78,72	118.752.978,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Villa				
	Jumlah	1.125.954.190,00	719.282.600,00	63,88	1.333.577.929,00

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan pemakaian ruangan pesta dan rapat pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah dan lain sebagainya;
 - b) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan mendapatkan pelayanan pemakai kekayaan daerah, dikecualikan terhadap aparatur yang karena jabatannya mendapat fasilitas perumahan dari pemerintah daerah, setiap orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap pemakaian kekayaan daerah dilarang merubah bentuk dan fungsi kekayaan daerah tanpa izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi :
 1. Pemakaian tanah;
 2. Pemakaian rumah;
 3. Pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
 4. Pemakaian alat berat; dan
 5. Laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
 - d) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - e) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp141.785.350,00 atau 28,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp500.159.190,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 26 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	63.250.000,00	66.750.000,00	105,53	635.799.600,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	240.000.000,00	20.181.750,00	8,41	0,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	80.141.200,00	38.455.000,00	47,98	56.450.000,00
5	Retribusi Pemakaian Ruang	5.850.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	80.917.990,00	16.398.600,00	20,27	68.214.100,00
	Jumlah	500.159.190,00	141.785.350,00	28,35	761.513.700,00

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp358.373.840,00 atau kurang 71,65% dari target dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
 - Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah;
 - Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan pertokoan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - Tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2021 adalah sebesar Rp274.969.500,00 atau 90,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp303.844.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 27 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	303.844.000,00	274.969.500,00	90,50	297.721.251,00
Jumlah		303.844.000,00	274.969.500,00	90,50	297.721.251,00

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp28.874.500,00 atau kurang 9,50% dari target.

- 3) Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
 - Subjek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah;
 - Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
 - Tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut;
 - Pemakaian Rumah Potong Hewan Rp10.000,00/ekor
 - Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rp15.000,00/ekor

- e) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2021 adalah sebesar Rp168.580.000,00 atau 114,86% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp146.765.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 28 Rincian Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	146.765.000,00	168.580.000,00	114,86	155.590.000,00
Jumlah		146.765.000,00	168.580.000,00	114,86	155.590.000,00

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2021 melebihi dari target sebesar Rp21.815.000,00 atau lebih 14,86% dari target dikarenakan terjadi lonjakan pemotongan pada hari raya Idul Fitri dan kegiatan hajatan warga.

- 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- a) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki atau di kelola oleh pemerintah daerah;
- b) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah setiap orang atau pribadi atau badan yang masuk dan atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olahraga yang berada dilingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- c) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga :
1. Taman pemandian alam Tasnan Kecamatan Grugujan;
 2. Wana Wisata Tasnan;
 3. Wisata Kota;
 4. Objek Wisata Sempol;
 5. Arum Jeram Bosamba;
 6. Gedung Gelora Pelita;
 7. Stadion; dan
 8. Tempat olah raga lainnya
- Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang sediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- d) Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Khusus objek wisata pemandian tasnan, arung jeram Bosamba, kawah wurung dan bangunan untuk pengelolaan cafe dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta dan Perum Perhutani; dan
- e) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2021 adalah sebesar Rp133.947.750,00 atau 78,72% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp170.161.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 29 Rincian Retribusi Rekreasi dan Olahraga

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	170.161.000,00	133.947.750,00	78,72	118.752.978,00
Jumlah		170.161.000,00	133.947.750,00	78,72	118.752.978,00

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2021 kurang dari target sebesar Rp36.213.250,00 atau kurang 21,28% dikarenakan pandemi Covid-19 serta diberlakukannya PPKM darurat sehingga sarana prasarana tempat olahraga ditutup.

- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta;
 - Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menggunakan penginapan/ pesanggrahan/villa;
 - Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat pesanggrahan Sumber Wringin yang dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah, yang tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - Tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut;
 - Kelas Arabica satu malam Rp250.000,00
 - Kelas Robusta satu malam Rp150.000,00
 - Kelas Mocca satu malam Rp125.000,00
 - Aula Pesanggrahan satu hari Rp500.000,00
 - Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tahun 2021 adalah sebesar nihil atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.025.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 30 Rincian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan Pesanggrahan/Vila	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.025.000,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa tahun 2021 kurang dari target sebesar nihil atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp5.025.000,00 dikarenakan pandemi Covid-19 serta diberlakukannya PPKM darurat sehingga tidak ada pengunjung penginapan.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	378.743.088,00	1.007.645.432,00	806.723.363,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 sebesar Rp1.007.645.432,00 atau 266,05% dari anggaran sebesar Rp378.743.088,00 dengan obyek Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut :

Tabel 5 - 31 Obyek Retribusi Perizinan Tertentu

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05	806.723.363,00
	Jumlah	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05	806.723.363,00

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
 - b) Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
 - c) Objek Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan meliputi :
 1. Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
 2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
 3. Pelestarian/pemugaran;
 4. Pembuatan duplikat/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (kepolisian setempat);
 5. Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan;
 6. Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 7. Tidak termasuk didalamnya bangunan fungsi keagamaan (masjid, gereja, wihara, pura, kelenteng dll), bangunan fungsi sosial dan budaya (bangunan kantor milik negara), kecuali milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha dan bangunan fungsi khusus.
 - d) Tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - e) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.007.645.432,00 atau 266,05% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp378.743.088,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 32 Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05	806.723.363,00
	Jumlah	378.743.088,00	1.007.645.432,00	266,05	806.723.363,00

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2021 melebihi dari target sebesar Rp628.902.344,00 atau lebih 166,05% dari target.

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	4.203.394.607,40

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.260.079.389,45 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp4.260.079.389,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp4.203.394.607,40 realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp4.260.079.389,45 mengalami kenaikan sebesar Rp56.684.782,05 atau sebesar 1,35% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 33 Obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	100,00	4.203.394.607,40
Jumlah		4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	100,00	4.203.394.607,40

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun 2021 adalah sebesar Rp4.260.079.389,45 atau 100% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.260.079.389,00 dengan rincian obyek sebagai berikut :

Tabel 5 - 34 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	100,00	4.203.394.607,40
Jumlah		4.260.079.389,00	4.260.079.389,45	100,00	4.203.394.607,40

Untuk penyeteroran bagian laba tersebut, diperhitungkan dengan menggunakan metode biaya. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai diakui sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan tersebut merupakan pembagian dividen PT Bank Jatim yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2020, sesuai Salinan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 01 tanggal 03 Mei 2021 oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn.

Dividen yang diputuskan dalam RUPS Tahun Buku 2020 adalah sebesar 49,26% dari laba bersih Tahun Buku 2020 atau sebesar Rp733.507.081.305,70 dan dibagikan 100% dalam bentuk *cash dividen* dengan *dividen yield* 19,54%.

Bagian dividen Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp4.260.079.389,45 disetorkan ke Rekening 0311000011 Kas Umum Daerah melalui Nota Kredit Nomor 1080 tanggal 28 Mei 2021.

Pembagian dividen PT Bank Jatim Tahun Buku 2020 tersebut tertuang dalam surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada Bupati Bondowoso Nomor

060/321/DIR/OPR/SRT tanggal 21 Mei 2021 perihal Pembagian Dividen PT Bank Jatim Tahun Buku 2020.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	146.869.635.045,00	169.394.688.328,14	169.556.377.240,36

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2021 adalah sebesar Rp169.394.688.328,14 atau 115,34% dari anggarannya sebesar Rp146.869.635.045,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2020 sebesar Rp169.556.377.240,36 realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp169.394.688.328,14 mengalami penurunan sebesar Rp161.688.912,22 atau 0,10% dengan Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5 - 35 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	237.415.000,00	564.967.356,00	237,97	400.537.679,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	116.304.000,00	470.147.000,00	404,24	0,00
3	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.330.608.414,92	88,71	1.294.282.943,46
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	29.458.110,00	4.412.600,00	14,98	0,00
5	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	2.923.116.438,15	58,46	8.487.031.632,83
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.337.526.536,00	4.283.187.274,37	98,75	775.243.994,70
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	168.330.468,54	0,00	45.188.743,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	12.475.242,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.646.250,00	40.675.330,00	382,06	50.971.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	92.610.149,00	114.553.878,00	123,69	98.376.377,00
11	Pendapatan BLUD	135.537.000.000,00	159.482.214.326,16	117,67	120.656.282.247,57
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	29.224.472,80
13	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	8.675.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	37.635.663.150,00
Jumlah		146.869.635.045,00	169.394.688.328,14	115,34	169.556.377.240,36

- 1) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 adalah sebesar Rp564.967.356,00 atau 237,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp237.415.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 36 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	322.260.989,00	0,00	121.584.173,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	34.350.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	237.415.000,00	242.706.367,00	100,00	244.603.506,00
Jumlah		237.415.000,00	564.967.356,00	237,97	400.537.679,00

a) Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5 - 37 Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	322.260.989,00	0,00	121.584.173,00
Jumlah		0,00	322.260.989,00	0,00	121.584.173,00

Hasil Penjualan Alat Angkutan sebesar Rp322.260.989,00 merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penjualan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang telah dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 38 Rincian SK Penghapusan Peralatan dan Mesin

No	No SK	Jumlah (Rp)
1	Nomor : 188./74/430.4.2/2014 Tgl 26 Desember 2014	1.760.000,00
2	Nomor : 188./31/430.4.2/2016 Tgl 2 Juni 2016	500.000,00
3	Nomor : 188./7/430.4.2/2020 Tgl 14 Agustus 2020	12.877.200,00
4	Nomor : 188/63/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	940.000,00
5	Nomor : 188/57/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	2.320.000,00
6	Nomor : 188/56/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	885.000,00
7	Nomor : 188./59/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	17.450.000,00
8	Nomor : 188./62/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	515.000,00
9	Nomor : 188./55/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	740.000,00
10	Nomor : 188./58/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	1.115.000,00
11	Nomor : 188./61/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	550.000,00
12	Nomor : 188./64/430.4.2/2020 Tgl 30 Desember 2020	425.000,00
13	Nomor : 188/8/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	31.710.000,00
14	Nomor : 188/11/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	520.800,00
15	Nomor : 188/13/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	113.072.663,00
16	Nomor : 188/12/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	49.102.200,00
17	Nomor : 188/14/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	1.043.490,00
18	Nomor : 188/10/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	1.638.263,00
19	Nomor : 188/9/430.4.2/2021 Tgl 3 Juni 2021	59.976.000,00
20	Nomor : 188/21/430.4.2/2021 Tgl 13 Oktober 2021	20.113.538,00
21	Nomor : 188/24/430.4.2/2021 Tgl 13 Oktober 2021	1.753.200,00
22	Nomor : 188/25/430.4.2/2021 Tgl 13 Oktober 2021	495.390,00
23	Nomor : 188/22/430.4.2/2021 Tgl 13 Oktober 2021	1.177.050,00
24	Nomor : 188/35/430.4.2/2021 Tgl 13 Oktober 2021	1.581.195,00
Jumlah		322.260.989,00

b) Rincian Hasil Penjualan Bangunan Gedung tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5 - 39 Rincian Hasil Penjualan Bangunan Gedung

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	34.350.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	34.350.000,00

c) Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5 - 40 Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
2	Hasil Penjualan Tanaman	217.415.000,00	222.706.367,00	102,43	244.603.506,00
Jumlah		237.415.000,00	242.706.367,00	100,00	244.603.506,00

- 2) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 adalah sebesar Rp470.147.000,00 atau 404,24% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp116.304.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 41 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	116.304.000,00	470.147.000,00	404,24	0,00
Jumlah		116.304.000,00	470.147.000,00	404,24	0,00

Untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah senilai Rp470.147.000,00 merupakan hasil dari penyewaan aset milik daerah berupa tanah, rumah, stand dan kantin.

- 3) Realisasi Jasa Giro tahun 2021 adalah sebesar Rp1.330.608.414,92 atau 88,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 42 Rincian Jasa Giro

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.330.608.414,92	88,71	1.294.282.943,46
Jumlah		1.500.000.000,00	1.330.608.414,92	88,71	1.294.282.943,46

- 4) Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2021 adalah sebesar Rp4.412.600,00 atau 14,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp29.458.110,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 43 Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	29.458.110,00	4.412.600,00	14,98	0,00
Jumlah		29.458.110,00	4.412.600,00	14,98	0,00

- 5) Realisasi Pendapatan Bunga tahun 2021 adalah sebesar Rp2.923.116.438,15 atau 58,46% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 44 Rincian Pendapatan Bunga

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	2.923.116.438,15	58,46	8.487.031.632,83
Jumlah		5.000.000.000,00	2.923.116.438,15	58,46	8.487.031.632,83

- 6) Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp4.283.187.274,37 atau 98,75% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.337.526.536,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 45 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	774.409.994,70
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.337.526.536,00	4.283.187.274,37	98,75	834.000,00
Jumlah		4.337.526.536,00	4.283.187.274,37	98,75	775.243.994,70

- 7) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2021 adalah sebesar Rp168.330.468,54 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 46 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	168.330.468,54	0,00	45.188.743,00
Jumlah		0,00	168.330.468,54	0,00	45.188.743,00

- 8) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp12.475.242,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 47 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	12.475.242,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	12.475.242,00	0,00	0,00

- 9) Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp40.675.330,00 atau 382,06% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp10.646.250,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 48 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.646.250,00	40.675.330,00	382,06	50.971.000,00
Jumlah		10.646.250,00	40.675.330,00	382,06	50.971.000,00

- 10) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 adalah sebesar Rp114.553.878,00 atau 123,69% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp92.610.149,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 49 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Gaji dan Tunjangan	92.610.149,00	113.183.878,00	122,22	98.376.377,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00
Jumlah		92.610.149,00	114.553.878,00	123,69	98.376.377,00

- 11) Realisasi Pendapatan BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp159.482.214.326,16 atau 117,67% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp135.537.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 50 Rincian Pendapatan BLUD

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	135.537.000.000,00	159.482.214.326,16	117,67	120.656.282.247,57
Jumlah		135.537.000.000,00	159.482.214.326,16	117,67	120.656.282.247,57

- 12) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA tahun 2021 adalah nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 51 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	29.224.472,80
Jumlah		0,00	0,00	0,00	29.224.472,80

- 13) Realisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA tahun 2021 adalah nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 52 Rincian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Fasilitas Umum - LRA	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	79.300.000,00

- 14) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2021 adalah nihil atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.675.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 53 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	8.675.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00
Jumlah		8.675.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00

- 15) Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2021 adalah nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 54 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FK

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN FKTP Nangkaan	0,00	0,00	0,00	1.192.218.150,00
2	Dana Kapitasi JKN FKTP Kotakulon	0,00	0,00	0,00	563.040.150,00
3	Dana Kapitasi JKN FKTP Kademangan	0,00	0,00	0,00	703.629.600,00
4	Dana Kapitasi JKN FKTP Tenggarang	0,00	0,00	0,00	1.859.357.100,00
5	Dana Kapitasi JKN FKTP Tegalampel	0,00	0,00	0,00	1.044.156.000,00
6	Dana Kapitasi JKN FKTP Taman Krocok	0,00	0,00	0,00	599.093.900,00
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Wringin	0,00	0,00	0,00	1.772.393.700,00
8	Dana Kapitasi JKN FKTP Pakem	0,00	0,00	0,00	1.243.511.450,00
9	Dana Kapitasi JKN FKTP Curahdami	0,00	0,00	0,00	1.658.292.600,00
10	Dana Kapitasi JKN FKTP Binakal	0,00	0,00	0,00	1.074.168.000,00
11	Dana Kapitasi JKN FKTP Grujungan	0,00	0,00	0,00	2.200.879.200,00
12	Dana Kapitasi JKN FKTP Maesan	0,00	0,00	0,00	2.432.865.600,00
13	Dana Kapitasi JKN FKTP Tamanan	0,00	0,00	0,00	2.339.730.900,00
14	Dana Kapitasi JKN FKTP Jambesari	0,00	0,00	0,00	1.725.748.500,00
15	Dana Kapitasi JKN FKTP Pujer	0,00	0,00	0,00	2.285.943.600,00
16	Dana Kapitasi JKN FKTP Tlogosari	0,00	0,00	0,00	2.311.221.900,00
17	Dana Kapitasi JKN FKTP Wonosari	0,00	0,00	0,00	1.971.792.300,00
18	Dana Kapitasi JKN FKTP Tapen	0,00	0,00	0,00	1.446.046.050,00
19	Dana Kapitasi JKN FKTP Sukosari	0,00	0,00	0,00	740.453.900,00
20	Dana Kapitasi JKN FKTP Sumber Wringin	0,00	0,00	0,00	1.484.464.650,00
21	Dana Kapitasi JKN FKTP Klabang	0,00	0,00	0,00	715.166.400,00
22	Dana Kapitasi JKN FKTP Sempol	0,00	0,00	0,00	1.081.913.400,00
23	Dana Kapitasi JKN FKTP Prajekan	0,00	0,00	0,00	1.204.585.500,00
24	Dana Kapitasi JKN FKTP Botolinggo	0,00	0,00	0,00	1.405.555.500,00
25	Dana Kapitasi JKN FKTP Cermee	0,00	0,00	0,00	2.579.435.100,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	37.635.663.150,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER	1.676.211.773.660,00	1.729.631.641.136,14	1.649.796.915.925,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang secara penganggaran dan realisasi hanya terdapat pada BPKAD selaku PPKD. Proses transfer dari Pemerintah Pusat juga langsung ke Rekening Kas Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 adalah sebesar Rp1.729.631.641.136,14 dan anggarannya sebesar Rp1.676.211.773.660,00 atau 103,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.649.796.915.925,00 realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2021 sebesar Rp1.729.631.641.136,14 mengalami kenaikan sebesar Rp79.834.725.211,14 atau sebesar 4,84%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening Pendapatan Transfer tahun 2021 :

Tabel 5 - 55 Rincian Pendapatan Transfer

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.315.080.460.413,00	1.323.758.092.095,00	100,66	1.264.055.581.233,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	273.759.249.000,00	273.759.249.000,00	100,00	256.120.568.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.372.064.247,00	132.114.300.041,14	151,21	129.620.766.692,00
Jumlah		1.676.211.773.660,00	1.729.631.641.136,14	103,19	1.649.796.915.925,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.315.080.460.413,00	1.323.758.092.095,00	1.264.055.581.233,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.323.758.092.095,00 dengan anggaran sebesar Rp1.315.080.460.413,00 atau 100,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun 2020 sebesar Rp1.264.055.581.233,00 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun 2021 sebesar Rp1.323.758.092.095,00 mengalami kenaikan sebesar Rp59.702.510.862,00 atau sebesar 4,72%. Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 56 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	113.237.482.036,00	142.767.234.998,00	126,08	99.407.048.031,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	843.159.769.000,00	843.159.769.000,00	100,00	851.793.800.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.146.533.000,00	136.481.721.719,00	86,85	312.854.733.202,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	201.536.676.377,00	201.349.366.378,00	99,91	0,00
Jumlah		1.315.080.460.413,00	1.323.758.092.095,00	100,66	1.264.055.581.233,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	113.237.482.036,00	142.767.234.998,00	99.407.048.031,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 adalah sebesar Rp142.767.234.998,00 atau 126,08% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp113.237.482.036,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 57 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.051.832.429,00	14.737.518.008,00	133,35	6.493.428.702,00
2	DBH PPh Pasal 21	15.541.322.800,00	15.331.599.041,00	98,65	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.260.731.422,00	0,00	16.453.832.504,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.065.630.187,00	46.096.899.953,00	102,29	31.292.981.201,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.593.747.700,00	57.368.872.546,00	156,77	37.803.687.552,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	817.468.900,00	1.087.707.787,00	133,06	5.382.490.341,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	370.937.851,00	370.937.851,00	100,00	212.679.900,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.761.853.150,00	3.405.465.855,00	193,29	672.336.442,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	677.069.869,00	749.883.385,00	110,75	307.335.100,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619.150,00	1.357.619.150,00	100,00	788.276.289,00
Jumlah		113.237.482.036,00	142.767.234.998,00	126,08	99.407.048.031,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	843.159.769.000,00	843.159.769.000,00	851.793.800.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 adalah sebesar Rp843.159.769.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp843.159.769.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 58 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAU	843.159.769.000,00	843.159.769.000,00	100,00	851.793.800.000,00
Jumlah		843.159.769.000,00	843.159.769.000,00	100,00	851.793.800.000,00

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.146.533.000,00	136.481.721.719,00	312.854.733.202,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021 adalah sebesar Rp136.481.721.719,00 atau 86,85% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp157.146.533.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 59 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.603.110.000,00	1.476.295.430,00	92,09	272.624.509.765,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.490.918.000,00	20.371.416.284,00	90,58	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.419.334.000,00	8.460.997.456,00	89,83	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	440.920.000,00	436.587.625,00	99,02	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	681.116.000,00	556.762.551,00	81,74	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.706.690.000,00	5.251.433.145,00	78,30	3.291.058.450,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.714.635.000,00	2.521.930.176,00	92,90	3.013.403.435,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	30.076.058.000,00	28.803.504.744,00	95,77	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.050.000.000,00	227.600.500,00	21,68	1.073.354.300,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	307.525.000,00	299.145.300,00	97,28	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.000.097.000,00	786.373.036,00	78,63	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan	4.012.500.000,00	3.480.270.150,00	86,74	0,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pertanian					
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.473.000.000,00	1.438.634.327,00	97,67	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.030.662.000,00	3.698.703.004,00	91,76	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.818.826.000,00	9.472.663.000,00	73,90	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.814.440.000,00	8.927.233.000,00	75,56	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	12.439.282.000,00	10.850.227.021,00	87,23	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	12.054.355.000,00	12.028.882.000,00	99,79	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	12.800.001.000,00	9.888.047.000,00	77,25	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.269.348.000,00	1.154.542.370,00	90,96	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	6.500.000.000,00	4.906.757.600,00	75,49	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.443.716.000,00	1.443.716.000,00	100,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	29.014.091.676,00
24	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	3.373.294.000,00
25	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	465.021.576,00
Jumlah		157.146.533.000,00	136.481.721.719,00	86,85	312.854.733.202,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	201.536.676.377,00	201.349.366.378,00	0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2021 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2021 adalah sebesar Rp201.349.366.378,00 atau 99,91% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp201.536.676.377,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 60 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	136.216.200.000,00	136.216.200.000,00	100,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	208.928.000,00	208.928.000,00	100,00	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.927.133.800,00	21.927.133.800,00	100,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	19.557.400.000,00	19.557.400.000,00	100,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.689.429.135,00	13.587.329.255,00	127,11	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.897.900.120,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.112.128.370,00	4.112.128.371,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	377.709.800,00	377.709.800,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.133.458.152,00	2.133.458.152,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	945.557.000,00	945.557.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	100,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	374.620.000,00	187.310.000,00	50,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	211.750.000,00	211.750.000,00	100,00	0,00
Jumlah		201.536.676.377,00	201.349.366.378,00	99,91	0,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	273.759.249.000,00	273.759.249.000,00	256.120.568.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp273.759.249.000,00 dengan anggaran sebesar Rp273.759.249.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2020 sebesar Rp256.120.568.000,00, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2021 sebesar Rp273.759.249.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.638.681.000,00 atau sebesar 6,89%. Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 61 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	37.542.241.000,00	37.542.241.000,00	100,00	19.903.560.000,00
2	Dana Desa	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00	100,00	236.217.008.000,00
Jumlah		273.759.249.000,00	273.759.249.000,00	100,00	256.120.568.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	37.542.241.000,00	37.542.241.000,00	19.903.560.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 adalah sebesar Rp37.542.241.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp37.542.241.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 62 Rincian Dana Insentif Daerah (DID)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	DID	37.542.241.000,00	37.542.241.000,00	100,00	19.903.560.000,00
	Jumlah	37.542.241.000,00	37.542.241.000,00	100,00	19.903.560.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.2.2	Dana Desa	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00

Realisasi Dana Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp236.217.008.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp236.217.008.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 63 Rincian Dana Desa

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Desa	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00	100,00	236.217.008.000,00
	Jumlah	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00	100,00	236.217.008.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.372.064.247,00	132.114.300.041,14	129.620.766.692,00

Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp132.114.300.041,14 dengan anggaran sebesar Rp87.372.064.247,00 atau 151,21%. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2020 sebesar Rp129.620.766.692,00, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 sebesar Rp132.114.300.041,14 mengalami kenaikan sebesar Rp2.493.533.349,14 atau sebesar 1,92%. Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 64 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	76.328.325.890,00	121.070.561.684,00	158,62	93.730.423.692,00
2	Bantuan Keuangan	11.043.738.357,00	11.043.738.357,14	100,00	35.890.343.000,00
	Jumlah	87.372.064.247,00	132.114.300.041,14	151,21	129.620.766.692,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	76.328.325.890,00	121.070.561.684,00	93.730.423.692,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun 2021 adalah sebesar Rp121.070.561.684,00 atau 158,62% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp76.328.325.890,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 65 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.941.573.100,00	36.399.942.373,00	228,33	21.893.268.540,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.428.224.990,00	14.232.193.517,00	262,19	10.433.402.771,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.354.605.860,00	24.371.334.335,00	182,49	17.451.089.858,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	188.618.940,00	309.214.240,00	163,94	306.798.772,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	41.415.303.000,00	45.757.877.219,00	110,49	43.645.863.751,00
Jumlah		76.328.325.890,00	121.070.561.684,00	158,62	93.730.423.692,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan	11.043.738.357,00	11.043.738.357,14	35.890.343.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2021 adalah sebesar Rp11.043.738.357,14 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.043.738.357,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 66 Rincian Bantuan Keuangan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.043.738.357,00	11.043.738.357,14	100,00	35.890.343.000,00
Jumlah		11.043.738.357,00	11.043.738.357,14	100,00	35.890.343.000,00

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur berupa bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan infrastruktur di Jawa Timur.

Bantuan Keuangan tersebut disalurkan pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 412.2/278/112.3/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2021.
2. Surat Nomor : 410/3949/112.4/2021 tanggal 25 Februari 2021 Perihal Bantuan Keuangan Khusus TMMMD ke 110, 111, dan 112 Tahun 2021 kepada Kabupaten.
3. Surat Nomor : 045.2/7272/102.1/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal *Refocusing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
4. Surat Nomor : 903/2936.10/101.1/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal *Refocusing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

5. Surat Nomor : 045.2/14866/102.1/2021 tanggal 1 September 2021 Perihal Perubahan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
6. Surat Nomor : 003.3/19676/001.2/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Peringatan Hari Jadi Ke-76 Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
7. Surat Nomor : 903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan surat diatas, rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2021 adalah sebesar Rp11.043.738.357,14 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.043.738.357,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 67 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pemenuhan Honor Perawat Ponkesdes	2.920.200.000,00	2.920.200.000,00	100,00	2.731.800.000,00
2	Pemenuhan Honor Dokter Puskesmas	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
3	Bantuan transport kunjungan Konseling (KOPIPU)	351.680.000,00	351.680.000,00	100,00	0,00
4	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	173.486.500,00	173.486.500,00	100,00	0,00
5	Pendampingan Pencegahan Stunting	254.000.000,00	254.000.000,00	100,00	245.000.000,00
6	Pendampingan Ponkestren	121.029.000,00	121.029.000,00	100,00	121.029.000,00
7	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala / Guru TK / PAUD Non PNS	408.000.000,00	408.000.000,00	100,00	408.000.000,00
8	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK	261.000.000,00	261.000.000,00	100,00	264.000.000,00
9	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Propinsi)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
11	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS)	5.611.200.000,00	5.611.200.000,00	100,00	5.611.200.000,00
12	Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)	357.142.857,00	357.142.857,14	100,00	0,00
13	(TMMMD) TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00
14	(BK JATIM PUSPA)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	70.000.000,00
15	(BK PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KE 76 PROP. JATIM TH. 2021)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
16	BOP MADIN	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
17	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
18	Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes	0,00	0,00	0,00	110.214.000,00
19	Pemenuhan Honor 5 Orang Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
20	Pemenuhan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
21	Pengembangan Taman Posyandu	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
22	Kunjungan Konseling Kesehatan oleh tim yang terdiri dari bidan dan perawat ponkesdes dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat /organisasi kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	753.600.000,00
Jumlah		11.043.738.357,00	11.043.738.357,14	100,00	35.890.343.000,00

Sisa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebesar Rp580.939.927,14 berada di Kas BUD Kabupaten Bondowoso dan akan dikembalikan ke RKUD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 68 Rincian Sisa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jatim

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penggunaan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pemenuhan Honor Perawat Ponkesdes	2.920.200.000,00	2.920.200.000,00	0,00
2	Pemenuhan Honor Dokter Puskesmas	225.000.000,00	217.500.000,00	7.500.000,00
3	Bantuan transport kunjungan Konseling (KOPIPU)	351.680.000,00	136.029.500,00	215.650.500,00
4	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	173.486.500,00	89.914.760,00	83.571.740,00
5	Pendampingan Pencegahan Stunting	254.000.000,00	135.154.570,00	118.845.430,00
6	Pendampingan Ponkestren	121.029.000,00	0,00	121.029.000,00
7	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala / Guru TK / PAUD Non PNS	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00
8	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK	261.000.000,00	252.000.000,00	9.000.000,00
9	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP	36.000.000,00	26.000.000,00	10.000.000,00
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Propinsi)	10.000.000,00	9.971.800,00	28.200,00
11	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS)	5.611.200.000,00	5.611.200.000,00	0,00
12	Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)	357.142.857,14	356.200.000,00	942.857,14
13	(TMMMD) TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA	175.000.000,00	162.757.800,00	12.242.200,00
14	(BK JATIM PUSPA)	90.000.000,00	89.670.000,00	330.000,00
15	(BK PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KE 76 PROP. JATIM TH. 2021)	50.000.000,00	48.200.000,00	1.800.000,00
Jumlah		11.043.738.357,14	10.462.798.430,00	580.939.927,14

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	69.302.860.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 adalah sebesar Rp101.582.419.780,00 atau 98,31% dari anggarannya sebesar Rp103.330.579.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 sebesar Rp69.302.860.000,00 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 sebesar Rp101.582.419.780,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.279.559.780,00 atau 46,58%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 tersebut merupakan pendapatan dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 69 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	69.302.860.000,00
2	Pendapatan Lainnya	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	98,31	0,00
	Jumlah	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	98,31	69.302.860.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	69.302.860.000,00

Pendapatan Hibah digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2021 adalah sebesar nihil. Obyek Pendapatan Hibah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 70 Rincian Pendapatan Hibah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	69.302.860.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	69.302.860.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	0,00

Realisasi Pendapatan Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp101.582.419.780,00 atau 98,31% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp103.330.579.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 71 Rincian Pendapatan Lainnya

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan	63.576.312.000,00	63.562.244.031,00	99,98	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	39.754.267.000,00	38.020.175.749,00	95,64	0,00
Jumlah		103.330.579.000,00	101.582.419.780,00	98,31	0,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.3.2.1 Lain-lain Pendapatan	63.576.312.000,00	63.562.244.031,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan tahun 2021 adalah sebesar Rp63.562.244.031,00 atau 99,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp63.576.312.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 72 Rincian Lain-lain Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	63.576.312.000,00	63.562.136.781,00	99,98	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	107.250,00	0,00	0,00
Jumlah		63.576.312.000,00	63.562.244.031,00	99,98	0,00

Pendapatan Hibah Dana BOS merupakan penyaluran Pendapatan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah provinsi. Pendapatan Dana BOS merupakan pendapatan Non RKUD yang ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.

Alokasi Dana BOS SD Tahun 2021 sebesar Rp48.569.684.000,00 disalurkan kepada 492 SD Negeri dan Alokasi Dana BOS SMP Tahun 2021 sebesar Rp14.971.408.000,00 disalurkan kepada 48 SMP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021.
- Surat Edaran Nomor 10460/C/PR.03.01/2021 tentang Perubahan Pelaksanaan Kebijakan dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Rincian Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp63.562.136.781,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp63.576.312.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 73 Rincian Pendapatan Hibah Dana BOS

No	Jenis Pendapatan	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Dana BOS - SD	48.569.684.000,00
2	Pendapatan Dana BOS - SMP	14.971.408.000,00
3	Pengembalian Utang Dana BOS Tahun 2015	21.044.781,00
Total		63.562.136.781,00

Realisasi Pendapatan Dana BOS-SD Tahun 2021 sebesar Rp48.569.684.000,00 disalurkan kepada 492 SD Negeri di wilayah Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 74 Rincian Realisasi Pendapatan Dana BOS – SD

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kecamatan Binakal	14	870.252.000,00
2	Kecamatan Bondowoso	28	4.988.452.000,00
3	Kecamatan Botolinggo	26	1.795.260.000,00
4	Kecamatan Cermee	41	2.864.522.000,00
5	Kecamatan Curahdami	22	2.091.258.000,00
6	Kecamatan Grujugan	21	2.132.766.000,00
7	Kecamatan Jambesari Darussholah	17	2.271.604.000,00
8	Kecamatan Klabang	19	1.273.994.000,00
9	Kecamatan Maesan	26	3.738.972.000,00
10	Kecamatan Pakem	17	1.577.908.000,00
11	Kecamatan Prajekan	20	1.630.618.000,00
12	Kecamatan Pujer	20	2.491.952.000,00
13	Kecamatan Ijen	10	981.548.000,00
14	Kecamatan Sukosari	11	853.156.000,00
15	Kecamatan Sumber Wringin	19	1.916.472.000,00
16	Kecamatan Taman Krocok	16	1.061.354.000,00
17	Kecamatan Tamanan	20	2.840.316.000,00
18	Kecamatan Tapan	24	1.824.928.000,00
19	Kecamatan Tegalampel	16	1.599.434.000,00
20	Kecamatan Tenggarang	21	2.371.836.000,00
21	Kecamatan Tlogosari	35	2.743.438.000,00
22	Kecamatan Wonosari	22	2.190.012.000,00
23	Kecamatan Wringin	27	2.459.632.000,00
Jumlah		492	48.569.684.000,00

Realisasi Pendapatan Dana BOS-SMP Tahun 2021 sebesar Rp14.971.408.000,00 disalurkan kepada 48 SMP Negeri di wilayah Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 75 Rincian Realisasi Pendapatan Dana BOS – SMP

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kecamatan Binakal	1	61.596.000,00
2	Kecamatan Bondowoso	7	3.581.652.000,00
3	Kecamatan Botolinggo	2	102.080.000,00
4	Kecamatan Cermee	4	694.608.000,00
5	Kecamatan Curahdami	1	187.572.000,00
6	Kecamatan Grujugan	2	364.936.000,00
7	Kecamatan Jambesari Darussholah	2	446.020.000,00
8	Kecamatan Klabang	1	362.420.000,00
9	Kecamatan Maesan	3	885.544.000,00
10	Kecamatan Pakem	2	417.948.000,00
11	Kecamatan Prajekan	2	1.027.644.000,00
12	Kecamatan Pujer	2	470.496.000,00

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Realisasi 2021 (Rp)
13	Kecamatan Ijen	2	296.184.000,00
14	Kecamatan Sukosari	1	509.026.000,00
15	Kecamatan Sumber Wringin	3	506.688.000,00
16	Kecamatan Taman Krocok	1	137.808.000,00
17	Kecamatan Tamanan	3	1.193.176.000,00
18	Kecamatan Tapan	2	1.075.570.000,00
19	Kecamatan Tegalampel	1	391.750.000,00
20	Kecamatan Tenggarang	2	934.844.000,00
21	Kecamatan Tlogosari	2	568.570.000,00
22	Kecamatan Wonosari	1	317.840.000,00
23	Kecamatan Wringin	1	437.436.000,00
Jumlah		48	14.971.408.000,00

Realisasi Pendapatan Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp21.044.781,00 merupakan pembayaran utang jangka pendek lainnya dana BOS tahun 2015 ke Kas Daerah dengan STS Nomor : 1.01.01.1/00002/STS/CP/00.00/2021 tanggal 23 April 2021.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.3.2.2 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	39.754.267.000,00	38.020.175.749,00	0,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP tahun 2021 adalah sebesar Rp38.020.175.749,00 atau 95,64% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp39.754.267.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5 - 76 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	39.754.267.000,00	38.020.175.749,00	95,64	0,00
Jumlah		39.754.267.000,00	38.020.175.749,00	95,64	0,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp38.020.175.749,00 atau 95,64% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp39.754.267.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5 - 77 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN FKTP Nangkaan	1.348.890.000,00	1.388.880.150,00	102,96	0,00
2	Dana Kapitasi JKN FKTP Kotakulon	652.114.000,00	641.779.688,00	98,42	0,00
3	Dana Kapitasi JKN FKTP Kademangan	731.388.000,00	685.257.600,00	93,69	0,00
4	Dana Kapitasi JKN FKTP Tenggarang	1.952.860.000,00	1.880.242.500,00	96,28	0,00
5	Dana Kapitasi JKN FKTP Tegalampel	1.091.191.000,00	1.052.769.900,00	96,48	0,00
6	Dana Kapitasi JKN FKTP Taman Krocok	715.619.000,00	704.786.650,00	98,49	0,00
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Wringin	1.775.410.000,00	1.838.744.400,00	103,57	0,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
8	Dana Kapitasi JKN FKTP Pakem	1.358.730.000,00	1.304.046.750,00	95,98	0,00
9	Dana Kapitasi JKN FKTP Curahdami	1.769.994.000,00	1.686.682.200,00	95,29	0,00
10	Dana Kapitasi JKN FKTP Binakal	1.090.689.000,00	986.915.100,00	90,49	0,00
11	Dana Kapitasi JKN FKTP Grujugan	2.303.625.000,00	2.171.191.200,00	94,25	0,00
12	Dana Kapitasi JKN FKTP Maesan	2.633.258.000,00	2.482.766.400,00	94,28	0,00
13	Dana Kapitasi JKN FKTP Tamanan	2.383.499.000,00	2.269.747.200,00	95,23	0,00
14	Dana Kapitasi JKN FKTP Jambesari	1.865.113.000,00	1.763.802.300,00	94,57	0,00
15	Dana Kapitasi JKN FKTP Pujer	2.349.420.000,00	2.080.857.361,00	88,57	0,00
16	Dana Kapitasi JKN FKTP Tlogosari	2.485.805.000,00	2.440.747.150,00	98,19	0,00
17	Dana Kapitasi JKN FKTP Wonosari	2.163.025.000,00	2.061.447.600,00	95,30	0,00
18	Dana Kapitasi JKN FKTP Tapen	1.649.201.000,00	1.566.099.300,00	94,96	0,00
19	Dana Kapitasi JKN FKTP Sukosari	787.789.000,00	759.695.450,00	96,43	0,00
20	Dana Kapitasi JKN FKTP Sumber Wringin	1.588.065.000,00	1.567.384.050,00	98,70	0,00
21	Dana Kapitasi JKN FKTP Klabang	1.263.281.000,00	1.184.782.500,00	93,79	0,00
22	Dana Kapitasi JKN FKTP Sempol	1.119.003.000,00	1.062.055.200,00	94,91	0,00
23	Dana Kapitasi JKN FKTP Prajekan	722.900.000,00	698.030.100,00	96,56	0,00
24	Dana Kapitasi JKN FKTP Botolinggo	1.364.941.000,00	1.306.850.400,00	95,74	0,00
25	Dana Kapitasi JKN FKTP Cerme	2.588.457.000,00	2.434.614.600,00	94,06	0,00
Jumlah		39.754.267.000,00	38.020.175.749,00	95,64	0,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	1.773.344.915.253,00	1.607.910.188.438,37	1.608.208.955.398,92

Realisasi Belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp1.607.910.188.438,37 atau 90,67% dari anggarannya sebesar Rp1.773.344.915.253,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2020 sebesar Rp1.608.208.955.398,92, realisasi Belanja pada tahun 2021 sebesar Rp1.607.910.188.438,37 mengalami penurunan sebesar Rp298.766.960,55 atau 0,02% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 78 Rincian Belanja Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.542.806.227.456,00	1.410.349.479.042,56	91,41	1.380.731.057.346,40
2	Belanja Modal	227.661.304.718,00	196.554.645.695,81	86,34	227.251.278.052,52
3	Belanja Tidak Terduga	2.877.383.079,00	1.006.063.700,00	34,96	226.620.000,00
Jumlah		1.773.344.915.253,00	1.607.910.188.438,37	90,67	1.608.208.955.398,92

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.542.806.227.456,00	1.410.349.479.042,56	1.380.731.057.346,40

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 adalah sebesar Rp1.410.349.479.042,56 atau 91,41% dari anggarannya sebesar Rp1.542.806.227.456,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp1.380.731.057.346,40, realisasi Belanja Operasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp29.618.421.696,16 atau 2,15% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 79 Rincian Belanja Operasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	841.075.659.477,00	799.417.410.997,00	95,05	752.196.941.707,00
2	Belanja Barang dan Jasa	516.299.761.254,00	444.016.600.988,70	86,00	554.882.853.239,40
3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00
4	Belanja Hibah	137.205.528.275,00	130.514.844.220,06	95,12	70.135.598.600,00
5	Belanja Bantuan Sosial	47.042.114.650,00	35.217.459.036,80	74,86	2.332.500.000,00
Jumlah		1.542.806.227.456,00	1.410.349.479.042,56	91,41	1.380.731.057.346,40

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	841.075.659.477,00	799.417.410.997,00	752.196.941.707,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp799.417.410.997,00 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp841.075.659.477,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp752.196.941.707,00, realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp799.417.410.997,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.220.469.290,00 atau 6,28% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 80 Rincian Belanja Pegawai

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	550.562.184.400,00	533.890.828.149,00	96,97	530.931.386.115,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	76.797.939.929,00	70.973.126.222,00	92,42	71.198.209.919,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.829.971.664,00	162.677.059.160,00	90,97	126.067.033.770,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.485.153.150,00	18.757.496.275,00	96,27	16.047.991.143,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	443.110.334,00	327.115.189,00	73,82	0,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	677.000.000,00	677.000.000,00	100,00	652.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	14.280.300.000,00	12.114.786.002,00	84,84	7.300.320.760,00
Jumlah		841.075.659.477,00	799.417.410.997,00	95,05	752.196.941.707,00

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek belanja pegawai tahun 2021 dengan anggarannya sebesar Rp841.075.659.477,00 dan realisasi sebesar Rp799.417.410.997,00 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp533.890.828.149,00 atau 96,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp550.562.184.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 81 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	413.042.983.893,00	406.088.568.053,00	98,32	407.089.786.134,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.053.701.650,00	38.119.256.192,00	95,17	38.539.873.273,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.612.844.500,00	6.282.043.550,00	82,52	7.905.580.550,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.074.786.450,00	24.816.800.318,00	98,97	25.723.896.150,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.548.211.200,00	7.927.866.680,00	92,74	7.037.605.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.954.400.656,00	22.966.338.010,00	95,88	19.830.840.934,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.265.806.104,00	1.988.909.477,00	46,62	1.968.122.250,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.424.629,00	5.713.588,00	54,81	5.471.169,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.255.656.711,00	22.379.426.182,00	92,26	19.497.766.970,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	954.940.633,00	828.874.616,00	86,80	833.116.638,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.788.427.974,00	2.487.031.483,00	89,19	2.499.327.047,00
Jumlah		550.562.184.400,00	533.890.828.149,00	96,97	530.931.386.115,00

- a) Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp406.088.568.053,00 atau 98,32% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp413.042.983.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 82 Rincian Belanja Gaji Pokok ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	401.928.406.093,00	395.214.323.653,00	98,33	407.089.786.134,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	11.114.577.800,00	10.874.244.400,00	97,84	0,00
Jumlah		413.042.983.893,00	406.088.568.053,00	98,32	407.089.786.134,00

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp38.119.256.192,00 atau 95,17% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp40.053.701.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 83 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.932.768.550,00	37.153.153.548,00	95,43	38.539.873.273,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.120.933.100,00	966.102.644,00	86,19	0,00
Jumlah		40.053.701.650,00	38.119.256.192,00	95,17	38.539.873.273,00

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp6.282.043.550,00 atau 82,52% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.612.844.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 84 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.612.844.500,00	6.282.043.550,00	82,52	7.905.580.550,00
Jumlah		7.612.844.500,00	6.282.043.550,00	82,52	7.905.580.550,00

- d) Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp24.816.800.318,00 atau 98,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp25.074.786.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 85 Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.074.786.450,00	24.816.800.318,00	98,97	25.723.896.150,00
Jumlah		25.074.786.450,00	24.816.800.318,00	98,97	25.723.896.150,00

- e) Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp7.927.866.680,00 atau 92,74% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.548.211.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 86 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.821.691.200,00	7.240.366.680,00	92,57	7.037.605.000,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	726.520.000,00	687.500.000,00	94,63	0,00
Jumlah		8.548.211.200,00	7.927.866.680,00	92,74	7.037.605.000,00

- f) Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp22.966.338.010,00 atau 95,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp23.954.400.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 87 Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	23.083.952.456,00	22.216.863.430,00	96,24	19.830.840.934,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	870.448.200,00	749.474.580,00	86,10	0,00
Jumlah		23.954.400.656,00	22.966.338.010,00	95,88	19.830.840.934,00

- g) Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp1.988.909.477,00 atau 46,62% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.265.806.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 88 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.264.124.104,00	1.988.909.477,00	46,64	1.968.122.250,00
2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.265.806.104,00	1.988.909.477,00	46,62	1.968.122.250,00

- h) Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp5.713.588,00 atau 54,81% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp10.424.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 89 Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.008.329,00	5.538.191,00	55,34	5.471.169,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	416.300,00	175.397,00	42,13	0,00
Jumlah		10.424.629,00	5.713.588,00	54,81	5.471.169,00

- i) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp22.379.426.182,00 atau 92,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp24.255.656.711,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 90 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.766.676.311,00	22.045.655.950,00	92,76	19.497.766.970,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	488.980.400,00	333.770.232,00	68,26	0,00
Jumlah		24.255.656.711,00	22.379.426.182,00	92,26	19.497.766.970,00

- j) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp828.874.616,00 atau 86,80% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp954.940.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 91 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	931.430.463,00	807.134.576,00	86,66	833.116.638,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.510.170,00	21.740.040,00	92,47	0,00
Jumlah		954.940.633,00	828.874.616,00	86,80	833.116.638,00

- k) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp2.487.031.483,00 atau 89,19% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.788.427.974,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 92 Rincian Belanja luran Jaminan Kematian ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.720.097.870,00	2.421.813.985,00	89,03	2.499.327.047,00
2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	68.330.104,00	65.217.498,00	95,44	0,00
Jumlah		2.788.427.974,00	2.487.031.483,00	89,19	2.499.327.047,00

- 2) Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp70.973.126.222,00 atau 92,42% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp76.797.939.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 93 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	75.237.939.788,00	69.418.126.222,00	92,26	69.698.209.919,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.560.000.000,00	1.555.000.000,00	99,68	1.500.000.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	141,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		76.797.939.929,00	70.973.126.222,00	92,42	71.198.209.919,00

- a) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp69.418.126.222,00 atau 92,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp75.237.939.788,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 94 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	75.237.939.788,00	69.418.126.222,00	92,26	69.698.209.919,00
Jumlah		75.237.939.788,00	69.418.126.222,00	92,26	69.698.209.919,00

- b) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp1.555.000.000,00 atau 99,68% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.560.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 95 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.560.000.000,00	1.555.000.000,00	99,68	1.500.000.000,00
Jumlah		1.560.000.000,00	1.555.000.000,00	99,68	1.500.000.000,00

- c) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN tahun 2021 adalah sebesar nihil atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp141,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 96 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	140,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		141,00	0,00	0,00	0,00

- 3) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp162.677.059.160,00 atau 90,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp178.829.971.664,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 97 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.828.091.848,00	1.122.411.168,00	61,40	1.310.375.300,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.274.250,00	7.844.480,00	24,31	59.696.700,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	144.178.042.575,00	132.796.055.460,00	92,11	121.600.936.720,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	256.120.200,00	246.623.200,00	96,29	0,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.909.000.500,00	1.446.250.000,00	75,76	1.427.000.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	29.791.212.291,00	26.327.544.852,00	88,37	0,00
7	Belanja Honorarium	835.230.000,00	730.330.000,00	87,44	1.669.025.050,00
Jumlah		178.829.971.664,00	162.677.059.160,00	90,97	126.067.033.770,00

- a) Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp1.122.411.168,00 atau 61,40% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.828.091.848,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 98 Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	50.078.161,00	23.353.132,00	46,63	21.891.850,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	151.475.415,00	59.343.134,00	39,18	68.817.300,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.421.734,00	568.656,00	40,00	1.975.500,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	44.733.454,00	44.733.407,00	100,00	42.963.550,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	572.000.000,00	429.000.000,00	75,00	489.702.250,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.478.176,00	2.191.235,00	40,00	4.251.550,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.196.848,00	8.196.804,00	100,00	7.266.250,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	748.060,00	0,00	0,00	1.678.150,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	707.960.000,00	269.024.800,00	38,00	409.328.900,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	286.000.000,00	286.000.000,00	100,00	262.500.000,00
Jumlah		1.828.091.848,00	1.122.411.168,00	61,40	1.310.375.300,00

- b) Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp7.844.480,00 atau 24,31% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.274.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 99 Rincian Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	73,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.383.324,00	0,00	0,00	4.560.000,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.739.035,00	0,00	0,00	31.064.700,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.844.480,00	7.844.480,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.701.152,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.991.828,00	0,00	0,00	6.068.300,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.970.381,00	0,00	0,00	5.503.700,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	3.643.977,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Jumlah		32.274.250,00	7.844.480,00	24,31	59.696.700,00

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tahun 2021 adalah sebesar Rp132.796.055.460,00 atau 92,11% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp144.178.042.575,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 100 Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja TPG PNSD	144.178.042.575,00	132.796.055.460,00	92,11	121.600.936.720,00
Jumlah		144.178.042.575,00	132.796.055.460,00	92,11	121.600.936.720,00

- d) Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD tahun 2021 adalah sebesar Rp246.623.200,00 atau 96,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp256.120.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 101 Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja TKG PNSD	256.120.200,00	246.623.200,00	96,29	0,00
Jumlah		256.120.200,00	246.623.200,00	96,29	0,00

- e) Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.446.250.000,00 atau 75,76% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.909.000.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 102 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.909.000.500,00	1.446.250.000,00	75,76	1.427.000.000,00
Jumlah		1.909.000.500,00	1.446.250.000,00	75,76	1.427.000.000,00

- f) Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp26.327.544.852,00 atau 88,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp29.791.212.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 103 Rincian Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	29.791.212.291,00	26.327.544.852,00	88,37	0,00
Jumlah		29.791.212.291,00	26.327.544.852,00	88,37	0,00

- g) Realisasi Belanja Honorarium tahun 2021 adalah sebesar Rp730.330.000,00 atau 87,44% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp835.230.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 104 Rincian Belanja Honorarium

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	96.860.000,00	33.840.000,00	34,94	1.669.025.050,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	691.820.000,00	656.290.000,00	94,86	0,00
3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	46.550.000,00	40.200.000,00	86,36	0,00
Jumlah		835.230.000,00	730.330.000,00	87,44	1.669.025.050,00

- 4) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp18.757.496.275,00 atau 96,27% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp19.485.153.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 105 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.000.860.000,00	99,69	0,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.521.300,00	120.775.200,00	85,34	0,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	135.497.820,00	86,62	0,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.743.000,00	99,63	86.058.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.827.750,00	1.451.247.000,00	99,62	0,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.822.900,00	135.654.750,00	99,88	120.399.300,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	105.966.000,00	1.568.175,00	1,48	53.272.275,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.649.000.000,00	99,63	5.670.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.396.500.000,00	98,52	1.386.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.420.000,00	393.758,00	27,73	0,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.205.300.000,00	4.123.681.572,00	98,06	4.058.261.568,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.674.000.000,00	4.655.000.000,00	99,59	4.674.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.300.000,00	1.575.000,00	0,37	0,00
Jumlah		19.485.153.150,00	18.757.496.275,00	96,27	16.047.991.143,00

- a) Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.000.860.000,00 atau 99,69% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.004.010.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 106 Rincian Belanja Uang Representasi DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.000.860.000,00	99,69	0,00
Jumlah		1.004.010.000,00	1.000.860.000,00	99,69	0,00

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp120.775.200,00 atau 85,34% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp141.521.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 107 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.521.300,00	120.775.200,00	85,34	0,00
Jumlah		141.521.300,00	120.775.200,00	85,34	0,00

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp135.497.820,00 atau 86,62% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp156.427.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 108 Rincian Belanja Tunjangan Beras DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	135.497.820,00	86,62	0,00
Jumlah		156.427.200,00	135.497.820,00	86,62	0,00

- d) Realisasi Belanja Uang Paket DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp85.743.000,00 atau 99,63% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp86.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 109 Rincian Belanja Uang Paket DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.743.000,00	99,63	86.058.000,00
Jumlah		86.058.000,00	85.743.000,00	99,63	86.058.000,00

- e) Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.451.247.000,00 atau 99,62% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.456.827.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 110 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.827.750,00	1.451.247.000,00	99,62	0,00
Jumlah		1.456.827.750,00	1.451.247.000,00	99,62	0,00

- f) Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp135.654.750,00 atau 99,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp135.822.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 111 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.822.900,00	135.654.750,00	99,88	120.399.300,00
Jumlah		135.822.900,00	135.654.750,00	99,88	120.399.300,00

- g) Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.568.175,00 atau 1,48% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp105.966.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 112 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	105.966.000,00	1.568.175,00	1,48	53.272.275,00
Jumlah		105.966.000,00	1.568.175,00	1,48	53.272.275,00

- h) Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp5.649.000.000,00 atau 99,63% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.670.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 113 Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.649.000.000,00	99,63	5.670.000.000,00
Jumlah		5.670.000.000,00	5.649.000.000,00	99,63	5.670.000.000,00

- i) Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.396.500.000,00 atau 98,52% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.417.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 114 Rincian Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.396.500.000,00	98,52	1.386.000.000,00
Jumlah		1.417.500.000,00	1.396.500.000,00	98,52	1.386.000.000,00

- j) Realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp393.758,00 atau 27,73% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 115 Rincian Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.420.000,00	393.758,00	27,73	0,00
Jumlah		1.420.000,00	393.758,00	27,73	0,00

- k) Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp4.123.681.572,00 atau 98,06% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.205.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 116 Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.750.000,00	80.450.244,00	72,64	0,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.000.000,00	2.057.832,00	10,29	8.261.568,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	24.550.000,00	6.173.496,00	25,15	0,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.050.000.000,00	4.035.000.000,00	99,63	4.050.000.000,00
Jumlah		4.205.300.000,00	4.123.681.572,00	98,06	4.058.261.568,00

- l) Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp4.655.000.000,00 atau 99,59% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.674.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 117 Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.674.000.000,00	4.655.000.000,00	99,59	4.674.000.000,00
Jumlah		4.674.000.000,00	4.655.000.000,00	99,59	4.674.000.000,00

- m) Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.575.000,00 atau 0,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp430.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 118 Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.300.000,00	1.575.000,00	0,37	0,00
Jumlah		430.300.000,00	1.575.000,00	0,37	0,00

- 5) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp327.115.189,00 atau 73,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp443.110.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 119 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.465.000,00	54.600.000,00	98,44	0,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	6.852.000,00	94,74	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.636.650,00	98.280.000,00	98,64	0,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.255.000,00	6.735.060,00	92,83	0,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.580.800,00	1.271.300,00	80,42	0,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	650,00	600,00	92,31	0,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.400,00	5.475.360,00	83,50	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.400,00	112.320,00	83,57	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
9	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	83,61	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	249.285.252,00	153.056.069,00	61,40	0,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	15.559.782,00	395.520,00	2,54	0,00
Jumlah		443.110.334,00	327.115.189,00	73,82	0,00

- a) Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp54.600.000,00 atau 98,44% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp55.465.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 120 Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.465.000,00	54.600.000,00	98,44	0,00
Jumlah		55.465.000,00	54.600.000,00	98,44	0,00

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp6.852.000,00 atau 94,74% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.232.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 121 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	6.852.000,00	94,74	0,00
Jumlah		7.232.400,00	6.852.000,00	94,74	0,00

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp98.280.000,00 atau 98,64% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp99.636.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 122 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.636.650,00	98.280.000,00	98,64	0,00
Jumlah		99.636.650,00	98.280.000,00	98,64	0,00

- d) Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp6.735.060,00 atau 92,83% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.255.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 123 Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.255.000,00	6.735.060,00	92,83	0,00
Jumlah		7.255.000,00	6.735.060,00	92,83	0,00

- e) Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp1.271.300,00 atau 80,42% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.580.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 124 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.580.800,00	1.271.300,00	80,42	0,00
Jumlah		1.580.800,00	1.271.300,00	80,42	0,00

- f) Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp600,00 atau 92,31% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 125 Rincian Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	650,00	600,00	92,31	0,00
Jumlah		650,00	600,00	92,31	0,00

- g) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp5.475.360,00 atau 83,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.557.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 126 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.400,00	5.475.360,00	83,50	0,00
Jumlah		6.557.400,00	5.475.360,00	83,50	0,00

- h) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp112.320,00 atau 83,57% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp134.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 127 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.400,00	112.320,00	83,57	0,00
Jumlah		134.400,00	112.320,00	83,57	0,00

- i) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp336.960,00 atau 83,61% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp403.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 128 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	83,61	0,00
Jumlah		403.000,00	336.960,00	83,61	0,00

- j) Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp153.056.069,00 atau 61,40% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp249.285.252,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 129 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	6.828.840,00	3.184.518,00	46,63	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	20.655.739,00	8.092.246,00	39,18	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	193.872,00	77.544,00	40,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.100.017,00	6.100.010,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	72.000.000,00	58.500.000,00	81,25	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	747.024,00	298.805,00	40,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.117.752,00	1.117.746,00	100,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	102.008,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.540.000,00	36.685.200,00	38,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.000.000,00	39.000.000,00	86,67	0,00
Jumlah		249.285.252,00	153.056.069,00	61,40	0,00

- k) Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp395.520,00 atau 2,54% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp15.559.782,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 130 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-	714.648,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	6.472.548,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	395.520,00	395.520,00	100,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.955,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.823.064,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	880.588,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.272.459,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.559.782,00	395.520,00	2,54	0,00

- 6) Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp677.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp677.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 131 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	425.000.000,00	425.000.000,00	100,00	400.000.000,00
	Jumlah	677.000.000,00	677.000.000,00	100,00	652.000.000,00

- a) Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp252.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp252.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 132 Rincian Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
Jumlah		252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00

- b) Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp425.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp425.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 133 Rincian Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	425.000.000,00	425.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Jumlah		425.000.000,00	425.000.000,00	100,00	400.000.000,00

- 7) Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp12.114.786.002,00 atau 84,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.280.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 134 Rincian Belanja Pegawai BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	14.280.300.000,00	12.114.786.002,00	84,84	7.300.320.760,00
Jumlah		14.280.300.000,00	12.114.786.002,00	84,84	7.300.320.760,00

- a) Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp12.114.786.002,00 atau 84,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.280.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 135 Rincian Belanja Pegawai BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	14.280.300.000,00	12.114.786.002,00	84,84	7.300.320.760,00
Jumlah		14.280.300.000,00	12.114.786.002,00	84,84	7.300.320.760,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	516.299.761.254,00	444.016.600.988,70	554.882.853.239,40

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp444.016.600.988,70 atau 86,00% dari anggarannya sebesar Rp516.299.761.254,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang termasuk kelompok Belanja Operasi. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp554.882.853.239,40 realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp444.016.600.988,70 mengalami penurunan sebesar Rp110.866.252.250,70 atau 19,98% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 136 Rincian Belanja Barang dan Jasa Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	108.631.279.697,00	88.965.725.052,40	81,90	187.680.803.512,95
2	Belanja Jasa	172.042.345.617,00	148.504.981.504,13	86,32	201.912.700.388,76
3	Belanja Pemeliharaan	6.826.723.907,00	6.234.966.189,00	91,33	5.441.580.507,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	38.577.071.500,00	25.647.472.523,00	66,48	22.776.086.219,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.627.333.000,00	26.342.475.416,00	92,02	6.211.475.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.496.202.685,00	46.246.768.790,32	99,46	50.138.822.923,64
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.098.804.848,00	102.074.211.513,85	88,68	80.721.384.688,05
	Jumlah	516.299.761.254,00	444.016.600.988,70	86,00	554.882.853.239,40

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp444.016.600.988,70 didalamnya terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dicatat secara tidak rinci yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp46.246.768.790,32 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp102.074.211.513,85. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/mapping atas belanja barang dan jasa yang dicatat secara tidak rinci.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp46.246.768.790,32 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 137 Rincian Mapping Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	BELANJA BARANG	13.921.497.922,00	13.796.412.595,00
-	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.446.000,00	4.446.000,00
-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.743.250,00	16.530.750,00
-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	131.320.981,00	130.750.650,00
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	480.000,00	480.000,00
-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	416.841.162,00	410.131.500,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.401.199.014,00	6.343.466.302,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.586.881.834,00	1.569.740.400,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	136.389.000,00	134.841.500,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	912.765.800,00	909.928.450,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.864.522.956,00	1.855.338.450,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	557.532.366,00	554.434.720,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	10.695.500,00	10.695.500,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.512.749,00	11.494.800,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.116.000,00	2.116.000,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat	710.509.710,00	698.209.473,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.141.511.600,00	1.127.778.100,00
-	Belanja Pakaian Olahraga	16.030.000,00	16.030.000,00
2	BELANJA JASA	24.235.895.989,00	24.141.559.406,93
-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	57.790.000,00	51.140.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112.289.500,00	107.848.500,00
-	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	118.754.000,00	118.754.000,00
-	Honorarium Rohaniwan	3.800.000,00	3.800.000,00
-	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.350.000,00	14.350.000,00
-	Honorarium Penyelenggara Ujian	112.101.000,00	112.101.000,00
-	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	245.500.000,00	245.475.000,00
-	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.388.010.500,00	10.382.157.530,00
-	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.667.493.792,00	2.657.393.351,34
-	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	34.716.500,00	34.716.500,00
-	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.647.543.700,00	3.639.201.300,00
-	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	173.849.000,00	173.699.000,00
-	Belanja Jasa Tenaga Ahli	896.505.450,00	894.665.450,00
-	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.388.513.000,00	1.386.321.000,00
-	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	797.430.000,00	796.080.000,00
-	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.100.000,00	1.100.000,00
-	Belanja Jasa Tata Rias	13.800.500,00	13.800.500,00
-	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	108.217.358,00	108.001.500,00
-	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.762.500,00	4.762.500,00
-	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	35.125.000,00	35.125.000,00
-	Belanja Tagihan Telepon	40.672.257,00	40.530.410,00
-	Belanja Tagihan Air	155.607.800,00	153.181.830,01
-	Belanja Tagihan Listrik	743.915.997,00	706.914.770,58
-	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	105.495.000,00	105.107.000,00
-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.966.076.302,00	1.955.848.865,00
-	Belanja Paket/Pengiriman	3.553.000,00	3.553.000,00
-	Belanja Penambahan Daya	67.378.900,00	67.378.900,00
-	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.000,00	200.000,00
-	Belanja Lembur	550.000,00	550.000,00
-	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.707.433,00	2.700.000,00
-	Belanja Sewa Electric Generating Set	42.222.000,00	41.422.000,00
-	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	233.230.000,00	231.830.000,00
-	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.240.000,00	4.240.000,00
-	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.440.000,00	9.440.000,00
-	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.500.000,00	5.500.000,00
-	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.140.000,00	2.140.000,00
-	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	600.000,00	600.000,00
-	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	8.235.000,00	8.235.000,00
-	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	300.000,00	300.000,00
-	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.180.500,00	21.395.500,00
3	BELANJA PEMELIHARAAN	8.141.493.397,00	8.123.212.438,39
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.600.000,00	1.600.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	41.627.927,00	41.366.200,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.054.000,00	15.054.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	80.613.100,00	80.088.100,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor		
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	258.124.408,00	258.053.850,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.360.000,00	3.360.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.836.000,00	18.836.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	58.770.225,00	57.979.825,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.749.000,00	1.749.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.323.000,00	5.323.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	4.867.500,00	4.867.500,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7.538.000,00	7.538.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	180.662.438,00	178.086.600,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	875.000,00	875.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.225.000,00	2.225.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	66.543.922,00	65.194.300,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	29.058.500,00	28.423.500,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	2.540.000,00	2.540.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	1.450.000,00	1.450.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	795.000,00	795.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	150.000,00	150.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.114.630.476,00	7.103.363.830,00
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	143.466.644,00	142.994.810,00
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	97.153.257,00	96.818.923,39
-	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	1.980.000,00	1.980.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00
4	BELANJA PERJALANAN DINAS	197.315.377,00	185.584.350,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.625.000,00	7.290.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	187.660.377,00	177.264.350,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	630.000,00	630.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	400.000,00	400.000,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Mapping	46.496.202.685,00	46.246.768.790,32

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp102.074.211.513,85 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 138 Rincian Mapping Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	48.738.670.800,00	40.171.732.978,85
-	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	360.000.000,00	126.179.900,00
-	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.892.669.000,00	7.615.301.848,96
-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	388.279.800,00	364.555.500,00
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.437.500,00	18.900.000,00
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	95.000.000,00	55.335.000,00
-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.014.000.000,00	9.213.578.386,78
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.000.000,00	1.210.000,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	925.800.000,00	905.049.048,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	226.200.000,00	193.880.275,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.500.000,00	17.900.200,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.229.500.000,00	326.096.900,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.119.840.000,00	1.104.622.550,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	254.240.000,00	229.633.700,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	432.733.000,00	413.709.560,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	75.000.000,00	1.645.600,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat	17.877.000.000,00	15.388.072.615,11
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.048.950.000,00	1.037.025.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000,00	34.085.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	89.725.000,00	36.209.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.792.984.000,00	1.512.350.595,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.716.250.000,00	1.520.829.800,00
-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	55.562.500,00	55.562.500,00
2	Belanja Jasa	57.235.901.148,00	54.142.499.464,00
-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	194.000.000,00	86.179.040,00
-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.922.550.000,00	1.710.995.370,00
-	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	245.000.000,00	0,00
-	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	94.250.000,00	34.576.960,00
-	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	47.624.624.148,00	46.666.804.157,00
-	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	124.600.000,00	0,00
-	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4.000.000,00	0,00
-	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.000.000,00	80.000.000,00
-	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.050.000,00	1.300.000,00
-	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	600.000,00
-	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.500.000,00	0,00
-	Belanja Jasa Kalibrasi	423.260.000,00	334.583.000,00
-	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.000.000,00	0,00
-	Belanja Tagihan Telepon	100.000.000,00	65.864.976,00
-	Belanja Tagihan Air	55.500.000,00	29.317.620,00
-	Belanja Tagihan Listrik	1.700.000.000,00	1.495.573.554,00
-	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.400.000,00	16.200.000,00
-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	306.450.000,00	259.948.992,00
-	Belanja Registrasi/Keanggotaan	13.000.000,00	6.300.000,00
-	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	93.732.000,00	55.395.872,00
-	Belanja Pengolahan Air Limbah	949.700.000,00	891.555.610,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
-	Belanja Medical Check Up	343.461.500,00	266.556.794,00
-	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00
-	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00
-	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.000.000,00	0,00
-	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.250.000,00	3.500.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00	0,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	162.000.000,00	60.000.600,00
-	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	228.000.000,00	228.000.000,00
-	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	560.750.000,00	489.550.500,00
-	Belanja Sosialisasi	400.000.000,00	179.828.000,00
-	Belanja Bimbingan Teknis	145.875.000,00	56.830.000,00
-	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15.000.000,00	0,00
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	703.948.500,00	541.349.780,00
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	590.000.000,00	581.688.639,00
3	Belanja Pemeliharaan	8.390.760.000,00	7.057.120.881,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	150.000.000,00	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	150.000.000,00	149.556.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.000.000,00	19.336.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00	358.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.000.000,00	50.255.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	71.500.000,00	27.830.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.315.000.000,00	712.697.700,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.650.000.000,00	1.560.801.381,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	510.000.000,00	186.676.200,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	110.000.000,00	109.721.700,00
-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	65.000.000,00	29.858.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.875.000.000,00	3.861.493.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	211.000.000,00	209.070.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.000.000,00	2.375.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	106.000.000,00	91.332.900,00
-	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	45.760.000,00	45.760.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	471.500.000,00	456.144.840,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	470.000.000,00	456.144.840,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5	Belanja Lain-lain (Extracom)	261.972.900,00	246.713.350,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.026.900,00	1.026.900,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.826.000,00	1.826.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	44.120.000,00	31.640.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	215.000.000,00	212.220.450,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD Setelah Mapping		115.098.804.848,00	102.074.211.513,85

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing mapping obyek Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dengan anggarannya sebesar Rp516.299.761.254,00 dan realisasi sebesar Rp444.016.600.988,70 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Barang tahun 2021 adalah sebesar Rp88.965.725.052,40 atau 81,90% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp108.631.279.697,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 139 Rincian Belanja Barang

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	108.626.779.697,00	88.961.225.052,40	81,90	186.693.155.168,95
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	987.648.344,00
Jumlah		108.631.279.697,00	88.965.725.052,40	81,90	187.680.803.512,95

- a) Realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2021 adalah sebesar Rp88.961.225.052,40 atau 81,90% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp108.626.779.697,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 140 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	881.266.105,00	807.552.250,00	91,64	2.735.457.841,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.835.937.586,00	1.956.066.941,00	68,97	2.412.718.533,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.280.924.538,00	5.418.016.148,00	74,41	5.212.116.692,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.393.471.960,00	9.450.113.820,00	90,92	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	89.426.000,00	86.285.000,00	96,49	134.621.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.401.300,00	744.000,00	30,98	5.098.091,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	47.595.000,00	40.193.000,00	84,45	45.069.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	46.250.000,00	45.650.000,00	98,70	64.865.400,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.235.790.531,00	2.885.856.153,40	89,19	20.178.672.433,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.077.903.040,00	1.531.802.177,00	73,72	2.872.500.739,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	78.873.080,00	65.976.600,00	83,65	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.280.210,00	3.028.440,00	21,21	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.270.500,00	2.775.000,00	84,85	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	23.830.000,00	22.255.000,00	93,39	0,00
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	750.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.373.063.750,00	1.290.977.289,00	94,02	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.127.374.090,00	8.445.415.640,00	92,53	16.697.442.300,20
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	317.856.310,00	296.714.629,00	93,35	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.135.483.764,00	7.409.608.023,00	73,11	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	179.975.000,00	170.913.000,00	94,96	171.169.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	11.922.600,00	1.671.000,00	14,02	0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	719.147.220,00	553.284.720,00	76,94	0,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.616.440.984,00	1.382.112.319,00	85,50	1.485.794.155,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.988.598.610,00	1.823.453.635,00	91,70	1.754.987.250,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	92.869.200,00	87.192.700,00	93,89	213.117.300,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.155.000.000,00	948.160.386,00	82,09	0,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.027.799.820,00	1.971.223.485,00	97,21	0,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.829.766.989,00	4.316.065.404,00	89,36	6.402.845.554,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	118.681.400,00	117.589.412,00	99,08	0,00
31	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.414.223.830,00	11.503.957.050,00	92,67	42.357.566.608,12
32	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.528.053.680,00	1.364.732.740,00	89,31	62.364.810.127,63
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	423.124.300,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan	250.000,00	222.750,00	89,10	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Pakan Lainnya				
35	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	88.000.000,00	87.055.000,00	98,93	0,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.619.474.400,00	21.087.879.179,00	73,68	15.428.535.655,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	355.210.500,00	263.350.212,00	74,14	1.096.459.500,00
38	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.580.000,00	13.380.000,00	56,74	0,00
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	67.200.000,00	67.100.000,00	99,85	725.448.800,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.807.803.000,00	1.555.481.100,00	55,40	1.500.880.500,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.200.000,00	6.210.000,00	50,90	0,00
42	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	393.279.000,00	307.720.500,00	78,24	661.914.060,00
43	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	60.000.000,00
44	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	25.650.000,00	25.195.500,00	98,23	0,00
45	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	131.250.000,00	128.145.000,00	97,63	205.152.000,00
46	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	36.750.000,00
47	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00	74.685.000,00	99,58	58.138.400,00
48	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	306.575.000,00	302.243.300,00	98,59	692.509.725,00
49	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	56.250.000,00	55.935.000,00	99,44	0,00
50	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	10.500.000,00
51	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.000.000,00
52	Belanja Pakaian Adat Daerah	56.000.000,00	55.649.000,00	99,37	13.650.000,00
53	Belanja Pakaian Batik Tradisional	349.010.000,00	335.202.850,00	96,04	214.174.805,00
54	Belanja Pakaian Olahraga	492.283.500,00	476.847.500,00	96,86	449.065.400,00
55	Belanja Pakaian Paskibraka	26.107.200,00	26.107.200,00	100,00	0,00
	Jumlah	108.626.779.697,00	88.961.225.052,40	81,90	186.693.155.168,95

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp142.929.370.626,25 atau 83,44% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp171.286.948.419,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 141 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.241.266.105,00	933.732.150,00	75,22	2.735.457.841,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	11.733.052.586,00	9.575.814.789,96	81,61	2.412.718.533,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.685.947.588,00	5.799.102.398,00	75,45	5.212.116.692,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.393.471.960,00	9.450.113.820,00	90,92	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	220.746.981,00	217.035.650,00	98,32	134.621.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	25.838.800,00	19.644.000,00	76,03	5.098.091,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	143.075.000,00	96.008.000,00	67,10	45.069.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	46.250.000,00	45.650.000,00	98,70	64.865.400,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.666.631.693,00	12.509.566.040,18	79,85	20.178.672.433,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.077.903.040,00	1.531.802.177,00	73,72	2.872.500.739,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	78.873.080,00	65.976.600,00	83,65	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.280.210,00	3.028.440,00	21,21	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.270.500,00	2.775.000,00	84,85	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	23.830.000,00	22.255.000,00	93,39	0,00
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	750.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.393.063.750,00	1.292.187.289,00	92,76	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.454.373.104,00	15.693.930.990,00	95,38	16.697.442.300,20
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.130.938.144,00	2.060.335.304,00	96,69	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.135.483.764,00	7.409.608.023,00	73,11	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	337.864.000,00	323.654.700,00	95,79	171.169.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	11.922.600,00	1.671.000,00	14,02	0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.861.413.020,00	1.789.310.070,00	62,53	0,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.600.803.940,00	4.342.073.319,00	94,38	1.485.794.155,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.800.370.976,00	2.607.522.055,00	93,11	1.754.987.250,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	536.297.700,00	511.597.760,00	95,39	213.117.300,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	11.512.749,00	11.494.800,00	99,84	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
28	Perlengkapan Pendukung Olahraga Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.157.116.000,00	950.276.386,00	82,12	0,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.102.799.820,00	1.972.869.085,00	93,82	0,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat	23.417.276.699,00	5.014.274.877,00	21,41	6.402.845.554,00
31	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	118.681.400,00	15.505.662.027,11	13064,95	0,00
32	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.414.223.830,00	11.503.957.050,00	92,67	42.357.566.608,12
33	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.528.053.680,00	1.364.732.740,00	89,31	62.364.810.127,63
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	423.124.300,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	250.000,00	222.750,00	89,10	0,00
36	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.048.950.000,00	1.037.025.000,00	98,86	0,00
37	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	88.000.000,00	87.055.000,00	98,93	0,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.699.474.400,00	21.121.964.179,00	73,60	15.428.535.655,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	444.935.500,00	299.559.212,00	67,33	1.096.459.500,00
40	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.580.000,00	13.380.000,00	56,74	0,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.208.711.600,00	1.194.878.100,00	98,86	725.448.800,00
42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.600.787.000,00	3.067.831.695,00	66,68	1.500.880.500,00
43	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.200.000,00	6.210.000,00	50,90	0,00
44	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.109.529.000,00	1.828.550.300,00	86,68	661.914.060,00
45	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	60.000.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	25.650.000,00	25.195.500,00	98,23	0,00
47	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	131.250.000,00	128.145.000,00	97,63	205.152.000,00
48	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	36.750.000,00
49	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00	74.685.000,00	99,58	58.138.400,00
50	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	362.137.500,00	357.805.800,00	98,80	692.509.725,00
51	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	56.250.000,00	55.935.000,00	99,44	0,00
52	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	10.500.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
53	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.000.000,00
54	Belanja Pakaian Adat Daerah	56.000.000,00	55.649.000,00	99,37	13.650.000,00
55	Belanja Pakaian Batik Tradisional	349.010.000,00	335.202.850,00	96,04	214.174.805,00
56	Belanja Pakaian Olahraga	508.313.500,00	492.877.500,00	96,96	449.065.400,00
57	Belanja Pakaian Paskibraka	26.107.200,00	26.107.200,00	100,00	0,00
Jumlah		171.286.948.419,00	142.929.370.626,25	83,44	186.693.155.168,95

- b) Realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis tahun 2021 adalah sebesar Rp4.500.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 142 Rincian Belanja Barang Tak Pakai Habis

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	987.648.344,00
2	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	987.648.344,00

- 2) Realisasi Belanja Jasa tahun 2021 adalah sebesar Rp148.504.981.504,13 atau 86,32% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp172.042.345.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 143 Rincian Belanja Jasa

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	131.399.332.859,00	113.766.228.618,63	86,58	176.866.712.445,76
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.513.733.941,00	19.694.086.322,00	83,76	18.241.109.043,00
3	Belanja Sewa Tanah	125.200.000,00	64.000.000,00	51,12	17.200.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.788.069.300,00	1.828.171.841,00	65,57	2.025.903.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	969.700.000,00	857.567.600,00	88,44	467.385.000,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.298.792.070,00	4.036.459.710,00	93,90	0,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.487.000,00	28.487.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.659.790.447,00	5.396.827.812,50	95,35	1.852.046.120,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.221.000.000,00	1.215.576.150,00	99,56	290.579.780,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	350.000.000,00	348.060.000,00	99,45	0,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.688.240.000,00	1.269.516.450,00	75,20	2.151.765.000,00
Jumlah		172.042.345.617,00	148.504.981.504,13	86,32	201.912.700.388,76

- a) Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2021 adalah sebesar Rp113.766.228.618,63 atau 86,58% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp131.399.332.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 144 Rincian Belanja Jasa Kantor Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.728.330.000,00	6.659.145.000,00	68,45	6.759.609.500,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.195.855.000,00	5.116.387.500,00	82,58	18.438.488.209,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	98.400.000,00	14.400.000,00	14,63	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.187.900.000,00	3.648.400.000,00	87,12	0,00
5	Honorarium Rohaniwan	49.400.000,00	29.100.000,00	58,91	0,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	145.690.000,00	103.170.000,00	70,81	0,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	78.550.000,00	75.750.000,00	96,44	0,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.178.350.000,00	1.016.650.000,00	86,28	0,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	540.000.000,00	520.500.000,00	96,39	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.757.600.000,00	12.738.600.000,00	99,85	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.051.393.800,00	7.917.316.000,00	87,47	36.657.066.862,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	182.955.500,00	90.097.000,00	49,25	203.536.750,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.482.291.150,00	7.140.527.000,00	84,18	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.741.280.000,00	1.704.830.000,00	97,91	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	105.500.000,00	90.380.000,00	85,67	9.172.684.058,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.375.505.000,00	497.340.000,00	14,73	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber	251.361.000,00	250.595.500,00	99,70	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Daya Air				
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	191.470.000,00	191.470.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	62.400.000,00	61.200.000,00	98,08	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	857.386.000,00	717.000.000,00	83,63	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.224.950.000,00	13.999.971.320,00	98,42	14.189.413.489,00
23	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	442.800.000,00	442.800.000,00	100,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	89.400.000,00	85.400.000,00	95,53	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.310.690.000,00	2.778.855.400,00	83,94	57.316.742.879,76
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.685.430.000,00	2.590.230.000,00	96,45	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.736.550.000,00	1.486.700.000,00	85,61	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	435.441.000,00	353.509.500,00	81,18	0,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.294.536.500,00	1.027.042.818,00	79,34	0,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	80.750.000,00	47.575.000,00	58,92	0,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.072.569.700,00	1.955.076.839,00	94,33	0,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
35	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	158.400.000,00	157.200.000,00	99,24	0,00
36	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	124.000.000,00	122.227.600,00	98,57	0,00
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.624.310.000,00	1.510.993.500,00	93,02	8.533.230.790,00
38	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	58.700.000,00	43.537.000,00	74,17	0,00
39	Belanja Jasa Kalibrasi	238.150.000,00	218.150.000,00	91,60	0,00
40	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.138.082.800,00	832.076.570,00	73,11	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
41	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	113.700.000,00	25.080.100,00	22,06	0,00
42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.609.670.000,00	2.495.422.800,00	95,62	0,00
43	Belanja Tagihan Telepon	955.970.000,00	774.645.506,00	81,03	653.095.896,00
44	Belanja Tagihan Air	574.103.970,00	282.066.320,00	49,13	288.836.920,00
45	Belanja Tagihan Listrik	3.515.573.417,00	2.768.057.182,00	78,74	18.712.649.863,00
46	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	347.900.000,00	296.084.000,00	85,11	1.518.720.000,00
47	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.603.982.000,00	1.316.351.521,63	82,07	3.497.235.299,00
48	Belanja Paket/Pengiriman	693.830.000,00	501.973.580,00	72,35	206.441.530,00
49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	879.546.296,00	704.478.850,00	80,10	718.960.400,00
51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	15.302.137.635,00	15.147.180.321,00	98,99	0,00
52	Belanja Lembur	3.016.881.200,00	2.863.747.000,00	94,92	0,00
53	Belanja Medical Check Up	99.000.000,00	3.092.000,00	3,12	0,00
54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	2.801.300.000,00	2.371.400.000,00	84,65	0,00
55	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	9.369.860.891,00	7.521.845.891,00	80,28	0,00
Jumlah		131.399.332.859,00	113.766.228.618,63	86,58	176.866.712.445,76

Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp189.581.737.470,56 atau 90,42% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp209.658.511.563,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 145 Rincian Belanja Jasa Kantor Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.980.120.000,00	6.796.464.040,00	68,10	6.759.609.500,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.230.694.500,00	6.935.231.370,00	84,26	18.438.488.209,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	98.400.000,00	14.400.000,00	14,63	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.551.654.000,00	3.767.154.000,00	82,76	0,00
5	Honorarium Rohaniwan	53.200.000,00	32.900.000,00	61,84	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	160.040.000,00	117.520.000,00	73,43	0,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	190.651.000,00	187.851.000,00	98,53	0,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.518.100.000,00	1.296.701.960,00	85,42	0,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	540.000.000,00	520.500.000,00	96,39	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.145.610.500,00	23.120.757.530,00	99,89	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	56.676.017.948,00	54.584.120.157,00	96,31	36.657.066.862,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	182.955.500,00	90.097.000,00	49,25	203.536.750,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.274.384.942,00	9.797.920.351,34	86,90	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.741.280.000,00	1.704.830.000,00	97,91	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	105.500.000,00	90.380.000,00	85,67	9.172.684.058,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.379.505.000,00	497.340.000,00	14,72	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	251.361.000,00	250.595.500,00	99,70	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	191.470.000,00	191.470.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	62.400.000,00	61.200.000,00	98,08	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	892.102.500,00	751.716.500,00	84,26	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.872.493.700,00	17.639.172.620,00	98,69	14.189.413.489,00
23	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	616.649.000,00	616.499.000,00	99,98	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	89.400.000,00	85.400.000,00	95,53	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.287.195.450,00	3.753.520.850,00	87,55	57.316.742.879,76
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.108.993.000,00	3.977.851.000,00	96,81	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.533.980.000,00	2.282.780.000,00	90,09	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	435.441.000,00	353.509.500,00	81,18	0,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.294.536.500,00	1.027.042.818,00	79,34	0,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	81.850.000,00	48.675.000,00	59,47	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
32	Belanja Jasa Tata Rias	41.800.500,00	41.800.500,00	100,00	0,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.072.569.700,00	1.955.076.839,00	94,33	0,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	122.417.358,00	112.801.500,00	92,15	0,00
35	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	158.400.000,00	157.200.000,00	99,24	0,00
37	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	124.000.000,00	122.227.600,00	98,57	0,00
38	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.624.310.000,00	1.510.993.500,00	93,02	8.533.230.790,00
39	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	63.462.500,00	48.299.500,00	76,11	0,00
40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	36.125.000,00	35.125.000,00	97,23	0,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	661.410.000,00	552.733.000,00	83,57	0,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.138.082.800,00	832.076.570,00	73,11	0,00
43	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	113.700.000,00	25.080.100,00	22,06	0,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.609.670.000,00	2.495.422.800,00	95,62	0,00
45	Belanja Tagihan Telepon	1.096.642.257,00	881.040.892,00	80,34	653.095.896,00
46	Belanja Tagihan Air	785.211.770,00	464.565.770,01	59,16	288.836.920,00
47	Belanja Tagihan Listrik	5.959.489.414,00	4.970.545.506,58	83,41	18.712.649.863,00
48	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	485.795.000,00	417.391.000,00	85,92	1.518.720.000,00
49	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.876.508.302,00	3.532.149.378,63	91,12	3.497.235.299,00
50	Belanja Paket/Pengiriman	697.383.000,00	505.526.580,00	72,49	206.441.530,00
51	Belanja Penambahan Daya	67.378.900,00	67.378.900,00	100,00	0,00
52	Belanja Registrasi/Keanggotaan	88.300.000,00	6.300.000,00	7,13	0,00
53	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	973.478.296,00	760.074.722,00	78,08	718.960.400,00
54	Belanja Pengolahan Air Limbah	949.700.000,00	891.555.610,00	93,88	0,00
55	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	15.302.137.635,00	15.147.180.321,00	98,99	0,00
56	Belanja Lembur	3.017.431.200,00	2.864.297.000,00	94,93	0,00
57	Belanja Medical Check Up	442.461.500,00	269.648.794,00	60,94	0,00
58	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan	2.801.300.000,00	2.371.400.000,00	84,65	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
59	Vaksinator Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID- 19	9.369.860.891,00	7.521.845.891,00	80,28	0,00
Jumlah		209.658.511.563,00	189.581.737.470,56	90,42	176.866.712.445,76

- b) Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2021 adalah sebesar Rp19.694.086.322,00 atau 83,76% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp23.513.733.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 146 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.469.153.600,00	17.959.689.600,00	87,74	0,00
2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	378.403.200,00	359.324.000,00	94,96	0,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.562.038.466,00	1.306.671.991,00	51,00	18.241.109.043,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	104.138.675,00	68.400.731,00	65,68	0,00
Jumlah		23.513.733.941,00	19.694.086.322,00	83,76	18.241.109.043,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN diperuntukan bagi tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dibiayai oleh APBD dan pembayaran iurannya dibayarkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- c) Realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2021 adalah sebesar Rp64.000.000,00 atau 51,12% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp125.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 147 Rincian Belanja Sewa Tanah Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	17.200.000,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	0,00
Jumlah		125.200.000,00	64.000.000,00	51,12	17.200.000,00

Realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp66.700.000,00 atau 52,15% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp127.907.433,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 148 Rincian Belanja Sewa Tanah Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	17.200.000,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.707.433,00	2.700.000,00	99,73	0,00
3	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	0,00
Jumlah		127.907.433,00	66.700.000,00	52,15	17.200.000,00

- d) Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebesar Rp1.828.171.841,00 atau 65,57% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.788.069.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 149 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Compressor	2.569.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	146.987.000,00
4	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor	10.000.000,00	9.098.000,00	90,98	0,00
5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.175.000,00	1.800.000,00	3,82	0,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.007.450.000,00	303.382.090,00	30,11	260.710.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.600.000,00	600.000,00	13,04	0,00
9	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	117.500.000,00	75.650.000,00	64,38	0,00
10	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	275.300,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.463.682.300,00	1.309.074.001,00	89,44	17.887.500,00
12	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	238.605.000,00
13	Belanja Sewa Alat Pembersih	50.000.000,00	49.978.500,00	99,96	0,00
14	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	112.118.500,00
15	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	268.200.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	750.000,00	750.000,00	100,00	265.800.000,00
17	Belanja Sewa	7.619.400,00	7.619.400,00	100,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Peralatan Cetak				
18	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	4.270.000,00	4.000.000,00	93,68	0,00
20	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00	0,00	468.965.000,00
21	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	5.677.600,00	3.757.000,00	66,17	0,00
22	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	246.630.000,00
24	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	37.500.000,00	34.462.850,00	91,90	0,00
	Jumlah	2.788.069.300,00	1.828.171.841,00	65,57	2.025.903.000,00

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp2.135.378.841,00 atau 67,78% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.150.226.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 150 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Compressor	2.569.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	42.222.000,00	41.422.000,00	98,11	146.987.000,00
4	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor	10.000.000,00	9.098.000,00	90,98	0,00
5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.175.000,00	233.630.000,00	495,24	260.710.000,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.240.680.000,00	303.382.090,00	24,45	0,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.840.000,00	4.840.000,00	54,75	0,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.440.000,00	9.440.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	167.500.000,00	75.650.000,00	45,16	0,00
11	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	275.300,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.463.682.300,00	1.309.074.001,00	89,44	17.887.500,00
13	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	238.605.000,00
14	Belanja Sewa Alat Pembersih	50.000.000,00	49.978.500,00	99,96	0,00
15	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	112.118.500,00
16	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.250.000,00	7.500.000,00	73,17	268.200.000,00
17	Belanja Sewa	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	265.800.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
18	Peralatan Studio Audio	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	7.619.400,00	7.619.400,00	100,00	0,00
20	Belanja Sewa Peralatan Cetak	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.270.000,00	4.000.000,00	93,68	0,00
22	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	468.965.000,00
23	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	5.677.600,00	3.757.000,00	66,17	0,00
24	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Sewa Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	246.630.000,00
26	Belanja Sewa Personal Computer	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	37.500.000,00	34.462.850,00	91,90	0,00
28	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
29	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	8.235.000,00	8.235.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN				
Jumlah		3.150.226.300,00	2.135.378.841,00	67,78	2.025.903.000,00

- e) Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2021 adalah sebesar Rp857.567.600,00 atau 88,44% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp969.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 151 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	288.800.000,00	267.862.500,00	92,75	272.160.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	531.650.000,00	458.107.100,00	86,17	195.225.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	35.000.000,00	20.000.000,00	57,14	0,00
6	Belanja Sewa Hotel	26.000.000,00	23.348.000,00	89,80	0,00
Jumlah		969.700.000,00	857.567.600,00	88,44	467.385.000,00

- f) Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 adalah sebesar Rp4.036.459.710,00 atau 93,90% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.298.792.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 152 Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	4.293.792.070,00	4.036.459.710,00	94,01	0,00
Jumlah		4.298.792.070,00	4.036.459.710,00	93,90	0,00

Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 sebesar Rp4.036.459.710,00 merupakan sewa jaringan kepada pihak ketiga yang terdiri dari :

Tabel 5 - 153 Rincian Sewa Jaringan dengan Media Udara

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Sewa Koneksi Internet E-Gov	3.605.454.150	PT. ICON+
2	Koneksi IP Public	14.000.000	CV. NUGRAHA
3	Sewa Bandwidth CCTV	330.013.200,00	PT TELKOM
4	Sewa Hosting unlimited Aplikasi IFK Sistem Informasi Persediaan Obat dan Alkes	12.000.000,00	CV. INDONESIA SOLUTION JEMBER
5	Sewa Bandwith Dedicat	60.000.000	PT TELKOM
6	Sewa Hosting Domain dpmptspnakerbws.id dan paket sms reguler	14.992.360	PT TELKOM
Jumlah		4.036.459.710,00	

- g) Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp28.487.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp28.487.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 154 Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	9.237.000,00	9.237.000,00	100,00	0,00
Jumlah		28.487.000,00	28.487.000,00	100,00	0,00

- h) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2021 adalah sebesar Rp5.396.827.812,50 atau 95,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.659.790.447,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 155 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	143.441.600,00	138.183.813,50	96,33	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	17.018.100,00	16.760.682,00	98,49	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi	363.650.216,00	359.332.000,00	98,81	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya				
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	185.605.000,00	183.614.794,00	98,93	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	1.748.756.120,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.213.398.760,00	1.180.786.900,00	97,31	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.143.016.989,00	1.040.150.000,00	91,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	215.000.000,00	167.414.500,00	77,87	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	99.572.000,00	99,57	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	276.831.816,00	273.438.280,00	98,77	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	77.658.800,00	76.952.743,00	99,09	103.290.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	762.011.326,00	745.334.000,00	97,81	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	14.707.840,00	14.359.000,00	97,63	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	99.000.000,00	98.472.000,00	99,47	0,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	240.000.000,00	237.862.000,00	99,11	0,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	418.450.000,00	410.658.500,00	98,14	0,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	150.000.000,00	147.451.400,00	98,30	0,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	210.000.000,00	206.485.200,00	98,33	0,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.659.790.447,00	5.396.827.812,50	95,35	1.852.046.120,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp5.396.827.812,50 atau 95,02% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.679.790.447,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 156 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	143.441.600,00	138.183.813,50	96,33	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	17.018.100,00	16.760.682,00	98,49	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	383.650.216,00	359.332.000,00	93,66	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	185.605.000,00	183.614.794,00	98,93	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	1.748.756.120,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.213.398.760,00	1.180.786.900,00	97,31	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik	1.143.016.989,00	1.040.150.000,00	91,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
Sipil Transportasi					
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	215.000.000,00	167.414.500,00	77,87	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	99.572.000,00	99,57	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	276.831.816,00	273.438.280,00	98,77	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	77.658.800,00	76.952.743,00	99,09	103.290.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	762.011.326,00	745.334.000,00	97,81	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	14.707.840,00	14.359.000,00	97,63	0,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	99.000.000,00	98.472.000,00	99,47	0,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	240.000.000,00	237.862.000,00	99,11	0,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	418.450.000,00	410.658.500,00	98,14	0,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	150.000.000,00	147.451.400,00	98,30	0,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	210.000.000,00	206.485.200,00	98,33	0,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.679.790.447,00	5.396.827.812,50	95,02	1.852.046.120,00

- i) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2021 adalah sebesar Rp1.215.576.150,00 atau 99,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.221.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 157 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	300.000.000,00	299.520.000,00	99,84	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
3	Belanja Jasa	50.000.000,00	48.982.450,00	97,96	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi				
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	80.000.000,00	78.734.200,00	98,42	290.579.780,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000,00	49.439.500,00	98,88	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	441.000.000,00	439.900.000,00	99,75	0,00
	Jumlah	1.221.000.000,00	1.215.576.150,00	99,56	290.579.780,00

Realisasi Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp1.275.576.750,00 atau 92,23% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.383.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 158 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	300.000.000,00	299.520.000,00	99,84	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	50.000.000,00	48.982.450,00	97,96	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	212.000.000,00	110.000.600,00	51,89	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	80.000.000,00	78.734.200,00	98,42	290.579.780,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	50.000.000,00	49.439.500,00	98,88	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
8	Jasa Konsultasi Manajemen Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	441.000.000,00	439.900.000,00	99,75	0,00
Jumlah		1.383.000.000,00	1.275.576.750,00	92,23	290.579.780,00

- j) Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) tahun 2021 adalah sebesar Rp348.060.000,00 atau 99,45% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp350.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 159 Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Pariwisata	194.000.000,00	192.060.000,00	99,00	0,00
Jumlah		350.000.000,00	348.060.000,00	99,45	0,00

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) merupakan belanja jasa atas ketersediaan layanan jasa publikasi informasi pariwisata melalui media TV, media cetak dan media online, pemasangan banner dan bando promosi pariwisata serta pembuatan dan pemasangan baliho informasi nasional dan informasi daerah.

- k) Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.269.516.450,00 atau 75,20% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.688.240.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 160 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	351.740.000,00	261.965.000,00	74,48	2.118.885.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	1.191.500.000,00	863.315.450,00	72,46	32.880.000,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	145.000.000,00	144.236.000,00	99,47	0,00
Jumlah		1.688.240.000,00	1.269.516.450,00	75,20	2.151.765.000,00

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp3.368.158.869,00 atau 77,36% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.353.994.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 161 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	934.670.500,00	772.911.000,00	82,69	2.118.885.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	1.337.375.000,00	920.145.450,00	68,80	32.880.000,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	145.000.000,00	144.236.000,00	99,47	0,00
4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sosialisasi	400.000.000,00	179.828.000,00	44,96	0,00
6	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	703.948.500,00	541.349.780,00	76,90	0,00
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	590.000.000,00	581.688.639,00	98,59	0,00
Jumlah		4.353.994.000,00	3.368.158.869,00	77,36	2.151.765.000,00

- 3) Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 adalah sebesar Rp6.234.966.189,00 atau 91,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.826.723.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 162 Rincian Belanja Pemeliharaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	24.998.000,00	99,99	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.300.879.740,00	1.891.437.667,00	82,20	1.397.594.413,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.483.021.717,00	3.309.789.372,00	95,03	3.704.083.905,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.017.822.450,00	1.008.741.150,00	99,11	279.552.189,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.350.000,00
Jumlah		6.826.723.907,00	6.234.966.189,00	91,33	5.441.580.507,00

- a) Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah tahun 2021 adalah sebesar Rp24.998.000,00 atau 99,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 163 Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	25.000.000,00	24.998.000,00	99,99	0,00
Jumlah		25.000.000,00	24.998.000,00	99,99	0,00

- b) Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebesar Rp1.891.437.667,00 atau 82,20% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.300.879.740,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 164 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	70.500.000,00	70.360.000,00	99,80	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.477.000,00	124.235.000,00	99,01	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	52.343.600,00	25.715.000,00	49,13	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000,00	9.250.000,00	92,50	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	43.316.000,00	40.609.197,00	93,75	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.950.000,00	26.905.000,00	39,60	1.397.594.413,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	446.300.000,00	309.876.850,00	69,43	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.950.000,00	34.945.000,00	55,51	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.627.800,00	4.620.000,00	99,83	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	5.400.000,00	2.875.000,00	53,24	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	130.000.000,00	128.315.000,00	98,70	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	88.053.600,00	86.820.000,00	98,60	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	144.000,00	135.000,00	93,75	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat	307.800,00	305.100,00	99,12	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Pengolahan-Alat Produksi Perikanan				
16	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	9.280.170,00	8.876.770,00	95,65	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.001.060,00	2.001.060,00	100,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	11.169.800,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.654.600,00	10.210.000,00	35,63	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	62.287.000,00	60.780.800,00	97,58	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	17.980.400,00	15.435.000,00	85,84	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	69.123.000,00	44.126.900,00	63,84	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.601.600,00	42.625.000,00	82,60	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	878.900,00	878.900,00	100,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	60.000.000,00	11.400.000,00	19,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	195.000.000,00	194.777.000,00	99,89	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.478.900,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	238.600,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Kedokteran Jantung				
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	4.109.400,00	3.025.000,00	73,61	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	15.000.000,00	14.472.700,00	96,48	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	166.603.600,00	159.558.500,00	95,77	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.000.000,00	16.305.000,00	74,11	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	26.000.000,00	20.800.000,00	80,00	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	207.091.640,00	202.328.140,00	97,70	0,00
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.966.300,00	15.928.200,00	88,66	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	150.506.700,00	146.569.040,00	97,38	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	36.938.270,00	24.373.510,00	65,98	0,00
	Jumlah	2.300.879.740,00	1.891.437.667,00	82,20	1.397.594.413,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp5.514.082.523,00 atau 76,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.230.642.760,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 165 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	70.500.000,00	70.360.000,00	99,80	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.477.000,00	124.235.000,00	99,01	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	202.343.600,00	25.715.000,00	12,71	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000,00	9.250.000,00	92,50	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	193.316.000,00	190.165.197,00	98,37	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	112.950.000,00	46.241.000,00	40,94	1.397.594.413,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	447.900.000,00	311.476.850,00	69,54	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.950.000,00	34.945.000,00	55,51	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00	358.000,00	23,87	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.000.000,00	50.255.000,00	62,82	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	71.500.000,00	32.450.000,00	45,38	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.627.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	5.400.000,00	2.875.000,00	53,24	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	130.000.000,00	128.315.000,00	98,70	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	88.053.600,00	86.820.000,00	98,60	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan	144.000,00	135.000,00	93,75	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Tanaman/ Ikan/Ternak				
18	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat	307.800,00	305.100,00	99,12	0,00
19	Produksi Perikanan Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	9.280.170,00	8.876.770,00	95,65	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin	2.001.060,00	2.001.060,00	100,00	0,00
21	Hitung/Mesin Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	52.797.727,00	41.366.200,00	78,35	0,00
22	Reproduksi (Penggandaan) 'Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	15.054.000,00	15.054.000,00	100,00	0,00
23	Penyimpan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	80.613.100,00	80.088.100,00	99,35	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.654.600,00	10.210.000,00	35,63	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	320.411.408,00	318.834.650,00	99,51	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.340.400,00	18.795.000,00	88,07	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.402.959.000,00	775.660.600,00	55,29	0,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	110.371.825,00	100.604.825,00	91,15	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	878.900,00	878.900,00	100,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	60.000.000,00	11.400.000,00	19,00	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	195.000.000,00	194.777.000,00	99,89	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
32	Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.478.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	238.600,00	0,00	0,00	0,00
34	Kedokteran Jantung Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	4.109.400,00	3.025.000,00	73,61	0,00
35	Kedokteran Transfusi Darah Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	1.650.000.000,00	1.560.801.381,00	94,59	0,00
36	Kedokteran Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	510.000.000,00	186.676.200,00	36,60	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	15.000.000,00	14.472.700,00	96,48	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang	1.749.000,00	1.749.000,00	100,00	0,00
40	Studi:Keterampilan Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang	5.323.000,00	5.323.000,00	100,00	0,00
41	Studi:Kesenian Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	4.867.500,00	4.867.500,00	100,00	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	174.141.600,00	167.096.500,00	95,95	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	202.662.438,00	194.391.600,00	95,92	0,00
44	Belanja Pemeliharaan	136.000.000,00	130.521.700,00	95,97	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
45	Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	207.966.640,00	203.203.140,00	97,71	0,00
46	'Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.225.000,00	2.225.000,00	100,00	0,00
47	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	84.510.222,00	81.122.500,00	95,99	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	244.565.200,00	204.850.540,00	83,76	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	36.938.270,00	24.373.510,00	65,98	0,00
50	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	0,00
51	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
52	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	795.000,00	795.000,00	100,00	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
Jumlah		7.230.642.760,00	5.514.082.523,00	76,26	1.397.594.413,00

- c) Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.309.789.372,00 atau 95,03% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.483.021.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 166 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.630.792.797,00	1.506.867.874,00	92,40	3.704.083.905,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	118.800.000,00	114.100.000,00	96,04	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-	50.000.000,00	49.775.000,00	99,55	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
	Bangunan Gedung Instalasi				
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	125.000.000,00	124.372.200,00	99,50	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	50.800.000,00	49.212.300,00	96,87	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	157.000.000,00	155.885.000,00	99,29	0,00
7	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	730.228.020,00	718.802.498,00	98,44	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	465.252.500,00	462.503.500,00	99,41	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalo w/Tempat Peristirahatan	155.148.400,00	128.271.000,00	82,68	0,00
	Jumlah	3.483.021.717,00	3.309.789.372,00	95,03	3.704.083.905,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp14.483.716.202,00 atau 98,64% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.683.652.193,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 167 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.630.792.797,00	1.506.867.874,00	92,40	3.704.083.905,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	118.800.000,00	114.100.000,00	96,04	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	50.000.000,00	49.775.000,00	99,55	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
4	Instalasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	125.000.000,00	124.372.200,00	99,50	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	3.925.800.000,00	3.910.705.300,00	99,62	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.114.630.476,00	7.103.363.830,00	99,84	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	157.000.000,00	155.885.000,00	99,29	0,00
8	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam	730.228.020,00	718.802.498,00	98,44	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	465.252.500,00	462.503.500,00	99,41	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalo w/Tempat Peristirahatan	366.148.400,00	337.341.000,00	92,13	0,00
Jumlah		14.683.652.193,00	14.483.716.202,00	98,64	3.704.083.905,00

d) Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2021 adalah sebesar Rp1.008.741.150,00 atau 99,11% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.017.822.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 168 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	107.062.450,00	98.413.050,00	91,92	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	110.760.000,00	110.328.100,00	99,61	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	279.552.189,00
Jumlah		1.017.822.450,00	1.008.741.150,00	99,11	279.552.189,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp1.388.022.783,39 atau 98,08% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.415.202.351,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 169 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.000.000,00	2.375.000,00	47,50	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	143.466.644,00	142.994.810,00	99,67	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	97.153.257,00	96.818.923,39	99,66	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	106.000.000,00	91.332.900,00	86,16	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	107.062.450,00	98.413.050,00	91,92	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	156.520.000,00	156.088.100,00	99,72	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	279.552.189,00
Jumlah		1.415.202.351,00	1.388.022.783,39	98,08	279.552.189,00

e) Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 170 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	0,00	0,00	0,00	60.350.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	60.350.000,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp4.480.000,00 atau 100,00 % dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 171 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	0,00	0,00	0,00	60.350.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
2	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Alat Peraga Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	60.350.000,00

- 4) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 adalah sebesar Rp25.647.472.523,00 atau 66,48% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp38.577.071.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 172 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.577.071.500,00	25.647.472.523,00	66,48	22.776.086.219,00
Jumlah		38.577.071.500,00	25.647.472.523,00	66,48	22.776.086.219,00

- a) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tanah tahun 2021 adalah sebesar Rp25.647.472.523,00 atau 66,48% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp38.577.071.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 173 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.520.000,00	30.720.000,00	97,46	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.850.631.500,00	10.368.034.000,00	65,41	5.120.698.700,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	857.440.000,00	684.115.000,00	79,79	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.837.480.000,00	14.564.603.523,00	66,70	17.655.387.519,00
Jumlah		38.577.071.500,00	25.647.472.523,00	66,48	22.776.086.219,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar Rp26.289.201.713,00 atau 66,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp39.245.886.877,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 174 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	510.145.000,00	494.154.840,00	96,87	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.039.791.877,00	10.545.298.350,00	65,74	5.120.698.700,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	858.070.000,00	684.745.000,00	79,80	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.837.880.000,00	14.565.003.523,00	66,70	17.655.387.519,00
Jumlah		39.245.886.877,00	26.289.201.713,00	66,99	22.776.086.219,00

- 5) Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp26.342.475.416,00 atau 92,02% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp28.627.333.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 175 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.852.000.000,00	22.158.554.500,00	96,97	6.211.475.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.775.333.000,00	4.183.920.916,00	72,44	0,00
Jumlah		28.627.333.000,00	26.342.475.416,00	92,02	6.211.475.000,00

- a) Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp22.158.554.500,00 atau 96,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp22.852.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 176 Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	59.500.000,00	53.500.000,00	89,92	0,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.582.500.000,00	1.109.554.500,00	70,11	0,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.125.000.000,00	4.915.000.000,00	95,90	6.211.475.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	16.085.000.000,00	16.080.500.000,00	99,97	0,00
Jumlah		22.852.000.000,00	22.158.554.500,00	96,97	6.211.475.000,00

Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp16.080.500.000,00 merupakan bantuan uang tunai kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 177 Rincian Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)

No	Uraian	Jumlah Penerima	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok	17.745 orang	15.970.500.000,00
2	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	2 kelompok	110.000.000,00
Jumlah			16.080.500.000,00

Sedangkan penempatan rekening belanja transfer keuangan daerah pada jenis belanja barang dan jasa didasarkan kepada Pemetaan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

- b) Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp4.183.920.916,00 atau 72,44%

dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.775.333.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 178 Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.049.950.000,00	1.039.197.200,00	98,98	0,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.725.383.000,00	3.144.723.716,00	66,55	0,00
Jumlah		5.775.333.000,00	4.183.920.916,00	72,44	0,00

- 6) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2021 adalah sebesar Rp46.246.768.790,32 atau 99,46% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp46.496.202.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 179 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.496.202.685,00	46.246.768.790,32	99,46	50.138.822.923,64
Jumlah		46.496.202.685,00	46.246.768.790,32	99,46	50.138.822.923,64

Realisasi Barang dan Jasa BOS tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 180 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	00,00	50.138.822.923,64
Jumlah		0,00	0,00	00,00	50.138.822.923,64

- 7) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp102.074.211.513,85 atau 88,68% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp115.098.804.848,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 181 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.098.804.848,00	102.074.211.513,85	88,68	80.721.384.688,05
Jumlah		115.098.804.848,00	102.074.211.513,85	88,68	80.721.384.688,05

Realisasi Barang dan Jasa BLUD tahun 2021 setelah mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 182 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	80.721.384.688,05
Jumlah		0,00	0,00	0,00	80.721.384.688,05

- 8) Realisasi Belanja Lain-lain (Extracomp) Setelah Mapping tahun 2021 adalah sebesar Rp246.713.350,00 atau 94,18% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp261.972.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 183 Rincian Belanja Lain-lain (Extracomp) Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.026.900,00	1.026.900,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.826.000,00	1.826.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	44.120.000,00	31.640.000,00	71,71	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	215.000.000,00	212.220.450,00	98,71	0,00
Jumlah		261.972.900,00	246.713.350,00	94,18	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Setelah Mapping sebesar Rp444.016.600.988,70 atau 86,00% dari anggarannya sebesar Rp516.299.761.254,00 dengan obyek sebagai berikut :

Tabel 5 - 184 Rincian Belanja Barang dan Jasa Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	171.291.448.419,00	142.933.870.626,25	83,44	187.680.803.512,95
2	Belanja Jasa	253.514.142.754,00	226.789.040.375,06	89,46	201.912.700.388,76
3	Belanja Pemeliharaan	23.358.977.304,00	21.415.299.508,39	91,68	5.441.580.507,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	39.245.886.877,00	26.289.201.713,00	66,99	22.776.086.219,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.627.333.000,00	26.342.475.416,00	92,02	6.211.475.000,00
6	Belanja Lain-lain (Extracomp)	261.972.900,00	246.713.350,00	94,18	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	50.138.822.923,64
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	80.721.384.688,05
Jumlah		516.299.761.254,00	444.016.600.988,70	86,00	554.882.853.239,40

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00

Anggaran Belanja Subsidi tahun 2021 adalah sebesar Rp1.183.163.800,00 dan realisasinya sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Subsidi ini merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021, sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45/201/430.4.2/2021 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 00585/SP2D/2021 tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp1.183.163.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 185 Rincian Belanja Subsidi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00
	Jumlah	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	137.205.528.275,00	130.514.844.220,06	70.135.598.600,00

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pelaksanaan Belanja Hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 adalah sebesar Rp130.514.844.220,06 atau 95,12% dari anggarannya sebesar Rp137.205.528.275,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020 sebesar Rp70.135.598.600,00, realisasi belanja Hibah pada tahun 2021 sebesar Rp130.514.844.220,06 mengalami kenaikan sebesar Rp60.379.245.620,06 atau sebesar 86,09% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 186 Rincian Belanja Hibah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	496.892.520,00	99,38	0,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.369.707.892,00	15.254.041.000,00	99,25	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	119.560.368.383,00	112.988.458.700,06	94,50	70.135.598.600,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	137.205.528.275,00	130.514.844.220,06	95,12	70.135.598.600,00

Belanja hibah sebesar Rp130.514.844.220,06 terdiri dari :

Tabel 5 - 187 Rincian Penerima Belanja Hibah

No	Uraian	Penerima	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Instansi Vertikal	496.892.520,00	- Kejaksaan Negeri Bondowoso - Polres Bondowoso
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Pemerintah Desa/Kelurahan	15.254.041.000,00	- Penyediaan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	- Kelompok Masyarakat - Lembaga Pendidikan TK & PAUD - Anggota Masyarakat - Kelompok tani - Organisasi - Kelompok tani - Instansi Vertikal - Pemerintah Desa & RSUD - Anggota & Kelompok Masyarakat - Ponpes, Pemerintah Desa & Kelurahan - Kelurahan, Sekolah, Lembaga, Kelompok Masyarakat - Sekolah dan Desa	112.988.458.700,06	- Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Pertanian - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kelurahan Badean, Kelurahan Nangkaan, Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Dabasah, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Blindungan, Kelurahan Tenggarang, Kelurahan Sekarputih, Kelurahan Curahdami - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan - Bagian Kesejahteraan Masyarakat - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Partai Politik	1.775.452.000,00	- Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Gerindra - PDI-Perjuangan - Partai Golkar - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Persatuan Pembangunan

No	Uraian	Penerima	Realisasi (Rp)	Keterangan
				- Partai Amanat Nasional - Partai Demokrat
	Jumlah		130.514.844.220,06	

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Hibah tahun 2021 dengan anggarannya sebesar Rp137.205.528.275,00 dan realisasi sebesar Rp130.514.844.220,06 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 adalah sebesar Rp496.892.520,00 atau 99,38% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 188 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	496.892.520,00	99,38	0,00
	Jumlah	500.000.000,00	496.892.520,00	99,38	0,00

- a) Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 adalah sebesar Rp496.892.520,00 atau 99,38% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 189 Rincian Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	496.892.520,00	99,38	0,00
	Jumlah	500.000.000,00	496.892.520,00	99,38	0,00

- 2) Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp15.254.041.000,00 atau 99,25% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp15.369.707.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 190 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.369.707.892,00	15.254.041.000,00	99,25	0,00
	Jumlah	15.369.707.892,00	15.254.041.000,00	99,25	0,00

- a) Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp15.254.041.000,00 atau 99,25% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp15.369.707.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 191 Rincian Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.369.707.892,00	15.254.041.000,00	99,25	0,00
	Jumlah	15.369.707.892,00	15.254.041.000,00	99,25	0,00

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp15.254.041.000,00 merupakan pembangunan jalan lingkungan dan MCK yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa.

- 3) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2021 adalah sebesar Rp112.988.458.700,06 atau 94,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp119.560.368.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 192 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.533.930.080,00	28.410.784.315,67	96,20	70.135.598.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.840.077.300,00	29.377.492.888,37	95,26	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	59.186.361.003,00	55.200.181.496,02	93,27	0,00
Jumlah		119.560.368.383,00	112.988.458.700,06	94,50	70.135.598.600,00

- a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2021 adalah sebesar Rp28.410.784.315,67 atau 96,20% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp29.533.930.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 193 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.353.979.780,00	24.554.600.000,00	96,85	70.135.598.600,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.179.950.300,00	3.856.184.315,67	92,25	0,00
Jumlah		29.533.930.080,00	28.410.784.315,67	96,20	70.135.598.600,00

- b) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2021 adalah sebesar Rp29.377.492.888,37 atau 95,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp30.840.077.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 194 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.644.985.000,00	25.292.800.000,00	94,93	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.195.092.300,00	4.084.692.888,37	97,37	0,00
Jumlah		30.840.077.300,00	29.377.492.888,37	95,26	0,00

- c) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2021 adalah sebesar Rp55.200.181.496,02 atau 93,27% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp59.186.361.003,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 195 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.237.053.558,00	17.209.317.383,00	99,84	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	41.949.307.445,00	37.990.864.113,02	90,56	0,00
Jumlah		59.186.361.003,00	55.200.181.496,02	93,27	0,00

Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran 1.

- 4) Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2021 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.775.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 196 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	0,00

- a) Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2021 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.775.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 197 Rincian Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	0,00

Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.775.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 198 Rincian Penyaluran Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	551.888.000,00
2	Partai Gerindra	167.184.000,00
3	PDI-Perjuangan	317.604.000,00
4	Partai Golkar	206.256.000,00
5	Partai Keadilan Sejahterah	136.744.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	244.076.000,00
7	Partai Amanat Nasional	76.680.000,00
8	Partai Demokrat	75.020.000,00
Jumlah		1.775.452.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	47.042.114.650,00	35.217.459.036,80	2.332.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 adalah sebesar Rp35.217.459.036,80 atau 74,86% dari anggarannya sebesar Rp47.042.114.650,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp2.332.500.000,00 realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp35.217.459.036,80 mengalami kenaikan sebesar Rp32.884.959.036,80 atau sebesar 1.409,86% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 199 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.574.271.800,00	13.087.574.036,80	96,41	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	563.100.000,00	562.725.000,00	99,93	10.000.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	32.904.742.850,00	21.567.160.000,00	65,54	2.322.500.000,00
Jumlah		47.042.114.650,00	35.217.459.036,80	74,86	2.332.500.000,00

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 dengan anggarannya sebesar Rp47.042.114.650,00 dan realisasi sebesar Rp35.217.459.036,80 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2021 adalah sebesar Rp13.087.574.036,80 atau 96,41% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp13.574.271.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 200 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.438.400.000,00	2.438.400.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	11.135.871.800,00	10.649.174.036,80	95,63	0,00
Jumlah		13.574.271.800,00	13.087.574.036,80	96,41	0,00

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu tahun 2021 adalah sebesar Rp2.438.400.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.438.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 201 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.438.400.000,00	2.438.400.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.438.400.000,00	2.438.400.000,00	100,00	0,00

Realisasi belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp2.438.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 202 Rincian Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

No	Uraian	Jumlah Penerima (Orang)	Realisasi 2021 (Rp)	Keterangan
1	Warga Kelurahan Badean	518	310.800.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
2	Warga Kelurahan Nangkaan	417	250.200.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
3	Warga Kelurahan Kotakulon	388	232.800.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
4	Warga Kelurahan Tamansari	405	243.000.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)

No	Uraian	Jumlah Penerima (Orang)	Realisasi 2021 (Rp)	Keterangan
5	Warga Kelurahan Dabasah	376	225.600.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
6	Warga Kelurahan Kademangan	539	323.400.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
7	Warga Kelurahan Blindungan	465	279.000.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
8	Warga Kelurahan Tenggarang	415	249.000.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
9	Warga Kelurahan Sekarputih	341	204.600.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
10	Warga Kelurahan Curahdami	200	120.000.000,00	Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Jumlah		4.064	2.438.400.000,00	

- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu tahun 2021 adalah sebesar Rp10.649.174.036,80 atau 95,63% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.135.871.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 203 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	11.135.871.800,00	10.649.174.036,80	95,63	0,00
Jumlah		11.135.871.800,00	10.649.174.036,80	95,63	0,00

- 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp562.725.000,00 atau 99,93% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp563.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 204 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	563.100.000,00	562.725.000,00	99,93	0,00
Jumlah		563.100.000,00	562.725.000,00	99,93	10.000.000,00

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 205 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp562.725.000,00 atau 99,93% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp563.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 206 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	563.100.000,00	562.725.000,00	99,93	0,00
Jumlah		563.100.000,00	562.725.000,00	99,93	0,00

Realisasi belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp562.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 207 Rincian Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	Uraian	Jumlah Penerima	Realisasi 2021 (Rp)	Keterangan
1	Pompa air	73	525.600.000,00	Kelompok tani
2	Paket Sembako	150	37.125.000	Anggota Masyarakat
Jumlah		223	562.725.000,00	

- 3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2021 adalah sebesar Rp21.567.160.000,00 atau 65,54% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.904.742.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 208 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	32.656.742.850,00	21.320.200.000,00	65,29	2.322.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	248.000.000,00	246.960.000,00	99,58	0,00
Jumlah		32.904.742.850,00	21.567.160.000,00	65,54	2.322.500.000,00

- f) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2021 adalah sebesar Rp21.320.200.000,00 atau 65,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.656.742.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 209 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	32.656.742.850,00	21.320.200.000,00	65,29	2.322.500.000,00
Jumlah		32.656.742.850,00	21.320.200.000,00	65,29	2.322.500.000,00

g) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2021 adalah sebesar Rp246.960.000,00 atau 99,58% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp248.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 210 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	248.000.000,00	246.960.000,00	99,58	0,00
Jumlah		248.000.000,00	246.960.000,00	99,58	0,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.2 BELANJA MODAL	227.661.304.718,00	196.554.645.695,81	227.251.278.052,52

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp196.554.645.695,81 atau 86,34% dari anggarannya sebesar Rp227.661.304.718,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp227.251.278.052,52, realisasi Belanja Modal pada tahun 2021 sebesar Rp196.554.645.695,81 mengalami penurunan sebesar Rp30.696.632.356,71 atau sebesar 13,51% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 211 Jenis Belanja Modal

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.123.644.065,00	95.221.279.024,00	87,26	104.183.050.562,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.954.344.213,00	42.446.436.867,21	86,71	70.038.377.021,89
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.663.470.295,00	51.677.563.443,60	83,81	43.648.432.279,63

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.093.846.145,00	7.025.222.811,00	99,03	8.409.927.669,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	826.000.000,00	184.143.550,00	22,29	971.490.520,00
Jumlah		227.661.304.718,00	196.554.645.695,81	86,34	227.251.278.052,52

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.123.644.065,00	95.221.279.024,00	104.183.050.562,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp95.221.279.024,00 atau 87,26% dari anggaran sebesar Rp109.123.644.065,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp104.183.050.562,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 sebesar Rp95.221.279.024,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.961.771.538,00 atau 8,60% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 212 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping

No	Uraian	Sebelum Mapping			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	
A	Belanja Modal Alat Besar	324.520.100,00	128.065.000,00	39,46	75.595.086,00
1	Belanja Modal Alat Pengangkat	190.000.000,00	0,00	0,00	74.995.086,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	50.500.000,00	49.885.000,00	98,78	0,00
3	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	44.020.100,00	39.400.000,00	89,50	0,00
4	Belanja Modal Pompa	38.000.000,00	36.780.000,00	96,79	600.000,00
5	Belanja Modal Mesin Bor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Feeder	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	2.405.822.200,00	1.710.180.600,00	71,09	4.049.008.700,00
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.185.689.600,00	608.274.200,00	51,30	989.065.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	520.341.700,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.153.200,00	40.587.600,00	54,73	355.812.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	123.600.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	831.731.200,00	750.168.000,00	90,19	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	128.928.200,00	125.830.800,00	97,60	0,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	10.320.000,00	10.320.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.034.230.000,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	224.183.180,00	214.598.000,00	95,72	235.298.900,00
1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	115.169.800,00	113.630.000,00	98,66	0,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	650.000,00	649.000,00	99,85	0,00
7	Belanja Modal Peralatan Tukang	1.962.800,00	981.400,00	50,00	0,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase	Realisasi 2020
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
	Kayu				
8	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.576.600,00	6.935.500,00	91,54	0,00
9	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Ukur Universal	3.458.600,00	0,00	0,00	15.950.000,00
11	Belanja Modal Universal Tester	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.499.850,00	1.494.900,00	99,67	400.000,00
13	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	44.528.000,00	98,95	0,00
14	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	16.918.400,00	16.918.400,00	100,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	31.947.130,00	29.460.800,00	92,22	0,00
16	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00
20	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	199.302.000,00
21	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	926.900,00
22	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
D	Belanja Modal Alat Pertanian	93.546.000,00	72.892.800,00	77,92	182.962.400,00
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	85.838.200,00	67.040.000,00	78,10	0,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.250.000,00	4.395.000,00	70,32	177.781.400,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.457.800,00	1.457.800,00	100,00	5.181.000,00
4	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.371.346.480,00	10.864.115.326,00	59,14	11.006.263.903,00
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.340.520.720,00	1.119.807.920,00	83,54	787.455.998,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.992.958.375,00	3.237.410.780,00	81,08	4.118.570.040,00
4	Belanja Modal Mebel	2.849.071.570,00	2.687.780.231,00	94,34	2.684.034.390,00
5	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.094.000,00	1.990.000,00	95,03	1.050.000,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	73.960.940,00	60.500.000,00	81,80	150.868.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	1.526.092.830,00	1.357.399.430,00	88,95	1.999.910.272,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	167.221.990,00	131.420.000,00	78,59	37.673.600,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.595.589.173,00	1.501.889.175,00	19,77	1.056.241.603,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	305.565.432,00	287.692.830,00	94,15	99.600.000,00
11	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.249.800,00	109.665.000,00	99,47	22.595.000,00
12	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	57.039.170,00	55.050.000,00	96,51	0,00
13	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	45.521.200,00	44.665.000,00	98,12	17.500.000,00
14	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	183.460.900,00	177.244.000,00	96,61	0,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
15	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	63.748.900,00	63.385.960,00	99,43	0,00
16	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	58.251.480,00	28.215.000,00	48,44	30.765.000,00
17	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.099.234.180,00	2.963.366.269,00	95,62	3.159.006.700,00
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	447.043.490,00	404.817.310,00	90,55	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	619.522.200,00	573.287.950,00	92,54	2.800.000.700,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	138.133.600,00	125.569.700,00	90,90	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.042.500,00	1.050.000,00	25,97	0,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	222.150.410,00	219.329.909,00	98,73	0,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	38.938.280,00	34.447.400,00	88,47	332.506.000,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	57.989.850,00	47.550.000,00	82,00	10.000.000,00
8	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	170.200.000,00	165.798.000,00	97,41	0,00
9	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.347.651.650,00	1.338.040.000,00	99,29	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	50.000.000,00	49.951.000,00	99,90	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	3.562.200,00	3.525.000,00	98,96	0,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.427.731.049,00	33.027.641.609,00	93,23	21.359.034.546,00
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.079.124.508,00	1.168.814.753,00	56,22	6.059.144.075,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	256.429.341,00	202.400.000,00	78,93	20.142.000,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	3.657.340,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.970.593.287,00	2.688.349.124,00	90,50	2.637.071.920,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.017.539.100,00	3.696.866.858,00	92,02	1.853.536.471,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	1.172.974.819,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	607.338.550,00	544.141.154,00	89,59	79.508.000,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	209.774.980,00	187.979.940,00	89,61	4.994.698.400,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.968.268.713,00	2.813.075.070,00	94,77	1.150.569.974,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	36.802.660,00	26.980.000,00	73,31	0,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	274.196.890,00	195.606.000,00	71,34	0,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	20.325.000.000,00	20.070.578.240,00	98,75	988.955.400,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	24.009.810,00	10.120.000,00	42,15	467.728.909,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.103.345.870,00	871.080.470,00	78,95	30.635.000,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase	Realisasi 2020
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
16	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	831.050.000,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	1.073.019.578,00
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.490.920.005,00	4.076.704.506,00	90,78	1.975.059.248,00
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	22.272.200,00	22.200.000,00	99,68	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	15.200.000,00	990.000,00	6,51	189.981.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	147.805.000,00	127.736.999,00	86,42	156.960.199,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	250.591.393,00	241.498.370,00	96,37	94.244.500,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.920.000.000,00	1.891.096.132,00	98,49	866.900.000,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	50.022.400,00	37.005.000,00	73,98	0,00
8	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	413.517.500,00	380.692.500,00	92,06	0,00
9	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	5.000.000,00	3.980.000,00	79,60	0,00
10	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	49.273.700,00	48.595.000,00	98,62	0,00
11	Alat Kesehatan Kerja	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	124.628.000,00	87.094.000,00	69,88	187.550.000,00
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	160.000.000,00	156.200.000,00	97,63	0,00
14	Belanja Modal Peralatan Umum	19.654.000,00	19.225.000,00	97,82	0,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	1.250.000.000,00	1.002.330.006,00	80,19	0,00
16	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	62.355.812,00	57.461.499,00	92,15	0,00
17	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	7.524.000,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	29.850.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	81.741.990,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00	2.590.500,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	91.847.200,00
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	87.761.800,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	168.273.059,00
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	0,00	0,00	9.835.000,00
I	Belanja Modal Komputer	8.240.919.891,00	7.313.939.537,00	88,75	33.807.548.906,00
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	95.162.000,00	20.000.000,00	21,02	0,00
2	Belanja Modal Personal	2.118.076.600,00	1.895.489.200,00	89,49	25.524.452.280,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
	Computer				
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.668.721.931,00	3.355.091.876,00	91,45	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	104.769.580,00	79.002.400,00	75,41	4.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	63.575.000,00	59.149.000,00	93,04	67.150.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.412.041.160,00	1.209.855.260,00	85,68	3.430.971.157,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	446.709.820,00	429.892.600,00	96,24	4.780.975.469,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	331.863.800,00	265.459.201,00	79,99	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.568.940,00	1.975.000,00	76,88	0,00
-	Belanja Modal Elektronik/Electric	2.568.940,00	1.975.000,00	76,88	0,00
K	Belanja Modal Alat Pengeboran	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
-	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
L	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	64.882.500,00	62.404.500,00	96,18	171.394.500,00
1	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Sepatu Lapangan	37.500.000,00	35.454.500,00	94,55	0,00
4	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	19.682.500,00	19.250.000,00	97,80	171.394.500,00
5	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00
M	Belanja Modal Alat Peraga	459.008.400,00	400.340.300,00	87,22	2.118.151.996,00
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	149.563.400,00	99.275.000,00	66,38	0,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	309.445.000,00	301.065.300,00	97,29	0,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	0,00	0,00	37.098.600,00
10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	112.781.960,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	181.780.938,00
12	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.001.619.598,00
13	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	784.870.900,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
N	Belanja Modal Rambu-Rambu	729.676.200,00	684.986.600,00	93,88	0,00
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	166.255.300,00	163.911.000,00	98,59	0,00
2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	563.420.900,00	521.075.600,00	92,48	0,00
O	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.103.000,00	28.103.000,00	100,00	0,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	28.103.000,00	28.103.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.354.450.940,00	12.325.345.533,00	0,00	16.281.738.427,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.354.450.940,00	12.325.345.533,00	0,00	16.281.738.427,00
Q	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.801.731.000,00	21.341.670.444,00	0,00	9.761.987.250,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.801.731.000,00	21.341.670.444,00	0,00	9.761.987.250,00
JUMLAH		109.123.644.065,00	95.221.279.024,00	87,26	104.183.050.562,00

Pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp95.221.279.024,00 didalamnya terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang dicatat secara tidak rinci yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp12.325.345.533,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp21.341.670.444,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat secara tidak rinci.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp12.325.345.533,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 213 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pompa	46.603.800,00	46.603.800,00
2	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	13.530.200,00	13.420.200,00
3	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	136.958.219,00	136.218.800,00
4	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	37.247.800,00	37.247.800,00
5	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	14.211.200,00	14.066.200,00
6	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.000.000,00	8.000.000,00
7	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.846.162.596,00	1.837.621.675,00
8	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.060.709.913,00	1.056.273.052,00
9	Belanja Modal Mebel	3.003.717.635,00	2.999.886.550,00
10	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	52.135.000,00	52.122.500,00
11	Belanja Modal Alat Pembersih	39.550.164,00	39.449.500,00
12	Belanja Modal Alat Pendingin	459.083.402,00	458.870.402,00
13	Belanja Modal Alat Dapur	4.706.600,00	4.706.600,00
14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.034.760.203,00	1.034.038.800,00
15	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.485.000,00	1.485.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	57.403.500,00	57.278.500,00
17	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	126.741.000,00	126.491.000,00
18	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.442.000,00	3.442.000,00
19	Belanja Modal Sumber Tenaga	161.316.200,00	161.316.200,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.052.500,00	2.052.500,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	6.007.000,00	6.007.000,00
22	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	550.000,00	550.000,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	711.000,00	711.000,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	73.569.077,00	73.556.000,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	3.980.500,00	3.980.500,00
26	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	20.151.700,00	20.151.700,00
27	Belanja Modal Personal Computer	2.586.434.048,00	2.581.611.450,00
28	Belanja Modal Peralatan Mainframe	13.452.500,00	13.452.500,00
29	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	6.523.000,00	6.523.000,00
30	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.083.918.146,00	1.081.268.850,00
31	Belanja Modal Peralatan Jaringan	128.678.262,00	128.143.254,00
32	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	117.406.984,00	116.701.800,00
33	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	36.340.000,00	36.340.000,00
34	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.980.000,00	1.980.000,00
35	Belanja Modal Peralatan Permainan	161.491.791,00	160.337.400,00
36	Belanja Modal Peralatan Senam	3.440.000,00	3.440.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Setelah Mapping		12.354.450.940,00	12.325.345.533,00

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp21.341.670.444,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 214 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Feeder	980.000.000,00	972.000.000,00
2	Belanja Modal Compressor	812.000.000,00	698.425.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	541.050.000,00	530.734.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	159.339.900,00	138.942.914,00
5	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	29.000.000,00	15.070.000,00
6	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	10.000.000,00	8.858.430,00
7	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	20.000.000,00	19.030.000,00
8	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	120.000.000,00	119.000.000,00
9	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	156.711.000,00	125.091.600,00
10	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	471.741.300,00	411.200.000,00
11	Belanja Modal Mebel	865.955.500,00	761.985.480,00
12	Belanja Modal Alat Pembersih	410.606.958,00	384.890.800,00
13	Belanja Modal Alat Pendingin	3.303.176.000,00	2.906.963.800,00
14	Belanja Modal Alat Dapur	10.000.000,00	7.150.000,00
15	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	365.245.000,00	313.450.000,00
16	Belanja Modal Personal Computer	322.806.000,00	318.906.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	456.800.000,00	451.744.500,00
18	Belanja Modal Peralatan Jaringan	630.355.500,00	604.360.500,00
19	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.342.300.000,00	1.192.900.000,00
20	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.520.000,00	25.520.000,00
21	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	233.000.000,00	154.000.000,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.170.702.994,00	1.100.435.746,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	18.000.000,00	7.115.900,00
24	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	16.000.000,00	15.290.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	6.236.506.000,00	6.122.316.865,00
26	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	97.679.000,00	97.679.000,00
27	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	669.624.946,00	579.044.646,00
28	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	74.750.100,00	74.750.100,00
29	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	413.583.260,00	413.582.960,00
30	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	666.699.000,00	666.699.000,00
31	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	65.900.000,00	65.893.200,00
32	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.611.108.000,00	1.568.500.000,00
33	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	68.070.000,00	68.069.061,00
34	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	68.000.000,00	68.000.000,00
35	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	243.000.000,00	241.497.900,00
36	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	4.893.042,00	4.893.042,00
37	Belanja Modal Baju Pengaman	15.000.000,00	15.000.000,00
38	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	85.000.000,00	62.230.000,00
39	Belanja Modal Peralatan Permainan	11.607.500,00	10.450.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Setelah Mapping		22.801.731.000,00	21.341.670.444,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Mapping Tahun 2021 sebesar Rp95.221.279.024,00 atau 87,26% dari anggaran sebesar Rp109.123.644.065,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp104.183.050.562,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 sebesar Rp95.221.279.024,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.961.771.538,00 atau 8,60% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 215 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Mapping

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Alat Besar	2.163.123.900,00	1.845.093.800,00	85,30	75.595.086,00
1	Belanja Modal Alat Pengangkat	190.000.000,00	0,00	0,00	74.995.086,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	50.500.000,00	49.885.000,00	98,78	0,00
3	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	44.020.100,00	39.400.000,00	89,50	0,00
4	Belanja Modal Pompa	84.603.800,00	83.383.800,00	98,56	600.000,00
5	Belanja Modal Mesin Bor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Feeder	980.000.000,00	972.000.000,00	99,18	0,00
7	Belanja Modal Compressor	812.000.000,00	698.425.000,00	86,01	0,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	3.119.742.300,00	2.393.277.714,00	76,71	4.049.008.700,00
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.185.689.600,00	608.274.200,00	51,30	989.065.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	520.341.700,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	615.203.200,00	571.321.600,00	92,87	355.812.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	123.600.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	831.731.200,00	750.168.000,00	90,19	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	301.798.300,00	278.193.914,00	92,18	0,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	10.320.000,00	10.320.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.034.230.000,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
	Apung Tak Bermotor Khusus				
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	420.141.399,00	393.775.230,00	93,72	235.298.900,00
1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	115.169.800,00	113.630.000,00	98,66	0,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	650.000,00	649.000,00	99,85	0,00
7	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.962.800,00	981.400,00	50,00	0,00
8	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.576.600,00	6.935.500,00	91,54	0,00
9	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Ukur Universal	3.458.600,00	0,00	0,00	15.950.000,00
11	Belanja Modal Universal Tester	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	21.499.850,00	20.524.900,00	95,47	400.000,00
13	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	44.528.000,00	98,95	0,00
14	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	16.918.400,00	16.918.400,00	100,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	31.947.130,00	29.460.800,00	92,22	0,00
16	Belanja Modal Alat Ukur/Pembandingan	146.958.219,00	145.077.230,00	98,72	0,00
17	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	29.000.000,00	15.070.000,00	51,97	0,00
18	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00
20	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	199.302.000,00
21	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	926.900,00
22	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
D	Belanja Modal Alat Pertanian	130.793.800,00	110.140.600,00	84,21	182.962.400,00
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	85.838.200,00	67.040.000,00	78,10	0,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	43.497.800,00	41.642.800,00	95,74	177.781.400,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.457.800,00	1.457.800,00	100,00	5.181.000,00
4	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.599.303.951,00	23.400.367.285,00	74,05	11.006.263.903,00
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	14.211.200,00	14.066.200,00	98,98	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.343.394.316,00	3.082.521.195,00	92,20	787.455.998,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.525.409.588,00	4.704.883.832,00	85,15	4.118.570.040,00
4	Belanja Modal Mebel	6.718.744.705,00	6.449.652.261,00	95,99	2.684.034.390,00
5	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	54.229.000,00	54.112.500,00	99,79	1.050.000,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase	Realisasi 2020
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
6	Belanja Modal Alat Pembersih	524.118.062,00	484.840.300,00	92,51	150.868.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	5.288.352.232,00	4.723.233.632,00	89,31	1.999.910.272,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	181.928.590,00	143.276.600,00	78,75	37.673.600,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.995.594.376,00	2.849.377.975,00	31,68	1.056.241.603,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	307.050.432,00	289.177.830,00	94,18	99.600.000,00
11	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.249.800,00	109.665.000,00	99,47	22.595.000,00
12	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	57.039.170,00	55.050.000,00	96,51	0,00
13	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	45.521.200,00	44.665.000,00	98,12	17.500.000,00
14	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	183.460.900,00	177.244.000,00	96,61	0,00
15	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	63.748.900,00	63.385.960,00	99,43	0,00
16	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	58.251.480,00	28.215.000,00	48,44	30.765.000,00
17	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	128.000.000,00	127.000.000,00	99,22	0,00
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.887.640.680,00	4.522.997.769,00	92,54	3.159.006.700,00
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.846.746.990,00	1.654.995.810,00	89,62	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	771.783.200,00	725.298.950,00	93,98	2.800.000.700,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	138.133.600,00	125.569.700,00	90,90	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.042.500,00	1.050.000,00	25,97	0,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	222.150.410,00	219.329.909,00	98,73	0,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	275.380.280,00	191.889.400,00	69,68	332.506.000,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	57.989.850,00	47.550.000,00	82,00	10.000.000,00
8	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	170.200.000,00	165.798.000,00	97,41	0,00
9	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.347.651.650,00	1.338.040.000,00	99,29	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	50.000.000,00	49.951.000,00	99,90	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	3.562.200,00	3.525.000,00	98,96	0,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	47.010.723.049,00	44.279.884.687,00	94,19	21.359.034.546,00
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.251.880.002,00	2.271.302.999,00	69,85	6.059.144.075,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	274.429.341,00	209.515.900,00	76,35	20.142.000,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	3.657.340,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	9.207.099.287,00	8.810.665.989,00	95,69	2.637.071.920,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.115.218.100,00	3.794.545.858,00	92,21	1.853.536.471,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	1.172.974.819,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	623.338.550,00	559.431.154,00	89,75	79.508.000,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	879.399.926,00	767.024.586,00	87,22	4.994.698.400,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	3.381.851.973,00	3.226.658.030,00	95,41	1.150.569.974,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	36.802.660,00	26.980.000,00	73,31	0,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	340.096.890,00	261.499.200,00	76,89	0,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	21.936.108.000,00	21.639.078.240,00	98,65	988.955.400,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	24.009.810,00	10.120.000,00	42,15	467.728.909,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.103.345.870,00	871.080.470,00	78,95	30.635.000,00
16	Belanja Modal Sumber Tenaga	161.316.200,00	161.316.200,00	100,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	74.750.100,00	74.750.100,00	100,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	666.699.000,00	666.699.000,00	100,00	831.050.000,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	68.070.000,00	68.069.061,00	100,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	243.000.000,00	241.497.900,00	99,38	0,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	1.073.019.578,00
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.495.813.047,00	4.081.597.548,00	90,79	1.975.059.248,00
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	22.272.200,00	22.200.000,00	99,68	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	15.200.000,00	990.000,00	6,51	189.981.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	147.805.000,00	127.736.999,00	86,42	156.960.199,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	250.591.393,00	241.498.370,00	96,37	94.244.500,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.920.000.000,00	1.891.096.132,00	98,49	866.900.000,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	50.022.400,00	37.005.000,00	73,98	0,00
8	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	413.517.500,00	380.692.500,00	92,06	0,00
9	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	5.000.000,00	3.980.000,00	79,60	0,00
10	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	49.273.700,00	48.595.000,00	98,62	0,00
11	Alat Kesehatan Kerja	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	124.628.000,00	87.094.000,00	69,88	187.550.000,00
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	160.000.000,00	156.200.000,00	97,63	0,00
14	Belanja Modal Peralatan Umum	19.654.000,00	19.225.000,00	97,82	0,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	1.250.000.000,00	1.002.330.006,00	80,19	0,00
16	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	62.355.812,00	57.461.499,00	92,15	0,00
17	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	4.893.042,00	4.893.042,00	100,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	7.524.000,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	29.850.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	81.741.990,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.590.500,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
	Makanan				
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	91.847.200,00
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	87.761.800,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	168.273.059,00
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	0,00	0,00	9.835.000,00
I	Belanja Modal Komputer	13.587.294.331,00	12.616.651.391,00	92,86	33.807.548.906,00
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	95.162.000,00	20.000.000,00	21,02	0,00
2	Belanja Modal Personal Computer	5.027.316.648,00	4.796.006.650,00	95,40	25.524.452.280,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.668.721.931,00	3.355.091.876,00	91,45	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	118.222.080,00	92.454.900,00	78,20	4.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	63.575.000,00	59.149.000,00	93,04	67.150.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.952.759.306,00	2.742.868.610,00	92,89	3.430.971.157,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.205.743.582,00	1.162.396.354,00	96,40	4.780.975.469,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	449.270.784,00	382.161.001,00	85,06	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	6.523.000,00	6.523.000,00	100,00	0,00
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.568.940,00	1.975.000,00	76,88	0,00
-	Belanja Modal Elektronik/Electric	2.568.940,00	1.975.000,00	76,88	0,00
K	Belanja Modal Alat Pengeboran	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
-	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
L	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	201.222.500,00	175.974.500,00	87,45	171.394.500,00
1	Belanja Modal Baju Pengaman	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Sepatu Lapangan	37.500.000,00	35.454.500,00	94,55	0,00
4	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	104.682.500,00	81.480.000,00	77,84	171.394.500,00
5	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	44.040.000,00	44.040.000,00	100,00	0,00
M	Belanja Modal Alat Peraga	563.977.677,00	505.296.500,00	89,60	2.118.151.996,00
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	149.563.400,00	99.275.000,00	66,38	0,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	309.445.000,00	301.065.300,00	97,29	0,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	6.007.000,00	6.007.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	711.000,00	711.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	73.569.077,00	73.556.000,00	99,98	0,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	3.980.500,00	3.980.500,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang	20.151.700,00	20.151.700,00	100,00	0,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
	Studi:PKN				
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	0,00	0,00	37.098.600,00
10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	112.781.960,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	181.780.938,00
12	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.001.619.598,00
13	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	784.870.900,00
N	Belanja Modal Rambu-Rambu	731.656.200,00	686.966.600,00	93,89	0,00
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	166.255.300,00	163.911.000,00	98,59	0,00
2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	565.400.900,00	523.055.600,00	92,51	0,00
O	Belanja Modal Peralatan Olahraga	204.642.291,00	202.330.400,00	98,87	0,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	28.103.000,00	28.103.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Permainan	161.491.791,00	160.337.400,00	99,29	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Senam	3.440.000,00	3.440.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Permainan	11.607.500,00	10.450.000,00	90,03	0,00
P	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.281.738.427,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.281.738.427,00
Q	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	9.761.987.250,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	9.761.987.250,00
JUMLAH		109.123.644.065,00	95.221.279.024,00	87,26	104.183.050.562,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.954.344.213,00	42.446.436.867,21	70.038.377.021,89

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp42.446.436.867,21 atau 86,71% dari anggaran sebesar Rp48.954.344.213,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp70.038.377.021,89, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2021 sebesar Rp42.446.436.867,21 mengalami penurunan sebesar Rp27.591.940.154,68 atau 39,40% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 216 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.905.084.625,00	37.917.613.958,05	88,38	68.395.291.721,89
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.263.893.225,00	31.734.009.485,86	87,51	15.426.088.493,24
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	6.314.000,00	6.250.000,00	98,99	0,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.299.013.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	299.330.000,00	191.234.000,00	63,89	20.049.004.993,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	197.844.000,00	98,92	49.760.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	199.323.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	19.416.145.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	323.815.000,00	303.754.000,00	93,80	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.220.000,00	69.678.000,00	99,23	199.464.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	3.160.133.000,00
11	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	2.087.439.045,65
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.127.352.700,00	3.105.239.850,00	99,29	0,00
13	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.393.481.700,00	1.106.461.633,40	79,40	0,00
14	Belanja Modal Taman	46.010.000,00	45.409.125,00	98,69	0,00
15	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	200.000.000,00	198.596.000,00	99,30	289.976.000,00
16	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	974.668.000,00	959.137.863,79	98,41	322.732.000,00
17	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	652.753.800,00
18	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	1.832.202.000,00
19	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.411.257.390,00
B	Belanja Modal Monumen	292.600.000,00	291.714.053,16	99,70	84.650.000,00
-	Belanja Modal Tugu	292.600.000,00	291.714.053,16	99,70	84.650.000,00
C	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	647.919.588,00	631.635.109,00	97,49	511.951.300,00
-	Belanja Modal Pagar	647.919.588,00	631.635.109,00	97,49	511.951.300,00
D	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.108.740.000,00	3.605.473.747,00	70,57	1.046.484.000,00
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.108.740.000,00	3.605.473.747,00	70,57	1.046.484.000,00
JUMLAH		48.954.344.213,00	42.446.436.867,21	86,71	70.038.377.021,89

Pada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp42.446.436.867,21 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dicatat secara tidak rinci yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp3.605.473.747,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dicatat secara tidak rinci.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp3.605.473.747,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 217 Rincian Mapping Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.015.652.250,00	734.055.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	669.322.500,00	444.750.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.370.087.000,00	1.802.120.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Parkir	286.457.750,00	138.458.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	231.135.250,00	94.200.000,00
6	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	291.200.000,00	286.690.747,00
7	Belanja Modal Pagar	244.885.250,00	105.200.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Setelah Mapping		5.108.740.000,00	3.605.473.747,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Mapping Tahun 2021 sebesar Rp42.446.436.867,21 atau 86,71% dari anggaran sebesar Rp48.954.344.213,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp70.038.377.021,89 realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2021 sebesar Rp42.446.436.867,21 mengalami penurunan sebesar Rp27.591.940.154,68 atau 39,40% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 218 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Mapping

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.768.939.375,00	41.417.887.705,05	86,70	68.395.291.721,89
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	37.279.545.475,00	32.468.064.485,86	87,09	15.426.088.493,24
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	675.636.500,00	451.000.000,00	66,75	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.299.013.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.669.417.000,00	1.993.354.000,00	74,67	20.049.004.993,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	197.844.000,00	98,92	49.760.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	199.323.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	19.416.145.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung	323.815.000,00	303.754.000,00	93,80	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	70.220.000,00	69.678.000,00	99,23	199.464.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	3.160.133.000,00
11	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	2.087.439.045,65
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.127.352.700,00	3.105.239.850,00	99,29	0,00
13	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.679.939.450,00	1.244.919.633,40	74,11	0,00
14	Belanja Modal Taman	46.010.000,00	45.409.125,00	98,69	0,00
15	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	200.000.000,00	198.596.000,00	99,30	289.976.000,00
16	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	974.668.000,00	959.137.863,79	98,41	322.732.000,00
17	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	291.200.000,00	286.690.747,00	98,45	652.753.800,00
18	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	1.832.202.000,00
19	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	231.135.250,00	94.200.000,00	40,76	1.411.257.390,00
B	Belanja Modal Monumen	292.600.000,00	291.714.053,16	99,70	84.650.000,00
-	Belanja Modal Tugu	292.600.000,00	291.714.053,16	99,70	84.650.000,00
C	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	892.804.838,00	736.835.109,00	82,53	511.951.300,00
-	Belanja Modal Pagar	892.804.838,00	736.835.109,00	82,53	511.951.300,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
D	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	1.046.484.000,00
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	1.046.484.000,00
	JUMLAH	48.954.344.213,00	42.446.436.867,21	86,71	70.038.377.021,89

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.663.470.295,00	51.677.563.443,60	43.648.432.279,63

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 sebesar Rp51.677.563.443,60 atau 83,81 % dari anggaran sebesar Rp61.663.470.295,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp43.648.432.279,63, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2021 sebesar Rp51.677.563.443,60 mengalami kenaikan sebesar Rp8.029.131.163,97 atau 18,40% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 219 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.386.215.095,00	37.698.602.838,60	84,93	24.448.681.998,94
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.337.958.295,00	36.760.755.738,60	84,82	24.448.681.998,94
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.048.256.800,00	937.847.100,00	89,47	0,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	15.490.386.200,00	12.527.534.845,00	80,87	17.094.813.830,69
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.577.329.000,00	1.070.270.300,00	67,85	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	13.006.372.000,00	10.556.697.800,00	81,17	14.792.587.201,54
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	400.000.000,00	398.439.520,00	99,61	1.212.187.029,15
4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	400.000.000,00	396.423.750,00	99,11	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	106.685.200,00	105.703.475,00	99,08	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	733.470.600,00
7	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	349.069.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
C	Belanja Modal Instalasi	112.369.000,00	111.259.260,00	99,01	59.558.000,00
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	7.000.000,00	6.900.000,00	98,57	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	55.369.000,00	54.809.260,00	98,99	15.000.000,00
3	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Instalasi Lain	50.000.000,00	49.550.000,00	99,10	0,00
5	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	36.858.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
D	Belanja Modal Jaringan	611.500.000,00	608.976.500,00	0,00	1.340.567.550,00
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	1.266.067.550,00

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	611.500.000,00	608.976.500,00	99,59	0,00
3	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00
E	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	1.063.000.000,00	731.190.000,00	68,79	704.810.900,00
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	1.063.000.000,00	731.190.000,00	68,79	704.810.900,00
	JUMLAH	61.663.470.295,00	51.677.563.443,60	83,81	43.648.432.279,63

Pada realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD tahun 2021 sebesar Rp731.190.000,00 dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD menjadi Belanja Modal Jaringan Distribusi sebesar Rp731.190.000,00 sebagai berikut :

Tabel 5 - 220 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.386.215.095,00	37.698.602.838,60	84,93	24.448.681.998,94
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.337.958.295,00	36.760.755.738,60	84,82	24.448.681.998,94
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.048.256.800,00	937.847.100,00	89,47	0,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	15.490.386.200,00	12.527.534.845,00	80,87	17.094.813.830,69
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.577.329.000,00	1.070.270.300,00	67,85	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	13.006.372.000,00	10.556.697.800,00	81,17	14.792.587.201,54
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	400.000.000,00	398.439.520,00	99,61	1.212.187.029,15
4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	400.000.000,00	396.423.750,00	99,11	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	106.685.200,00	105.703.475,00	99,08	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	733.470.600,00
7	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	349.069.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
C	Belanja Modal Instalasi	112.369.000,00	111.259.260,00	99,01	59.558.000,00
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	7.000.000,00	6.900.000,00	98,57	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	55.369.000,00	54.809.260,00	98,99	15.000.000,00
3	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Instalasi Lain	50.000.000,00	49.550.000,00	99,10	0,00
5	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	36.858.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
D	Belanja Modal Jaringan	1.674.500.000,00	1.340.166.500,00	80,03	1.340.567.550,00
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.063.000.000,00	731.190.000,00	68,79	1.266.067.550,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	611.500.000,00	608.976.500,00	99,59	0,00
3	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
E	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	704.810.900,00
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	704.810.900,00
	JUMLAH	61.663.470.295,00	51.677.563.443,60	83,81	43.648.432.279,63

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.093.846.145,00	7.025.222.811,00	8.409.927.669,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp7.025.222.811,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp7.093.846.145,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp8.409.927.669,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp7.025.222.811,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.384.704.858,00 atau 16,47% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 221 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping

No	Uraian	Sebelum Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	308.803.600,00	307.789.500,00	99,67	2.011.163.279,00
1	Belanja Modal Buku Umum	46.337.000,00	46.220.100,00	99,75	1.930.082.079,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	15.075.000,00	15.030.200,00	99,70	4.765.100,00
3	Belanja Modal Buku Agama	20.800.000,00	20.714.000,00	99,59	6.885.600,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	54.955.000,00	54.781.000,00	99,68	17.067.900,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	16.500.000,00	16.424.600,00	99,54	4.771.200,00
6	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	36.925.000,00	36.799.100,00	99,66	10.739.000,00
7	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	69.412.500,00	69.184.700,00	99,67	21.311.900,00
8	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	32.400.000,00	32.294.600,00	99,67	10.534.500,00
9	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	16.399.100,00	16.341.200,00	99,65	5.006.000,00
10	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.000.000,00	5.555.000,00	92,58	265.221.000,00
1	Belanja Modal Alat Musik	6.000.000,00	5.555.000,00	92,58	0,00
2	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	13.981.000,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00		251.240.000,00
C	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	240.300.000,00	199.903.000,00	83,19	0,00
1	Belanja Modal Software	200.300.000,00	199.903.000,00	99,80	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.518.742.545,00	6.503.632.705,00	99,77	6.133.543.390,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.518.742.545,00	6.503.632.705,00	99,77	6.133.543.390,00
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00	8.342.606,00	41,71	0,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00	8.342.606,00	41,71	0,00
	JUMLAH	7.093.846.145,00	7.025.222.811,00	99,03	8.409.927.669,00

Pada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp7.025.222.811,00 didalamnya terdapat realisasi Modal Aset Tetap Lainnya yang dicatat secara tidak rinci yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar

Rp6.503.632.705,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp8.342.606,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dicatat secara tidak rinci.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp6.503.632.705,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 - 222 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	4.782.770.950,00	4.774.536.510,00
2	Belanja Modal Buku Agama	700.756.995,00	698.191.395,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	98.585.075,00	94.345.075,00
4	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	587.622.100,00	587.552.300,00
5	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	338.376.075,00	338.376.075,00
6	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	10.631.350,00	10.631.350,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Setelah Mapping		6.518.742.545,00	6.503.632.705,00

Pada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD tahun 2021 sebesar Rp8.342.606,00 tercatat secara tidak rinci, selanjutnya dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD menjadi Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp8.342.606,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping Tahun 2021 sebesar Rp51.677.563.443,60 atau 83,81% dari anggaran sebesar Rp61.663.470.295,00 dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 223 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.847.546.145,00	6.819.764.811,00	99,59	2.011.163.279,00
1	Belanja Modal Buku Umum	4.849.107.950,00	4.829.099.216,00	99,59	1.930.082.079,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	15.075.000,00	15.030.200,00	99,70	4.765.100,00
3	Belanja Modal Buku Agama	721.556.995,00	718.905.395,00	99,63	6.885.600,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	54.955.000,00	54.781.000,00	99,68	17.067.900,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	115.085.075,00	110.769.675,00	96,25	4.771.200,00
6	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	36.925.000,00	36.799.100,00	99,66	10.739.000,00
7	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	69.412.500,00	69.184.700,00	99,67	21.311.900,00
8	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	370.776.075,00	370.670.675,00	99,97	10.534.500,00
9	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	27.030.450,00	26.972.550,00	99,79	5.006.000,00
10	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	587.622.100,00	587.552.300,00	99,99	0,00
B	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.000.000,00	5.555.000,00	92,58	265.221.000,00
1	Belanja Modal Alat Musik	6.000.000,00	5.555.000,00	92,58	0,00
2	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	13.981.000,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	251.240.000,00
C	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.066.300.000,00	384.046.550,00	36,02	0,00
1	Belanja Modal Software	1.026.300.000,00	384.046.550,00	37,42	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	6.133.543.390,00
-	Belanja Modal Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	6.133.543.390,00

No	Uraian	Setelah Mapping		Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)		
	Lainnya BOS				
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	7.919.846.145,00	7.209.366.361,00	91,03	8.409.927.669,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya	826.000.000,00	184.143.550,00	971.490.520,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp184.143.550,00 atau 22,29% dari anggaran sebesar Rp826.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp971.490.520,00, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp184.143.550,00 mengalami penurunan sebesar Rp787.346.970,00 atau 81,05% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 224 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	826.000.000,00	184.143.550,00	22,29	971.490.520,00
	Jumlah	826.000.000,00	184.143.550,00	22,29	971.490.520,00

Pada realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD tahun 2021 sebesar Rp184.143.550,00 tercatat secara tidak rinci, selanjutnya dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD menjadi Belanja Modal Software sebesar Rp184.143.550,00.

Tabel 5 - 225 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	971.490.520,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	971.490.520,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	2.877.383.079,00	1.006.063.700,00	226.620.000,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2021 adalah sebesar Rp1.006.063.700,00 atau 34,96% dari anggarannya sebesar Rp2.877.383.079,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2020 sebesar Rp226.620.000,00 realisasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2021 sebesar Rp1.006.063.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp779.443.700,00 atau 343,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 226 Rincian Belanja Tidak Terduga

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	2.877.383.079,00	1.006.063.700,00	34,96	226.620.000,00
Jumlah		2.877.383.079,00	1.006.063.700,00	34,96	226.620.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2021 sebesar Rp1.006.063.700,00 terdiri dari :

- 1) Pembayaran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 sebesar Rp240.000.000,00 melalui SP2D nomor 05524/SP2D/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- 2) Pembayaran Pengembalian SILPA Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 kepada Provinsi Jawa Timur sesuai surat BPKAD Provinsi Jatim nomor 900/2000/203.4/2021 tanggal 15 Maret 2021 melalui SP2D nomor 13982/SP2D/2021 tanggal 14 Desember 2021.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.3 Belanja Transfer	355.891.616.869,00	355.891.616.869,00	349.172.085.712,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2021 adalah sebesar Rp355.891.616.869,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp355.891.616.869,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun 2020 sebesar Rp349.172.085.712,00, realisasi Belanja Transfer pada tahun 2021 sebesar Rp355.891.616.869,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.719.531.157,00 atau 1,92% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 227 Rincian Belanja Transfer

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.154.754.200,00	4.154.754.200,00	100,00	2.915.741.954,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.010.995.353,00	100,00	2.323.144.234,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.725.867.316,00	349.725.867.316,00	100,00	343.933.199.524,00
Jumlah		355.891.616.869,00	355.891.616.869,00	100,00	349.172.085.712,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.154.754.200,00	4.154.754.200,00	2.915.741.954,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp4.154.754.200,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp4.154.754.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil

Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun 2020 sebesar Rp2.915.741.954,00, realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2021 sebesar Rp4.154.754.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.239.012.246,00 atau 42,49% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5-228 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.154.754.200,00	4.154.754.200,00	100,00	2.915.741.954,00
Jumlah		4.154.754.200,00	4.154.754.200,00	100,00	2.915.741.954,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.3.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.010.995.353,00	2.323.144.234,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp2.010.995.353,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp2.010.995.353,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2020 sebesar Rp2.323.144.234,00, realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada tahun 2021 sebesar Rp2.010.995.353,00 mengalami penurunan sebesar Rp312.148.881,00 atau 13,44% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5-229 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.010.995.353,00	100,00	2.323.144.234,00
Jumlah		2.010.995.353,00	2.010.995.353,00	100,00	2.323.144.234,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.3.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.725.867.316,00	349.725.867.316,00	343.933.199.524,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp349.725.867.316,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp349.725.867.316,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2020 sebesar Rp343.933.199.524,00, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada tahun 2021 sebesar Rp349.725.867.316,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.792.667.792,00 atau 1,68% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5 - 230 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.725.867.316,00	349.725.867.316,00	100,00	343.933.199.524,00
Jumlah		349.725.867.316,00	349.725.867.316,00	100,00	343.933.199.524,00

Tabel 5 - 231 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)
1	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 2021 sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2021	17.153.868.972,00	17.153.868.972,00	100,00
2	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2021	4.282.207.584,00	4.282.207.584,00	100,00
3	Bantuan Dana Biaya Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (SILTAP) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 51 Tahun 2021	51.530.311.840,00	51.530.311.840,00	100,00
4	Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kab. Bondowoso Tahun 2021 Sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/1045/430.4.2/2021	14.777.315.000,00	14.777.315.000,00	100,00
5	Bantuan Dana Biaya Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (SILTAP) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2021	25.765.155.920,00	25.765.155.920,00	100,00
6	Dana Desa untuk 209 Pemerintah Desa	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00	100,00
Jumlah		349.725.867.316,00	349.725.867.316,00	100,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.4 Surplus / Defisit	(136.906.969.500,00)	90.548.823.217,36	(15.623.968.512,20)

Realisasi Surplus/(Defisit) tahun 2021 adalah sebesar surplus Rp90.548.823.217,36 atau 166,14% dari anggarannya sebesar defisit Rp136.906.969.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) tahun 2020 sebesar defisit Rp15.623.968.512,20 realisasi Surplus/(Defisit) pada tahun 2021 sebesar surplus Rp90.548.823.217,36 mengalami kenaikan sebesar Rp106.172.791.729,56 atau sebesar 679,55%. Surplus/(Defisit) tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 232 Rincian Surplus/(Defisit)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.992.329.562.622,00	2.054.350.628.524,73	103,11	1.941.757.072.598,72
2	Belanja Daerah	1.773.344.915.253,00	1.607.910.188.438,37	90,67	1.608.208.955.398,92
3	Belanja Transfer	355.891.616.869,00	355.891.616.869,00	100,00	349.172.085.712,00
Jumlah		(136.906.969.500,00)	90.548.823.217,36	166,14	(15.623.968.512,20)

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	152.530.938.011,77

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp137.046.287.999,57 atau 100,10 % dari anggarannya sebesar Rp136.906.969.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp152.530.938.011,77 realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp137.046.287.999,57 mengalami penurunan sebesar Rp15.484.650.012,20 atau sebesar 10,15% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 233 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	136.906.969.500,00	136.906.969.499,57	100,00	152.497.813.011,77
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	139.318.500,00	0,00	33.125.000,00
Jumlah		136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	100,10	152.530.938.011,77

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	136.906.969.500,00	136.906.969.499,57	152.497.813.011,77

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp136.906.969.499,57 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.906.969.499,57. Jika dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp152.497.813.011,77 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp136.906.969.499,57 mengalami penurunan sebesar Rp15.590.843.512,20 atau 10,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 234 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(1.919.470.241,00)	(1.919.469.783,85)	100,00	7.403.165.621,58
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(3.581.517.439,00)	(3.581.517.439,00)	100,00	(10.067.362.518,00)
3	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	33.125.000,00	33.125.000,00	100,00	0,00
4	Penghematan Belanja	126.718.549.932,00	126.718.549.929,85	100,00	155.162.010.363,19
5	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	(455,00)
5	Sisa Belanja Lainnya	15.656.282.248,00	15.656.282.247,57	100,00	0,00
6	Koreksi SiLPA	0,00	(455,00)	0,00	0,00
Jumlah		136.906.969.500,00	136.906.969.499,57	100,00	152.497.813.011,77

Penyajian nilai positif/(negatif) pada rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya disesuaikan dengan selisih kurang dan selisih lebih antara anggaran dan

realisasi pada LRA tahun sebelumnya dan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tahun 2021 dengan anggarannya sebesar Rp136.906.969.500,00 dan realisasi sebesar Rp136.906.969.499,57 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pelampauan Penerimaan PAD tahun 2021 adalah sebesar minus Rp1.919.469.783,85 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar minus Rp1.919.469.783,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 235 Rincian Pelampauan Penerimaan PAD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.423.388.051,00	1.423.388.050,96	100,00	(1.921.259.328,79)
2	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	(4.914.725.105,00)	(4.914.725.105,00)	100,00	(992.278.288,82)
3	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	2,40	0,00	0,00
4	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.571.866.813,00	1.571.867.267,79	100,00	10.316.703.239,19
Jumlah		(1.919.470.241,00)	(1.919.469.783,85)	100,00	7.403.165.621,58

- 2) Realisasi Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2021 adalah sebesar minus Rp3.581.517.439,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar minus Rp3.581.517.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 236 Rincian Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	(29.899.607.976,00)	(29.899.607.976,00)	100,00	(36.449.173.894,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	26.318.090.537,00	26.318.090.537,00	100,00	26.381.811.376,00
Jumlah		(3.581.517.439,00)	(3.581.517.439,00)	100,00	(10.067.362.518,00)

- 3) Realisasi Pelampauan Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp33.125.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp33.125.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 237 Rincian Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33.125.000,00	33.125.000,00	100,00	0,00
Jumlah		33.125.000,00	33.125.000,00	100,00	0,00

- 4) Realisasi Penghematan Belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp126.718.549.932,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp126.718.549.932,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 238 Rincian Penghematan Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	100.714.115.759,00	100.714.115.758,33	100,00	105.907.463.658,58
2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	24.891.022.123,00	24.891.022.122,01	100,00	40.780.310.305,91
3	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.113.412.050,00	1.113.412.049,51	100,00	8.442.716.898,70
4	Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	31.519.500,00
Jumlah		126.718.549.932,00	126.718.549.929,85	100,00	155.162.010.363,19

- 5) Realisasi Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 239 Rincian Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	(455,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	(455,00)

- 6) Realisasi Sisa Belanja Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp15.656.282.248,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp15.656.282.248,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 240 Rincian Sisa Belanja Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.656.282.248,00	15.656.282.247,57	100,00	0,00
Jumlah		15.656.282.248,00	15.656.282.247,57	100,00	0,00

- 7) Realisasi Koreksi SiLPA tahun 2021 adalah sebesar minus Rp455,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 241 Rincian Koreksi SiLPA

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(455,00)	0,00	0,00
Jumlah		0,00	(455,00)	0,00	0,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.4.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	139.318.500,00	33.125.000,00

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2020 sebesar Rp33.125.000,00 realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp106.193.500,00 atau 320,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 242 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	68.158.500,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	71.160.000,00	0,00	33.125.000,00
Jumlah		0,00	139.318.500,00	0,00	33.125.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp139.318.500,00 merupakan penerimaan kembali piutang (*intracomptable*) yang tidak pernah dihapusbukukan.

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2021 dengan anggarannya sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp139.318.500,00 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi tahun 2021 adalah sebesar Rp68.158.500,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 243 Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	68.158.500,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	68.158.500,00	0,00	0,00

- 2) Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp71.160.000,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 244 Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	71.160.000,00	0,00	33.125.000,00
Jumlah		0,00	71.160.000,00	0,00	33.125.000,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 sebesar nihil.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pembiayaan Netto	136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	152.530.938.011,77

Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2021 sebesar Rp137.046.287.999,57 atau 100,10% dari anggaran sebesar Rp136.906.969.500,00. Jika dibandingkan dengan Pembiayaan Netto tahun 2020 sebesar Rp152.530.938.011,77 realisasi Pembiayaan Netto tahun 2021 sebesar Rp137.046.287.999,57 mengalami penurunan sebesar Rp15.484.650.012,20 atau 10,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 245 Rincian Pembiayaan Netto

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	100,10	152.530.938.011,77
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	100,10	152.530.938.011,77

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	227.595.111.216,93	136.906.969.499,57

Realisasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp227.595.111.216,93 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp136.906.969.499,57 realisasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) pada tahun 2021 sebesar Rp227.595.111.216,93 mengalami kenaikan sebesar Rp90.688.141.717,36 atau 66,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 246 Rincian Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	(136.906.969.500,00)	90.548.823.217,36	166,14	(15.623.968.512,20)
2	Pembiayaan Netto	136.906.969.500,00	137.046.287.999,57	100,10	152.530.938.011,77
Jumlah		0,00	227.595.111.216,93	0,00	136.906.969.499,57

Komponen pembentuk Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp227.595.111.216,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 247 Komponen Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

No	Uraian	(Rp)
1	Pelampauan Pendapatan	62.021.065.902,73
2	Sisa Anggaran Belanja	165.434.726.814,63
3	Selisih Lebih Pembiayaan Netto	139.318.499,57
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)		227.595.111.216,93

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>Tahun 2021</u> (Rp)	<u>Tahun 2020</u> (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih-Awal	136.906.969.499,57	152.497.813.466,77

Nilai SAL - Awal tahun 2021 sebesar Rp136.906.969.499,57 merupakan SAL – Akhir Tahun 2020. Saldo tersebut menjadi Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2021.

	<u>Tahun 2021</u> (Rp)	<u>Tahun 2020</u> (Rp)
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	136.906.969.499,57	152.497.813.466,77

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2021 yang digunakan untuk menutup defisit pada APBD Tahun 2021, yaitu sebesar Rp136.906.969.499,57

	<u>Tahun 2021</u> (Rp)	<u>Tahun 2020</u> (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	227.595.111.216,93	136.906.969.499,57

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp227.595.111.216,93.

	<u>Tahun 2021</u> (Rp)	<u>Tahun 2020</u> (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(455,00)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar nihil.

	<u>Tahun 2021</u> (Rp)	<u>Tahun 2020</u> (Rp)
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih - Akhir	227.595.111.216,93	136.906.969.499,57

SAL - Akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran lalu dan Tahun Anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL - Akhir sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp227.595.111.216,93.

5.3 NERACA

5.3.1 Aset

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1 Aset lancar	292.740.504.238,17	220.066.369.360,93

Aset Lancar tahun 2021 adalah sebesar Rp292.740.504.238,17 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah sebesar Rp220.066.369.360,93 realisasi Aset Lancar pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp72.674.134.877,24 atau sebesar 33,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-248 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Kas dan Bank	227.796.515.381,93	137.040.875.711,61
2	Piutang	51.965.512.705,77	64.819.979.705,07
3	Penyisihan Piutang	(28.862.198.413,61)	(27.526.204.145,14)
4	Beban Dibayar Dimuka	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Persediaan	41.836.674.564,08	45.727.718.089,39
	Jumlah	292.740.504.238,17	220.066.369.360,93

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1 Kas dan Bank	227.796.515.381,93	137.040.875.711,61

Kas dan Bank tahun 2021 adalah sebesar Rp227.796.515.381,93 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 sebesar Rp137.040.875.711,61, saldo Kas dan Bank pada tahun 2021 sebesar Rp227.796.515.381,93 mengalami kenaikan sebesar Rp90.755.639.670,32 atau sebesar 66,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-249 Kas dan Bank

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Kas di Kas Daerah	179.556.601.565,89	104.040.569.665,12	72,58
2	Kas di Bendahara Penerimaan	18.433.000,00	7.875.000,00	134,07
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	317.407.530,00	(100,00)
4	Kas di BLUD	43.083.972.311,47	23.661.575.848,16	82,08
5	Kas Lainnya	5.137.508.504,57	9.013.447.668,33	(43,00)
	Jumlah	227.796.515.381,93	137.040.875.711,61	66,23

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	179.556.601.565,89	104.040.569.665,12

Kas di Kas Daerah adalah kas yang ada pada rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk giro. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.556.601.565,89, jika dibandingkan dengan saldo kas tahun 2020 sebesar Rp104.040.569.665,12, saldo kas di Kas Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp179.556.601.565,89 mengalami kenaikan sebesar Rp75.516.031.900,77 atau sebesar 72,58% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-250 Kas Daerah

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Giro Kas Umum Daerah	179.556.601.565,89	104.040.569.665,12	72,58
2	Deposito	0,00	0,00	0,00
Jumlah		179.556.601.565,89	104.040.569.665,12	72,58

1. Giro Kas Umum Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp179.556.601.565,89 merupakan saldo kas daerah yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk giro pada Bank Jatim Cabang Bondowoso dengan nomor rekening 311000011.
2. Deposito merupakan saldo kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan pada beberapa bank di Kabupaten Bondowoso yang saldo per 31 Desember 2021 sebesar nihil.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	18.433.000,00	7.875.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2021 adalah sebesar Rp18.433.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-251 Kas Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara Penerimaan	18.433.000,00	7.875.000,00	134,07
Jumlah		18.433.000,00	7.875.000,00	134,07

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp18.433.000,00 merupakan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2021 pada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang belum disetor ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2021.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	317.407.530,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada kas yang ada di bendahara pengeluaran OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-252 Kas Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	317.407.530,00	(100,00)
Jumlah		0,00	317.407.530,00	(100,00)

Rincian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) bendahara pengeluaran kepada Kas Daerah sebagai lampiran 2

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.4 Kas di BLUD	43.083.972.311,47	23.661.575.848,16

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan saldo kas untuk keperluan operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso. Kas di BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp43.083.972.311,47 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 sebesar Rp23.661.575.848,16, saldo Kas di BLUD pada tahun 2021 sebesar Rp43.083.972.311,47 mengalami kenaikan sebesar Rp19.422.396.463,31 atau sebesar 82,08% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-253 Kas di BLUD RSUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Giro Kas BLUD RSUD	38.070.271.751,47	8.651.738.240,16	340,03
2	Deposito BLUD RSUD	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(66,67)
3	Kas pada Bendahara Penerimaan RSUD	13.700.560,00	9.837.608,00	39,27
Jumlah		43.083.972.311,47	23.661.575.848,16	82,08

1. Giro Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.070.271.751,47 merupakan saldo kas yang terdapat pada Rekening Kas BLUD pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Bondowoso dengan nomor rekening 0311003733.
2. Deposito per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-254 Deposito BLUD RSUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	No. Seri DB. 394824	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
2	No. Seri DB. 394825	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
3	No. Seri DB. 394826	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
4	No. Seri DB. 394857	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
5	No. Seri DB. 394858	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
6	No. Seri DB. 394859	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
7	No. Seri DB. 491747	2.500.000.000,00	0,00	0,00
8	No. Seri DB. 491748	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(66,67)

3. Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. H. Koesnadi per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.700.560,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-255 Kas pada Bendahara Penerimaan BLUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara Penerimaan	13.700.560,00	9.837.608,00	39,27
Jumlah		13.700.560,00	9.837.608,00	39,27

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp13.700.560,00 merupakan pendapatan BLUD tahun 2021 pada Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr H Koesnadi yang belum disetor pada rekening Giro Kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2021.

		Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.5	Kas Lainnya	5.137.508.504,57	9.013.447.668,33

Kas lainnya merupakan saldo kas pada bendahara diluar bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.137.508.504,57. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 sebesar Rp9.013.447.668,33 saldo Kas Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp5.137.508.504,57 mengalami penurunan sebesar Rp3.875.939.163,76 atau sebesar 43,00% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-256 Kas Lainnya

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Kas di Bendahara FKTP	4.677.675.195,48	7.086.358.233,88	(33,99)
2	Kas di Bendahara BOS	459.833.309,09	1.927.089.434,45	(76,14)
Jumlah		5.137.508.504,57	9.013.447.668,33	(43,00)

1. Kas pada Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.677.675.195,48 merupakan sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2021 pada FKTP se-Kabupaten Bondowoso. Dana Kapitasi tersebut dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan langsung ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP. Berdasarkan saldo kas sesuai Buku Kas Umum Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-257 Kas pada Bendahara FKTP

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Giro	4.677.675.195,48	7.086.358.233,88	(33,99)
2	Kas Tunai	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.677.675.195,48	7.086.358.233,88	(33,99)

- a. Giro pada Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.677.675.195,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-258 Kas pada Giro FKTP

No	Nama FKTP	Rek. Bank Jatim	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Tren %
1	Nangkaan	rek. 0311017934	250.724.535,04	167.977.507,04	49,26
2	Kotakulon	rek. 0311017845	72.589.685,70	52.239.906,70	38,95
3	Kademangan	rek. 0311017853	74.948.018,00	103.708.082,00	(27,73)
4	Tenggarang	rek. 1581000053	73.098.459,00	277.317.046,00	(73,64)
5	Tegalampel	rek. 0311017802	54.900.734,27	54.631.607,27	0,49
6	Tamankrocok	rek. 1581000061	70.575.204,00	36.691.427,00	92,35
7	Wringin	rek. 0311017870	285.180.028,00	230.507.479,00	23,72
8	Pakem	rek. 0311017837	177.439.008,00	89.754.979,00	97,69
9	Curahdami	rek. 0311017896	234.968.840,00	330.979.771,00	(29,01)
10	Binakal	rek. 0311017861	124.327.671,00	173.933.633,00	(28,52)
11	Grujugan	rek. 0311017764	133.552.900,00	235.253.492,00	(43,23)
12	Maesan	rek. 1571000039	282.065.585,00	648.450.435,00	(56,50)

No	Nama FKTP	Rek. Bank Jatim	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Tren %
13	Tamanan	rek. 1571000063	334.286.818,00	414.162.208,00	(19,29)
14	Jambesari	rek. 1571000098	178.490.940,00	190.193.660,00	(6,15)
15	Pujer	rek. 0311017772	412.797.193,48	900.896.978,48	(54,18)
16	Tlogosari	rek. 1581000088	470.726.959,00	545.394.569,00	(13,69)
17	Wonosari	rek. 1581000045	203.553.361,00	196.677.898,00	3,50
18	Tapen	rek. 1581000029	371.215.440,00	646.130.768,00	(42,55)
19	Sukosari	rek. 1581000037	88.041.657,00	112.774.569,00	(21,93)
20	Sumber Wringin	rek. 0311017781	329.185.428,00	450.680.326,00	(26,96)
21	Klabang	rek. 1151000092	42.374.849,00	49.590.805,00	(14,55)
22	Sempol	rek. 1581000070	21.034.227,04	131.127.353,04	(83,96)
23	Prajeakan	rek. 1151000084	25.552.851,60	169.937.463,00	(84,96)
24	Botolinggo	rek. 0311017811	123.559.342,00	231.327.620,00	(46,59)
25	Cermee	rek. 1151000777	242.485.461,35	646.018.651,35	(62,46)
Total Giro			4.677.675.195,48	7.086.358.233,88	(33,99)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas FKTP Pakem per 31 Desember 2021 bahwa terdapat saldo akhir bank sebesar Rp177.953.813,00 sedangkan saldo kas menurut Buku Kas Umum (BKU) sebesar Rp177.439.013,00 sehingga terdapat perbedaan positif sebesar Rp514.800,00 karena jumlah pajak yang sudah terbayar masuk pada kredit rekening Giro FKTP Pakem.

- b. Kas Tunai pada Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar nihil.
2. Kas pada Bendahara BOS merupakan sisa kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah oleh Pemerintah Pusat yang saldonya per 31 Desember 2021 sebesar Rp459.833.309,09 terdiri dari :

Tabel 5-259 Kas pada Bendahara BOS

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara BOS	258.429.144,09	1.793.084.172,41	(85,59)
2	Pungutan Pajak Yang Belum Disetor (Utang PFK BOS)	201.404.165,00	133.906.212,04	50,41
3	Pungutan Pajak Restoran Yang Belum Disetor	0,00	99.050,00	(100,00)
Jumlah		459.833.309,09	1.927.089.434,45	(76,14)

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.6. Piutang Pendapatan	34.869.237.347,91	39.376.238.980,21

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Jumlah piutang tersebut merupakan jumlah piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

Tabel 5-260 Rincian Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Piutang Pajak	20.721.060.194,20	14.897.668.452,20
2	Piutang Retribusi	2.888.873.095,10	2.090.286.149,82
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	11.259.304.058,61	22.388.284.378,19
Jumlah Piutang		34.869.237.347,91	39.376.238.980,21

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.6.1 Piutang Pajak	20.721.060.194,20	14.897.668.452,20

Piutang Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang belum diterima kasnya oleh Badan Pendapatan Daerah.

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp20.721.060.194,20 merupakan jumlah tagihan pajak daerah berdasarkan Ketetapan Pajak yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-261 Rincian Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Pajak Reklame	422.079.881,00	1.206.573.292,00	1.222.924.141,00	405.729.032,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.939.283.440,20	11.655.097.193,00	11.439.546.682,00	2.154.833.951,20
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.321.393,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.321.393,00
4	Pajak Hotel	0,00	706.656.835,00	706.656.835,00	0,00
5	Pajak Restoran	5.600.000,00	3.157.453.390,00	3.027.371.917,00	135.681.473,00
6	Pajak Air Tanah	3.718.710,00	191.308.135,00	194.652.003,00	374.842,00
7	Pajak Hiburan	1.139.000,00	25.177.900,00	24.377.900,00	1.939.000,00
8	Pajak Parkir	0,00	75.027.250,00	75.027.250,00	0,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	12.503.289.179,00	16.631.694.793,00	11.135.040.318,00	17.999.943.654,00
10	BPHTB	16.236.849,00	7.288.086.793,00	7.288.086.793,00	16.236.849,00
	Total	14.897.668.452,20	40.938.155.581,00	35.114.763.839,00	20.721.060.194,20

Total piutang yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.721.060.194,20 di atas terdiri dari :

1. Piutang Pajak Reklame adalah piutang pajak atas penyelenggaraan reklame yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp405.729.032,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-262 Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2012	138.523.340,00	0,00	0,00	138.523.340,00
2	2013	34.567.603,00	0,00	0,00	34.567.603,00
3	2014	41.065.605,00	0,00	0,00	41.065.605,00
4	2015	8.310.115,00	0,00	0,00	8.310.115,00
5	2017	34.267.525,00	0,00	0,00	34.267.525,00
6	2018	3.293.750,00	0,00	0,00	3.293.750,00
7	2019	7.453.125,00	0,00	0,00	7.453.125,00
8	2020	154.598.818,00	0,00	72.481.968,00	82.116.850,00
9	2021	0,00	1.206.573.292,00	1.150.442.173,00	56.131.119,00
	Jumlah	422.079.881,00	1.206.573.292,00	1.222.924.141,00	405.729.032,00

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah piutang pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain yang belum diterima kasnya. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.154.833.951,20 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-263 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	1998 s.d April 2010	1.101.408.541,20	0,00	0,00	1.101.408.541,20
2	2020	837.874.899,00	0,00	837.874.899,00	0,00
3	2021	0,00	11.655.097.193,00	10.601.671.783,00	1.053.425.410,00
Jumlah		1.939.283.440,20	11.655.097.193,00	11.439.546.682,00	2.154.833.951,20

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 untuk tahun SKP 2021 sebesar Rp1.053.425.410,00 merupakan piutang Pajak Penerangan Jalan bagian bulan Desember 2021 kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo yang telah diterima kasnya pada bulan Januari 2021.

Tabel 5-264 Rincian Piutang PPJ PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Desember 2020	837.874.899,00	0,00	837.874.899,00	0,00
2	Januari 2021	0,00	822.437.300,00	822.437.300,00	0,00
3	Februari 2021	0,00	772.117.691,00	772.117.691,00	0,00
4	Maret 2021	0,00	792.850.659,00	792.850.659,00	0,00
5	April 2021	0,00	980.837.100,00	980.837.100,00	0,00
6	Mei 2021	0,00	1.008.106.761,00	1.008.106.761,00	0,00
7	Juni 2021	0,00	1.025.459.239,00	1.025.459.239,00	0,00
8	Juli 2021	0,00	1.008.890.139,00	1.008.890.139,00	0,00
9	Agustus 2021	0,00	1.011.003.874,00	1.011.003.874,00	0,00
10	September 2021	0,00	1.018.618.466,00	1.018.618.466,00	0,00
11	Oktober 2021	0,00	1.043.295.370,00	1.043.295.370,00	0,00
12	November 2021	0,00	1.042.912.027,00	1.042.912.027,00	0,00
13	Desember 2021	0,00	1.053.425.410,00	0,00	1.053.425.410,00
Jumlah		837.874.899,00	11.579.954.036,00	11.364.403.525,00	1.053.425.410,00

Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2021 untuk tahun SKP 1998 s.d April 2010 sebesar Rp1.101.408.541,20 merupakan piutang PPJ kepada PT. Bonindo Abadi sejak tahun 1998 sampai dengan bulan April 2010 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-265 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo

No	Uraian	Pokok	Denda	Jumlah
1	Tahun 1998 s/d 2001	249.163.335,00	24.916.333,50	274.079.668,50
2	Tahun 2002	104.946.900,00	10.494.690,00	115.441.590,00
3	Tahun 2003	68.484.515,00	6.848.451,50	75.332.966,50
4	Tahun 2004	82.930.905,00	8.293.090,50	91.223.995,50
5	Tahun 2005	87.982.355,00	8.798.235,50	96.780.590,50
6	Tahun 2006	111.799.190,00	11.179.919,00	122.979.109,00
7	Tahun 2007	102.369.706,00	10.236.970,60	112.606.676,60
8	Tahun 2008	88.507.438,00	8.850.743,80	97.358.181,80
9	Tahun 2009	74.160.403,00	7.416.040,30	81.576.443,30
10	Januari s/d April 2010	30.935.745,00	3.093.574,50	34.029.319,50
Jumlah		1.001.280.492,00	100.128.049,20	1.101.408.541,20

PT Bonindo Abadi adalah perusahaan yang berkedudukan di Jalan Raya Jember Km 9 Desa Pekauman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso. Perusahaan berdiri tahun 1994 berdasarkan Akta Notaris Mahdalina S. Gandawi Djaja, SH dengan akta Nomor 52, tanggal 25 Agustus 1994. PT Bonindo Abadi bergerak di bidang produksi kertas budaya, *chopstik* dan industri batu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dengan laporan Nomor : 62/R/XVIII/SBY/04/2008 tanggal 15 April Tahun 2008 terdapat tunggakan piutang

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp888.444.596,00 oleh PT Bonindo Abadi. Terhadap tunggakan piutang tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera menindaklanjuti dan menagih kepada PT Bonindo. Bupati telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan melayangkan surat teguran Nomor : 700/079430.99/2008 kepada PT Bonindo. Namun demikian PT Bonindo tidak pernah membayar tunggakan tersebut, bahkan jumlah tersebut semakin berkembang karena sampai dengan April 2010 PT Bonindo tidak pernah membayar PPJ sehingga jumlah tunggakan piutang PPJ bersama dendanya menjadi Rp1.101.408.541,20. Piutang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selalu menjadi catatan dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penagihan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya-upaya penagihan piutang PPJ kepada PT. Bonindo Abadi yaitu:

- a. Memberi peringatan/penagihan tertulis kepada PT. Bonindo Abadi untuk melunasi piutangnya dengan nomor dan tanggal surat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-266 Tabel Surat Tagihan PPJ PT Bonindo

NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
No.700/078/430.99/2008	Tgl.13/06/2008	Teguran
No.503/346/430.42/2008	Tgl.15/12/2008	Permintaan Mematuhi Putusan MA
No.973/382/430.814/2010	Tgl.17/05/2010	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/25/430.42/2011	Tgl.05/01/2011	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1009/430.42/2011	Tgl.05/04/2011	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.700/134/430.99/2011	Tgl.19/07/2011	Peringatan
No.973/1365/430.6.1/2013	Tgl.20/12/2013	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/615/430.6.1/2014	Tgl.20/05/2014	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/382/430.6.1/2014	Tgl.26/11/2014	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1612/430.10.13/2015	Tgl.26/08/2015	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/629/430.10.13/2016	Tgl.30/08/2016	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/610/430.10.2/2017	Tgl.24/08/2017	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1615/430.10.2/2021	Tgl.06/10/2021	Koordinasi Rekomendasi BPK - RI

- b. Melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya koordinasi dengan Kepala PLN Distribusi Jawa Timur UPJ. Bondowoso pada tanggal 23 Maret 2010 mengenai piutang Pajak Penerangan Jalan PT.Bonindo Abadi Bondowoso. Sebagai hasil dari upaya koordinasi tersebut maka Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo Abadi terhitung mulai bulan Mei tahun 2010 sampai saat ini telah dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah meminta asistensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan tim asistensi ke Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan bimbingan, saran, dan rekomendasi terhadap permasalahan tunggakan PPJ PT Bonindo dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Asistensi Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor : LBA-101/PW13/3/2015 Tanggal 3 Maret 2015. BPKP menyarankan kepada Bupati Bondowoso sebagai berikut :
 - Sepanjang bukti dasar atau dokumen sumber yaitu tagihan listrik dari PLN yang memuat adanya tagihan PPJ atas PT Bonindo Abadi belum diperoleh maka Piutang PPJ atas PT. Bonindo sebesar Rp1.101.408.541,20 dapat

dikoreksi dari pembukuan, namun tetap dijelaskan (*disclosure*) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Jawa Timur untuk meminta PT. PLN Distribusi Situbondo menerbitkan rekening listrik yang memuat tagihan PPJ PT. Bonindo Abadi pada tahun terjadinya tunggakan PPJ, yang juga berfungsi sebagai SKPD.
 - Melakukan koordinasi kepada Kejaksaan setempat sebagai Pengacara Negara untuk mendapatkan pertimbangan hukum mengenai status tunggakan PPJ PT. Bonindo Abadi.
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah piutang pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.321.393,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-267 Rincian Piutang Pajak Mineral

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2014	300.060,00	0,00	0,00	300.060,00
2	2015	2.300.940,00	0,00	0,00	2.300.940,00
3	2016	100.080,00	0,00	0,00	100.080,00
4	2017	450.113,00	0,00	0,00	450.113,00
5	2019	2.510.200,00	0,00	0,00	2.510.200,00
6	2020	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
7	2021	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Jumlah		6.321.393,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.321.393,00

4. Piutang Pajak Hotel adalah piutang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-268 Rincian Piutang Pajak Hotel

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	706.656.835,00	706.656.835,00	0,00
Jumlah		0,00	706.656.835,00	706.656.835,00	0,00

5. Piutang Pajak Restoran adalah piutang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang belum diterima kasnya. Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp135.681.473,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-269 Rincian Piutang Pajak Restoran

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2013	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
2	2014	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	2015	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4	2016	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
5	2017	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
6	2018	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
7	2019	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
8	2020	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
9	2021	0,00	3.157.453.390,00	3.027.371.917,00	130.081.473,00
Jumlah		5.600.000,00	3.157.453.390,00	3.027.371.917,00	135.681.473,00

6. Piutang Pajak Air Tanah adalah piutang pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang belum diterima kasnya. Piutang Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp374.842,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-270 Rincian Piutang Pajak Air Tanah

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	129.420,00	0,00	14.940,00	114.480,00
2	2020	3.589.290,00	0,00	3.589.290,00	0,00
3	2021	0,00	191.308.135,00	191.047.773,00	260.362,00
Jumlah		3.718.710,00	191.308.135,00	194.652.003,00	374.842,00

7. Piutang Pajak Hiburan adalah piutang pajak atas penyelenggaraan hiburan yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.939.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-271 Rincian Piutang Pajak Hiburan

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2012	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2	2013	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3	2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	2020	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
7	2021	0,00	25.177.900,00	24.377.900,00	800.000,00
Jumlah		1.139.000,00	25.177.900,00	24.377.900,00	1.939.000,00

8. Piutang Pajak Parkir adalah piutang pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang belum diterima kasnya. Saldo Piutang Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-272 Rincian Piutang Pajak Parkir

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	75.027.250,00	75.027.250,00	0,00
Jumlah		0,00	75.027.250,00	75.027.250,00	0,00

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah piutang pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang belum diterima kasnya. Nilai piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.999.943.654,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-273 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2012	517.484.137,00	0,00	3.701.020,00	513.783.117,00
2	2013	913.369.149,00	0,00	9.007.828,00	904.361.321,00
3	2014	111.224.293,00	0,00	475.691,00	110.748.602,00
4	2015	81.106.929,00	0,00	394.638,00	80.712.291,00

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
5	2016	5.765.114,00	0,00	0,00	5.765.114,00
6	2017	20.633.496,00	0,00	47.837,00	20.585.659,00
7	2018	4.269.929.703,00	0,00	62.379.801,00	4.207.549.902,00
8	2019	4.649.700.535,00	0,00	57.257.600,00	4.592.442.935,00
9	2020	1.934.075.823,00	0,00	37.187.560,00	1.896.888.263,00
10	2021	0,00	16.631.694.793,00	10.964.588.343,00	5.667.106.450,00
Jumlah		12.503.289.179,00	16.631.694.793,00	11.135.040.318,00	17.999.943.654,00

10. Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah piutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum diterima kasnya. Saldo piutang Pajak BPHTB sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.236.849,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-274 Rincian Piutang Pajak BPHTB

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2014	16.236.849,00	0,00	0,00	16.236.849,00
2	2021	0,00	7.288.086.793,00	7.288.086.793,00	0,00
Jumlah		16.236.849,00	7.288.086.793,00	7.288.086.793,00	16.236.849,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.6.2 Piutang Retribusi	2.888.873.095,10	2.090.286.149,82

Piutang Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum diterima kasnya. Jumlah Piutang Retribusi merupakan jumlah tunggakan retribusi yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.888.873.095,10 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.888.873.095,10.

Tabel 5-275 Jenis Piutang Retribusi

No	Jenis Piutang Retribusi	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	1.138.652.252,82	5.676.268.265,28	5.019.324.320,00	1.795.596.198,10
2	Retribusi Jasa Usaha	283.911.553,00	414.312.500,00	272.669.500,00	425.554.553,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	667.722.344,00	1.007.645.432,00	1.007.645.432,00	667.722.344,00
Jumlah		2.090.286.149,82	7.098.226.197,28	6.299.639.252,00	2.888.873.095,10

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.888.873.095,10 terdiri dari :

1. Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.795.596.198,10 terdiri dari :

Tabel 5-276 Tabel Piutang Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Piutang Retribusi Umum	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
a	Sewa Pasar Kios	566.027.115,00	626.547.120,00	399.755.247,00	792.818.988,00
b	Sewa Pasar Los	98.371.225,00	183.916.665,00	139.757.900,00	142.529.990,00

No	Jenis Piutang Retribusi Umum	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
c	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	191.396.412,82	228.189.480,28	167.386.173,00	252.199.720,10
d	Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS	282.857.500,00	4.637.615.000,00	4.312.425.000,00	608.047.500,00
Jumlah		1.138.652.252,82	5.676.268.265,28	5.019.324.320,00	1.795.596.198,10

a. Sewa Kios Pasar

Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah kios yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso berjumlah 1.923 kios yang tersebar pada 12 pasar. Nilai Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp792.818.988,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-277 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2008	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
2	2009	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
3	2010	1.953.900,00	0,00	0,00	1.953.900,00
4	2011	6.753.075,00	0,00	0,00	6.753.075,00
5	2012	8.071.350,00	0,00	0,00	8.071.350,00
6	2013	6.497.200,00	0,00	0,00	6.497.200,00
8	2014	5.787.845,00	0,00	0,00	5.787.845,00
9	2015	6.662.125,00	0,00	506.250,00	6.155.875,00
10	2016	6.427.375,00	0,00	112.500,00	6.314.875,00
11	2017	30.707.700,00	0,00	3.350.000,00	27.357.700,00
12	2018	94.416.725,00	0,00	8.683.000,00	85.733.725,00
13	2019	112.231.504,00	0,00	8.647.775,00	103.583.729,00
14	2020	286.338.316,00	0,00	32.382.450,00	253.955.866,00
15	2021	0,00	626.547.120,00	346.073.272,00	280.473.848,00
Jumlah		566.027.115,00	626.547.120,00	399.755.247,00	792.818.988,00

b. Sewa Los Pasar

Piutang Sewa Los Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa los milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Retribusi Sewa Los Pasar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.529.990,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-278 Rincian Piutang Retribusi Sewa Los Pasar

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2017	5.740.335,00	0,00	32.000,00	5.708.335,00
2	2018	14.327.500,00	0,00	433.000,00	13.894.500,00
3	2019	20.836.025,00	0,00	0,00	20.836.025,00
4	2020	57.467.365,00	0,00	6.852.000,00	50.615.365,00
5	2021	0,00	183.916.665,00	132.440.900,00	51.475.765,00
Jumlah		98.371.225,00	183.916.665,00	139.757.900,00	142.529.990,00

c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan piutang retribusi atas penerbitan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252.199.720,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-279 Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2015	117.313.107,00	0,00	0,00	117.313.107,00
2	2018	21.121.501,00	0,00	0,00	21.121.501,00
3	2019	15.236.045,48	0,00	3.632.357,00	11.603.688,48
4	2020	37.725.759,34	0,00	8.861.137,00	28.864.622,34
5	2021	0,00	228.189.480,28	154.892.679,00	73.296.801,28
Jumlah		191.396.412,82	228.189.480,28	167.386.173,00	252.199.720,10

d. Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS

Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS yang dikelola oleh Dinas Kesehatan merupakan piutang retribusi atas jasa klaim non kapitasi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Klaim Non Kapitasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp608.047.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-280 Rincian Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2017	8.404.500,00	0,00	0,00	8.404.500,00
2	2018	141.536.000,00	0,00	0,00	141.536.000,00
3	2019	132.917.000,00	0,00	0,00	132.917.000,00
4	2021	0,00	4.637.615.000,00	4.312.425.000,00	325.190.000,00
Jumlah		282.857.500,00	4.637.615.000,00	4.312.425.000,00	608.047.500,00

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp283.911.553,00 terdiri dari :

Tabel 5-281 Tabel Piutang Retribusi Jasa Usaha

No	Jenis Piutang Retribusi Jasa Usaha	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
a	Sewa Tanah Trotoar	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
b	Sewa Terminal	5.282.200,00	0,00	0,00	5.282.200,00
c	Sewa Pasar	243.940.953,00	394.312.500,00	262.669.500,00	375.583.953,00
d	Piutang Kemitraan	33.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	43.000.000,00
Jumlah		283.911.553,00	414.312.500,00	272.669.500,00	425.554.553,00

a. Sewa Tanah Trotoar

Piutang retribusi Sewa Tanah Trotoar yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan piutang retribusi yang sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak dipungut lagi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi Sewa Tanah Trotoar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.688.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-282 Rincian Piutang Sewa Tanah Trotoar

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2011	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
Jumlah		1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00

b. Sewa Kios Terminal

Piutang retribusi Sewa Kios Terminal yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Terminal Bus yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi Sewa Kios Terminal sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.282.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-283 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2000	2.646.000,00	0,00	0,00	2.646.000,00
2	2006	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00
3	2011	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
4	2016	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Jumlah		5.282.200,00	0,00	0,00	5.282.200,00

Mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak ada mutasi tambah/kurang piutang dikarenakan terminal Kabupaten Bondowoso telah berubah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk kawasan pertokoan yang berada di dalamnya.

c. Sewa Toko Pasar

Piutang retribusi Sewa Toko Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa toko milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah toko pasar yang dimiliki oleh Pemkab Bondowoso berjumlah 167 toko pasar yang tersebar pada 6 pasar. Nilai piutang retribusi Sewa Toko Pasar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp375.583.953,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-284 Rincian Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2011	398.200,00	0,00	0,00	398.200,00
2	2012	1.124.275,00	0,00	0,00	1.124.275,00
3	2013	4.027.250,00	0,00	0,00	4.027.250,00
4	2014	3.197.050,00	0,00	0,00	3.197.050,00
5	2015	23.018.400,00	0,00	0,00	23.018.400,00
6	2016	35.141.200,00	0,00	6.160.000,00	28.981.200,00
7	2017	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
8	2018	9.186.000,00	0,00	960.000,00	8.226.000,00
9	2019	40.809.829,00	0,00	640.000,00	40.169.829,00
10	2020	126.904.749,00	0,00	25.412.750,00	101.491.999,00
11	2021	0,00	394.312.500,00	229.496.750,00	164.815.750,00
Jumlah		243.940.953,00	394.312.500,00	262.669.500,00	375.583.953,00

d. Piutang Kemitraan

Piutang Kemitraan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan piutang retribusi atas kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa tanah dan bangunan dikomplek Pemandian Tasnan Baru Bondowoso dengan PT. Dian Graha Utama sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-285 Rincian Piutang Kemitraan

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2	2020	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	2021	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah		33.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	43.000.000,00

3. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp667.722.344,00 terdiri dari :

Tabel 5-286 Tabel Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

No	Jenis Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
a	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	667.722.344,00	1.007.645.432,00	1.007.645.432,00	667.722.344,00
Jumlah		667.722.344,00	1.007.645.432,00	1.007.645.432,00	667.722.344,00

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Piutang retribusi IMB yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan piutang retribusi atas penerbitan IMB yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi IMB sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp667.722.344,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-287 Rincian Piutang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2010	667.722.344,00	0,00	0,00	667.722.344,00
2	2021	0,00	1.007.645.432,00	1.007.645.432,00	0,00
Jumlah		667.722.344,00	1.007.645.432,00	1.007.645.432,00	667.722.344,00

Penerbitan Surat Keputusan Retribusi IMB pada tahun 2021 sebesar Rp1.007.645.432,00 selain diakui sebagai penambahan piutang Retribusi IMB juga diakui sebagai pendapatan Retribusi IMB – LO. Adapun perbandingan antara penambahan piutang Retribusi IMB dengan pendapatan Retribusi IMB - LO adalah sebagai berikut :

- Penambahan piutang Retribusi IMB	Rp 1.007.645.432,00
- Pendapatan Retribusi IMB – LO	Rp 1.007.645.432,00
Selisih	Rp 0,00

Pembayaran piutang selain dicatat sebagai pengurang piutang Retribusi IMB sebesar Rp1.007.645.432,00 juga diakui sebagai pendapatan Retribusi IMB – LRA. Adapun perbandingan antara pengurangan piutang Retribusi IMB dengan pendapatan Retribusi IMB – LRA adalah sebagai berikut :

- Pengurangan piutang Retribusi IMB	Rp 1.007.645.432,00
- Pendapatan Retribusi IMB - LRA	Rp 1.007.645.432,00
Selisih	Rp 0,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.6.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	11.259.304.058,61	22.388.284.378,19

Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis piutang pajak dan retribusi sebagaimana tersebut di atas. Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 5-288 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Piutang Bunga Jasa Giro BUD	131.553.947,32	205.358.763,15	131.553.947,32	205.358.763,15
2	Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS	2.945.315,87	636.655,62	3.156.662,18	425.309,31
3	Klaim BPJS	10.786.404.461,00	64.757.083.506,00	66.555.398.587,00	8.988.089.380,00
4	Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya	9.201.772.680,00	73.765.713.310,00	81.696.189.911,00	1.271.296.079,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Parpol	94.640.604,00	0,00	0,00	94.640.604,00
6	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	85.441.830,00	498.957.339,00	322.260.989,00	262.138.180,00
7	Piutang Denda Keterlambatan Proyek	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
8	Piutang Sewa ATM BNI	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
9	Piutang Lain-Lain	2.048.085.500,00	403.365.703,15	2.048.085.500,00	403.365.703,15
	Jumlah	22.388.284.378,19	139.631.115.276,92	150.760.095.596,50	11.259.304.058,61

1. Piutang Bunga Jasa Giro BUD merupakan Piutang Bunga Jasa Giro BUD yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-289 Rincian Piutang Bunga Jasa Giro BUD

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	131.553.947,32	0,00	131.553.947,32	0,00
2	2021	0,00	205.358.763,15	0,00	205.358.763,15
	Jumlah	131.553.947,32	205.358.763,15	131.553.947,32	205.358.763,15

2. Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS merupakan Piutang Bunga Jasa Giro Dana BOS yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-290 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	2.006.249,92	0,00	2.006.249,92	0,00
2	2020	939.065,95	0,00	939.065,95	0,00
3	2021	0,00	636.655,62	211.346,31	425.309,31
Jumlah		2.945.315,87	636.655,62	3.156.662,18	425.309,31

3. Piutang klaim BPJS merupakan klaim non kapitasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan meliputi : Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Obat, Pelayanan Alat Kesehatan, Pelayanan Ambulan, Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD), Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso yang nilainya telah diverifikasi yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-291 Rincian Piutang Klaim BPJS

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	10.786.404.461,00	0,00	10.786.329.961,00	74.500,00
2	2021	0,00	64.757.083.506,00	55.769.068.626,00	8.988.014.880,00
Jumlah		10.786.404.461,00	64.757.083.506,00	66.555.398.587,00	8.988.089.380,00

4. Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya merupakan klaim atas layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. H. Koesnadi kepada pasien dari pihak tertanggung yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-292 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
a	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	167.000,00	751.255,00	751.255,00	167.000,00
b	PT Jasa Raharja	110.223.387,00	1.258.200.271,00	935.561.132,00	432.862.526,00
c	BPJS Tenaga Kerja	101.005.447,00	126.654.808,00	127.737.183,00	99.923.072,00
d	Perhutani	0,00	2.882.257,00	2.882.257,00	0,00
e	Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)	723.500,00	7.783.500,00	8.507.000,00	0,00
f	Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM	6.647.346,00	69.720.025,00	52.291.490,00	24.075.881,00
g	RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	26.350.000,00	142.075.000,00	154.050.000,00	14.375.000,00
h	Lab RS Bhayangkara Bondowoso	0,00	324.660.000,00	324.660.000,00	0,00
i	Dinkes Situbondo	0,00	87.526.594,00	77.526.594,00	10.000.000,00
j	Kemenkes	8.956.656.000,00	71.745.459.600,00	80.012.223.000,00	689.892.600,00
Jumlah		9.201.772.680,00	73.765.713.310,00	81.696.189.911,00	1.271.296.079,00

a. PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Tabel 5-293 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PT KAI)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2017	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
2	2021	0,00	751.255,00	751.255,00	0,00
Jumlah		167.000,00	751.255,00	751.255,00	167.000,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT KAI merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT KAI meliputi : Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Satu Hari, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Obat, Pelayanan Penunjang Diagnostik, Pelayanan Tindakan Medis, Pelayanan Kesehatan Gigi, Pelayanan Kedokteran Forensik, Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah, serta Pelayanan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : KL.705/IV/DO.9/2019-134.4/395/430.10.7/2021.

b. PT Jasa Raharja

Tabel 5-294 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PT Jasa Raharja)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2017	39.419.436,00	0,00	0,00	39.419.436,00
2	2018	28.251.831,00	0,00	0,00	28.251.831,00
3	2019	7.345.411,00	0,00	0,00	7.345.411,00
4	2020	35.206.709,00	0,00	6.719.675,00	28.487.034,00
5	2021	0,00	1.258.200.271,00	928.841.457,00	329.358.814,00
Jumlah		110.223.387,00	1.258.200.271,00	935.561.132,00	432.862.526,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT Jasa Raharja merupakan piutang atas pelayanan penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum meliputi Pelayanan Gawat Darurat di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 134.4/858.1/430.10.7/2019.

c. BPJS Tenaga Kerja

Tabel 5-295 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (BPJS Tenaga Kerja)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2018	348.700,00	0,00	0,00	348.700,00
2	2019	44.718.776,00	0,00	0,00	44.718.776,00
3	2020	55.937.971,00	0,00	1.082.375,00	54.855.596,00
4	2021	0,00	126.654.808,00	126.654.808,00	0,00
Jumlah		101.005.447,00	126.654.808,00	127.737.183,00	99.923.072,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Tenaga Kerja merupakan piutang atas pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi : Pelayanan Gawat Darurat, Pemeriksaan Dasar dan Penunjang, Perawatan lanjutan, Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Perawatan Intensif, Pengobatan, Pelayanan Khusus, Alat Kesehatan dan Implan, Jasa Dokter/Medis, Operasi, Pelayanan Darah, dan Rehabilitasi Medik di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : PER/43/112018-134.4/ 1330.1/430.10.7/2021.

d. Perhutani

Tabel 5-296 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya (Perhutani)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	2.882.257,00	2.882.257,00	0,00
Jumlah		0,00	2.882.257,00	2.882.257,00	0,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Perhutani merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga Perum Perhutani KPH Bondowoso meliputi : Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Kecelakaan Kerja di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 01/PKS/SDM/BDW/DIVRE-JATIM/2020 -134.4/1353.1/430.10.7/2020.

e. Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)

Tabel 5-297 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PPBRI)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	723.500,00	0,00	723.500,00	0,00
2	2021	0,00	7.783.500,00	7.783.500,00	0,00
Jumlah		723.500,00	7.783.500,00	8.507.000,00	0,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PPBRI merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi anggota/pensiunan BRI Cabang Bondowoso beserta Keluarganya meliputi; Pelayanan Rawat Jalan, Perawatan Melahirkan, Perawatan Rawat Inap di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : B078/PC/03/2019-134.4/272.2/430.10.7/ 2019.

f. Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM

Tabel 5-298 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2017	2.477.150,00	0,00	0,00	2.477.150,00
2	2018	1.592.630,00	0,00	0,00	1.592.630,00
3	2020	2.577.566,00	0,00	2.571.766,00	5.800,00
4	2021	0,00	69.720.025,00	49.719.724,00	20.000.301,00
Jumlah		6.647.346,00	69.720.025,00	52.291.490,00	24.075.881,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom merupakan piutang atas pelayanan kesehatan dan perawatan bagi peserta Yayasan Kesehatan Telkom di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 209/HK.630/YAKES-053/2020-134.4/1564.1/430.10.7/2020.

g. RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo

Tabel 5-299 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00	0,00
2	2021	0,00	142.075.000,00	127.700.000,00	14.375.000,00
Jumlah		26.350.000,00	142.075.000,00	154.050.000,00	14.375.000,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo merupakan pelayanan rujukan pasien UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo meliputi : Pelayanan Rujukan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Tindakan Pembedahan, Perawatan Penunjang, Pelayanan Multi Drug Resistance (MDR), Pelayanan HIV / AIDS, Pelayanan Ponek, Pelayanan TB-Dots, Pelayanan Rujukan Parsial untuk pemeriksaan diagnostik, Pelayanan Onkologi/Kemoterapi, Pelayanan Specimen di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 455/685/431.518/2019 - 134.4/1753/430.10.7/2019.

h. Lab RS Bhayangkara Bondowoso

Tabel 5-300 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Lab RS Bhayangkara Bondowoso)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	324.660.000,00	324.660.000,00	0,00
Jumlah		0,00	324.660.000,00	324.660.000,00	0,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Lab RS Bhayangkara merupakan piutang atas pelayanan Laboratorium Klinik dan Radiologi RS Bhayangkara Bondowoso meliputi : Layanan Rujukan Bahan Pemeriksaan Laboratorium atau Radiologi di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : MOU/35/V/HUK.8.1/2019/Rumkit - 134.4/619.1/430.10.7/2019.

i. Dinas Kesehatan Situbondo

Tabel 5-301 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Dinas Kesehatan Situbondo)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	87.526.594,00	77.526.594,00	10.000.000,00
Jumlah		0,00	87.526.594,00	77.526.594,00	10.000.000,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Dinkes Situbondo merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jampersal, Pelayanan Penduduk Masyarakat Miskin dengan Identitas Surat Pernyataan Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Situbondo di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 440/7399.1/431.202.5.2/2020 - 134.4/177/430.10.7/2020.

j. Kemenkes

Tabel 5-302 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Kemenkes)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	8.956.656.000,00	0,00	8.956.656.000,00	0,00
2	2021	0,00	71.745.459.600,00	71.055.567.000,00	689.892.600,00
Jumlah		8.956.656.000,00	71.745.459.600,00	80.012.223.000,00	689.892.600,00

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes merupakan piutang atas pelayanan pasien rujukan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/218/KPTS/013/2020.

5. Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan piutang atas kelebihan pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2014 yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-303 Rincian Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	HANURA	9.240.633,00	0,00	0,00	9.240.633,00
2	P K P B	3.353.500,00	0,00	0,00	3.353.500,00
3	P P R N	3.477.700,00	0,00	0,00	3.477.700,00
4	P - BARNAS	4.077.133,00	0,00	0,00	4.077.133,00
5	P K N U	74.491.633,00	0,00	0,00	74.491.633,00
6	DEMOKRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		94.640.604,00	0,00	0,00	94.640.604,00

6. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan piutang hasil penjualan kendaraan darat bermotor yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-304 Rincian Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2013	35.350.000,00	0,00	0,00	35.350.000,00
2	2014	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00
3	2016	8.710.000,00	0,00	500.000,00	8.210.000,00
4	2020	39.621.830,00	0,00	37.817.200,00	1.804.630,00
5	2021	0,00	498.957.339,00	282.183.789,00	216.773.550,00
Jumlah		85.441.830,00	498.957.339,00	322.260.989,00	262.138.180,00

Penambahan sebesar Rp498.957.339,00 berdasarkan :

- a. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/378/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/8/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- b. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/379/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/9/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

- c. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/380/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/10/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- d. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/381/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/11/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- e. Penjualan Kendaraan dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/382/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/12/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pertanian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- f. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dan Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/383/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/13/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- g. Penjualan Kendaraan dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/384/430.4.2/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/14/430.4.2/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- h. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dan Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1010/430.4.2/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah

Yang Dikelola Oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/21/430.4.2/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

- i. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1011/430.4.2/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/22/430.4.2/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- j. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1012/430.4.2/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/23/430.4.2/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- k. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1013/430.4.2/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/24/430.4.2/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- l. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1014/430.4.2/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/25/430.4.2/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- m. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1051/430.4.2/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor :

188/25/430.4.2/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

- n. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2021 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/1052/430.4.2/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/25/430.4.2/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- o. Penjualan Kendaraan dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2020 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/691/430.4.2/2020 Tanggal 22 Juli 2020 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/12/430.4.2/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

Pengurangan dari realisasi pendapatan sebesar Rp322.260.989,00 merupakan pendapatan penjualan kendaraan dinas bermotor roda empat dan roda dua tahun 2021.

7. Piutang Denda Keterlambatan Proyek yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan piutang denda keterlambatan penyelesaian kegiatan/proyek yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-305 Rincian Piutang Denda Keterlambatan Proyek

No	Tahun	Piutang 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2021 (Rp)
1	2011	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
Jumlah		33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00

8. Piutang Sewa ATM Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan sewa aset BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-306 Rincian Piutang Sewa ATM (PT BNI)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
Jumlah		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00

9. Piutang Lain-Lain merupakan piutang kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa, aset tetap serta kekurangan volume pekerjaan kepada pihak ketiga yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-307 Rincian Piutang Lain-Lain

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	2.048.085.500,00	0,00	2.048.085.500,00	0,00
2	2021	0,00	403.365.703,15	0,00	403.365.703,15
Jumlah		2.048.085.500,00	403.365.703,15	2.048.085.500,00	403.365.703,15

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah belum termasuk piutang klaim Jamkesda BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebesar Rp1.223.300.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim Surat Pernyataan Miskin (SPM)	Rp	85.218.000,00
- Klaim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Rp	3.154.479,00
- Klaim Penjamin	Rp	1.134.927.796,00
Jumlah	Rp	1.223.300.275,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.7. Piutang Transfer	8.128.005.469,00	16.331.739.736,00

Piutang transfer merupakan piutang dana bagi hasil atas saldo piutang bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum diterima kasnya oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat

Tabel 5-308 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Piutang Transfer	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan	631.298.117,00	3.183.353.895,00	3.814.652.012,00	0,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.741.991.800,00	3.531.761.683,00	6.273.753.483,00	0,00
3	Bagi Hasil PBB Sektor Perkebunan	340.663.200,00	3.722.187.493,00	4.062.850.693,00	0,00
4	Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan	461.343.300,00	466.752.647,00	928.095.947,00	0,00
5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.644.973.148,00	2.049.844.805,00	4.694.817.953,00	0,00
6	Bagi Hasil SDA Kehutanan	103.817.450,00	196.376.935,00	300.194.385,00	0,00
7	Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	24.048.150,00	1.643.612.705,00	1.667.660.855,00	0,00
8	Bagi Hasil SDA Perikanan	316.881.000,00	229.300.150,00	546.181.150,00	0,00
9	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	572.689.700,00	20.775.124.846,00	21.347.814.546,00	0,00
10	Bagi Hasil SDA Gas Bumi	9.831.900,00	270.238.887,00	280.070.787,00	0,00
11	Bagi Hasil SDA Panas Bumi	28.884.550,00	53.742.301,00	82.626.851,00	0,00
	Jumlah	7.876.422.315,00	36.122.296.347,00	43.998.718.662,00	0,00

Penambahan sebesar Rp36.122.296.347,00 merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas dana bagi hasil yang terdiri dari koreksi piutang tahun 2019 sebesar Rp5.111.789.365,00 dan penambahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 sebesar Rp31.010.506.982,00.

Pengurangan sebesar Rp43.998.718.662,00 merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 yang merupakan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dan 2020.

Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan

Tabel 5-309 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	183.860.017,00	0,00	183.860.017,00	0,00
2	2020	447.438.100,00	3.183.353.895,00	3.630.791.995,00	0,00
Jumlah		631.298.117,00	3.183.353.895,00	3.814.652.012,00	0,00

b. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tabel 5-310 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	2.741.991.800,00	3.531.761.683,00	6.273.753.483,00	0,00
Jumlah		2.741.991.800,00	3.531.761.683,00	6.273.753.483,00	0,00

c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil PBB Sektor Perkebunan

Tabel 5-311 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil PBB Sektor Perkebunan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	340.663.200,00	3.722.187.493,00	4.062.850.693,00	0,00
Jumlah		340.663.200,00	3.722.187.493,00	4.062.850.693,00	0,00

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan

Tabel 5-312 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	461.343.300,00	466.752.647,00	928.095.947,00	0,00
Jumlah		461.343.300,00	466.752.647,00	928.095.947,00	0,00

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Tabel 5-313 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2016	2.644.973.148,00	0,00	2.644.973.148,00	0,00
2	2020	0,00	2.049.844.805,00	2.049.844.805,00	0,00
Jumlah		2.644.973.148,00	2.049.844.805,00	4.694.817.953,00	0,00

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Kehutanan

Tabel 5-314 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Kehutanan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	103.817.450,00	196.376.935,00	300.194.385,00	0,00
Jumlah		103.817.450,00	196.376.935,00	300.194.385,00	0,00

- g. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)

Tabel 5-315 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2016	24.048.150,00	0,00	24.048.150,00	0,00
2	2020	0,00	1.643.612.705,00	1.643.612.705,00	0,00
Jumlah		24.048.150,00	1.643.612.705,00	1.667.660.855,00	0,00

- h. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Perikanan

Tabel 5-316 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Perikanan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2016	316.881.000,00	0,00	316.881.000,00	0,00
2	2020	0,00	229.300.150,00	229.300.150,00	0,00
Jumlah		316.881.000,00	229.300.150,00	546.181.150,00	0,00

- i. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Minyak Bumi

Tabel 5-317 Bagi Hasil SDA Minyak Bumi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	572.689.700,00	20.775.124.846,00	21.347.814.546,00	0,00
Jumlah		572.689.700,00	20.775.124.846,00	21.347.814.546,00	0,00

- j. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Gas Bumi

Tabel 5-318 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Gas Bumi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	9.831.900,00	270.238.887,00	280.070.787,00	0,00
Jumlah		9.831.900,00	270.238.887,00	280.070.787,00	0,00

- k. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Panas Bumi

Tabel 5-319 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Panas Bumi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	2020	28.884.550,00	53.742.301,00	82.626.851,00	0,00
Jumlah		28.884.550,00	53.742.301,00	82.626.851,00	0,00

2. Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Provinsi

Tabel 5-320 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

No	Piutang Transfer	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	36.350.235.548,00	36.350.235.548,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	14.232.193.517,00	14.232.193.517,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	24.371.334.335,00	24.371.334.335,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan (P-AP)	0,00	358.921.065,00	358.921.065,00	0,00
5	Pajak Rokok	8.455.317.421,00	45.430.565.267,00	45.757.877.219,00	8.128.005.469,00
Jumlah		8.455.317.421,00	120.743.249.732,00	121.070.561.684,00	8.128.005.469,00

Penambahan sebesar Rp120.743.249.732,00 merupakan bagian Pemkab Bondowoso atas dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi berdasarkan:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/728/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2020;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/299/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2020;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/300/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/247/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/463/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/420/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
- g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/738/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2021;
- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/727/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021;
- i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/941/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021; dan
- j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/836/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Pada Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021.

Pengurangan sebesar Rp121.070.561.684,00 merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2020	Rp 37.762.170.114,00
- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2021	Rp 83.308.391.570,00
Jumlah	<u>Rp 121.070.561.684,00</u>

	Saldo	Saldo
	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.8. Piutang Lainnya	<u>8.968.269.888,86</u>	<u>9.112.000.988,86</u>

Jumlah Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis piutang pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah dan transfer. Piutang yang timbul dari perjanjian/perikatan merupakan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam jangka

waktu dan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-321 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
a	Kredit Sapi Kereman	881.576.257,00	0,00	0,00	881.576.257,00
b	Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	2.365.214.118,92	0,00	0,00	2.365.214.118,92
c	Kredit Pembelian Gabah Petani	1.389.129.336,94	0,00	71.397.600,00	1.317.731.736,94
d	Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.457.972.026,00	0,00	72.333.500,00	4.385.638.526,00
e	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
Jumlah		9.112.000.988,86	0,00	143.731.100,00	8.968.269.888,86

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp8.968.269.888,86 seluruhnya merupakan piutang yang lebih dari 3 tahun terhitung dari tanggal jatuh temponya tidak dilakukan pelunasan (kualitas kredit macet). Untuk menindaklanjuti permasalahan besarnya kredit macet selain melakukan upaya penagihan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 telah melakukan inventarisasi piutang yang timbul dari perjanjian/perikatan untuk mengklasifikasikan permasalahan piutang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyelesaian piutang.

Kegiatan Inventarisasi piutang dilaksanakan oleh masing-masing OPD yang membidangi (*leading sector*) dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi Intern
Berupa kegiatan pengumpulan data dan informasi berdasarkan dokumen pendukung piutang berupa dokumen perjanjian, dokumen agunan, catatan pembukuan dan bukti-bukti lainnya yang sah serta wawancara kepada pegawai/ petugas yang membidangi.
- 2) Inventarisasi Ekstern
Melakukan klarifikasi nilai piutang kepada debitur dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil inventarisasi piutang kemudian OPD melakukan pengelompokan/klasifikasi piutang ke dalam 3 kategori dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-322 Pengelompokan/Klasifikasi Piutang Dari Perjanjian/Perikatan

No	Kategori	Kriteria
1	Sesuai	Apabila debitur mengakui besarnya nilai piutang sesuai dengan yang tercatat pada neraca, atau OPD mempunyai keyakinan yang sangat memadai berupa dokumen perjanjian kredit, dokumen agunan, catatan pembukuan, keterangan petugas, atau bukti-bukti lainnya yang sah bahwa debitur memiliki piutang yang besarnya sesuai dengan yang tercatat pada neraca.
2	Tidak Sesuai	Apabila debitur mengakui memiliki hutang yang sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca namun menyatakan telah lunas, atau Apabila debitur mengakui memiliki hutang namun nilainya tidak sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca dan menyatakan telah lunas, atau Apabila debitur mengakui memiliki hutang namun nilainya tidak sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca dan menyatakan belum lunas, atau Debitur menyatakan tidak memiliki hutang kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3	Tidak terkonfirmasi	Apabila tidak ada konfirmasi/informasi dari debitur, atau OPD belum dapat melengkapi dokumen perjanjian kredit/catatan pembukuan/dokumen agunan/bukti-bukti lainnya yang sah sebagai pendukung nilai piutang yang tercatat pada neraca.

Hasil inventarisasi terhadap piutang per 31 Desember 2021 diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 5-323 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan

No	Jenis	Sesuai (Rp)	Tidak Sesuai (Rp)	Tidak Terkonfirmasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kredit Sapi Kereman	32.117.530,00	355.459.975,00	493.998.752,00	881.576.257,00
2	Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	0,00	0,00	2.365.214.118,92	2.365.214.118,92
3	Kredit Pembelian Gabah Petani	0,00	502.894.715,00	814.837.021,94	1.317.731.736,94
4	Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.951.080.393,00	156.863.933,00	277.694.200,00	4.385.638.526,00
5	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikatan	16.456.250,00	0,00	1.653.000,00	18.109.250,00
Jumlah		3.999.654.173,00	1.015.218.623,00	3.953.397.092,86	8.968.269.888,86

- Saldo Kredit Sapi Kereman per 31 Desember 2021 merupakan piutang atas kredit sapi kereman kepada Petani Peternak yang disalurkan dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan saat ini dikelola oleh Dinas Pertanian dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-324 Rincian Piutang Kredit Sapi Kereman

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2000	47.573.746,00	0,00	0,00	47.573.746,00
2	2001 (APBD)	139.415.011,00	0,00	0,00	139.415.011,00
3	2002 (APBD)	258.728.300,00	0,00	0,00	258.728.300,00
4	2002 (PAK)	344.308.200,00	0,00	0,00	344.308.200,00
5	2003	91.551.000,00	0,00	0,00	91.551.000,00
Jumlah		881.576.257,00	0,00	0,00	881.576.257,00

- Saldo Kredit Usaha Kecil dan Menengah (*feeder point*) per 31 Desember 2021 merupakan piutang kredit kepada pengusaha kecil dan menengah /UKM yang disalurkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 yang saat ini dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-325 Rincian Piutang Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Feeder Point)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	APBD 2001	9.751.110,00	0,00	0,00	9.751.110,00
2	PAK 2001	50.197.718,00	0,00	0,00	50.197.718,00
3	APBD 2002	285.730.850,00	0,00	0,00	285.730.850,00
4	PAK 2002	321.633.150,00	0,00	0,00	321.633.150,00
5	MEKANISASI 2002	166.996.990,00	0,00	0,00	166.996.990,00
6	SENTRA PAK 2002	19.931.200,00	0,00	0,00	19.931.200,00
7	APBD 2003	797.956.700,00	0,00	0,00	797.956.700,00
8	APBD 2004	306.171.800,00	0,00	0,00	306.171.800,00
9	APBD 2005	285.137.500,92	0,00	0,00	285.137.500,92
10	APBD 2006	88.548.100,00	0,00	0,00	88.548.100,00
11	APBD 2007	14.599.000,00	0,00	0,00	14.599.000,00
12	APBD 2008	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00
Jumlah		2.365.214.118,92	0,00	0,00	2.365.214.118,92

- Saldo Kredit Pembelian Gabah Petani per 31 Desember 2021 merupakan piutang kredit untuk penyangga stock pangan dan kelompok lumbung pangan yang disalurkan

dari tahun 2002 sampai dengan 2007 dan saat ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-326 Rincian Piutang Kredit Pembelian Gabah Petani

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	GABAH 2002	649.138.872,64	0,00	0,00	649.138.872,64
2	GABAH 2003	683.925,00	0,00	388.500,00	295.425,00
3	GABAH 2004	31.168.850,00	0,00	2.009.100,00	29.159.750,00
4	GABAH 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GABAH 2006	128.500.000,00	0,00	69.000.000,00	59.500.000,00
6	GABAH 2007	350.086.000,00	0,00	0,00	350.086.000,00
7	LUMBUNG 2002	99.362.289,30	0,00	0,00	99.362.289,30
8	LUMBUNG PAK 2002	26.598.000,00	0,00	0,00	26.598.000,00
9	LUMBUNG 2003	103.591.400,00	0,00	0,00	103.591.400,00
Jumlah		1.389.129.336,94	0,00	71.397.600,00	1.317.731.736,94

4. Saldo Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2021 merupakan piutang kredit kepada Koperasi dan UKM yang disalurkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dan saat ini dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-327 Rincian Piutang Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	KSP/USP (APBD 2002)	28.135.000,00	0,00	0,00	28.135.000,00
2	KSP/USP (PAK 2002)	201.884.160,00	0,00	0,00	201.884.160,00
3	PKM (PAK 2002)	31.495.000,00	0,00	0,00	31.495.000,00
4	KSP/USP (APBD 2003)	744.210.700,00	0,00	11.550.000,00	732.660.700,00
5	PKM (APBD 2003)	289.422.500,00	0,00	6.002.000,00	283.420.500,00
6	KSP/USP (APBD 2004)	74.563.000,00	0,00	0,00	74.563.000,00
7	PKM (APBD 2004)	399.436.000,00	0,00	500.000,00	398.936.000,00
8	KSP/USP (PAK 2004)	46.027.800,00	0,00	0,00	46.027.800,00
9	PKM (PAK 2004)	246.169.100,00	0,00	0,00	246.169.100,00
10	KSP/USP (APBD 2005)	280.481.933,00	0,00	0,00	280.481.933,00
11	PKM (APBD 2005)	241.555.500,00	0,00	30.265.000,00	211.290.500,00
12	KSP/USP (PAK 2005)	512.105.000,00	0,00	0,00	512.105.000,00
13	PKM (PAK 2005)	553.985.000,00	0,00	18.650.000,00	535.335.000,00
14	KSP/USP (APBD 2006)	27.049.000,00	0,00	0,00	27.049.000,00
15	PKM (APBD 2006)	512.018.833,00	0,00	0,00	512.018.833,00
16	PKM (APBD 2007)	175.154.000,00	0,00	0,00	175.154.000,00
17	PKM (APBD 2008)	94.279.500,00	0,00	5.366.500,00	88.913.000,00
Jumlah		4.457.972.026,00	0,00	72.333.500,00	4.385.638.526,00

5. Saldo Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan per 31 Desember 2021 merupakan piutang kepada petani ikan penerima bantuan *feeder point* yang disalurkan pada tahun 2005 yang saat ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-328 Rincian Piutang Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2005	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
Jumlah		18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00

Terhadap hasil inventarisasi piutang, sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini tidak diketahui upaya apa yang telah dilakukan oleh OPD terkait.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	28.862.198.413,61	27.526.204.145,14

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Piutang yang disajikan sudah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan/*Net Realizable Value* (NRV) dengan memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin teknis Nomor 6 Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa nilai piutang disajikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Tabel 5-329 Jenis Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	19.893.928.524,75	18.414.203.156,28
2	Penyisihan Piutang Lainnya	8.968.269.888,86	9.112.000.988,86
	Jumlah	28.862.198.413,61	27.526.204.145,14

Berdasarkan daftar umur piutang, berikut tabel penyisihan piutang tak tertagih :

Tabel 5-330 Rincian Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Saldo Piutang Per 31 Des 2021 (Rp)	% Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Des 2021	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Des 2020
1	Lancar (Belum Jatuh Tempo)	9.790.580.654,61	0%	0,00	0,00
2	Kurang Lancar (s.d 1 tahun)	16.172.014.624,28	30%	4.851.604.387,28	6.190.921.305,10
3	Diragukan (Lebih dari 1 s.d 3 tahun)	6.641.078.001,82	70%	4.648.754.601,27	8.162.231.854,98
4	Macet (Lebih dari 3 tahun)	19.361.839.425,06	100%	19.361.839.425,06	13.173.050.985,06
	Jumlah	51.965.512.705,77		28.862.198.413,61	27.526.204.145,14

Rincian Penyisihan Piutang dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran 3.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka	4.000.000,00	4.000.000,00

Beban dibayar di muka merupakan pengeluaran OPD yang telah dikeluarkan dari rekening kas umum daerah dan membebani pagu anggaran, namun fasilitas/barang/jasa dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh OPD. Beban dibayar di muka inilah yang menyebabkan pengakuan belanja dengan pengakuan beban selain terjadinya utang belanja/utang jangka pendek lainnya.

Saldo beban dibayar di muka Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000,00 sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-331 Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Sewa Rumah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Beban dibayar dimuka berasal dari perhitungan sewa rumah oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai tempat singgah/tinggal sementara bagi tenaga kerja asal Kabupaten Bondowoso yang bekerja di Kota Batam. Masa sewa dihitung mulai 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp48.000.000,00. Penambahan beban dibayar dimuka sebesar Rp4.000.000,00 merupakan nilai sewa untuk bagian bulan Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-332 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka

No	Masa Sewa (Bulan)	Nilai Sewa (Rp)	Sudah Jatuh Tempo (11/12 x Nilai Sewa) (Rp)	Belum Jatuh Tempo (1/12 x Nilai Sewa) (Rp)
1	12	48.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah		48.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.1.11. Persediaan	41.836.674.564,08	45.727.718.089,39

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan sebesar Rp41.836.674.564,08 terdiri dari :

Tabel 5-333 Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	45.727.718.089,39	173.883.058.541,93	177.774.102.067,24	41.836.674.564,08
2	Barang Habis Pakai Tak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Barang Habis Pakai Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		45.727.718.089,39	173.883.058.541,93	177.774.102.067,24	41.836.674.564,08

Persediaan per 31 Desember 2021 dinilai berdasarkan inventarisasi fisik (sesuai SAP Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan) dan laporan mutasi persediaan per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	45.727.718.089,39
Penambahan Tahun 2021	Rp	173.883.058.541,93
Pengurangan Tahun 2021	Rp	177.774.102.067,24
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	41.836.674.564,08

Penjelasan untuk masing-masing penambahan persediaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan persediaan sebesar Rp173.883.058.541,93 terdiri dari :		
a. Belanja barang persediaan	Rp	139.746.308.082,01
b. Penerimaan dari hibah	Rp	29.701.717.619,23
c. Belanja non barang persediaan	Rp	285.494.547,80
d. Mutasi masuk	Rp	2.916.692.909,30
e. Reklasifikasi	Rp	604.796.390,86
f. Persediaan diterima dimuka	Rp	628.048.992,73
Jumlah	Rp	173.883.058.541,93

Penjelasan untuk masing-masing penambahan persediaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Persediaan sebesar Rp139.746.308.082,01;
 Jumlah tersebut merupakan penambahan persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada APBD. Dalam pelaksanaannya, realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2021 tidak seluruhnya menambah persediaan karena didalamnya terdapat barang yang bukan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-334 Belanja Barang Dan Jasa Yang Menjadi Persediaan

No	Uraian	Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Pengurangan (Rp)	Belanja Barang Persediaan (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	142.929.370.626,25	3.183.062.544,24	139.746.308.082,01
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
Jumlah		142.933.870.626,25	3.187.562.544,24	139.746.308.082,01

Selisih antara realisasi belanja barang persediaan LRA dengan persediaan yang diakui dari belanja barang dan jasa disebabkan adanya belanja barang non persediaan, pembayaran utang dan kelebihan pembayaran (piutang) yang bersumber dana dari realisasi belanja barang dan jasa 2021 sebesar Rp3.187.562.544,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-335 Rincian Belanja Barang Persediaan Yang Tidak Diakui sebagai Persediaan

No	Uraian	Belanja Barang Non Persediaan (Rp)	Pengurangan		Jumlah (Rp)
			Utang (Rp)	Piutang (Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	332.107.247,00	2.850.955.297,24	0,00	3.183.062.544,24
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		336.607.247,00	2.850.955.297,24	0,00	3.187.562.544,24

Pencatatan penambahan persediaan dari belanja barang persediaan sebesar Rp139.746.308.082,01 pada Laporan Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten

Bondowoso disesuaikan dengan klasifikasi persediaan riilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-336 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Belanja Barang Persediaan (Rp)	Reklasifikasi		Belanja Barang Persediaan Setelah Reklasifikasi (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	139.746.308.082,01	25.971.388.800,00	25.971.388.800,00	139.746.308.082,01
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		139.746.308.082,01	25.971.388.800,00	25.971.388.800,00	139.746.308.082,01

- b. Penerimaan dari Hibah sebesar Rp29.701.717.619,23;
Jumlah tersebut merupakan penambahan persediaan karena adanya hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan	Rp	3.280.030.660,51
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	725.528.800,00
- Obat-Obatan	Rp	23.422.469.841,82
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	1.807.875.496,90
- Natura dan Pakan	Rp	465.812.820,00
Jumlah	Rp	29.701.717.619,23

- c. Belanja Non Barang Persediaan sebesar Rp285.494.547,80;
Jumlah tersebut merupakan perolehan persediaan yang direalisasikan sebagai belanja non barang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	350.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	33.228.000,00
- Natura dan Pakan	Rp	36.655.000,00
- Persediaan Dalam Proses	Rp	215.261.547,80
Jumlah	Rp	285.494.547,80

- d. Mutasi masuk sebesar Rp2.916.692.909,30;
Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah (mutasi masuk) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	56.593.251,00
- Obat-Obatan	Rp	2.860.099.658,30
Jumlah	Rp	2.916.692.909,30

- e. Reklasifikasi sebesar Rp604.796.390,86;
Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses yang telah selesai menjadi persediaan untuk dijual/diserahkan.

- f. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp628.048.992,73;
Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena pengakuan utang persediaan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan	Rp	388.382.292,24
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	14.632.000,00

- Obat-Obatan	Rp	225.034.700,49
Jumlah	Rp	628.048.992,73
2. Pengurangan persediaan sebesar Rp177.774.102.067,24 terdiri dari :		
a. Pemakaian barang persediaan	Rp	173.981.557.323,44
b. Mutasi keluar	Rp	2.916.692.909,30
c. Kedaluwarsa tahun berjalan	Rp	271.055.443,64
d. Reklasifikasi	Rp	604.796.390,86
Jumlah	Rp	177.774.102.067,24

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan persediaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian barang persediaan sebesar Rp173.981.557.323,44;
Jumlah tersebut merupakan pemakaian barang persediaan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-337 Rincian Pemakaian Persediaan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan	39.070.999.133,01
2	Suku Cadang	2.904.395.479,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	38.908.785.149,13
4	Obat-Obatan	42.903.777.575,37
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	21.545.134.319,76
6	Natura dan Pakan	28.648.465.667,17
Jumlah		173.981.557.323,44

- b. Mutasi keluar sebesar Rp2.916.692.909,30;
Jumlah tersebut merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah (mutasi keluar) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	56.593.251,00
- Obat-Obatan	Rp	2.860.099.658,30
Jumlah	Rp	2.916.692.909,30

- c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp 271.055.443,64;
Jumlah tersebut merupakan persediaan yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-338 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/Expired Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan	19.042.889,88
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	94.378.393,85
3	Obat-Obatan	157.634.159,91
Jumlah		271.055.443,64

- d. Reklasifikasi sebesar Rp604.796.390,86;
Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses yang telah selesai menjadi persediaan untuk dijual/diserahkan

Selain persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.836.674.564,08, terdapat persediaan induk dan benih ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta persediaan vaksin pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Koesnadi yang belum dicatat sebagai persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-339 Rincian Persediaan Ikan Tahun 2021 Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Persediaan	Satuan	Ukuran	Saldo			Saldo Per 31 Des 2021	Lokasi
				Per 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan		
1	Induk Nila	Ekor		840	0	120	720	Kolam Tenggarang
2	Benih Nila	Ekor	3-5 cm	28.750	96.840	117.640	7.950	Kolam Tenggarang
3	Benih Nila	Ekor	7-9 cm	1.480	15.090	15.890	680	Kolam Tenggarang
4	Induk Tombro	Ekor		6	0	0	6	Kolam Tenggarang
5	Calon Induk Ikan	Ekor	1 kg 4-12 ekor	55.000	0	53.200	1.800	Kolam Sumberwringin
6	Calon Induk Tombro	Ekor		80	0	24	56	Kolam Sumberwringin
Jumlah				86.156	111.930	186.874	11.212	

Tabel 5-340 Rincian Persediaan Vaksin Tahun 2021 Pada Dinas Kesehatan

No	Fasyankes	Saldo Per 31 Desember 2021			
		Sinovac Duodose	Aztrazeneca	Moderna	PFizer
1	Maesan	110	8	0	208
2	Grujugan	280	0	0	0
3	Nangkaan	495	0	0	154
4	Curahdami	87	0	0	99
5	Binakal	222	0	0	9
6	Pakem	137	0	0	34
7	Wringin	566	13	0	11
8	Kotakulon	898	0	0	95
9	Tegalampel	39	0	0	69
10	Kademangan	288	0	0	57
11	Tenggarang	55	0	0	13
12	Taman Krocok	260	0	0	50
13	Wonosari	26	1	0	13
14	Tapen	200	0	0	15
15	Klabang	581	0	0	20
16	Prajekan	313	0	0	97
17	Botolinggo	95	0	0	40
18	Sukosari	349	0	0	56
19	Cermee	253	5	0	98
20	Sumber Wringin	111	3	0	154
21	Sempol	16	0	0	45
22	Tlogosari	230	0	0	67
23	Pujer	50	0	0	0
24	Jambesari	206	0	0	29
25	Tamanan	808	0	0	73
26	I F K	30.165	390	57	20.025
Jumlah		36.840	420	57	21.531

Tabel 5-341 Rincian Persediaan Vaksin Tahun 2021 Pada RSUD dr. H. Koesnadi

No	Fasyankes	Saldo Per 31 Desember 2021			
		Sinovac Duodose	Aztrazeneca	Moderna	PFizer
1	RSU dr. H. Koesnadi	420	3	4	37
Jumlah		420	3	4	37

5.3.1.1.11.1 Barang Pakai Habis

Mutasi atas saldo Barang Pakai Habis per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.836.674.564,08 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5-342 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Bahan	16.285.358.817,03	41.382.892.108,56	39.146.635.273,89	18.521.615.651,70
2	Suku Cadang	48.040.600,00	2.889.129.506,00	2.904.395.479,00	32.774.627,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	7.270.454.813,03	38.585.660.338,00	39.003.163.542,98	6.852.951.608,05
4	Obat-Obatan	14.650.336.023,64	45.400.731.527,81	45.921.511.393,58	14.129.556.157,87
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.924.007.186,00	17.169.228.767,76	21.545.134.319,76	1.548.101.634,00
6	Natura dan Pakan	1.159.985.806,63	28.240.154.746,00	28.648.465.667,17	751.674.885,46
7	Persediaan Dalam Proses	389.534.843,06	215.261.547,80	604.796.390,86	0,00
Jumlah		45.727.718.089,39	173.883.058.541,93	177.774.102.067,24	41.836.674.564,08

Mutasi penambahan barang pakai habis selama Tahun 2021 sebesar Rp173.883.058.541,93 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan bahan tahun berjalan sebesar Rp41.382.892.108,56 berasal dari :
 - a. Realisasi belanja barang pakai habis - bahan sebesar Rp37.657.535.904,81;
 - b. Penerimaan hibah bahan sebesar Rp3.280.030.660,51 dengan rincian sebagaimana Lampiran 4;
 - c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp350.000,00 merupakan perolehan bahan yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;
 - d. Mutasi masuk bahan sebesar Rp56.593.251,00 merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
 - e. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp388.382.292,24 merupakan penambah bahan karena pengakuan utang persediaan tahun 2021.
2. Penambahan suku cadang tahun berjalan sebesar Rp2.889.129.506,00 berasal dari realisasi belanja barang pakai habis - suku cadang.
3. Penambahan alat/bahan untuk kegiatan kantor tahun berjalan sebesar Rp38.585.660.338,00 berasal dari:
 - a. Realisasi belanja barang pakai habis - alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp37.812.271.538,00;
 - b. Penerimaan hibah alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp725.528.800,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5-343 Rincian HibahAlat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
1	Blangko Elektronik KTP	63.426.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 470/20/109.06/2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Blangko Elektronik KTP	126.852.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 471.13/385/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Blangko Elektronik KTP	63.426.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 470/32/109.06/2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Blangko Elektronik KTP	63.426.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 470/79/109.06/2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
5	Blangko Elektronik KTP	169.136.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 471.13/1101/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Blangko Elektronik KTP	21.142.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 471.13/1549/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Blangko Elektronik KTP	105.710.000,00	Kementerian Dalam Negeri	No. 471.13/2158/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Buku KIA	112.410.800,00	Kementerian Kesehatan	KN.02.04/6/PPK/1402/VI/2021	Dinas Kesehatan
JUMLAH		725.528.800,00			

- c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp33.228.000,00 merupakan perolehan alat/bahan untuk kegiatan kantor yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan; dan
- d. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp14.632.000,00 merupakan penambah alat/bahan untuk kegiatan kantor karena pengakuan utang persediaan tahun 2021.
4. Penambahan obat-obatan tahun berjalan sebesar Rp45.400.731.527,81 berasal dari:
 - a. Realisasi belanja barang pakai habis – obat-obatan sebesar Rp18.893.127.327,20;
 - b. Penerimaan hibah obat-obatan sebesar Rp23.422.469.841,82 dengan rincian sebagaimana Lampiran 5; dan
 - c. Mutasi masuk obat-obatan sebesar Rp2.860.099.658,30 merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
 - d. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp225.034.700,49 merupakan penambah obat-obatan untuk kegiatan kantor karena pengakuan utang persediaan tahun 2021.
5. Penambahan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun berjalan sebesar Rp17.169.228.767,76 terdiri dari :
 - a. Realisasi belanja barang pakai habis – persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp14.756.556.880,00;
 - b. Penerimaan hibah persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp1.807.875.496,90 dengan rincian sebagaimana Lampiran 6; dan
 - c. Reklasifikasi dari persediaan dalam proses yang telah selesai sebesar Rp604.796.390,86.
6. Penambahan natura dan pakan tahun berjalan sebesar Rp28.240.154.746,00 terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja barang pakai habis – natura dan pakan sebesar Rp27.737.686.926,00;
 - b. Penerimaan hibah natura dan pakan sebesar Rp465.812.820,00 dengan rincian sebagaimana Lampiran 7; dan
 - c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp36.655.000,00 merupakan perolehan natura dan pakan yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan.
7. Penambahan persediaan dalam proses tahun berjalan sebesar Rp215.261.547,80 merupakan penyelesaian persediaan dalam proses yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan.

Sedangkan mutasi pengurangan barang pakai habis selama tahun 2021 sebesar Rp177.774.102.067,24 terdiri dari:

1. Pengurangan bahan tahun berjalan sebesar Rp39.146.635.273,89 terdiri dari:

- a. Pemakaian persediaan bahan sebesar Rp39.070.999.133,01;
 - b. Mutasi keluar bahan sebesar Rp56.593.251,00 merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
 - c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp19.042.889,88 merupakan bahan yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2021.
2. Pengurangan suku cadang tahun berjalan sebesar Rp2.904.395.479,00 merupakan pemakaian suku cadang tahun 2021.
 3. Pengurangan alat/bahan untuk kegiatan kantor tahun berjalan sebesar Rp39.003.163.542,98 terdiri dari:
 - a. Pemakaian persediaan bahan sebesar Rp38.908.785.149,13; dan
 - b. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp94.378.393,85 merupakan alat/bahan untuk kegiatan kantor yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2021.
 4. Pengurangan obat-obatan tahun berjalan sebesar Rp45.921.511.393,58 terdiri dari:
 - a. Pemakaian persediaan obat-obatan sebesar Rp42.903.777.575,37;
 - b. Mutasi keluar obat-obatan sebesar Rp2.860.099.658,30 merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
 - c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp157.634.159,91 merupakan obat-obatan yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2021.
 5. Pengurangan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun berjalan sebesar Rp21.545.134.319,76 merupakan penyerahan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun 2021.
 6. Pengurangan natura dan pakan tahun berjalan sebesar Rp28.648.465.667,17 merupakan pemakaian natura dan pakan tahun 2021.
 7. Pengurangan persediaan dalam proses tahun berjalan sebesar Rp604.796.390,86 merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses yang telah selesai menjadi persediaan untuk dijual/diserahkan.

Selain barang pakai habis di atas, terdapat barang pakai habis yang sudah *expired* dan telah dikeluarkan dari penyajian neraca per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-344 Barang Pakai Habis Yang Sudah Kedaluwarsa/*Expired*

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Bahan	38.091.335,93	19.042.889,88	19.380.000,00	37.754.225,81
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	490.036.707,65	94.378.393,85	506.293.239,40	78.121.862,10
3	Obat-Obatan	136.324.284,10	157.634.159,91	84.172.853,00	209.785.591,01
	Jumlah	664.452.327,68	271.055.443,64	609.846.092,40	325.661.678,92

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	37.467.057.468,76	36.999.689.204,00

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Permanen	37.467.057.468,76	36.999.689.204,00

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut :

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda	37.467.057.468,76	36.999.689.204,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.467.057.468,76. Nilai tersebut berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

Tabel 5-345 Rincian Penyertaan Modal Pemda

No	SKPD	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan Tahun 2021 (Rp)	Pengurangan Tahun 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	21.801.839.250,00	0,00	0,00	21.801.839.250,00
2	Penyertaan pada PDAM Kabupaten Bondowoso	12.698.129.709,00	1.089.634.749,00	0,00	13.787.764.458,00
3	Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang	2.499.720.245,00	0,00	622.266.484,24	1.877.453.760,76
	Jumlah	36.999.689.204,00	1.089.634.749,00	622.266.484,24	37.467.057.468,76

Dasar hukum penyertaan Modal Pemda pada Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, penyertaan pada PDAM dan PT Bondowoso Gemilang Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

Tabel 5-346 Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemda

No	Penyertaan Modal	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Dasar Hukum	Metode Penilaian
1	Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	21.801.839.250,00	Perda No 10 Th 2011	Biaya

No	Penyertaan Modal	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Dasar Hukum	Metode Penilaian
2	Penyertaan pada PDAM Kabupaten Bondowoso	13.787.764.458,00	Perda No 3 Th 2015	Ekuitas
3	Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang	1.877.453.760,76	Perda No 1 Th 2017	Ekuitas
Jumlah		37.467.057.468,76		

Penjelasan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada masing-masing perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut :

1. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengalami perubahan dengan jumlah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.801.839.250,00 dalam bentuk surat kolektif saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. seri A Nomor 30 Tanggal 10 Juli 2012 yang mewakili 87.207.357 lembar saham biasa atas nama Pemda Tingkat II Kabupaten Bondowoso dari nomor 10894959490 s/d 10982166846.
2. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PDAM per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.787.764.458,00 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp1.089.634.749,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.698.129.709,00. Perhitungan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan pada laporan keuangan PDAM tahun 2021 yang sudah diaudit (*Audited*), yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5-347 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Penyertaan Modal	19.455.312.026,00	18.915.797.642,00
2	Bagian Laba Pemda	482.470.337,00	539.514.384,00
Jumlah		19.937.782.363,00	19.455.312.026,00
3	Akumulasi Kerugian	(6.150.017.905,00)	(6.757.182.317,00)
Saldo		13.787.764.458,00	12.698.129.709,00

Adapun perhitungan bagian laba Pemda adalah sebagai berikut :

Tabel 5-348 Perhitungan Bagian Laba Pemda Pada PDAM

No	Uraian	Labatahun 2021	%	Pembagian Laba 2021	Pembagian Laba 2020
1	Bagian Laba PDAM	877.218.795,00	55	482.470.337,00	539.514.384,00
Jumlah		877.218.795,00		482.470.337,00	539.514.384,00

Penjelasan atas jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PDAM per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-349 Rincian Penyertaan Modal Pemda Pada PDAM

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Saldo Per 31 Des 2020
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah	19.937.782.363,00	19.455.312.026,00
a.	Penyediaan tanah seluas 6.720 m2	51.941.500,00	51.941.500,00
b.	Aset Eks P2AB yang dihibahkan ke Pemda Tk II Bondowoso sesuai Berita Acara Nomor : 5/BA/W/97 tanggal 5 Juni 1997	5.580.874.605,00	5.580.874.605,00
c.	BAST No. 50/1858/430.513/2002 tanggal 14 Januari 2002 :		
1)	Pembuatan broncaptering dan pipa PVC Wringin, Maesan dan BNA	261.500.000,00	261.500.000,00
2)	Pembuatan intake, rumah pompa, daya PLN dan pompa serta pemasangan pipa	361.380.000,00	361.380.000,00
3)	Pembuatan sumur bor, pemasangan pompa dan daya PLN dan pompa serta pemasangan Well Head dan pemasangan pipa	357.211.000,00	357.211.000,00

No	Uraian	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
d.	Bantuan dana pengadaan 7 (tujuh) unit Chlorinasi sesuai SPMU BVR Nomor 36 tanggal 5 September 2002	369.600.000,00	369.600.000,00
e.	Bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM tahun 2006 sesuai surat Bupati Bondowoso No : 539/1277/430.22/2007 tanggal 30 November 2007	470.582.090,00	470.582.090,00
f.	Bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM tahun 2007 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 616/988/430.51/2008 tanggal 18 November 2008	144.434.317,00	144.434.317,00
g.	Pemasangan perpipaan eks APBD I di Desa Taal Tegalampel sesuai BAST Nomor : 602.1/6238/112/ABLP/2009 tanggal 29 Oktober 2009	194.652.700,00	194.652.700,00
h.	Bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM tahun 2008 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 900/1328/430.814/2011 tanggal 11 Mei 2011	58.083.608,00	58.083.608,00
i.	Pemasangan perpipaan 7 HU eks APBD II di Desa Sumber Malang Wringin tahun 2009 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	339.907.883,00	339.907.883,00
j.	Pengadaan sumur bor, pompa, perpipaan dan HU Desa Karangsengon tahun 2007 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	634.600.000,00	634.600.000,00
k.	Pemasangan Pipa, Daya PLN, dan ruang panel di Desa Koncel Kidul Kecamatan Tlogosari, APBD II tahun 2006 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	166.319.000,00	166.319.000,00
l.	Pekerjaan perpipaan di Desa Locare Kecamatan Curahdami, APBD II tahun 2006 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	85.935.000,00	85.935.000,00
m.	Pekerjaan perpipaan, reservoir, rumah panel, pompa dan HU di Desa Pakem Kecamatan Pakem, APBD II tahun 2007 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	838.000.000,00	838.000.000,00
o.	Perpipaan dan HU di Desa Petung Kecamatan Curahdami, APBD II tahun 2007 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	254.254.000,00	254.254.000,00
p.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2010 Audit BPKP Nomor : LAI-9763/PW13/4/2011 tanggal 20 Juni 2011	13.727.400,00	13.727.400,00
r.	Penyertaan Modal (APBD tahun 2012, Perda No. 13 tahun 2011 tentang APBD tahun 2012)	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00
s.	Penyertaan Modal (PAK APBD tahun 2014)	500.000.000,00	500.000.000,00
t.	Penyertaan Modal (PAK APBD tahun 2015)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
u.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2014	11.770.009,00	11.770.009,00
v.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2015	20.658.594,00	20.658.594,00
w.	Penyertaan Modal (APBD tahun 2016)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
x.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2016	9.165.486,00	9.165.486,00
y.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2017 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/95/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021	42.423.891,00	42.423.891,00
z.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2018 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/95/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021	122.254.495,00	122.254.495,00
aa.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2019 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/95/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021	681.522.064,00	681.522.064,00
ab.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2020	539.514.384,00	539.514.384,00

No	Uraian	Saldo	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
ac.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2021	482.470.337,00	0,00
	Akumulasi Kerugian	(6.150.017.905,00)	(6.757.182.317,00)
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda	13.787.764.458,00	12.698.129.709,00

3. Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang merupakan penyertaan modal/investasi kepada BUMD PT Bondowoso Gemilang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/625/430.4.2/2018 tentang Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Perseroda) Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah merealisasikan penyertaan modal kepada PT Bondowoso Gemilang melalui SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp2.961.849.000,00.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.877.453.760,76 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp622.266.484,24 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.499.720.245,00.

Perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.877.453.760,76 berpedoman pada laporan keuangan PT Bondowoso Gemilang tahun 2021 yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Unaudited) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5-350 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PT Bondowoso Gemilang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Penyertaan Modal	2.964.665.658,41	2.964.665.659,17
2	Bagian Laba/(Rugi)	(622.266.485,00)	(187.012.320,00)
3	Koreksi Saldo Awal	0,76	(0,76)
	Jumlah	2.342.399.174,17	2.777.653.338,41
4	Akumulasi Kerugian	(464.945.413,41)	(277.933.093,41)
	Saldo	1.877.453.760,76	2.499.720.245,00

Perhitungan bagian rugi sebesar Rp622.266.485,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-351 Perhitungan Bagian Laba/(Rugi) Pada PT Bondowoso Gemilang

No	Uraian	Labal/(Rugi) Tahun 2021	Persentase Kepemilikan	Bagian Laba/(Rugi) 2021	Bagian Laba/(Rugi) 2020
1	Bagian Laba/(Rugi)	(622.266.485,00)	100%	(622.266.485,00)	(187.012.320,00)
	Jumlah	(622.266.485,00)		(622.266.485,00)	(187.012.320,00)

Koreksi saldo awal sebesar Rp0,76 merupakan koreksi pembulatan dua desimal dibelakang koma atas saldo awal penyertaan modal dari sebesar Rp2.964.665.659,17 menjadi sebesar Rp2.964.665.658,41 sesuai laporan keuangan PT Bondowoso Gemilang tahun 2021 (Unaudited).

Penjelasan atas jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-352 Rincian Penyertaan Modal Pemda Pada PT Bondowoso Gemilang

No	Uraian	Saldo	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah	2.964.665.659,17	2.964.665.658,41
a.	SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018	2.961.849.000,00	2.961.849.000,00
b.	Koreksi atas laba thn 2018	2.816.659,17	2.816.659,17
c.	Koreksi saldo awal 2020	(0,76)	(0,76)

No	Uraian	Saldo	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
d.	Koreksi saldo awal 2021	0,76	0,00
2.	Akumulasi Kerugian	(1.087.211.898,41)	(464.945.413,41)
a.	Rugi thn 2019	(277.933.093,41)	(277.933.093,41)
b.	Rugi thn 2020	(187.012.320,00)	(187.012.320,00)
c.	Rugi thn 2021	(622.266.485,00)	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Pemda		1.877.453.760,76	2.499.720.245,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	4.462.652.283.426,15	4.267.171.054.816,11

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.462.652.283.426,15 bila dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.267.171.054.816,11 mengalami kenaikan sebesar Rp195.481.228.610,04. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	4.267.171.054.816,11
Penambahan tahun 2021	Rp	200.842.931.622,04
Jumlah	Rp	4.468.013.986.438,15
Pengurangan tahun 2021	Rp	5.361.703.012,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	4.462.652.283.426,15

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2021 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-353 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Tanah	356.992.452.776,00	0,00	0,00	356.992.452.776,00
2	Peralatan dan Mesin	713.018.983.064,63	95.805.116.792,00	4.464.525.612,00	804.359.574.244,63
3	Gedung dan Bangunan	966.125.500.568,52	46.171.843.624,25	141.012.900,00	1.012.156.331.292,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.157.138.561.361,75	52.031.651.394,79	0,00	2.209.170.212.756,54
5	Aset Tetap Lainnya	72.594.049.345,21	6.825.319.811,00	0,00	79.419.369.156,21
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	1.301.507.700,00	9.000.000,00	756.164.500,00	554.343.200,00
Jumlah Aset Tetap		4.267.171.054.816,11	200.842.931.622,04	5.361.703.012,00	4.462.652.283.426,15

Penjelasan mutasi penambahan aset tetap tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap sebesar Rp200.842.931.622,04 terdiri dari :
 - a. Belanja modal *netto* Rp 193.741.901.930,66
 - b. Penerimaan dari hibah Rp 4.264.101.000,00
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 1.875.016.291,38
 - d. Reklasifikasi Rp 765.164.500,00
 - e. Mutasi masuk Rp 196.747.900,00

Jumlah Rp 200.842.931.622,04

- a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp193.741.901.930,66; Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal yang mengakibatkan adanya penambahan aset tetap. Dalam pelaksanaannya, realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2021 (*bruto*) tidak seluruhnya menambah aset tetap karena

didalamnya terdapat barang-barang yang tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap misalnya barang tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi dan tergolong sebagai barang dan jasa. Perbedaan antara realisasi belanja modal *bruto* dan belanja modal *netto* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-354 Perbedaan Realisasi Belanja Modal *Bruto* dan *Netto*

No	Uraian	Realisasi Belanja Modal <i>Bruto</i> (Rp)	Realisasi Belanja Modal <i>Netto</i> (Rp)	Selisih (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	95.221.279.024,00	93.367.069.372,00	1.854.209.652,00
3	Gedung dan Bangunan	42.446.436.867,21	42.267.125.852,87	179.311.014,34
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.677.563.443,60	51.282.386.894,79	395.176.548,81
5	Aset Tetap Lainnya	7.025.222.811,00	6.825.319.811,00	199.903.000,00
Jumlah		196.370.502.145,81	193.741.901.930,66	2.628.600.215,15

Selisih antara realisasi belanja modal *bruto* dan *netto* sebesar Rp2.628.600.215,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-355 Rincian Selisih Realisasi Belanja Modal *Bruto* dan *Netto*

No	Uraian	Rincian Selisih				Jumlah
		<i>Extracomptable</i>	Utang/Piutang	Belanja Jasa	Lainnya	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.657.580.752,00	0,00	73.207.900,00	123.421.000,00	1.854.209.652,00
3	Gedung dan Bangunan	162.500.500,00	16.810.514,34	0,00	0,00	179.311.014,34
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	386.555.188,81	8.621.360,00	0,00	395.176.548,81
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.903.000,00	199.903.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.820.081.252,00	403.365.703,15	81.829.260,00	323.324.000,00	2.628.600.215,15

Pencatatan penambahan aset tetap dari belanja modal sebesar Rp193.741.901.930,66 pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan klasifikasi aset riilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-356 Tabel Reklasifikasi Belanja Modal

No	Uraian	Belanja Modal Aset Tetap (Rp)	Reklasifikasi		Belanja Aset Tetap Setelah Reklasifikasi
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	93.367.069.372,00	708.454.400,00	699.354.400,00	93.376.169.372,00
3	Gedung dan Bangunan	42.267.125.852,87	0,00	2.200.000,00	42.264.925.852,87
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.282.386.894,79	500.783.010,00	507.683.010,00	51.275.486.894,79
5	Aset Tetap Lainnya	6.825.319.811,00	0,00	0,00	6.825.319.811,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		193.741.901.930,66	1.209.237.410,00	1.209.237.410,00	193.741.901.930,66

- b. Penerimaan aset tetap bersumber dari hibah sebesar Rp4.264.101.000,00. Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan lembaga swasta dengan rincian

sebagai berikut:

1. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	54.600.000,00
2. Alat Laboratorium	Rp	828.000.000,00
3. Komputer	Rp	1.041.360.000,00
4. Bangunan Gedung	Rp	2.340.141.000,00

Jumlah Rp 4.264.101.000,00

c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.875.016.291,38.

Jumlah tersebut merupakan perolehan aset tetap peralatan & mesin dan gedung & bangunan yang direalisasikan sebagai belanja barang dan jasa.

d. Reklasifikasi sebesar Rp765.164.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi jalan dan jembatan	Rp	756.164.500,00
2. Reklasifikasi dari bangunan gedung menjadi KDP	Rp	9.000.000,00

Jumlah Rp 765.164.500,00

e. Mutasi Masuk sebesar Rp196.747.900,00.

Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi masuk) berupa alat kantor dan rumah tangga.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.776.489.992,00 dan *Block Grand* senilai Rp7.488.612.672,00 pada tahun 2018. Seluruh barang tersebut belum dicatat sebagai barang milik daerah karena belum ada dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Tabel 5-357 Hibah/Bantuan Yang Belum Mendapatkan BAST

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Persediaan	1.356.983.000,00	0,00	1.356.983.000,00
2	Aset Tetap	3.781.346.992,00	3.605.748.672,00	7.387.095.664,00
3	Ekstracomptable	90.796.500,00	183.660.000,00	274.456.500,00
4	Bukan Aset	547.363.500,00	3.699.204.000,00	4.246.567.500,00
Jumlah		5.776.489.992,00	7.488.612.672,00	13.265.102.664,00

Selain itu terdapat aset tetap yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum dicatat sebagai barang milik daerah pada Neraca per 31 Desember 2021. Aset yang berasal dari Fasilitas Umum (Fasum) Fasilitas Sosial (Fasos) diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasum-fasos dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Peraturan dan mekanisme penyerahan fasum-fasos dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih dalam proses penyusunan, sehingga aset yang berasal dari fasum-fasos tersebut belum dapat diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan 2021.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerima penyerahan fasum-fasos dari PT. Podo Joyo Masyhur sebagai pengembang perumahan Taman Mutiara Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso berupa infrastruktur jalan, infrastruktur saluran, tanah jalan dan tanah untuk fasilitas umum sesuai berita acara serah terima

fasilitas umum, fasilitas sosial dan utilitas Nomor : 001/PJM/EKS/IV/2018 dan nomor : 640/163/430.9.12/2018 tanggal 9 Mei 2018. Selanjutnya aset tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan setelah peraturan dan mekanisme tentang penyerahan fasum-fasos telah selesai disusun.

2. Pengurangan aset tetap sebesar Rp5.361.703.012,00 terdiri dari :

a. Reklasifikasi	Rp	765.164.500,00
b. Dimusnahkan	Rp	1.407.528.153,00
c. Dijual	Rp	2.753.806.050,00
d. Hibah keluar	Rp	238.456.409,00
e. Mutasi keluar	Rp	196.747.900,00
Jumlah	Rp	5.361.703.012,00

Penjelasan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp5.361.703.012,00 adalah sebagai berikut:

a. Reklasifikasi sebesar Rp765.164.500,00;

Jumlah tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai dikerjakan dan memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap milik daerah berupa jalan sebesar Rp756.164.500,00 dan reklasifikasi dari bangunan gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.000.000,00.

b. Dimusnahkan sebesar Rp1.407.528.153,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Alat Angkutan	Rp	40.536.667,00
2. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	2.000.000,00
3. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	262.013.380,00
4. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	34.525.074,00
5. Komputer	Rp	1.060.553.032,00
6. Alat Keselamatan Kerja	Rp	7.900.000,00
Jumlah	Rp	1.407.528.153,00

c. Dijual sebesar Rp2.753.806.050,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut penjualan berupa alat angkutan sebesar Rp2.753.806.050,00.

d. Hibah keluar sebesar Rp238.456.409,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut hibah berupa alat-alat angkutan.

e. Mutasi Keluar sebesar Rp196.747.900,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi keluar) dengan rincian sebagai berikut:

1. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	64.735.000,00
2. Bangunan Gedung	Rp	132.012.900,00
Jumlah	Rp	196.747.900,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.1 Tanah	356.992.452.776,00	356.992.452.776,00
Mutasi penambahan dan pengurangan tanah tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 356.992.452.776,00	
Penambahan tahun 2021	Rp 0,00	
Jumlah	Rp 356.992.452.776,00	
Pengurangan tahun 2021	Rp 0,00	
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 356.992.452.776,00	

1. Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar nihil.
2. Pengurangan Aset Tetap sebesar nihil.

Pada nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2021, dari hasil kegiatan verifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Kelurahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso masih terdapat tanah kas desa yang menjadi kelurahan belum seluruhnya dicatat dan/atau masih dalam penelusuran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-358 Rincian Tanah Kas Desa Dalam Penelusuran

No	Nama Kelurahan	Total Luas Tanah Kas Desa (m ²)	Total Luas Tanah Kas Desa Yang Tercatat (m ²)	Total Luas Tanah Kas Desa Yang Belum Tercatat dan/atau Masih Dalam Penelusuran (m ²)
1	Dabasah	47.430	1.361	46.069
2	Tamansari	49.965	49.565	400
3	Kotakulon	78.390	70.540	7.850
4	Blindungan	1.200	400	800
5	Badean	4.700	3.475	1.225
6	Kademangan	52.760	52.360	400
7	Nangkaan	30.000	30.000	0
8	Sekarputih	85.660	5.560	80.100
9	Tenggarang	46.780	11.100	35.680
10	Curahdami	81.600	35.010	46.590

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	804.359.574.244,63	713.018.983.064,63
Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 713.018.983.064,63	
Penambahan Tahun 2021	Rp 95.805.116.792,00	
Jumlah	Rp 808.824.099.856,63	
Pengurangan Tahun 2021	Rp 4.464.525.612,00	
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 804.359.574.244,63	

1. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp95.805.116.792,00 terdiri dari :
 - a. Belanja modal *netto* Rp 93.376.169.372,00
 - b. Penerimaan dari hibah Rp 1.923.960.000,00
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 440.252.420,00
 - d. Mutasi masuk Rp 64.735.000,00

Jumlah Rp 95.805.116.792,00

Penjelasan untuk masing-masing penambahan peralatan dan mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp93.376.169.372,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan peralatan dan mesin dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Besar	Rp	1.881.065.800,00
2. Alat Angkutan	Rp	2.393.242.514,00
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	360.913.530,00
4. Alat Pertanian	Rp	50.520.600,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	22.258.740.833,00
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	4.540.640.869,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	44.065.187.787,00
8. Alat Laboratorium	Rp	4.072.160.048,00
9. Komputer	Rp	12.489.790.791,00
10. Alat Eksplorasi	Rp	1.975.000,00
11. Alat Keselamatan Kerja	Rp	195.824.500,00
12. Alat Peraga	Rp	299.145.300,00
13. Rambu-Rambu	Rp	682.921.600,00
14. Peralatan Olah Raga	Rp	84.040.200,00
Jumlah	Rp	93.376.169.372,00

b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp1.923.960.000,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-359 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Nomor BAST	SKPD
1	Alat Laboratorium	825.000.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4.1./BNPB/OJLP/LP.01.03/12/2020	RSU dr. H. Koesnadi
2	Alat Laboratorium	3.000.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1154/BNPB/OJLP/LP.01.03/07/2021	RSU dr. H. Koesnadi
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.800.000,00	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	36652/C3/KPA/XII/BMN/2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Komputer	706.400.000,00	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	36652/C3/KPA/XII/BMN/2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.800.000,00	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	4258/C4/DM.01.02/2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Komputer	334.960.000,00	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	4258/C4/DM.01.02/2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH		1.923.960.000,00			

c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp440.252.420,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan peralatan dan mesin dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Besar	Rp	14.354.797,00
2. Alat Angkutan	Rp	1.620.000,00

3. Alat Pertanian	Rp	1.957.100,00
4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	317.430.367,00
5. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	6.170.000,00
6. Alat Laboratorium	Rp	60.000.816,00
7. Komputer	Rp	37.531.340,00
8. Alat Keselamatan Kerja	Rp	1.188.000,00
Jumlah	Rp	440.252.420,00

- d. Mutasi Masuk Sebesar Rp64.735.000,00;

Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi masuk) berupa alat kantor dan rumah tangga.

2. Pengurangan aset tetap sebesar Rp4.464.525.612,00 terdiri dari :

a. Dimusnahkan	Rp	1.407.528.153,00
b. Dijual	Rp	2.753.806.050,00
c. Hibah Keluar	Rp	238.456.409,00
d. Mutasi Keluar	Rp	64.735.000,00
Jumlah	Rp	4.464.525.612,00

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan peralatan dan mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dimusnahkan sebesar Rp1.407.528.153,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Angkutan	Rp	40.536.667,00
2. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	2.000.000,00
3. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	262.013.380,00
4. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	34.525.074,00
5. Komputer	Rp	1.060.553.032,00
6. Alat Keselamatan Kerja	Rp	7.900.000,00
Jumlah	Rp	1.407.528.153,00

- b. Dijual sebesar Rp2.753.806.050,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut penjualan berupa alat angkutan;

- c. Hibah keluar sebesar Rp238.456.409,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut hibah berupa alat angkutan; dan

- d. Mutasi Keluar sebesar Rp64.735.000,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi keluar) berupa alat kantor dan rumah tangga.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-360 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Alat Besar	13.204.403.658,00	1.895.420.597,00	0,00	15.099.824.255,00
2	Alat Angkutan	116.326.696.371,00	2.394.862.514,00	3.032.799.126,00	115.688.759.759,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.689.275.197,00	360.913.530,00	2.000.000,00	7.048.188.727,00
4	Alat Pertanian	5.857.304.166,00	52.477.700,00	0,00	5.909.781.866,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	136.882.015.902,96	22.695.506.200,00	326.748.380,00	159.250.773.722,96
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	26.367.540.380,00	4.546.810.869,00	34.525.074,00	30.879.826.175,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	214.009.081.001,93	44.065.187.787,00	0,00	258.074.268.788,93
8	Alat Laboratorium	66.865.227.499,26	4.960.160.864,00	0,00	71.825.388.363,26
9	Alat Persenjataan	154.931.000,00	0,00	0,00	154.931.000,00
10	Komputer	113.141.804.038,48	13.568.682.131,00	1.060.553.032,00	125.649.933.137,48
11	Alat Eksplorasi	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	2.104.807.628,00	197.012.500,00	7.900.000,00	2.293.920.128,00
16	Alat Peraga	0,00	299.145.300,00	0,00	299.145.300,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rambu-Rambu	10.105.139.582,00	682.921.600,00	0,00	10.788.061.182,00
19	Peralatan Olah Raga	1.310.756.640,00	84.040.200,00	0,00	1.394.796.840,00
Jumlah Aset Tetap		713.018.983.064,63	95.805.116.792,00	4.464.525.612,00	804.359.574.244,63

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.012.156.331.292,77	966.125.500.568,52

Mutasi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	966.125.500.568,52
Penambahan Tahun 2021	Rp	46.171.843.624,25
Jumlah	Rp	1.012.297.344.192,77
Pengurangan Tahun 2021	Rp	141.012.900,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.012.156.331.292,77

1. Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp46.171.843.624,25 terdiri dari :

a. Belanja modal <i>netto</i>	Rp	42.264.925.852,87
b. Penerimaan dari Hibah	Rp	2.340.141.000,00
c. Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.434.763.871,38
d. Mutasi Masuk	Rp	132.012.900,00
Jumlah	Rp	46.171.843.624,25

Penjelasan untuk masing-masing penambahan gedung dan bangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp42.264.925.852,87;

Jumlah tersebut merupakan penambahan gedung dan bangunan dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan gedung	Rp	41.236.376.690,71
2. Monumen	Rp	291.714.053,16
3. Bangunan Menara	Rp	736.835.109,00
Jumlah	Rp	42.264.925.852,87

- b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp2.340.141.000,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah berupa renovasi Stadion Kabupaten Bondowoso dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai Berita Acara Nomor : 5.14.1/SET.BIII/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;

- c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.434.763.871,38;

Jumlah tersebut merupakan penambahan gedung dan bangunan dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai gedung dan bangunan berupa bangunan gedung; dan

- d. Mutasi Masuk Sebesar Rp132.012.900,00;

Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi masuk) berupa bangunan gedung.

2. Pengurangan aset tetap sebesar Rp141.012.900,00 terdiri dari :

a. Reklasifikasi	Rp	9.000.000,00
b. Mutasi Keluar	Rp	132.012.900,00
Jumlah	Rp	141.012.900,00

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan peralatan dan mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi sebesar Rp9.000.000,00;

Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi dari bangunan gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

- b. Mutasi Keluar sebesar Rp132.012.900,00;

Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi keluar) berupa bangunan gedung.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis gedung dan bangunan selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-361 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung	961.578.635.749,03	45.143.294.462,09	141.012.900,00	1.006.580.917.311,12
2	Monumen	4.261.215.319,49	291.714.053,16	0,00	4.552.929.372,65
3	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	285.649.500,00	736.835.109,00	0,00	1.022.484.609,00
Jumlah Aset Tetap		966.125.500.568,52	46.171.843.624,25	141.012.900,00	1.012.156.331.292,77

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.209.170.212.756,54	2.157.138.561.361,75

Mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	2.157.138.561.361,75
Penambahan Tahun 2021	Rp	52.031.651.394,79
Jumlah	Rp	2.209.170.212.756,54
Pengurangan Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.209.170.212.756,54

1. Penambahan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp52.031.651.394,79 terdiri dari:
 - a. Belanja modal *netto* Rp 51.275.486.894,79
 - b. Reklasifikasi Rp 756.164.500,00

Jumlah Rp 52.031.651.394,79

Penjelasan untuk masing-masing penambahan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp51.275.486.894,79;

Jumlah tersebut merupakan penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

 1. Jalan dan Jembatan Rp 37.708.471.399,79
 2. Bangunan Air Rp 12.131.111.095,00
 3. Jaringan Rp 1.435.904.400,00

Jumlah Rp 51.275.486.894,79
- b. Reklasifikasi sebesar Rp756.164.500,00;

Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi dari KDP yang telah selesai dikerjakan dan memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap milik daerah berupa Jalan.
2. Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar nihil.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-362 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.016.526.114.758,82	38.464.635.899,79	0,00	1.054.990.750.658,61
2	Bangunan Air (Irigasi)	1.072.782.283.228,93	12.131.111.095,00	0,00	1.084.913.394.323,93
3	Instalasi	14.093.658.383,00	0,00	0,00	14.093.658.383,00
4	Jaringan	53.736.504.991,00	1.435.904.400,00	0,00	55.172.409.391,00
	Jumlah Aset Tetap	2.157.138.561.361,75	52.031.651.394,79	0,00	2.209.170.212.756,54

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	79.419.369.156,21	72.594.049.345,21

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	72.594.049.345,21
Penambahan tahun 2021	Rp	6.825.319.811,00
Jumlah	Rp	79.419.369.156,21

Pengurangan tahun 2021 Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2021 Rp 79.419.369.156,21

1. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp6.825.319.811,00 merupakan penambahan aset tetap lainnya dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku perpustakaan Rp 6.819.764.811,00
 2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan Rp 5.555.000,00
Jumlah Rp 6.825.319.811,00

2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar nihil.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis aset tetap lainnya selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-363 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	70.638.144.200,21	6.819.764.811,00	0,00	77.457.909.011,21
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.091.669.314,00	5.555.000,00	0,00	1.097.224.314,00
3	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	100.790.000,00	0,00	0,00	100.790.000,00
5	Tanaman	763.445.831,00	0,00	0,00	763.445.831,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		72.594.049.345,21	6.825.319.811,00	0,00	79.419.369.156,21

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	554.343.200,00	1.301.507.700,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang dalam masa pembangunan atau pengerjaannya melewati satu periode anggaran. Jumlah tersebut merupakan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang masih dalam pengerjaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-364 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.301.507.700,00	9.000.000,00	756.164.500,00	554.343.200,00
Jumlah Aset Tetap		1.301.507.700,00	9.000.000,00	756.164.500,00	554.343.200,00

Penambahan KDP sebesar Rp9.000.000,00 merupakan aset-aset yang dalam masa pembangunan atau pengerjaannya melewati periode anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-365 Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Jumlah (Rp)	OPD	Keterangan
1	KDP - Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.000.000,00	RSUD dr. H. Koesnadi	Perencanaan
Jumlah		9.000.000,00		

Pengurangan KDP sebesar Rp756.164.500,00 merupakan KDP tahun 2021 yang telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang direklasifikasi menjadi aset tetap pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-366 Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Jumlah (Rp)	Tahun Pengakuan	OPD
1	KDP Jalan Kabupaten	756.164.500,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jumlah		756.164.500,00		

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2021 sebesar Rp554.343.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-367 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah Biaya Yg Sudah Dikeluarkan	Jumlah Biaya Yg Masih Harus Dibayar
1	Perencanaan – Tugu Pembangunan Administrasi Proyek (AP) – Tugu Pembangunan	24.05/02/PPK-DED Alun-alun/XI/2019, 26/11/2019	388.000.800,00	388.000.800,00	0,00
			0,00	1.500.000,00	0,00
2	Perencanaan – Bangunan Kesehatan	07.02/72.A/PPK/1.02.01./2019, 30/10/2019	97.810.000,00	83.138.500,00	0,00
3	Perencanaan – Bangunan Kesehatan	07.02/71.A/PPK/1.02.01./2019, 30/10/2019	85.534.000,00	72.703.900,00	0,00
4	Perencanaan – Bangunan Tempat Kerja	050/855/PPKom.V/430.10 .7/2021	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Jumlah			580.344.800,00	554.343.200,00	0,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.964.664.492.387,03	1.701.000.454.138,36

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai Aset Tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan perhitungan penyusutan Aset Tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 18 dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.964.664.492.387,03.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-368 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Peralatan Mesin	514.172.781.297,69	94.260.688.616,67	4.315.661.254,00	604.117.808.660,36
2	Gedung dan Bangunan	379.115.530.792,33	53.233.649.280,00	0,00	432.349.180.072,33
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	807.712.142.048,34	120.485.361.606,00	0,00	928.197.503.654,34
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		1.701.000.454.138,36	267.979.699.502,67	4.315.661.254,00	1.964.664.492.387,03

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp267.979.699.502,67 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5-369 Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi (Rp)	Total (Rp)
1	Peralatan Mesin	94.157.563.616,67	103.125.000,00	94.260.688.616,67
2	Gedung dan Bangunan	53.233.649.280,00	0,00	53.233.649.280,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.485.361.606,00	0,00	120.485.361.606,00
Jumlah		267.876.574.502,67	103.125.000,00	267.979.699.502,67

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp4.315.661.254,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5-370 Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Penghapusan (Rp)	Koreksi (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Total (Rp)
1	Peralatan Mesin	4.315.661.254,00	0,00	0,00	4.315.661.254,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.315.661.254,00	0,00	0,00	4.315.661.254,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.4 Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	62.432.621.049,58	62.916.211.602,59

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5-371 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	2.549.278.509,00	2.535.278.509,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	151.408.140,00	151.408.140,00
3	Aset Tak Berwujud	8.969.674.320,00	8.752.074.510,00
4	Akumulasi Amortisasi	(7.113.980.691,34)	(6.402.640.328,33)
5	Aset Lain-lain	61.609.438.122,00	61.613.288.122,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.733.197.350,08)	(3.733.197.350,08)
	Jumlah	62.432.621.049,58	62.916.211.602,59

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	2.549.278.509,00	2.535.278.509,00

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

1. Tagihan Penjualan Angsuran;

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah;

Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 merupakan TGR pada kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dengan SK Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Putusan Pengadilan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-372 Rekapitulasi TGR atas hasil Pemeriksaan APIP dan APEP yang Dilaporkan kepada Majelis TPTGR

No	Uraian	Tahun	Jumlah
a	SK Pembebanan Sementara		2.507.350.309,00
1	Temuan Audit BPK atas LKD tahun 2004 pada pos DPRD	2004	2.034.463.909,00
2	Belanja Bantuan Parpol pada Bakesbang Linmas	2006	74.900.000,00
3	Penerimaan pembayaran piutang kredit sapi kereman (PTSK)	2013	397.986.400,00
b	SK Pembebanan Sementara		41.928.200,00
1	TGR barang milik daerah	2004	41.928.200,00
	Jumlah		2.549.278.509,00

Mutasi Tagihan TGR adalah sebagai berikut :

Tabel 5-373 Rincian TGR atas hasil pemeriksaan APIP dan APEP yang Dilaporkan kepada Majelis TPTGR

No.	Uraian Kerugian	Nilai Kerugian (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)	Ket.
a	SK Pembebanan Sementara	2.507.350.309,00	0,00	2.507.350.309,00	
1	Temuan Audit BPK atas LKD tahun 2004 pada pos DPRD	2.034.463.909,00	0,00	2.034.463.909,00	
2	Belanja Bantuan Parpol pada Bakesbang Linmas	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00	
3	Penerimaan pembayaran piutang kredit sapi kereman (PTSK)	397.986.400,00	0,00	397.986.400,00	
b	SK Pembebanan Sementara	41.928.200,00	0,00	41.928.200,00	
1	TGR barang milik daerah	41.928.200,00	0,00	41.928.200,00	
	Jumlah	2.549.278.509,00	0,00	2.549.278.509,00	

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	151.408.140,00	151.408.140,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp151.408.140,00 merupakan kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa tanah dan bangunan dikomplek Pemandian Tasnan Baru Bondowoso dengan PT. Dian Graha Utama sebagai berikut :

1. Bentuk kerjasama : Kerjasama Pemanfaatan
2. Nomor Perjanjian : 188/13/430.6.2/2014
3. Pembagian Keuntungan : Kontribusi keuntungan dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2044 dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - Untuk 5 tahun pertama sebesar Rp18.000.000,00/tahun.
 - Untuk 5 tahun kedua sebesar Rp20.000.000,00/tahun.
 - Untuk 5 tahun ketiga sebesar Rp22.000.000,00/tahun.
 - Untuk 5 tahun keempat sebesar Rp24.000.000,00/tahun.
 - Untuk 5 tahun kelima sebesar Rp26.000.000,00/tahun.
 - Untuk 5 tahun keenam sebesar Rp28.000.000,00/tahun, dengan total jangka waktu pemangasaan selama 30 tahun dengan grace period 1 tahun, sehingga pembayaran kontribusi oleh PT. Dian Graha Utama dimulai tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 30. Kontribusi tersebut sudah termasuk diperhitungkan didalamnya, kontribusi sewa bangunan Pedagang Kaki Lima dan keuntungan pengelolaan.
4. Jangka Waktu Perjanjian : 30 tahun

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud	8.969.674.320,00	8.752.074.510,00

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah Rp8.969.674.320,00 berasal dari saldo Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.752.074.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-374 Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	665.294.500,00	0,00	0,00	665.294.500,00
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	101.672.500,00	0,00	0,00	101.672.500,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00
2	Dinas Kesehatan	353.603.000,00	66.082.500,00	0,00	419.685.500,00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Aplikasi Persediaan Barang	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Software Antrian Pasien	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi Terintegrasi	42.064.000,00	0,00	0,00	42.064.000,00
	Software Antrian Pasien	34.820.500,00	0,00	0,00	34.820.500,00
	Software SIKDA	49.428.500,00	0,00	0,00	49.428.500,00
	Software PSC 119	119.790.000,00	66.082.500,00	0,00	185.872.500,00
3	RSUD dr. H. Koesnadi	27.633.925,00	184.143.550,00	0,00	211.777.475,00
	Software Absensi	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
	Software MMPI	12.783.925,00	0,00	0,00	12.783.925,00
	Software SIPERKASA	0,00	148.860.800,00	0,00	148.860.800,00
	Software Mobile Presensi	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Software MMPI 2	0,00	15.282.750,00	0,00	15.282.750,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.841.500,00	0,00	0,00	275.841.500,00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Website Surat Perjanjian	79.667.500,00	0,00	0,00	79.667.500,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.516.000,00	19.675.000,00	0,00	30.191.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	0,00	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.426.000,00	0,00	0,00	52.426.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Pengembangan Website	48.510.000,00	0,00	0,00	48.510.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	142.169.500,00	0,00	0,00	142.169.500,00
	Aplikasi Pengaduan Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba)	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	29.744.000,00	0,00	0,00	29.744.000,00
	Aplikasi LAKIP	29.150.000,00	0,00	0,00	29.150.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Jabatan Fungsional	29.584.500,00	0,00	0,00	29.584.500,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
9	Dinas Sosial	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	153.789.900,00	0,00	0,00	153.789.900,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Web GIS	49.891.600,00	0,00	0,00	49.891.600,00
	Software Aplikasi Web GIS	99.982.300,00	0,00	0,00	99.982.300,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	439.108.240,00	48.900.000,00	372.455.240,00	115.553.000,00
	Software Update SIAK-AFIS	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
	Software SIAK Desa/Kelurahan	199.300.000,00	0,00	199.300.000,00	0,00
	Software Sistem Aplikasi Arsip Elektronik	55.950.000,00	0,00	55.950.000,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Android (SIPENDOWO)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00
	Aplikasi Pelaporan SIAK Desa (SILAPDES)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran	10.682.000,00	0,00	0,00	10.682.000,00
	Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (SILADUK)	58.205.240,00	0,00	58.205.240,00	0,00
	Aplikasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Cek Data Kependudukan)	22.055.000,00	0,00	0,00	22.055.000,00
	Aplikasi Laporan Update Data Pindah Datang Penduduk	0,00	24.450.000,00	0,00	24.450.000,00
	Aplikasi Register Kartu Keluarga dan Akta Kematian	0,00	24.450.000,00	0,00	24.450.000,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.492.682.200,00	45.276.000,00	0,00	1.537.958.200,00
	Aplikasi Informasi Daerah "Bondowosoku"	59.840.000,00	0,00	0,00	59.840.000,00
	Aplikasi Dashboard	109.725.000,00	0,00	0,00	109.725.000,00
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	479.000.000,00	0,00	0,00	479.000.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Sistem Informasi Pemerintah	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	377.000.000,00	0,00	0,00	377.000.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.geopark.bondowosokab.go.id)	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.humas.bondowosokab.go.id)	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00
	Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan (www.wonosari.bondowosokab.go.id)	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00
	Software StreamX	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
	Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP)	0,00	45.276.000,00	0,00	45.276.000,00
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	681.472.000,00	24.750.000,00	0,00	706.222.000,00
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	215.300.000,00	0,00	0,00	215.300.000,00
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	0,00	50.229.000,00
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	0,00	170.550.000,00
	Software Sijeprek	74.227.000,00	0,00	0,00	74.227.000,00
	Website	49.850.000,00	0,00	0,00	49.850.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Database Data Industri	39.850.000,00	0,00	0,00	39.850.000,00
	Software Akuntansi Koperasi	77.550.000,00	0,00	0,00	77.550.000,00
	Software Industri	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
17	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja	712.130.000,00	0,00	0,00	712.130.000,00
	Aplikasi Program Penyediaan Layanan Perijinan	229.883.500,00	0,00	0,00	229.883.500,00
	Aplikasi Program Paten	263.055.000,00	0,00	0,00	263.055.000,00
	Pembelian Anti Virus	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00
	Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Tenaga Kerja	99.621.500,00	0,00	0,00	99.621.500,00
	Software Hosting Domain Si Kerja, SMS Getway Si Kerja, Hosting Domain Si Jadwal	31.228.000,00	0,00	0,00	31.228.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Pengaduan Masyarakat	79.451.000,00	0,00	0,00	79.451.000,00
18	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	444.504.560,00	36.746.000,00	0,00	481.250.560,00
	Software Kearsipan (SIMAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Perpustakaan E-Beca	101.333.000,00	0,00	0,00	101.333.000,00
	Aplikasi E-Book Kubuku	59.862.600,00	0,00	0,00	59.862.600,00
	Software Kearsipan	126.789.960,00	0,00	0,00	126.789.960,00
	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu (Siputer)	0,00	36.746.000,00	0,00	36.746.000,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
20	Dinas Pertanian	101.466.000,00	0,00	0,00	101.466.000,00
	Software	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Aplikasi Bondowoso Republik Kopi	48.550.000,00	0,00	0,00	48.550.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
21	Bagian Hukum	77.406.000,00	0,00	0,00	77.406.000,00
	Sistem Informasi Layanan Pembentukan Produk Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paket Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi JDIH Bondowoso	77.406.000,00	0,00	0,00	77.406.000,00
22	Bagian Administrasi Pemerintahan	167.644.200,00	0,00	0,00	167.644.200,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	85.656.600,00	0,00	0,00	85.656.600,00
	Aplikasi Hitung Cepat	49.643.000,00	0,00	0,00	49.643.000,00
	Update Data LPPD	7.500.000,00		0,00	7.500.000,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24.844.600,00	0,00	0,00	24.844.600,00
23	Bagian Administrasi Perekonomian	9.656.900,00	0,00	0,00	9.656.900,00
	Software Aplikasi Laporan Penggunaan Laporan Botanic (ELAPBONIC)	9.656.900,00	0,00	0,00	9.656.900,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	49.627.000,00	0,00	0,00	49.627.000,00
	Software Aplikasi SIBUK (Software Informasi Bantuan Keuangan)	49.627.000,00	0,00	0,00	49.627.000,00
25	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	183.064.585,00	0,00	0,00	183.064.585,00
	Aplikasi E-Barjas SMS Gateway	95.036.700,00	0,00	0,00	95.036.700,00
	Aplikasi One Stop Service	88.027.885,00	0,00	0,00	88.027.885,00
26	Bagian Umum dan Perlengkapan	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
27	Kecamatan Bondowoso	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
28	Kecamatan Tamanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
29	Kecamatan Tenggarang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
30	Kecamatan Tegalampel	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
31	Kecamatan Curahdami	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
32	Kecamatan Wringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
33	Kecamatan Pakem	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
34	Kecamatan Binakal	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
35	Kecamatan Maesan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
36	Kecamatan Grjugan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
37	Kecamatan Pujer	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
38	Kecamatan Wonosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
39	Kecamatan Tlogosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
40	Kecamatan Sukosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
41	Kecamatan Tapen	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
42	Kecamatan Sumberwringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
43	Kecamatan Prajekan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
44	Kecamatan Klabang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
45	Kecamatan Cermee	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
46	Kecamatan Taman Krocok	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
47	Kecamatan Jambesari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
48	Kecamatan Botolinggo	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
49	Inspektorat	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
	Website	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.690.900,00	0,00	0,00	75.690.900,00
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	Software SIADEK (Sistem Informasi Data Ekonomi)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Updating Website Bappeda	44.598.400,00	0,00	0,00	44.598.400,00
51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	284.316.000,00	67.000.000,00	155.650.000,00	195.666.000,00
	Software Windows Server	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00
	Software Simd@k	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00
	Software Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan desa	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Sistem Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah (Sirekon)	49.750.000,00	0,00	0,00	49.750.000,00
	Software Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)	75.000.000,00	67.000.000,00	0,00	142.000.000,00
52	Badan Pendapatan Daerah	1.406.645.800,00	0,00	0,00	1.406.645.800,00
	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada)	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismiop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi SIM BPHTB	193.200.000,00	0,00	0,00	193.200.000,00
	Software Aplikasi E-SPTPD	92.935.000,00	0,00	0,00	92.935.000,00
	Software Aplikasi SIM-PAD	91.728.950,00	0,00	0,00	91.728.950,00
	E-SPTPD Berbasis Android	91.864.850,00	0,00	0,00	91.864.850,00
53	Badan Kepegawaian Daerah	742.699.800,00	253.132.000,00	0,00	995.831.800,00
	Website (bkd.bondowosokab.go.id)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software mesin Absensi	59.199.800,00	0,00	0,00	59.199.800,00
	Software Simpeg Webbase	268.277.500,00	43.725.000,00	0,00	312.002.500,00
	Software Kenaikan Pangkat	43.662.500,00	0,00	0,00	43.662.500,00
	Software SMS Gateway	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software E-Absensi Berbasis Web	110.880.000,00	0,00	0,00	110.880.000,00
	Software aplikasi E-absensi Berbasis Android	38.280.000,00	0,00	0,00	38.280.000,00
	Software Aplikasi Layanan Antar Dokumen Pensiun Berbasis Web	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Software e-SKP	134.700.000,00	79.530.000,00	0,00	214.230.000,00
	Aplikasi Sitapelegit	0,00	89.914.000,00	0,00	89.914.000,00
	Aplikasi Siraddin	0,00	39.963.000,00	0,00	39.963.000,00
	Jumlah	8.752.074.510,00	745.705.050,00	528.105.240,00	8.969.674.320,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.113.980.691,34	6.402.640.328,33

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah Rp7.113.980.691,34 berasal dari saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.402.640.328,33 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5-375 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	644.960.000,00	20.334.500,00	0,00	665.294.500,00
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	81.338.000,00	20.334.500,00	0,00	101.672.500,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00
2	Dinas Kesehatan	303.053.600,00	82.932.300,00	0,00	385.985.900,00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Aplikasi Persediaan Barang	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Software Antrian Pasien	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	42.064.000,00	0,00	0,00	42.064.000,00
	Software Antrian Pasien	13.928.200,00	6.964.100,00	0,00	20.892.300,00
	Software SIKDA	19.771.400,00	9.885.700,00	0,00	29.657.100,00
	Software PSC 119	119.790.000,00	66.082.500,00	0,00	185.872.500,00
3	RSUD dr. H. Koesnadi	5.526.785,00	42.355.495,00	0,00	47.882.280,00
	Software Absensi	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	5.940.000,00
	Software MMPI	2.556.785,00	2.556.785,00	0,00	5.113.570,00
	Software SIPERKASA	0,00	29.772.160,00	0,00	29.772.160,00
	Software Mobile Presensi	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Software MMPI 2	0,00	3.056.550,00	0,00	3.056.550,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.107.500,00	15.933.500,00	0,00	228.041.000,00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Website Surat Perjanjian	15.933.500,00	15.933.500,00	0,00	31.867.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.516.000,00	19.675.000,00	0,00	30.191.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	0,00	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.536.800,00	10.485.200,00	0,00	33.022.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Pengembangan Website	19.404.000,00	9.702.000,00	0,00	29.106.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	96.071.800,00	28.433.900,00	0,00	124.505.700,00
	Aplikasi Pengaduan Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba)	39.820.000,00	9.955.000,00	0,00	49.775.000,00
	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	23.795.200,00	5.948.800,00	0,00	29.744.000,00
	Aplikasi LAKIP	17.490.000,00	5.830.000,00	0,00	23.320.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Jabatan Fungsional	11.833.800,00	5.916.900,00	0,00	17.750.700,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
9	Dinas Sosial	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	43.085.900,00	30.757.980,00	0,00	73.843.880,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Web GIS	19.956.640,00	9.978.320,00	0,00	29.934.960,00
	Software Aplikasi Web GIS	19.996.460,00	19.996.460,00	0,00	39.992.920,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	352.148.696,00	39.351.648,00	344.573.144,00	46.927.200,00
	Software Update SIAK-AFIS	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
	Software SIAK Desa/Kelurahan	199.300.000,00	0,00	199.300.000,00	0,00
	Software Sistem Aplikasi Arsip Elektronik	55.950.000,00	0,00	55.950.000,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Android (Sipendowo)	13.800.000,00	4.600.000,00	18.400.000,00	0,00
	Aplikasi Pelaporan SIAK Desa (SILAPDES)	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran	4.272.800,00	2.136.400,00	0,00	6.409.200,00
	Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (SILADUK)	23.282.096,00	11.641.048,00	34.923.144,00	0,00
	Aplikasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Cek Data Kependudukan)	4.411.000,00	4.411.000,00	0,00	8.822.000,00
	Aplikasi Laporan Update Data Pindah Datang Penduduk	0,00	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00
	Aplikasi Register Kartu Keluarga dan Akta Kematian	0,00	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	789.525.040,00	307.591.640,00	0,00	1.097.116.680,00
	Aplikasi Informasi Daerah "Bondowosoku"	47.872.000,00	11.968.000,00	0,00	59.840.000,00
	Aplikasi Dashboard	87.780.000,00	21.945.000,00	0,00	109.725.000,00
	Website OPD	71.940.000,00	23.980.000,00	0,00	95.920.000,00
	Website OPD	71.940.000,00	23.980.000,00	0,00	95.920.000,00
	Website Desa	287.400.000,00	95.800.000,00	0,00	383.200.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Website Sistem Informasi Pemerintah	47.960.000,00	23.980.000,00	0,00	71.940.000,00
	Website Desa	150.800.000,00	75.400.000,00	0,00	226.200.000,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.geopark.bondowosokab.go.id)	4.975.080,00	4.975.080,00	0,00	9.950.160,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.humas.bondowosokab.go.id)	4.975.080,00	4.975.080,00	0,00	9.950.160,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan (www.wonosari.bondowosokab.go.id)	4.975.080,00	4.975.080,00	0,00	9.950.160,00
	Software StreamX	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	11.550.000,00
	Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP)	0,00	9.055.200,00	0,00	9.055.200,00
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	577.161.466,66	60.300.533,34	0,00	637.462.000,00
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	215.300.000,00	0,00	0,00	215.300.000,00
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	0,00	50.229.000,00
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	0,00	170.550.000,00
	Software Sijeprek	53.109.666,66	21.117.333,34	0,00	74.227.000,00
	Website	29.910.000,00	9.970.000,00	0,00	39.880.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Database Data Industri	23.910.000,00	7.970.000,00	0,00	31.880.000,00
	Software Akuntansi Koperasi	31.020.000,00	15.510.000,00	0,00	46.530.000,00
	Software Industri	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
17	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja	556.735.400,00	96.449.300,00	0,00	653.184.700,00
	Aplikasi Program Penyediaan Layanan Perijinan	229.883.500,00	0,00	0,00	229.883.500,00
	Aplikasi Program Paten	210.444.000,00	52.611.000,00	0,00	263.055.000,00
	Pembelian Anti Virus	2.985.000,00	995.000,00	0,00	3.980.000,00
	Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Tenaga Kerja	59.772.900,00	19.924.300,00	0,00	79.697.200,00
	Software Hosting Domain Si Kerja, SMS Getway Si Kerja, Hosting Domain Si Jadwal	18.736.800,00	6.245.600,00	0,00	24.982.400,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Pengaduan Masyarakat	31.780.400,00	15.890.200,00	0,00	47.670.600,00
18	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	239.591.247,00	67.723.107,00	0,00	307.314.354,00
	Software Kearsipan (SIMAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Website Perpustakaan E-Beca	40.533.200,00	20.266.600,00	0,00	60.799.800,00
	Aplikasi E-Book Kubuku	17.964.255,00	13.966.115,00	0,00	31.930.370,00
	Software Kearsipan	25.357.992,00	25.357.992,00	0,00	50.715.984,00
	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu (Siputer)	0,00	7.349.200,00	0,00	7.349.200,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
20	Dinas Pertanian	100.682.800,00	783.200,00	0,00	101.466.000,00
	Software	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
	Aplikasi Bondowoso Republik Kopi	48.550.000,00	0,00	0,00	48.550.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
21	Bagian Hukum	15.481.200,00	15.481.200,00	0,00	30.962.400,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Sistem Informasi Layanan Pembentukan Produk Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paket Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi JDIH Bondowoso	15.481.200,00	15.481.200,00	0,00	30.962.400,00
22	Bagian Administrasi Pemerintahan	157.715.600,00	9.928.600,00	0,00	167.644.200,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	85.656.600,00	0,00	0,00	85.656.600,00
	Aplikasi Hitung Cepat	39.714.400,00	9.928.600,00	0,00	49.643.000,00
	Update Data LPPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24.844.600,00	0,00	0,00	24.844.600,00
23	Bagian Administrasi Perekonomian	3.862.760,00	1.931.380,00	0,00	5.794.140,00
	Software Aplikasi Laporan Penggunaan Laporan Botani (ELAPBONIC)	3.862.760,00	1.931.380,00	0,00	5.794.140,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	19.850.800,00	9.925.400,00	0,00	29.776.200,00
	Software Aplikasi SIBUK (Software Informasi Bantuan Keuangan)	19.850.800,00	9.925.400,00	0,00	29.776.200,00
25	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	55.620.257,00	36.612.917,00	0,00	92.233.174,00
	Aplikasi E-Barjas SMS Gateway	38.014.680,00	19.007.340,00	0,00	57.022.020,00
	Aplikasi One Stop Service	17.605.577,00	17.605.577,00	0,00	35.211.154,00
26	Bagian Umum dan Perlengkapan	6.265.600,00	1.566.400,00	0,00	7.832.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	6.265.600,00	1.566.400,00	0,00	7.832.000,00
27	Kecamatan Bondowoso	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
28	Kecamatan Tamanan	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
29	Kecamatan Tenggarang	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
30	Kecamatan Tegalampel	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
31	Kecamatan Curahdami	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
32	Kecamatan Wringin	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
33	Kecamatan Pakem	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
34	Kecamatan Binakal	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
35	Kecamatan Maesan	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
36	Kecamatan Grujugan	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
37	Kecamatan Pujer	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
38	Kecamatan Wonosari	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
39	Kecamatan Tlogosari	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
40	Kecamatan Sukosari	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
41	Kecamatan Tapen	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
42	Kecamatan Sumberwringin	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
43	Kecamatan Prajekan	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
44	Kecamatan Klabang	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
45	Kecamatan Cerme	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
46	Kecamatan Taman Krocok	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
47	Kecamatan Jambesari	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
48	Kecamatan Botolinggo	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
49	Inspektorat	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
	Website	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.931.860,00	10.919.680,00	0,00	53.851.540,00
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	Software SIADEK (Sistem Informasi Data Ekonomi)	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Updating Website Bappeda	17.839.360,00	8.919.680,00	0,00	26.759.040,00
51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	193.682.800,00	42.483.200,00	155.650.000,00	80.516.000,00
	Software Windows Server	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00
	Software Simd@k	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00
	Software Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan desa	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Sistem Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah (Sirekon)	19.900.000,00	9.950.000,00	0,00	29.850.000,00
	Software Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)	15.000.000,00	31.750.000,00	0,00	46.750.000,00
52	Badan Pendapatan Daerah	1.105.652.350,00	94.728.960,00	0,00	1.200.381.310,00
	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada)	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismiop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.132.800,00	783.200,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi SIM BPHTB	77.280.000,00	38.640.000,00	0,00	115.920.000,00
	Software Aplikasi E-SPTPD	37.174.000,00	18.587.000,00	0,00	55.761.000,00
	Software Aplikasi SIM-PAD	36.691.580,00	18.345.790,00	0,00	55.037.370,00
	E-SPTPD Berbasis Android	18.372.970,00	18.372.970,00	0,00	36.745.940,00
53	Badan Kepegawaian Daerah	674.166.466,67	143.732.066,67	0,00	817.898.533,34
	Website	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software mesin Absensi	59.199.800,00	0,00	0,00	59.199.800,00
	Software Simpeg Webbase	268.277.500,00	43.725.000,00	0,00	312.002.500,00
	Software Kenaikan Pangkat	43.662.500,00	0,00	0,00	43.662.500,00
	Software SMS Gateway	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software E-Absensi Berbasis Web	110.880.000,00	0,00	0,00	110.880.000,00
	Software aplikasi E-absensi Berbasis Android	38.280.000,00	0,00	0,00	38.280.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Aplikasi Layanan Antar Dokumen Pensiun Berbasis Web	2.100.000,00	700.000,00	0,00	2.800.000,00
	Software e-SKP	67.566.666,67	73.331.666,67	0,00	140.898.333,34
	Aplikasi Sitapelegit	0,00	17.982.800,00	0,00	17.982.800,00
	Aplikasi Siraddin	0,00	7.992.600,00	0,00	7.992.600,00
	Jumlah	6.402.640.328,33	1.211.563.507,01	500.223.144,00	7.113.980.691,34

Untuk Aset Tak Berwujud yang masih memiliki masa manfaat tetapi sudah tidak digunakan lagi, maka Amortisasi dibebankan seluruhnya sampai berakhirnya masa manfaat pada tahun berjalan.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5.5 Aset Lain-Lain	61.609.438.122,00	61.613.288.122,00

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.609.438.122,00 merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan Kebijakan Akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-376 Rincian Aset Lainnya – Aset Lain-Lain

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
2	Peralatan dan Mesin	16.178.690.432,00	0,00	0,00	16.178.690.432,00
	Alat Besar	1.084.077.500,00	0,00	0,00	1.084.077.500,00
	Alat Angkutan	1.182.062.882,00	0,00	0,00	1.182.062.882,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.940.035.915,00	0,00	0,00	6.940.035.915,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	415.447.404,00	0,00	0,00	415.447.404,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.997.778.779,00	0,00	0,00	1.997.778.779,00
	Alat Laboratorium	2.271.839.040,00	0,00	0,00	2.271.839.040,00
	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputer	2.286.873.912,00	0,00	0,00	2.286.873.912,00
	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	396.213.000,00	0,00	0,00	396.213.000,00
	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monumen	396.213.000,00	0,00	0,00	396.213.000,00
	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.493.194.090,00	0,00	0,00	44.493.194.090,00
	Jalan dan Jembatan	15.528.770.008,00	0,00	0,00	15.528.770.008,00
	Bangunan Air (Irigasi)	9.772.900.812,00	0,00	0,00	9.772.900.812,00
	Instalasi	19.191.523.270,00	0,00	0,00	19.191.523.270,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tidak Berwujud	545.190.600,00	0,00	3.850.000,00	541.340.600,00
	Aset Tidak Berwujud	545.190.600,00	0,00	3.850.000,00	541.340.600,00
	Jumlah	61.613.288.122,00	0,00	3.850.000,00	61.609.438.122,00

Penambahan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain tahun 2021 adalah sebesar nihil.

Pengurangan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain tahun 2020 sebesar Rp3.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-377 Rincian Pengurangan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain

No	Jenis Aset Lain-Lain	Dimusnahkan (Rp)	Dihibahkan (Rp)	Dijual (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Total (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
	Aset Tidak Berwujud	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
	Jumlah	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00

Belum adanya perubahan atau mutasi aset lain lain berupa jalan, irigasi dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dikarenakan berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan belum sepenuhnya lengkap. Hal ini karena beberapa sebab berikut:

- Kegiatan/pekerjaan yang asetnya akan dimutasi adalah kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2009, 2011, 2012, dan 2013. Kondisi saat ini, pejabat yang mengelola kegiatan pada saat itu sebagian besar sudah purna tugas.

- Terjadi perubahan/penggabungan Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2017 yang menyebabkan beberapa berkas kegiatan tidak dapat ditemukan karena perpindahan kantor dan ruangan.
- Pejabat penerima hibah (Kepala Desa/Kelurahan) sudah banyak yang purna/tidak menjabat sehingga kesulitan dalam melengkapi kelengkapan berkas hibah.

Dari kendala tersebut, langkah yang akan dilakukan terkait penyelesaian aset lain-lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

- Mengidentifikasi ulang lokasi dan kondisi pekerjaan jalan lingkungan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 121 ruas Jalan lingkungan untuk segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- Akan melaksanakan serah terima Hibah terhadap 121 pekerjaan jalan lingkungan dengan Berita Acara baru dan pejabat penerima baru yang bertugas pada saat ini.

Adapun belum adanya perubahan atau mutasi aset lain lain berupa instalasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dikarenakan beberapa sebab berikut:

- Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil sebanyak 54 unit senilai Rp19.191.523.270,00 merupakan aset yang berasal dari belanja modal (pengadaan tahun 2007, 2008 dan 2012) dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (pengadaan tahun 2013, 2014 dan 2015). Aset yang berasal dari belanja modal tahun 2007, 2008 dan 2012 belum dihapus karena bentuk serah terima kepada PT. PLN (Persero) berupa Serah Terima Operasi (STO) sehingga aset masih menjadi milik Pemkab. Sedangkan pengadaan tahun 2013, 2014 dan 2015 awalnya masuk ke persediaan tetapi kemudian direklas (masuk aset lainnya) karena bentuk penyerahan berupa Serah Terima Operasi (STO).
- Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo untuk penyerahan aset dan perubahan Berita Acara Serah Terima yang awalnya Serah Terima Operasi (STO) menjadi Serah Terima Jaringan (STJ). Upaya lainnya, telah dilakukan konsultasi dengan KPP Pratama Situbondo dalam rangka pengenaan pajak hibah akibat serah terima aset. Namun demikian, dari upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut hingga sekarang masih belum menemui titik temu sehingga akan direncanakan untuk melakukan koordinasi ulang dengan pihak PT. PLN (Persero) pada tahun 2022.

		Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	3.733.197.350,08	3.733.197.350,08

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.733.197.350,08 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5-378 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.394.602.832,00	0,00	0,00	2.394.602.832,00
	Alat Besar	1.084.077.500,00	0,00	0,00	1.084.077.500,00

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	Alat Angkutan	1.171.229.882,00	0,00	0,00	1.171.229.882,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	120.140.450,00	0,00	0,00	120.140.450,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputer	18.580.000,00	0,00	0,00	18.580.000,00
	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.338.594.518,08	0,00	0,00	1.338.594.518,08
	Jalan dan Jembatan	809.185.822,40	0,00	0,00	809.185.822,40
	Bangunan Air (Irigasi)	529.408.695,68	0,00	0,00	529.408.695,68
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.733.197.350,08	0,00	0,00	3.733.197.350,08

	Saldo	Saldo
	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Kewajiban	8.506.829.474,91	22.264.616.592,48

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dengan penjelasan sebagai berikut:

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	8.506.829.474,91	22.264.616.592,48

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-379 Rincian Utang Jangka Pendek

No	Jenis	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	133.906.212,04	1.674.393.863,73	1.606.895.910,77	201.404.165,00
2	Pendapatan Diterima di Muka	1.747.899.149,08	303.581.129,92	1.311.986.649,08	739.493.629,92
3	Utang Beban	14.561.206.073,24	105.265.907.168,34	115.143.462.879,85	4.683.650.361,73
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.821.605.158,12	11.249.180.954,14	14.188.504.794,00	2.882.281.318,26
	Jumlah	22.264.616.592,48	118.493.063.116,13	132.250.850.233,70	8.506.829.474,91

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	201.404.165,00	133.906.212,04

Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah pajak atau uang yang dipungut tetapi belum disetor ke pihak ketiga atau ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2021. Utang PFK sebesar Rp201.404.165,00 terdiri dari :

Tabel 5-380 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Jenis	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Utang Pajak BOS	133.906.212,04	1.674.393.863,73	1.606.895.910,77	201.404.165,00
2	Utang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	133.906.212,04	1.674.393.863,73	1.606.895.910,77	201.404.165,00

Utang Pajak BOS tahun 2021 sebesar Rp201.404.165,00. Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Dana BOS yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan ke Kas Negara.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	739.493.629,92	1.747.899.149,08

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengakui sebagai pendapatan. Pendapatan Diterima di muka merupakan perbedaan pengakuan pendapatan LRA dengan pendapatan LO selain terjadinya piutang.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 untuk masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp739.493.629,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-381 Rincian Pendapatan Diterima di Muka (OPD)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Pendapatan Sewa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso	750.000.000,00	0,00	450.000.000,00	300.000.000,00
2	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	16.000.000,00
3	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD	27.333.333,33	0,00	8.000.000,00	19.333.333,33
4	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Dinas Kesehatan	27.333.333,33	0,00	8.000.000,00	19.333.333,33
5	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.333.333,33	0,00	8.000.000,00	19.333.333,33
6	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Sekretariat Daerah	34.166.666,67	0,00	10.000.000,00	24.166.666,67
7	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H.Koesnadi	22.500.000,00	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00
8	Pendapatan Sewa ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi	17.050.000,00	0,00	6.200.000,00	10.850.000,00
9	Pendapatan Sewa ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi	28.462.500,00	0,00	10.350.000,00	18.112.500,00
10	Pendapatan Pajak Reklame	307.797.559,42	303.581.129,92	306.514.226,08	304.864.463,26
11	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	481.922.423,00	0,00	481.922.423,00	0,00
Jumlah		1.747.899.149,08	303.581.129,92	1.311.986.649,08	739.493.629,92

1. Pendapatan Sewa dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso sebesar Rp300.000.000,00.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Kantor Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 3 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2022. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-382 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	36	28	8
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	300.000.000,00

2. Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan sebesar Rp16.000.000,00.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Gedung Kantor Kas Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-383 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	36	24
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00

3. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD sebesar Rp19.333.333,33.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-384 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	31	29
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	20.666.666,67	19.333.333,33

4. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Kesehatan sebesar Rp19.333.333,33.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-385 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Kesehatan

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	31	29
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	20.666.666,67	19.333.333,33

5. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.333.333,33.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-386 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	31	29
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	20.666.666,67	19.333.333,33

6. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Sekretariat Daerah sebesar Rp24.166.666,67. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-387 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Sekretariat Daerah

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	31	29
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	50.000.000,00	25.833.333,33	24.166.666,67

7. Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp7.500.000,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H. Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 10 tahun dimulai pada tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2022. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-388 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H. Koesnadi

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	120	114	6
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	150.000.000,00	142.500.000,00	7.500.000,00

8. Pendapatan Sewa ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi sebesar Rp10.050.000,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-389 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	39	21
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	31.000.000,00	20.150.000,00	10.850.000,00

9. Pendapatan Sewa ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi sebesar Rp18.112.500,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 3 tahun dimulai pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-390 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	36	15	21
2	Masa Sewa Gedung (Rp)	31.050.000,00	12.937.500,00	18.112.500,00

10. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp304.864.463,26.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan Pajak Reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan.

Tabel 5-391 Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Reklame

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Pajak Reklame	307.797.559,42	303.581.129,92	306.514.226,08	304.864.463,26
	Jumlah	307.797.559,42	303.581.129,92	306.514.226,08	304.864.463,26

11. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan P2 sebesar Rp0,00.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang dikelola oleh Badan Pendapatan.

Tabel 5-392 Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Bumi dan Bangunan P2

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan P2	481.922.423,00	0,00	481.922.423,00	0,00
	Jumlah	481.922.423,00	0,00	481.922.423,00	0,00

Saldo	Saldo
Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
(Rp)	(Rp)

5.3.2.1.3 Utang Beban

4.683.650.361,73

14.561.206.073,24

Saldo Utang beban per 31 Desember 2021 adalah Rp4.683.650.361,73, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-393 Rincian Utang Beban

No	Jenis Utang Beban	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Utang Bagi Hasil atas Retribusi Parkir Berlangganan	145.804.500,00	658.318.500,00	710.804.500,00	93.318.500,00
2	Utang Klaim Non Maskin	34.436.447,00	1.206.591,00	0,00	35.643.038,00
3	Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya	2.911.358.097,24	29.389.087.524,34	31.684.430.528,85	616.015.092,73
4	Utang Jasa Pelayanan Kapitasi-BPJS	594.734.280,00	22.885.342.800,00	23.480.077.080,00	0,00
5	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi-BPJS	6.352.488.617,00	40.418.210.938,00	45.351.423.706,00	1.419.275.849,00
6	Utang jasa pelayanan	5.898.000,00	0,00	5.898.000,00	0,00

No	Jenis Utang Beban	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	SJP				
7	Utang jasa pelayanan Covid-19	0,00	16.922.000,00	14.713.600,00	2.208.400,00
8	Utang Jasa Pelayanan Umum	303.860.814,00	4.157.962.299,00	4.099.053.451,00	362.769.662,00
9	Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis	16.806.900,00	898.678.070,00	824.454.470,00	91.030.500,00
10	Utang Jasa Pelayanan Jampersal	0,00	51.335.200,00	42.044.000,00	9.291.200,00
11	Utang Belanja Barang	605.200,00	288.815.700,00	273.028.000,00	16.392.900,00
12	Utang Belanja Jasa	4.195.213.218,00	6.500.027.546,00	8.657.535.544,00	2.037.705.220,00
	Total	14.561.206.073,24	105.265.907.168,34	115.143.462.879,85	4.683.650.361,73

- Utang Bagi Hasil Atas Retribusi Parkir Berlangganan sebesar Rp93.318.500,00.
Jumlah tersebut merupakan utang bagi hasil atas pendapatan retribusi parkir berlangganan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bondowoso berdasarkan perjanjian kerja sama pelaksanaan fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Bondowoso Nomor:188.45/10.15/430.6.2/2014, Nomor:974/547/120.12/2014 dan Nomor:1057/VI/2014/Polres tanggal 5 Juni 2014 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
 - Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Tabel 5-394 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Dispenda Prov Jatim

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	105.303.250,00	0,00	105.303.250,00	0,00
2	2021	0,00	475.452.250,00	422.760.000,00	52.692.250,00
	Jumlah	105.303.250,00	475.452.250,00	528.063.250,00	52.692.250,00

- Polres Bondowoso

Tabel 5-395 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Polres Bondowoso

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	40.501.250,00	0,00	40.501.250,00	0,00
2	2021	0,00	182.866.250,00	142.240.000,00	40.626.250,00
	Jumlah	40.501.250,00	182.866.250,00	182.741.250,00	40.626.250,00

- Utang klaim Non Maskin sebesar Rp35.643.038,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas tagihan/klaim Non Maskin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
 - RSUD dr. H. Soebandi Jember.

Tabel 5-396 Rincian Utang Klaim Non Maskin RSUD dr. H. Soebandi Jember

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	26.990.523,00	0,00	0,00	26.990.523,00
2	2020	2.204.688,00	0,00	0,00	2.204.688,00

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
3	2021	0,00	1.206.591,00	0,00	1.206.591,00
Jumlah		29.195.211,00	1.206.591,00	0,00	30.401.802,00

b. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

Tabel 5-397 Rincian Utang Klaim Non Maskin RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	2.240.700,00	0,00	0,00	2.240.700,00
2	2020	3.000.536,00	0,00	0,00	3.000.536,00
Jumlah		5.241.236,00	0,00	0,00	5.241.236,00

3. Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya sebesar Rp616.015.092,73.

Jumlah tersebut merupakan utang atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh pihak ketiga kepada RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-398 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

No	Jenis Utang Beban	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
a	UTD PMI Bondowoso	109.080.000,00	1.294.560.000,00	1.258.560.000,00	145.080.000,00
b	Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan)	326.741.727,50	4.788.077.925,41	5.109.734.522,91	5.085.130,00
c	Penyedia Bahan Habis Pakai Laborat (Bahan Kimia)	503.185.950,41	3.052.649.367,35	3.363.778.132,96	192.057.184,80
d	Penyedia Obat	1.335.670.936,91	11.620.861.303,69	12.878.213.890,11	78.318.350,49
e	Penyedia Oksigen	288.752.640,00	2.350.420.435,00	2.492.456.725,00	146.716.350,00
f	Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi	1.283.700,00	31.899.424,99	33.183.124,99	0,00
g	Penyedia Bahan Habis Pakai (IBS)	199.698.544,52	1.488.927.265,55	1.687.948.118,07	677.692,00
h	Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi	16.929.000,00	318.803.969,50	326.162.969,50	9.570.000,00
i	Penyedia Bahan Habis Pakai Hemodialisa	25.779.600,00	3.426.665.000,00	3.452.444.600,00	0,00
j	Penyedia Bahan Habis Pakai Cathlab	4.925.058,00	27.488.605,00	32.413.663,00	0,00
k	Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi	35.816.939,90	763.910.433,85	765.575.988,31	34.151.385,44
l	Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik	61.008.000,00	209.907.794,00	266.556.794,00	4.359.000,00
m	Penyedia Nitrogen	2.486.000,00	14.916.000,00	17.402.000,00	0,00
Total		2.911.358.097,24	29.389.087.524,34	31.684.430.528,85	616.015.092,73

a. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Bondowoso.

Tabel 5-399 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya UTD PMI Bondowoso

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	109.080.000,00	0,00	109.080.000,00	0,00

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
2	2021	0,00	1.294.560.000,00	1.149.480.000,00	145.080.000,00
Jumlah		109.080.000,00	1.294.560.000,00	1.258.560.000,00	145.080.000,00

b. Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan).

Tabel 5-400 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	326.741.727,50	0,00	326.741.727,50	0,00
2	2021	0,00	4.788.077.925,41	4.782.992.795,41	5.085.130,00
Jumlah		326.741.727,50	4.788.077.925,41	5.109.734.522,91	5.085.130,00

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.085.130,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai umum (alat kesehatan) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-401 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Umum (Alkes)

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	RS. BHAYANGKARA	123.250,00
2	PT. MMA	982.080,00
3	PT. MMM	3.000.000,00
4	PT. BRATACO	979.800,00
Jumlah		5.085.130,00

c. Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia).

Tabel 5-402 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	503.185.950,41	0,00	503.185.950,41	0,00
2	2021	0,00	3.052.649.367,35	2.860.592.182,55	192.057.184,80
Jumlah		503.185.950,41	3.052.649.367,35	3.363.778.132,96	192.057.184,80

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp192.057.184,80 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai laboratorium (bahan kimia) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-403 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia)

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	91.818.180,00
2	PT. BRATACO	749.999,80
3	PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI	6.908.000,00
4	PT. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA	39.487.800,00
5	PT. TAMARA OWVERSEAS C	1.699.500,00
6	PT. KPA	6.575.525,00
7	PT. NUSA TRIUTAMA	3.118.500,00
8	PT. MB. CITRA MEDIKA	41.699.680,00
Jumlah		192.057.184,80

d. Penyedia Obat.

**Tabel 5-404 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya
Penyedia Obat**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	1.335.670.936,91	0,00	1.335.670.936,91	0,00
2	2021	0,00	11.620.861.303,69	11.542.542.953,20	78.318.350,49
Jumlah		1.335.670.936,91	11.620.861.303,69	12.878.213.890,11	78.318.350,49

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.318.350,49 tersebut merupakan utang kepada penyedia obat dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-405 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Obat

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. KIMIA FARMA	7.203.030,00
2	PT. ANUGERAH PHARMINDO L	21.715.667,99
3	PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	4.866.452,00
4	PT. BINA SAN PRIMA	5.975.370,00
5	PT. PENTA VALENT	4.151.400,00
6	PT. TRI SAPT.A JAYA	1.522.620,00
7	PT. MILLENIUM PHARMACON I	12.416.180,50
8	PT. DISTRIVERSA BUANAMAS	6.579.375,00
9	APOTIK SAFARI	183.100,00
10	PT. SAPT.A SARI TAMA	553.902,00
11	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	9.068.975,00
12	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	750.000,00
13	RS. BHAYANGKARA BONDOWOSO	237.000,00
14	PT. ANTARMITRA SEMBADA	1.386.000,00
15	PT. MENSA BINASUKSES	1.373.988,00
16	RS. ELIZABETH	268.040,00
17	RS. ABDOER RAHEM	67.250,00
Jumlah		78.318.350,49

e. Penyedia Oksigen.

**Tabel 5-406 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya
Penyedia Oksigen**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	288.752.640,00	0,00	288.752.640,00	0,00
2	2021	0,00	2.350.420.435,00	2.203.704.085,00	146.716.350,00
Jumlah		288.752.640,00	2.350.420.435,00	2.492.456.725,00	146.716.350,00

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.716.350,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia oksigen dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-407 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Oksigen

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. SAMATOR GAS I	146.716.350,00
Jumlah		146.716.350,00

f. Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi.

Tabel 5-408 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	1.283.700,00		1.283.700,00	0,00
2	2021	0,00	31.899.424,99	31.899.424,99	0,00
Jumlah		1.283.700,00	31.899.424,99	33.183.124,99	0,00

g. Penyedia Bahan Habis Pakai Instalasi Bedah Sentral (IBS).

Tabel 5-409 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

Penyedia Bahan Habis Pakai (IBS)

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	199.698.544,52	0,00	199.698.544,52	0,00
2	2021	0,00	1.488.927.265,55	1.488.249.573,55	677.692,00
Jumlah		199.698.544,52	1.488.927.265,55	1.687.948.118,07	677.692,00

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp677.692 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai (IBS) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-410 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai (IBS)

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. DNR	677.692,00
Jumlah		677.692,00

h. Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi.

Tabel 5-411 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	16.929.000,00	0,00	16.929.000,00	0,00
2	2021	0,00	318.803.969,50	309.233.969,50	9.570.000,00
Jumlah		16.929.000,00	318.803.969,50	326.162.969,50	9.570.000,00

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.570.000,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai radiologi dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-412 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. SEJATI GLOBAL MEDIKA	9.570.000,00
Jumlah		9.570.000,00

i. Penyedia Bahan Habis Pakai Hemodialisa.

Tabel 5-413 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

Penyedia Bahan Habis Pakai Hemodialisa

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	25.779.600,00		25.779.600,00	0,00
2	2021	0,00	3.426.665.000,00	3.426.665.000,00	0,00
Jumlah		25.779.600,00	3.426.665.000,00	3.452.444.600,00	0,00

j. Penyedia Bahan Habis Pakai *Cathlab*.

**Tabel 5-414 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya
Penyedia Bahan Habis Pakai *Cathlab***

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	4.925.058,00	0,00	4.925.058,00	0,00
2	2021	0,00	27.488.605,00	27.488.605,00	0,00
Jumlah		4.925.058,00	27.488.605,00	32.413.663,00	0,00

k. Orthopedi.

**Tabel 5-415 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya
Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	35.816.939,90	0,00	35.816.939,90	0,00
2	2021	0,00	763.910.433,85	729.759.048,41	34.151.385,44
Jumlah		35.816.939,90	763.910.433,85	765.575.988,31	34.151.385,44

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.151.385,44 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai orthopedi dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-416 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. KAI	7.344.015,44
2	PT. PARIT PADANG	15.023.400,00
3	PT. AMS	2.673.000,00
4	PT. ORTO TIMUR	9.110.970,00
Jumlah		34.151.385,44

l. Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik.

**Tabel 5-417 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya
Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	61.008.000,00	0,00	61.008.000,00	0,00
2	2021	0,00	209.907.794,00	205.548.794,00	4.359.000,00
Jumlah		61.008.000,00	209.907.794,00	266.556.794,00	4.359.000,00

m. Penyedia Nitrogen.

**Tabel 5-418 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya
Penyedia Nitrogen**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	2.486.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00
2	2021	0,00	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00
Jumlah		2.486.000,00	14.916.000,00	17.402.000,00	0,00

4. Utang Jasa Pelayanan Kapitasi-BPJS sebesar Rp00,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS sebesar persentase tertentu dari besarnya klaim BPJS yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-419 Rincian Utang Jasa Pelayanan Kapitasi BPJS

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2018	161.572,00	0,00	161.572,00	0,00
2	2020	594.572.708,00	0,00	594.572.708,00	0,00
3	2021	0,00	22.885.342.800,00	22.885.342.800,00	0,00
Jumlah		594.734.280,00	22.885.342.800,00	23.480.077.080,00	0,00

5. Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi-BPJS sebesar Rp1.419.275.849,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr H. Koesnadi atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien non rawat jalan BPJS sebesar persentase tertentu dari besarnya klaim BPJS yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan

Tabel 5-420 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	147.004.000,00	0,00	147.004.000,00	0,00
2	2021	0,00	1.724.970.000,00	1.561.526.000,00	163.444.000,00
Jumlah		147.004.000,00	1.724.970.000,00	1.708.530.000,00	163.444.000,00

- b. Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi

Tabel 5-421 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	6.205.484.617,00	0,00	6.205.484.617,00	0,00
2	2021	0,00	38.693.240.938,00	37.437.409.089,00	1.255.831.849,00
Jumlah		6.205.484.617,00	38.693.240.938,00	43.642.893.706,00	1.255.831.849,00

6. Utang jasa pelayanan Surat Jaminan Pembiayaan (SJP) sebesar Rp0,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan terhadap masyarakat miskin yang belum memiliki penjaminan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) (aktif/belum aktif) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-422 Rincian Utang Jasa Pelayanan SJP

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	5.898.000,00	0,00	5.898.000,00	0,00
Jumlah		5.898.000,00	0,00	5.898.000,00	0,00

7. Utang Jasa Pelayanan Covid-19 sebesar Rp00,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-423 Rincian Utang Jasa Pelayanan Kapitasi BPJS

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	16.922.000,00	14.713.600,00	2.208.400,00
Jumlah		0,00	16.922.000,00	14.713.600,00	2.208.400,00

8. Utang Jasa Pelayanan Umum sebesar Rp362.769.662,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr H. Koesnadi atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien umum dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

- a. Jasa Pelayanan Umum – Dinkes.

Tabel 5-424 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – Dinkes

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	110.542.000,00	0,00	110.542.000,00	0,00
2	2021	0,00	1.122.497.080,00	964.601.000,00	157.896.080,00
Jumlah		110.542.000,00	1.122.497.080,00	1.075.143.000,00	157.896.080,00

- b. Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi.

Tabel 5-425 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	193.318.814,00	0,00	193.318.814,00	0,00
2	2021	0,00	3.035.465.219,00	2.830.591.637,00	204.873.582,00
Jumlah		193.318.814,00	3.035.465.219,00	3.023.910.451,00	204.873.582,00

9. Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis sebesar Rp91.030.500,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas jasa pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah hasil buangan dari suatu aktivitas medis pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-426 Rincian Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis

PT. Putra Restu Ibu Abadi – Mojokerto

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	16.806.900,00	0,00	16.806.900,00	0,00
2	2021	0,00	898.678.070,00	807.647.570,00	91.030.500,00
Jumlah		16.806.900,00	898.678.070,00	824.454.470,00	91.030.500,00

10. Utang Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp9.291.200,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien Jampersal dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-427 Rincian Utang Jasa Pelayanan Jampersal

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2021	0,00	51.335.200,00	42.044.000,00	9.291.200,00
Jumlah		0,00	51.335.200,00	42.044.000,00	9.291.200,00

11. Utang Belanja Barang sebesar Rp16.392.900,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada penyedia barang atas barang berupa persediaan yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-428 Rincian Utang Beban Barang

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	605.200,00	0,00	605.200,00	0,00
2	2021	0,00	288.815.700,00	272.422.800,00	16.392.900,00
Jumlah		605.200,00	288.815.700,00	273.028.000,00	16.392.900,00

12. Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.037.705.220,00.

Jumlah tersebut merupakan utang belanja jasa listrik, air, telepon, internet, dan langganan media cetak yang sampai akhir tahun 2021 belum terbayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-429 Rincian Utang Jasa Kantor

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2019	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
2	2020	4.195.165.218,00	0,00	4.194.794.218,00	371.000,00
3	2021	0,00	6.500.027.546,00	4.462.693.326,00	2.037.334.220,00
Jumlah		4.195.213.218,00	6.500.027.546,00	8.657.535.544,00	2.037.705.220,00

Utang belanja belum termasuk utang klaim Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso kepada BLUD RSUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp1.223.300.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim Surat Pernyataan Miskin (SPM)	Rp	85.218.000,00
- Klaim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Rp	3.154.479,00
- Klaim Penjamin	Rp	1.134.927.796,00
Jumlah	Rp	1.223.300.275,00

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	2.882.281.318,26	5.821.605.158,12

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebesar Rp2.882.281.318,26 pada tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp5.821.605.158,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-430 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Jenis Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres	125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00
2	Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik	645,12	0,00	0,00	645,12
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	4.929.628.813,00	205.442.597,00	2.959.642.664,00	2.175.428.746,00
4	Utang Bantuan Keuangan Provinsi	766.063.700,00	11.043.738.357,14	11.228.862.130,00	580.939.927,14
Jumlah		5.821.605.158,12	11.249.180.954,14	14.188.504.794,00	2.882.281.318,26

1. Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres sebesar Rp125.912.000,00.

Jumlah tersebut merupakan hasil penerimaan kembali atas pengguliran dana bantuan sapi Banpres/hibah dari Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Petani Peternak yang belum digulirkan kembali dan dana tersebut masih ada di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-431 Rincian Utang Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2003	125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00
Jumlah		125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00

2. Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik sebesar Rp645,12.
Jumlah tersebut merupakan utang beban berupa saldo Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik pada tahun 2010 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-432 Rincian Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	P K B	64,13	0,00	0,00	64,13
2	P. GOLKAR	51,78	0,00	0,00	51,78
3	P P P	30,53	0,00	0,00	30,53
4	P D I P	34,44	0,00	0,00	34,44
5	P. DEMOKRAT	99,43	0,00	0,00	99,43
6	P K S	59,95	0,00	0,00	59,95
7	P K P B	23,95	0,00	0,00	23,95
8	P. HANURA	71,81	0,00	0,00	71,81
9	P P R N	62,69	0,00	0,00	62,69
10	P A N	29,04	0,00	0,00	29,04
11	P. BARNAS	40,86	0,00	0,00	40,86
12	P K N U	76,51	0,00	0,00	76,51
Jumlah		645,12	0,00	0,00	645,12

3. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp2.175.428.746,00.
Jumlah tersebut merupakan utang utang kelebihan pembayaran transfer dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) kepada pihak ketiga dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-433 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	s.d 2019	4.929.628.813,00	0,00	2.959.642.664,00	1.969.986.149,00
2	2020	0,00	205.442.597,00	0,00	205.442.597,00
Jumlah		4.929.628.813,00	205.442.597,00	2.959.642.664,00	2.175.428.746,00

Penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp205.442.597,00 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

4. Utang Bantuan Keuangan Provinsi Rp580.939.927,14.
Jumlah tersebut merupakan bantuan keuangan yang tidak terealisasi dan sampai dengan akhir tahun 2021 belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-434 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2020	766.063.700,00	0,00	766.063.700,00	0,00
2	2021	0,00	11.043.738.357,14	10.462.798.430,00	580.939.927,14
Jumlah		766.063.700,00	11.043.738.357,14	11.228.862.130,00	580.939.927,14

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5.3.3 Ekuitas	2.882.121.144.320,72	2.863.888.254.252,79

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.882.121.144.320,72 dan per 31 Desember 2020 senilai Rp2.863.888.254.252,79. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1 Pendapatan-LO	1.842.379.337.995,53	1.677.680.761.285,42

Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) disajikan berdasarkan akuntansi berbasis akrual dimana pengakuan Pendapatan-LO terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan tahun 2021, sehingga nilai pendapatan-LO adalah sebesar Surat Ketetapan Pendapatan yang telah diterbitkan. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp1.842.379.337.995,53. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.677.680.761.285,42 mengalami kenaikan sebesar Rp164.698.576.710,11 atau 9,82% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-435 Kelompok Pendapatan LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	219.238.663.990,30	204.513.552.070,42	14.725.111.919,88	7,20
2	Pendapatan Transfer	1.487.589.601.606,00	1.386.913.006.385,00	100.676.595.221,00	7,26
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	135.551.072.399,23	86.254.202.830,00	49.296.869.569,23	57,15
	Jumlah	1.842.379.337.995,53	1.677.680.761.285,42	164.698.576.710,11	9,82

Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	219.238.663.990,30	204.513.552.070,42

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp219.238.663.990,30. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp204.513.552.070,42 mengalami kenaikan sebesar Rp14.725.111.919,88 atau 7,20% dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-436 Jenis Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.423.011.100,16	31.272.121.863,98	10.150.889.236,18	32,46
2	Pendapatan Retribusi Daerah	15.657.753.497,28	17.602.747.605,01	(1.944.994.107,73)	(11,05)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.742.549.726,45	4.742.908.991,40	(359.264,95)	(0,01)

No	Uraian	TA 2021 (Rp) (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
4	yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	157.415.349.666,41	150.895.773.610,03	6.519.576.056,38	4,32
	Jumlah	219.238.663.990,30	204.513.552.070,42	14.725.111.919,88	7,20

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	41.423.011.100,16	31.272.121.863,98

Pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp41.423.011.100,16. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp31.272.121.863,98 mengalami kenaikan sebesar Rp10.150.889.236,18 atau 32,46% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-437 Obyek Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	706.656.835,00	663.747.507,00	42.909.328,00	6,46
2	Pajak Restoran-LO	3.157.453.390,00	2.337.236.832,00	820.216.558,00	35,09
3	Pajak Hiburan-LO	25.177.900,00	34.793.800,00	(9.615.900,00)	(27,64)
4	Pajak Reklame-LO	1.209.506.388,16	1.077.092.901,02	132.413.487,14	12,29
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	11.655.097.193,00	11.079.835.738,00	575.261.455,00	5,19
6	Pajak Parkir-LO	75.027.250,00	89.583.900,00	(14.556.650,00)	(16,25)
7	Pajak Air Tanah-LO	191.308.135,00	189.484.776,00	1.823.359,00	0,96
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.080.000,00	29.236.330,00	(28.156.330,00)	(96,31)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	17.113.617.216,00	10.373.599.311,00	6.740.017.905,00	64,97
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	7.288.086.793,00	5.397.510.768,96	1.890.576.024,04	35,03
	Jumlah	41.423.011.100,16	31.272.121.863,98	10.150.889.236,18	32,46

Pendapatan Pajak Hotel-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp706.656.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp663.747.507,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.909.328,00 atau 6,46% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-438 Rincian Pajak Hotel - LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	706.656.835,00	663.747.507,00	42.909.328,00	6,46
	Jumlah	706.656.835,00	663.747.507,00	42.909.328,00	6,46

Pendapatan Pajak Hotel-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Hotel Tahun 2021 sebanyak 225 SKP dengan pokok pajak senilai Rp706.656.835,00.

Pendapatan Pajak Restoran-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp3.157.453.390,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.337.236.832,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp820.216.558,00 atau 35,09% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-439 Rincian Pajak Restoran - LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	3.157.453.390,00	2.337.236.832,00	820.216.558,00	35,09
Jumlah		3.157.453.390,00	2.337.236.832,00	820.216.558,00	35,09

Pendapatan Pajak Restoran-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Restoran-LO Tahun 2021 sebanyak 8.187 SKP dengan pokok pajak senilai Rp3.031.194.190,00 dan koreksi atas temuan kurang bayar pajak catering sebesar Rp126.259.200,00.

Pendapatan Pajak Hiburan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp25.177.900,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp34.793.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.615.900,00 atau 27,64% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-440 Rincian Pajak Restoran - LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	0,00	16.700.000,00	(16.700.000,00)	(100,00)
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	25.177.900,00	18.093.800,00	7.084.100,00	39,15
Jumlah		25.177.900,00	34.793.800,00	(9.615.900,00)	(27,64)

Pendapatan Pajak Hiburan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Hiburan-LO Tahun 2021 sebanyak 138 SKP dengan pokok pajak senilai Rp25.177.900,00.

Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp1.209.506.388,16. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.077.092.901,02 mengalami kenaikan sebesar Rp132.413.487,14 atau 12,29% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-441 Rincian Pajak Reklame-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.209.506.388,16	1.077.092.901,02	132.413.487,14	12,29
Jumlah		1.209.506.388,16	1.077.092.901,02	132.413.487,14	12,29

Pendapatan Pajak Reklame-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Reklame-LO Tahun 2021 sebanyak 3.381 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.206.573.292,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.209.506.388,16 terdapat perbedaan sebesar (Rp2.933.096,16) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Reklame-LO	1.209.506.388,16
SKP Pajak Reklame	1.206.573.292,00

Selisih		(2.933.096,16)
Penjelasan Selisih :		
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka awal tahun	(307.797.559,42)	
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka akhir tahun	304.864.463,26	
Selisih		(2.933.096,16)
Total Selisih		0,00

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp11.655.097.193,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp11.079.835.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp575.261.455,00 atau 5,19% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-442 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	11.655.097.193,00	11.079.835.738,00	575.261.455,00	5,19
	Jumlah	11.655.097.193,00	11.079.835.738,00	575.261.455,00	5,19

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2021 sebanyak 76 SKP dengan pokok pajak senilai Rp11.655.097.193,00.

Pendapatan Pajak Parkir-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp75.027.250,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp89.583.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.556.650,00 atau 16,25% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-443 Rincian Pajak Parkir-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Parkir-LO	75.027.250,00	89.583.900,00	(14.556.650,00)	(16,25)
	Jumlah	75.027.250,00	89.583.900,00	(14.556.650,00)	(16,25)

Pendapatan Pajak Parkir-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Parkir Tahun 2021 sebanyak 61 SKP dengan pokok pajak senilai Rp75.027.250,00.

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp191.308.135,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp189.484.776,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.823.359,00 atau 0,96% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-444 Rincian Pajak Air Tanah-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Air Tanah-LO	191.308.135,00	189.484.776,00	1.823.359,00	0,96
	Jumlah	191.308.135,00	189.484.776,00	1.823.359,00	0,96

Pendapatan Pajak Parkir-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebanyak 1.823 SKP dengan pokok pajak senilai Rp191.308.135,00.

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp1.080.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp29.236.330,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.156.330,00 atau 96,31% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-445 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	0,00	29.236.330,00	(29.236.330,00)	(100,00)
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
Jumlah		1.080.000,00	29.236.330,00	(28.156.330,00)	(96,31)

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 sebanyak 1 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.080.000,00.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp17.113.617.216,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp10.373.599.311,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.740.017.905,00 atau 64,97% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-446 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	PBBP2-LO	17.113.617.216,00	10.373.599.311,00	6.740.017.905,00	64,97
Jumlah		17.113.617.216,00	10.373.599.311,00	6.740.017.905,00	64,97

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2021 sebanyak 354.917 SKP dengan pokok pajak senilai Rp16.631.694.793,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2021 sebesar Rp17.113.617.216,00 terdapat perbedaan sebesar Rp481.922.423,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	17.113.617.216,00
SKP Pajak Reklame	16.631.694.793,00
Selisih	481.922.423,00
Penjelasan Selisih :	
Penyesuaian pendapatan diterima dimuka awal tahun	481.922.423,00
Total Selisih	0,00

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp7.288.086.793,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.397.510.768,96 mengalami kenaikan sebesar Rp1.890.576.024,04 atau 35,03% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-447 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	7.288.086.793,00	5.397.510.768,96	1.890.576.024,04	35,03
	Jumlah	7.288.086.793,00	5.397.510.768,96	1.890.576.024,04	35,03

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2021 sebanyak 1.023 SKP dengan pokok pajak senilai Rp7.288.086.793,00.

	<u>TA 2021 (Rp)</u>	<u>TA 2020 (Rp)</u>
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	15.657.753.497,28	17.602.747.605,01

Pendapatan Retribusi-LO pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp15.657.753.497,28. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp17.602.747.605,01 mengalami penurunan sebesar Rp1.944.994.107,73 atau 11,05% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-448 Obyek Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	13.297.182.465,28	14.866.197.397,34	(1.569.014.932,06)	(10,55)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.352.925.600,00	1.929.826.844,67	(576.901.244,67)	(29,89)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.007.645.432,00	806.723.363,00	200.922.069,00	24,91
	Jumlah	15.657.753.497,28	17.602.747.605,01	(1.944.994.107,73)	(11,05)

Pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2021 adalah sebesar Rp13.297.182.465,28. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp14.866.197.397,34 mengalami penurunan sebesar Rp1.569.014.932,06 atau 10,55% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-449 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	7.614.605.700,00	9.005.105.732,00	(1.390.500.032,00)	(15,44)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	123.295.000,00	163.320.000,00	(40.025.000,00)	(24,51)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.719.919.000,00	3.817.933.000,00	(98.014.000,00)	(2,57)
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.366.505.285,00	1.368.105.035,00	(1.599.750,00)	(0,12)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	242.668.000,00	289.252.000,00	(46.584.000,00)	(16,10)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	2.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(20,00)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-	228.189.480,28	219.981.630,34	8.207.849,94	3,73

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
LO					
	Jumlah	13.297.182.465,28	14.866.197.397,34	(1.569.014.932,06)	(10,55)

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 adalah sebesar Rp1.352.925.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.929.826.844,67 mengalami penurunan sebesar Rp576.901.244,67 atau 29,89% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-450 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	633.785.350,00	1.245.078.866,67	(611.293.516,67)	(49,10)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	406.612.500,00	395.405.000,00	11.207.500,00	2,83
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	168.580.000,00	155.590.000,00	12.990.000,00	8,35
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	143.947.750,00	133.752.978,00	10.194.772,00	7,62
	Jumlah	1.352.925.600,00	1.929.826.844,67	(576.901.244,67)	(29,89)

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 adalah sebesar Rp1.007.645.432,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp806.723.363,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.922.069,00 atau 24,91% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-451 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.007.645.432,00	806.723.363,00	200.922.069,00	24,91
	Jumlah	1.007.645.432,00	806.723.363,00	200.922.069,00	24,91

		<u>TA 2021</u> (Rp)	<u>TA 2020</u> (Rp)
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.742.549.726,45	4.742.908.991,40

Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp4.742.549.726,45. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.742.908.991,40 mengalami penurunan sebesar Rp359.264,95 atau 0,01% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-452 Obyek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	4.742.549.726,45	4.742.908.991,40	(359.264,95)	(0,01)
	Jumlah	4.742.549.726,45	4.742.908.991,40	(359.264,95)	(0,01)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp4.742.549.726,45. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.742.908.991,40 mengalami penurunan sebesar Rp359.264,95 atau 0,01% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-453 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.260.079.389,45	4.742.908.991,40	(482.829.601,95)	(10,18)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	482.470.337,00	0,00	482.470.337,00	0,00
Jumlah		4.742.549.726,45	4.742.908.991,40	(359.264,95)	(0,01)

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
	157.415.349.666,41	150.895.773.610,03

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp157.415.349.666,41. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp150.895.773.610,03 mengalami kenaikan sebesar Rp6.519.576.056,38 atau 4,32% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-454 Obyek Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	242.706.367,00	278.953.506,00	(36.247.139,00)	(12,99)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	470.147.000,00	0,00	470.147.000,00	0,00
3	Jasa Giro-LO	1.401.893.224,19	1.245.848.294,95	156.044.929,24	12,53
4	Pendapatan Bunga-LO	2.923.116.438,15	8.487.031.632,83	(5.563.915.194,68)	(65,56)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.271.280.774,37	294.087.117,86	3.977.193.656,51	1.352,39
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	168.330.468,54	29.251.743,00	139.078.725,54	475,45
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	12.475.242,00	0,00	12.475.242,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	114.553.878,00	98.376.377,00	16.177.501,00	16,44
9	Pendapatan dari BLUD-LO	147.759.879.944,16	102.633.185.815,59	45.126.694.128,57	43,97
10	Pendapatan Dana	0,00	37.635.663.150,00	(37.635.663.150,00)	(100,00)

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
11	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	40.675.330,00	50.971.000,00	(10.295.670,00)	(20,20)
12	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	10.291.000,00	63.104.972,80	(52.813.972,80)	(83,69)
13	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	0,00	79.300.000,00	(79.300.000,00)	(100,00)
Jumlah		157.415.349.666,41	150.895.773.610,03	6.519.576.056,38	4,32

Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO tahun 2021 adalah sebesar Rp242.706.367,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp278.953.506,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.247.139,00 atau 12,99% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-455 Rincian Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan- LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	34.350.000,00	(34.350.000,00)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	242.706.367,00	244.603.506,00	(1.897.139,00)	(0,78)
Jumlah		242.706.367,00	278.953.506,00	(36.247.139,00)	(12,99)

Pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp470.147.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp470.147.000,00 atau 0,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-456 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Sewa BMD-LO	470.147.000,00	0,00	470.147.000,00	0,00
Jumlah		470.147.000,00	0,00	470.147.000,00	0,00

Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp1.401.893.224,19. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.245.848.294,95 mengalami kenaikan sebesar Rp156.044.929,24 atau 12,53% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-457 Rincian Jasa Giro-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.401.893.224,19	1.245.848.294,95	156.044.929,24	12,53
Jumlah		1.401.893.224,19	1.245.848.294,95	156.044.929,24	12,53

Pendapatan Pendapatan Bunga-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp2.923.116.438,15. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp8.487.031.632,83

mengalami penurunan sebesar Rp5.563.915.194,68 atau 65,56% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-458 Rincian Pendapatan Bunga-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.923.116.438,15	8.487.031.632,83	(5.563.915.194,68)	(65,56)
Jumlah		2.923.116.438,15	8.487.031.632,83	(5.563.915.194,68)	(65,56)

Pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp4.271.280.774,37. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp294.087.117,86 mengalami kenaikan sebesar Rp3.977.193.656,51 atau 1.352,39% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-459 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	294.087.117,86	(294.087.117,86)	(100,00)
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	4.271.280.774,37	0,00	4.271.280.774,37	0,00
Jumlah		4.271.280.774,37	294.087.117,86	3.977.193.656,51	1.352,39

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp2.923.116.438,15. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp8.487.031.632,83 mengalami kenaikan sebesar Rp5.563.915.194,68 atau 65,56% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-460 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	168.330.468,54	29.251.743,00	139.078.725,54	475,45
Jumlah		168.330.468,54	29.251.743,00	139.078.725,54	475,45

Pendapatan denda pajak daerah-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp12.475.242,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.475.242,00 atau 0,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-461 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	12.475.242,00	0,00	12.475.242,00	0,00
Jumlah		12.475.242,00	0,00	12.475.242,00	0,00

Pendapatan dari pengembalian-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp114.553.878,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp98.376.377,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp16.177.501,00 atau 16,44% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-462 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	113.183.878,00	98.376.377,00	14.807.501,00	15,05
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00
Jumlah		114.553.878,00	98.376.377,00	16.177.501,00	16,44

Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp147.759.879.944,16. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp102.633.185.815,59 mengalami kenaikan sebesar Rp45.126.694.128,57 atau 43,97% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-463 Rincian Pendapatan dari BLUD-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan dari BLUD-LO	147.759.879.944,16	102.633.185.815,59	45.126.694.128,57	43,97
Jumlah		147.759.879.944,16	102.633.185.815,59	45.126.694.128,57	43,97

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp37.635.663.150,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.635.663.150,00 atau 100,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-464 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	37.635.663.150,00	(37.635.663.150,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	37.635.663.150,00	(37.635.663.150,00)	(100,00)

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp40.675.330,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp50.971.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.295.670,00 atau 20,20% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-465 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	40.675.330,00	50.971.000,00	(10.295.670,00)	(20,20)
Jumlah		40.675.330,00	50.971.000,00	(10.295.670,00)	(20,20)

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp10.291.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar

Rp63.104.972,80 mengalami penurunan sebesar Rp52.813.972,80 atau 83,69% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-466 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	10.291.000,00	63.104.972,80	(52.813.972,80)	(83,69)
Jumlah		10.291.000,00	63.104.972,80	(52.813.972,80)	(83,69)

Pendapatan fasilitas sosial dan fasilitas umum - LO tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp63.104.972,80 mengalami penurunan sebesar Rp79.300.000,00 atau 100,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-467 Rincian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	0,00	79.300.000,00	(79.300.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	79.300.000,00	(79.300.000,00)	(100,00)

	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer	1.487.589.601.606,00	1.386.913.006.385,00

Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp1.487.589.601.606,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.386.913.006.385,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.676.595.221,00 atau 7,26% dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-468 Rincian Pendapatan Transfer

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.318.841.312.444,00	1.234.388.634.052,00	84.452.678.392,00	6,84
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	37.542.241.000,00	19.903.560.000,00	17.638.681.000,00	88,62
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	131.206.048.162,00	132.620.812.333,00	(1.414.764.171,00)	(1,07)
Jumlah		1.487.589.601.606,00	1.386.913.006.385,00	100.676.595.221,00	7,26

	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.318.841.312.444,00	1.234.388.634.052,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.318.841.312.444,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.234.388.634.052,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.676.595.221,00 atau 7,26 % dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-469 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Bagi Hasil	137.850.455.347,00	69.740.100.850,00	68.110.354.497,00	97,66
2	Dana Alokasi Umum	843.159.769.000,00	851.793.800.000,00	(8.634.031.000,00)	(1,01)
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	136.481.721.719,00	312.854.733.202,00	(176.373.011.483,00)	(56,38)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	201.349.366.378,00	0,00	201.349.366.378,00	0,00
Jumlah		1.318.841.312.444,00	1.234.388.634.052,00	84.452.678.392,00	6,84

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.1.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil	137.850.455.347,00	69.740.100.850,00

Pendapatan dana bagi hasil pada tahun 2021 adalah sebesar Rp137.850.455.347,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp69.740.100.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.110.354.497,00 atau 97,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-470 Rincian Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DBH PBB-LO	14.466.221.035,00	5.838.937.400,00	8.627.283.635,00	147,75
2	DBH PPh Pasal 21-LO	14.342.360.661,00	0,00	14.342.360.661,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN-LO	1.988.732.022,00	11.435.963.200,00	(9.447.231.178,00)	(82,61)
4	DBH CHT-LO	43.451.926.805,00	33.129.521.000,00	10.322.405.805,00	31,16
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	56.796.182.846,00	15.549.725.300,00	41.246.457.546,00	265,26
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	1.077.875.887,00	1.740.418.100,00	(662.542.213,00)	(38,07)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	342.053.301,00	241.564.450,00	100.488.851,00	41,60
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.381.417.705,00	291.338.850,00	3.090.078.855,00	1.060,65
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	646.065.935,00	411.152.550,00	234.913.385,00	57,14
10	DBH SDA Perikanan-LO	1.357.619.150,00	1.101.480.000,00	256.139.150,00	23,25
Jumlah		137.850.455.347,00	69.740.100.850,00	68.110.354.497,00	97,66

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.1.4.2.1.2 Dana Alokasi Umum	843.159.769.000,00	851.793.800.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2021 adalah sebesar 843.159.769.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp851.793.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.634.031.000,00 atau 1,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-471 Rincian Dana Alokasi Umum – LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Alokasi Umum-LO	843.159.769.000,00	851.793.800.000,00	(8.634.031.000,00)	(1,01)
Jumlah		843.159.769.000,00	851.793.800.000,00	(8.634.031.000,00)	(1,01)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.1.4.2.1.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik	136.481.721.719,00	312.854.733.202,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik pada tahun 2021 adalah sebesar Rp136.481.721.719,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp312.854.733.202,00 mengalami penurunan sebesar Rp176.373.011.483,00 atau 56,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-472 Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.476.295.430,00	272.624.509.765,00	(271.148.214.335,00)	(99,46)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	20.371.416.284,00	0,00	20.371.416.284,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.460.997.456,00	0,00	8.460.997.456,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	436.587.625,00	0,00	436.587.625,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	556.762.551,00	0,00	556.762.551,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	5.251.433.145,00	3.291.058.450,00	1.960.374.695,00	59,57
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	29.014.091.676,00	(29.014.091.676,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	2.521.930.176,00	3.013.403.435,00	(491.473.259,00)	(16,31)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	28.803.504.744,00	0,00	28.803.504.744,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	227.600.500,00	1.073.354.300,00	(845.753.800,00)	(78,80)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	299.145.300,00	0,00	299.145.300,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	3.373.294.000,00	(3.373.294.000,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	786.373.036,00	0,00	786.373.036,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	3.480.270.150,00	0,00	3.480.270.150,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Pembangunan Pertanian-LO				
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- LO Penugasan- LO	1.438.634.327,00	0,00	1.438.634.327,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan- LO	3.698.703.004,00	0,00	3.698.703.004,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan-LO	9.472.663.000,00	0,00	9.472.663.000,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan-LO	8.927.233.000,00	0,00	8.927.233.000,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	465.021.576,00	(465.021.576,00)	(100,00)
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	10.850.227.021,00	0,00	10.850.227.021,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	12.028.882.000,00	0,00	12.028.882.000,00	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	9.888.047.000,00	0,00	9.888.047.000,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	1.154.542.370,00	0,00	1.154.542.370,00	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler-LO	4.906.757.600,00	0,00	4.906.757.600,00	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Penugasan-LO	1.443.716.000,00	0,00	1.443.716.000,00	0,00
	Jumlah	136.481.721.719,00	312.854.733.202,00	(176.373.011.483,00)	(56,38)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.1.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	201.349.366.378,00	0,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik pada tahun 2021 adalah sebesar Rp201.349.366.378,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp201.349.366.378,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-473 Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	136.216.200.000,00	0,00	136.216.200.000,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.512.000.000,00	0,00	1.512.000.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	208.928.000,00	0,00	208.928.000,00	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	21.927.133.800,00	0,00	21.927.133.800,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan- LO	19.557.400.000,00	0,00	19.557.400.000,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	13.587.329.255,00	0,00	13.587.329.255,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.112.128.371,00	0,00	4.112.128.371,00	0,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	377.709.800,00	0,00	377.709.800,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	2.133.458.152,00	0,00	2.133.458.152,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	945.557.000,00	0,00	945.557.000,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	372.462.000,00	0,00	372.462.000,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	187.310.000,00	0,00	187.310.000,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	211.750.000,00	0,00	211.750.000,00	0,00
Jumlah		201.349.366.378,00	0,00	201.349.366.378,00	0,00

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	19.903.560.000,00	8.986.706.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp37.542.241.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp19.903.560.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.638.681.000,00 atau 88,62% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-474 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	37.542.241.000,00	19.903.560.000,00	17.638.681.000,00	88,62
Jumlah		37.542.241.000,00	19.903.560.000,00	17.638.681.000,00	88,62

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)	37.542.241.000,00	19.903.560.000,00

Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp37.542.241.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp19.903.560.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.638.681.000,00 atau 88,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-475 Rincian Dana Insentif Daerah (DID)

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DID-LO	37.542.241.000,00	19.903.560.000,00	17.638.681.000,00	88,62
Jumlah		37.542.241.000,00	19.903.560.000,00	17.638.681.000,00	88,62

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	131.206.048.162,00	132.620.812.333,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp131.206.048.162,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp132.620.812.333,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.414.764.171,00 atau 1,07% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-476 Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	120.743.249.732,00	97.496.533.033,00	23.246.716.699,00	23,84
2	Bantuan Keuangan	10.462.798.430,00	35.124.279.300,00	(24.661.480.870,00)	(70,21)
	Jumlah	131.206.048.162,00	132.620.812.333,00	(1.414.764.171,00)	(1,07)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil	120.743.249.732,00	97.496.533.033,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO pada tahun 2021 adalah sebesar Rp120.743.249.732,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp97.496.533.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.246.716.699,00 atau 23,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-477 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	120.743.249.732,00	97.496.533.033,00	23.246.716.699,00	23,84
	Jumlah	120.743.249.732,00	97.496.533.033,00	23.246.716.699,00	23,84

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	10.462.798.430,00	35.124.279.300,00

Pendapatan Bantuan Keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.462.798.430,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp35.124.279.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.661.480.870,00 atau 70,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-478 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.462.798.430,00	35.124.279.300,00	(24.661.480.870,00)	(70,21)
	Jumlah	10.462.798.430,00	35.124.279.300,00	(24.661.480.870,00)	(70,21)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	135.551.072.399,23	86.254.202.830,00

Lain-lain pendapatan yang sah pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp135.551.072.399,23. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp86.254.202.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.296.869.569,23 atau 57,15% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-479 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah	33.968.652.619,23	86.254.202.830,00	(52.285.550.210,77)	(60,62)
2	Pendapatan Lainnya	101.582.419.780,00	0,00	101.582.419.780,00	0,00
	Jumlah	135.551.072.399,23	86.254.202.830,00	49.296.869.569,23	57,15

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah	33.968.652.619,23	86.254.202.830,00

Pendapatan Hibah tahun 2021 adalah sebesar Rp33.968.652.619,23. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp86.254.202.830,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.285.550.210,77 atau 60,62% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-480 Pendapatan Hibah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	9.027.367.814,90	85.757.631.618,00	(76.730.263.803,10)	(89,47)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	24.321.596.709,83	0,00	24.321.596.709,83	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	619.688.094,50	496.571.212,00	123.116.882,50	24,79
	Jumlah	33.968.652.619,23	86.254.202.830,00	(52.285.550.210,77)	(60,62)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp9.027.367.814,90. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp85.757.631.618,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.730.263.803,10 atau 89,47% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-481 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	9.027.367.814,90	85.757.631.618,00	(76.730.263.803,10)	(89,47)
	Jumlah	9.027.367.814,90	85.757.631.618,00	(76.730.263.803,10)	(89,47)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp24.321.596.709,83. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.321.596.709,83 atau 0,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-482 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	24.321.596.709,83	0,00	24.321.596.709,83	0,00
	Jumlah	24.321.596.709,83	0,00	24.321.596.709,83	0,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp619.688.094,50. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp496.571.212,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp123.116.882,50 atau 24,79% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-483 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	493.226.612,50	0,00	493.226.612,50	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	126.461.482,00	496.571.212,00	(370.109.730,00)	(74,53)
Jumlah		619.688.094,50	496.571.212,00	123.116.882,50	24,79

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya	101.582.419.780,00	0,00

Pendapatan Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp101.582.419.780,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp101.582.419.780,00 atau 0,00% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-484 Pendapatan Hibah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Lain-lain Pendapatan-LO	63.562.244.031,00	0,00	63.562.244.031,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	38.020.175.749,00	0,00	38.020.175.749,00	0,00
Jumlah		101.582.419.780,00	0,00	101.582.419.780,00	0,00

Lain-lain Pendapatan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp63.562.244.031,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.562.244.031,00 atau 0,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-485 Rincian Lain-lain Pendapatan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	63.562.136.781,00	0,00	63.562.136.781,00	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	107.250,00	0,00	107.250,00	0,00
Jumlah		63.562.244.031,00	0,00	63.562.244.031,00	0,00

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.2 Beban	1.827.621.945.024,36	1.759.005.278.712,29

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp1.827.621.945.024,36. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar

Rp1.759.005.278.712,29 mengalami kenaikan sebesar Rp68.616.666.312,07 atau 3,90% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-486 Jenis Beban

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	798.903.569.988,00	752.196.941.707,00	46.706.628.281,00	6,21
2	Beban Persediaan	152.436.423.003,68	135.210.577.026,43	17.225.845.977,25	12,74
3	Beban Jasa	245.915.390.165,06	269.212.042.254,40	(23.296.652.089,34)	(8,65)
4	Beban Pemeliharaan	20.216.659.854,39	20.099.048.652,00	117.611.202,39	0,59
5	Beban Perjalanan Dinas	26.289.401.713,00	23.086.260.119,00	3.203.141.594,00	13,87
6	Beban Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah	151.380.791.843,64	184.001.114.864,13	(32.620.323.020,49)	(17,73)
8	Beban Bantuan Sosial	35.217.459.036,80	2.332.500.000,00	32.884.959.036,80	1.409,86
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	269.191.263.009,68	249.115.751.010,39	20.075.511.999,29	8,06
10	Beban Penyisihan Piutang	4.506.502.674,11	5.680.492.659,94	(1.173.989.985,83)	(20,67)
11	Beban Transfer	119.674.608.869,00	112.955.077.712,00	6.719.531.157,00	5,95
12	Beban Lain-lain	2.706.711.067,00	3.932.308.907,00	(1.225.597.840,00)	(31,17)
	Jumlah	1.827.621.945.024,36	1.759.005.278.712,29	68.616.666.312,07	3,90

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.4 Beban Pegawai	798.903.569.988,00	752.196.941.707,00

Beban Pegawai tahun 2021 adalah sebesar Rp798.903.569.988,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp752.196.941.707,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.706.628.281,00 atau 6,21% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-487 Obyek Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	533.890.828.149,00	530.931.386.115,00	2.959.442.034,00	0,56
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	70.973.126.222,00	71.198.209.919,00	(225.083.697,00)	(0,32)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	162.163.218.151,00	126.067.033.770,00	36.096.184.381,00	28,63
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.757.496.275,00	16.047.991.143,00	2.709.505.132,00	16,88
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	327.115.189,00	0,00	327.115.189,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	677.000.000,00	652.000.000,00	25.000.000,00	3,83
7	Beban Pegawai BLUD	12.114.786.002,00	7.300.320.760,00	4.814.465.242,00	65,95
	Jumlah	798.903.569.988,00	752.196.941.707,00	46.706.628.281,00	6,21

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp533.890.828.149,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp530.931.386.115,00

mengalami kenaikan sebesar Rp2.959.442.034,00 atau 0,56% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-488 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	406.088.568.053,00	407.089.786.134,00	(1.001.218.081,00)	(0,25)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.119.256.192,00	38.539.873.273,00	(420.617.081,00)	(1,09)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.282.043.550,00	7.905.580.550,00	(1.623.537.000,00)	(20,54)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.816.800.318,00	25.723.896.150,00	(907.095.832,00)	(3,53)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.927.866.680,00	7.037.605.000,00	890.261.680,00	12,65
6	Beban Tunjangan Beras ASN	22.966.555.270,00	19.830.840.934,00	3.135.714.336,00	15,81
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.988.692.217,00	1.968.122.250,00	20.569.967,00	1,05
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.713.588,00	5.471.169,00	242.419,00	4,43
9	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	22.379.426.182,00	19.497.766.970,00	2.881.659.212,00	14,78
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	828.874.616,00	833.116.638,00	(4.242.022,00)	(0,51)
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	2.487.031.483,00	2.499.327.047,00	(12.295.564,00)	(0,49)
Jumlah		533.890.828.149,00	530.931.386.115,00	2.959.442.034,00	0,56

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp70.973.126.222,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp71.198.209.919,00 mengalami penurunan sebesar 225.083.697,00 atau 0,32% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5-489 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	69.418.126.222,00	69.698.209.919,00	(280.083.697,00)	(0,40)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.555.000.000,00	1.500.000.000,00	55.000.000,00	3,67
Jumlah		70.973.126.222,00	71.198.209.919,00	(225.083.697,00)	(0,32)

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp162.163.218.151,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp126.067.033.770,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.096.184.381,00 atau 28,63% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-490 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi	1.122.411.168,00	1.310.375.300,00	(187.964.132,00)	(14,34)

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
	ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.844.480,00	59.696.700,00	(51.852.220,00)	(86,86)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	132.796.055.460,00	121.600.936.720,00	11.195.118.740,00	9,21
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	246.623.200,00	1.427.000.000,00	(1.180.376.800,00)	(82,72)
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.446.250.000,00	0,00	1.446.250.000,00	0,00
6	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	25.813.703.843,00	0,00	25.813.703.843,00	0,00
7	Beban Honorarium	730.330.000,00	1.669.025.050,00	(938.695.050,00)	(56,24)
	Jumlah	162.163.218.151,00	126.067.033.770,00	36.096.184.381,00	28,63

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2021 adalah sebesar Rp18.757.496.275,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp16.047.991.143,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.709.505.132,00 atau 16,88% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-491 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.000.860.000,00	0,00	1.000.860.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	120.775.200,00	0,00	120.775.200,00	0,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	135.497.820,00	0,00	135.497.820,00	0,00
4	Beban Uang Paket DPRD	85.743.000,00	86.058.000,00	(315.000,00)	(0,37)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.451.247.000,00	0,00	1.451.247.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.654.750,00	120.399.300,00	15.255.450,00	12,67
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1.568.175,00	53.272.275,00	(51.704.100,00)	(97,06)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.649.000.000,00	5.670.000.000,00	(21.000.000,00)	(0,37)
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.396.500.000,00	1.386.000.000,00	10.500.000,00	0,76
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	393.758,00	0,00	393.758,00	0,00
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.123.681.572,00	4.058.261.568,00	65.420.004,00	1,61
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.655.000.000,00	4.674.000.000,00	(19.000.000,00)	(0,41)
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00
	Jumlah	18.757.496.275,00	16.047.991.143,00	2.709.505.132,00	16,88

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp327.115.189,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp327.115.189,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-492 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.852.000,00	0,00	6.852.000,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.735.060,00	0,00	6.735.060,00	0,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.271.300,00	0,00	1.271.300,00	0,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	600,00	0,00	600,00	0,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.475.360,00	0,00	5.475.360,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	112.320,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	336.960,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	153.056.069,00	0,00	153.056.069,00	0,00
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	395.520,00	0,00	395.520,00	0,00
Jumlah		327.115.189,00	0,00	327.115.189,00	0,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2021 adalah sebesar Rp677.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp652.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.000.000,00 atau 3,83 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-493 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	425.000.000,00	400.000.000,00	25.000.000,00	6,25
Jumlah		677.000.000,00	652.000.000,00	25.000.000,00	3,83

Beban Pegawai BLUD tahun 2021 adalah sebesar Rp12.114.786.002,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp7.300.320.760,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.814.465.242,00 atau 65,95 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-494 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai BLUD	12.114.786.002,00	7.300.320.760,00	4.814.465.242,00	65,95
	Jumlah	12.114.786.002,00	7.300.320.760,00	4.814.465.242,00	65,95

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.5 Beban Persediaan	152.436.423.003,68	135.210.577.026,43

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual sehingga Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan (*use of goods*) selama Tahun 2021. Beban persediaan tahun 2021 adalah sebesar Rp152.436.423.003,68. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp135.210.577.026,43 mengalami kenaikan sebesar Rp17.225.845.977,25 atau 12,74% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-495 Obyek Beban Persediaan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Barang	152.436.423.003,68	135.210.577.026,43	17.225.845.977,25	12,74
	Jumlah	152.436.423.003,68	135.210.577.026,43	17.225.845.977,25	12,74

Beban Barang tahun 2021 adalah sebesar Rp152.436.423.003,68. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp135.210.577.026,43 mengalami kenaikan sebesar Rp17.225.845.977,25 atau 12,74% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-496 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Barang Pakai Habis	152.436.423.003,68	135.210.577.026,43	17.225.845.977,25	12,74
	Jumlah	152.436.423.003,68	135.210.577.026,43	17.225.845.977,25	12,74

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.6 Beban Jasa	245.915.390.165,06	269.212.042.254,40

Perbedaan pengakuan belanja jasa dengan beban jasa diantaranya pada pengakuan utang beban jasa telepon, air, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit dan utang beban jasa lainnya. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

Beban jasa tahun 2021 adalah sebesar Rp245.915.390.165,06. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp269.212.042.254,40 mengalami penurunan sebesar Rp23.296.652.089,34 atau 8,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-497 Obyek Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Jasa	218.775.437.330,06	262.985.567.254,40	(44.210.129.924,34)	(16,81)

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.139.952.835,00	6.226.475.000,00	20.913.477.835,00	335,88
Jumlah		245.915.390.165,06	269.212.042.254,40	(23.296.652.089,34)	(8,65)

Beban jasa tahun 2021 adalah sebesar Rp218.775.437.330,06. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp262.985.567.254,40 mengalami penurunan sebesar Rp44.210.129.924,34 atau 16,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-498 Rincian Beban jasa

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Kantor Jasa	182.654.325.532,56	236.620.112.251,40	(53.965.786.718,84)	(22,81)
2	Beban Jaminan/Asuransi	19.701.212.274,00	18.241.109.043,00	1.460.103.231,00	8,00
3	Beban Sewa Tanah	66.700.000,00	17.200.000,00	49.500.000,00	287,79
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.135.378.841,00	2.583.020.160,00	(447.641.319,00)	(17,33)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	857.567.600,00	472.400.000,00	385.167.600,00	81,53
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.036.459.710,00	0,00	4.036.459.710,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	28.487.000,00	4.150.000,00	24.337.000,00	586,43
8	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	5.405.449.172,50	1.863.140.520,00	3.542.308.652,50	190,13
9	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.296.676.750,00	290.579.780,00	1.006.096.970,00	346,24
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	348.060.000,00	0,00	348.060.000,00	0,00
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	228.000.000,00	192.000.000,00	36.000.000,00	18,75
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.017.120.450,00	2.701.855.500,00	(684.735.050,00)	(25,34)
Jumlah		218.775.437.330,06	262.985.567.254,40	(44.210.129.924,34)	(16,81)

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp27.139.952.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp6.226.475.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.913.477.835,00 atau 335,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-499 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.106.068.500,00	6.226.475.000,00	15.879.593.500,00	255,03
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.033.884.335,00	0,00	5.033.884.335,00	0,00
Jumlah		27.139.952.835,00	6.226.475.000,00	20.913.477.835,00	335,88

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.7 Beban Pemeliharaan	20.216.659.854,39	20.099.048.652,00

Beban Pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik OPD Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp20.216.659.854,39 . Jika dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp20.099.048.652,00 mengalami kenaikan sebesar Rp117.611.202,39 atau 0,59% dengan obyek beban pemeliharaan sebagai berikut :

Tabel 5-500 Rincian Obyek Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pemeliharaan	20.216.659.854,39	20.099.048.652,00	117.611.202,39	0,59
Jumlah		20.216.659.854,39	20.099.048.652,00	117.611.202,39	0,59

Beban Pemeliharaan tahun 2021 adalah sebesar Rp20.216.659.854,39. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp20.099.048.652,00 mengalami kenaikan sebesar Rp117.611.202,39 atau 0,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-501 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	24.998.000,00	0,00	24.998.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.090.002.541,00	5.037.042.820,00	52.959.721,00	1,05
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.774.467.913,00	13.902.487.293,00	(128.019.380,00)	(0,92)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.322.711.400,39	1.099.168.539,00	223.542.861,39	20,34
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.480.000,00	60.350.000,00	(55.870.000,00)	(92,58)
Jumlah		20.216.659.854,39	20.099.048.652,00	117.611.202,39	0,59

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.8 Beban Perjalanan Dinas	26.289.401.713,00	23.086.260.119,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi selama tahun 2021 untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan yang terealisasi sebesar Rp26.289.401.713,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban perjalanan dinas tahun 2020 sebesar Rp23.086.260.119,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.203.141.594,00 atau 13,87% dengan obyek beban perjalanan dinas sebagai berikut :

Tabel 5-502 Obyek Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas	26.289.401.713,00	23.086.260.119,00	3.203.141.594,00	13,87
	Jumlah	26.289.401.713,00	23.086.260.119,00	3.203.141.594,00	13,87

Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 adalah sebesar Rp26.289.401.713,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp23.086.260.119,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.203.141.594,00 atau 13,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-503 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.289.401.713,00	23.086.260.119,00	3.203.141.594,00	13,87
	Jumlah	26.289.401.713,00	23.086.260.119,00	3.203.141.594,00	13,87

	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.9 Beban Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00

Beban Subsidi tahun 2021 sebesar Rp1.183.163.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi tahun 2020 sebesar Rp1.183.163.800,00 tidak mengalami perubahan dengan obyek beban subsidi sebagai berikut:

Tabel 5-504 Obyek Beban Subsidi

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00

Beban Subsidi kepada BUMD tahun 2021 adalah sebesar Rp1.183.163.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.183.163.800,00 tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-505 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00

	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.10Beban Hibah	151.380.791.843,64	184.001.114.864,13

Beban Hibah berupa barang dapat berasal dari barang yang dibeli untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau sebelumnya merupakan bagian persediaan, dan telah diserahkan kepada masyarakat pada tahun berjalan.

Beban hibah tahun 2021 sebesar Rp151.380.791.843,64. Jika dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2020 sebesar Rp184.001.114.864,13 mengalami penurunan sebesar Rp32.620.323.020,49 atau 17,73% dengan obyek beban hibah sebagai berikut:

Tabel 5-506 Obyek Beban Hibah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	496.892.520,00	0,00	496.892.520,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.254.041.000,00	0,00	15.254.041.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	112.036.197.003,88	70.135.598.600,00	41.900.598.403,88	59,74
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	0,00	1.775.452.000,00	0,00
5	Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan	21.818.209.319,76	113.865.516.264,13	(92.047.306.944,37)	(80,84)
Jumlah		151.380.791.843,64	184.001.114.864,13	(32.620.323.020,49)	(17,73)

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 adalah sebesar Rp496.892.520,00 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp496.892.520,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-507 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	496.892.520,00	0,00	496.892.520,00	0,00
Jumlah		496.892.520,00	0,00	496.892.520,00	0,00

Beban Hibah Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp15.254.041.000,00 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.254.041.000,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-508 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.254.041.000,00	0,00	15.254.041.000,00	0,00
Jumlah		15.254.041.000,00	0,00	15.254.041.000,00	0,00

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2021 adalah sebesar Rp112.036.197.003,88. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp70.135.598.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.900.598.403,88 atau 59,74 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-509 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.642.557.733,29	0,00	27.642.557.733,29	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	29.377.492.888,37	0,00	29.377.492.888,37	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	55.016.146.382,22	0,00	55.016.146.382,22	0,00
Jumlah		112.036.197.003,88	0,00	112.036.197.003,88	0,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2021 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.775.452.000,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-510 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	0,00	1.775.452.000,00	0,00
Jumlah		1.775.452.000,00	0,00	1.775.452.000,00	0,00

Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan tahun 2021 adalah sebesar Rp21.818.209.319,76. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp113.865.516.264,13 mengalami penurunan sebesar Rp92.047.306.944,37 atau 80,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-511 Rincian Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.096.805.131,90	44.280.444.231,12	(29.183.639.099,22)	(65,91)
2	Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.721.404.187,86	69.585.072.033,01	(62.863.667.845,15)	(90,34)

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Jumlah	21.818.209.319,76	113.865.516.264,13	(92.047.306.944,37)	(80,84)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.11Beban Bantuan Sosial	35.217.459.036,80	2.332.500.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 adalah sebesar Rp35.217.459.036,80. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.332.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.884.959.036,80 atau 1.409,86 % dengan obyek beban sebagai berikut :

Tabel 5-512 Obyek Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	13.087.574.036,80	0,00	13.087.574.036,80	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	562.725.000,00	10.000.000,00	552.725.000,00	5.527,25
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	21.567.160.000,00	2.322.500.000,00	19.244.660.000,00	828,62
	Jumlah	35.217.459.036,80	2.332.500.000,00	32.884.959.036,80	1.409,86

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu tahun 2021 adalah sebesar Rp13.087.574.036,80. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.087.574.036,80 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-513 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.438.400.000,00	0,00	2.438.400.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.649.174.036,80	0,00	10.649.174.036,80	0,00
	Jumlah	13.087.574.036,80	0,00	13.087.574.036,80	0,00

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp562.725.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp552.725.000,00 atau 5.527,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-514 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
2	Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	562.725.000,00	0,00	562.725.000,00	0,00
Jumlah		562.725.000,00	10.000.000,00	552.725.000,00	5.527,25

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2021 adalah sebesar Rp21.567.160.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.322.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.244.660.000,00 atau 828,62 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-515 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	21.320.200.000,00	2.322.500.000,00	18.997.700.000,00	817,98
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	246.960.000,00	0,00	246.960.000,00	0,00
Jumlah		21.567.160.000,00	2.322.500.000,00	19.244.660.000,00	828,62

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi	269.191.263.009,68	249.115.751.010,39

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan baru diterapkan pertama kali di Tahun 2015 sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp269.191.263.009,68. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp249.115.751.010,39 mengalami kenaikan sebesar Rp20.075.511.999,29 atau 8,06% dengan obyek beban sebagai berikut:

Tabel 5-516 Obyek Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi 2021 (Rp)	Beban Penyusutan dan Amortisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan	267.979.699.502,67	247.608.362.113,39	20.371.337.389,28	8,23
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.211.563.507,01	1.507.388.897,00	(295.825.389,99)	(19,63)
Jumlah		269.191.263.009,68	249.115.751.010,39	20.075.511.999,29	8,06

Beban Penyusutan tahun 2021 adalah sebesar Rp267.979.699.502,67. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp247.608.362.113,39 mengalami kenaikan sebesar Rp20.371.337.389,28 atau 8,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-517 Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.260.688.616,67	85.535.145.379,39	8.725.543.237,28	10,20
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.233.649.280,00	47.757.576.545,00	5.476.072.735,00	11,47
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	120.485.361.606,00	114.315.640.189,00	6.169.721.417,00	5,40
Jumlah		267.979.699.502,67	247.608.362.113,39	20.371.337.389,28	8,23

Beban Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2021 adalah sebesar Rp1.211.563.507,01. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.507.388.897,00 mengalami penurunan sebesar Rp295.825.389,99 atau 19,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-518 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.211.563.507,01	1.507.388.897,00	(295.825.389,99)	(19,63)
Jumlah		1.211.563.507,01	1.507.388.897,00	(295.825.389,99)	(19,63)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.13 Beban Penyisihan Piutang	4.506.502.674,11	5.680.492.659,94

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, penghitungan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih didasarkan pada analisis umur piutang (*aging schedule*). Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.506.502.674,11. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.680.492.659,94 mengalami penurunan sebesar Rp1.173.989.985,83 atau 20,67% dengan obyek beban sebagai berikut:

Tabel 5-519 Obyek Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Jenis Piutang	Beban Penyisihan Piutang 2021 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.888.942.172,40	2.688.996.690,10	1.199.945.482,30	44,62
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	414.757.707,21	256.758.945,80	157.998.761,41	61,54
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	202.802.794,50	2.734.737.024,04	(2.531.934.229,54)	(92,58)
Jumlah		4.506.502.674,11	5.680.492.659,94	(1.173.989.985,83)	(20,67)

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp3.888.942.172,40. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.688.996.690,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.199.945.482,30 atau 44,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-520 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Pajak Restoran	39.965.941,90	638.720,00	39.327.221,90	6.157,19
2	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	394.000,00	101.000,00	293.000,00	290,10
3	Beban Penyisihan Pajak Reklame	38.221.742,80	49.305.020,40	(11.083.277,60)	(22,48)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.088.541,00	(1.088.541,00)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	399.033,90	1.232.104,00	(833.070,10)	(67,61)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.809.961.453,80	2.636.631.304,70	1.173.330.149,10	44,50
Jumlah		3.888.942.172,40	2.688.996.690,10	1.199.945.482,30	44,62

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp414.757.707,21. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp256.758.945,80 mengalami kenaikan sebesar Rp157.998.761,41 atau 61,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-521 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	332.579.807,61	191.776.129,50	140.803.678,11	73,42
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	82.177.899,60	64.982.816,30	17.195.083,30	26,46
Jumlah		414.757.707,21	256.758.945,80	157.998.761,41	61,54

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 adalah sebesar Rp202.802.794,50. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.734.737.024,04 mengalami penurunan sebesar Rp2.531.934.229,54 atau 92,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-522 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	52.148.757,00	14.499.549,00	37.649.208,00	259,66
2	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro	0,00	1.404.374,94	(1.404.374,94)	(100,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	150.654.037,50	2.718.833.100,10	(2.568.179.062,60)	(94,46)
Jumlah		202.802.794,50	2.734.737.024,04	(2.531.934.229,54)	(92,58)

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.1.14 Beban Transfer	119.674.608.869,00	112.955.077.712,00

Beban transfer tahun 2021 sebesar Rp119.674.608.869,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban transfer tahun 2020 sebesar Rp112.955.077.712,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.719.531.157,00 atau 5,95% dengan obyek beban transfer sebagai berikut :

Tabel 5-523 Obyek Beban Transfer

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.154.754.200,00	2.915.741.954,00	1.239.012.246,00	42,49
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.323.144.234,00	(312.148.881,00)	(13,44)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	113.508.859.316,00	107.716.191.524,00	5.792.667.792,00	5,38
Jumlah		119.674.608.869,00	112.955.077.712,00	6.719.531.157,00	5,95

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp4.154.754.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.915.741.954,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.239.012.246,00 atau 42,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-524 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.154.754.200,00	2.915.741.954,00	1.239.012.246,00	42,49
Jumlah		4.154.754.200,00	2.915.741.954,00	1.239.012.246,00	42,49

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp2.010.995.353,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.323.144.234,00 mengalami penurunan sebesar Rp312.148.881,00 atau 13,44% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-525 Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.323.144.234,00	(312.148.881,00)	(13,44)
Jumlah		2.010.995.353,00	2.323.144.234,00	(312.148.881,00)	(13,44)

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp113.508.859.316,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp107.716.191.524,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.792.667.792,00 atau 5,38 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-526 Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	113.508.859.316,00	107.716.191.524,00	5.792.667.792,00	5,38
	Jumlah	113.508.859.316,00	107.716.191.524,00	5.792.667.792,00	5,38

	<u>TA 2021</u> (Rp)	<u>TA 2020</u> (Rp)
5.4.1.15 Beban Lain-lain	2.706.711.067,00	3.932.308.907,00

Beban Lain-Lain berasal dari Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa dan Belanja Modal dengan nilai di bawah kebijakan kapitalisasi. Pengadaan yang berasal dari Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi akan dilakukan pencatatan secara *extracomptable*. Realisasi Beban Lain-Lain tahun 2021 sebesar Rp2.706.711.067,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban jasa tahun 2020 sebesar Rp3.932.308.907,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.225.597.840,00 atau 31,17% dengan obyek beban lain-lain sebagai berikut :

Tabel 5-527 Obyek Beban Lain-Lain

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	622.266.485,00	187.012.320,00	435.254.165,00	232,74
2	Beban Lain-lain	2.084.444.582,00	3.745.296.587,00	(1.660.852.005,00)	(44,35)
	Jumlah	2.706.711.067,00	3.932.308.907,00	(1.225.597.840,00)	(31,17)

Beban penurunan nilai investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp622.266.485,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp187.012.320,00 mengalami kenaikan sebesar Rp435.254.165,00 atau 232,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-528 Rincian Beban Penurunan Nilai Investasi

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	622.266.485,00	187.012.320,00	435.254.165,00	232,74
	Jumlah	622.266.485,00	187.012.320,00	435.254.165,00	232,74

Beban lain-lain tahun 2021 adalah sebesar Rp2.084.444.582,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp3.745.296.587,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.660.852.005,00 atau 44,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-529 Rincian Beban Lain-lain

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Lain-lain	2.084.444.582,00	3.745.296.587,00	(1.660.852.005,00)	(44,35)
	Jumlah	2.084.444.582,00	3.745.296.587,00	(1.660.852.005,00)	(44,35)

	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	14.757.392.971,17	(81.324.517.426,87)

Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sejumlah Rp14.757.392.971,17 dan (Rp81.324.517.426,87). Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-530 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	14.757.392.971,17	(81.324.517.426,87)	96.081.910.398,04	(118,15)
	Jumlah	14.757.392.971,17	(81.324.517.426,87)	96.081.910.398,04	(118,15)

	TA 2021	TA 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	143.266.875,36	(4.005.430.267,41)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sejumlah Rp143.266.875,36 dan (Rp4.005.430.267,41) Surplus/defisit dari Operasi merupakan selisih antara Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp446.980.195,00 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp303.713.319,64.

5.4.5 Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 adalah Rp14.900.659.846,53.

5.4.6 Pos Luar Biasa

Saldo Pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sejumlah (Rp240.000.000,00) dan (Rp117.540.000,00). Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Surplus/defisit dari pos luar biasa merupakan selisih antara Pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp240.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-531 Rincian Pos Luar Biasa

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Tak Terduga	240.000.000,00	117.540.000,00	122.460.000,00	104,19
	Jumlah	240.000.000,00	117.540.000,00	122.460.000,00	104,19

5.4.6.1 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp240.000.000,00) dan sebesar (Rp117.540.000,00) .

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5.4.7 Surplus/Defisit LO	14.660.659.846,53	(85.447.487.694,28)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp14.660.659.846,53 dan sebesar (Rp85.447.487.694,28).

5.5 LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp286.538.501.557,17 dan tahun 2020 sebesar Rp211.226.771.861,32 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Aliran kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

Tabel 5 - 532 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas	2.053.785.661.168,73	1.941.356.534.919,72
2	Jumlah Arus Keluar Kas	1.767.247.159.611,56	1.730.129.763.058,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		286.538.501.557,17	211.226.771.861,32

5.5.2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sebesar Rp2.053.785.661.168,73 dan tahun 2020 sebesar Rp1.941.356.534.919,72 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 533 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	35.114.763.839,00	30.580.807.590,96
2	Penerimaan Retribusi Daerah	14.367.036.052,00	18.316.717.235,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.260.079.389,45	4.203.394.607,40
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168.829.720.972,14	169.155.839.561,36
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	142.767.234.998,00	99.407.048.031,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	843.159.769.000,00	851.793.800.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	136.481.721.719,00	312.854.733.202,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	201.349.366.378,00	0,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	37.542.241.000,00	19.903.560.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	236.217.008.000,00	236.217.008.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	121.070.561.684,00	93.730.423.692,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	11.043.738.357,14	35.890.343.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah	0,00	69.302.860.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya	101.582.419.780,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		2.053.785.661.168,73	1.941.356.534.919,72

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp2.053.785.661.168,73 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp2.054.350.628.524,73 dari Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan sebesar Rp564.967.356,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 534 Rincian Pendapatan Daerah Yang Tidak Termasuk Dalam Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penjualan Peralatan/Mesin	322.260.989,00	121.584.173,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2	Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	34.350.000,00
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	242.706.367,00	244.603.506,00
Jumlah Pendapatan Daerah Yang Tidak Termasuk Dalam Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		564.967.356,00	400.537.679,00

Pendapatan Daerah Yang Tidak Termasuk Dalam Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp564.967.356,00 dicatat sebagai Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

5.5.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sebesar Rp1.767.247.159.611,56 dan tahun 2020 sebesar Rp1.730.129.763.058,40 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 535 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Pegawai	799.417.410.997,00	752.196.941.707,00
2	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	444.016.600.988,70	554.882.853.239,40
3	Pembayaran Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	130.514.844.220,06	70.135.598.600,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	35.217.459.036,80	2.332.500.000,00
6	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	4.154.754.200,00	2.915.741.954,00
7	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa	2.010.995.353,00	2.323.144.234,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	349.725.867.316,00	343.933.199.524,00
9	Pembayaran Belanja Tak Terduga	1.006.063.700,00	226.620.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi		1.767.247.159.611,56	1.730.129.763.058,40

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2021 sebesar minus Rp195.989.678.339,81 dan tahun 2020 sebesar minus Rp226.850.740.373,52 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 5 - 536 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	564.967.356,00	400.537.679,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	196.554.645.695,81	227.251.278.052,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(195.989.678.339,81)	(226.850.740.373,52)

5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sebesar Rp564.967.356,00 dan tahun 2020 sebesar Rp400.537.679,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 537 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penjualan Peralatan/Mesin	322.260.989,00	121.584.173,00
-	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	20.572.839,00	46.029.323,00
-	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	301.688.150,00	75.554.850,00
2.	Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	34.350.000,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
3.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	242.706.367,00	244.603.506,00
-	Penjualan Hasil Pertanian	222.706.367,00	158.851.200,00
-	Penjualan Hasil Perkebunan	0,00	60.752.306,00
-	Penjualan Hasil Perikanan	20.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		564.967.356,00	400.537.679,00

5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 sebesar Rp196.554.645.695,81 dan tahun 2020 sebesar Rp227.251.278.052,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 538 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	95.221.279.024,00	104.183.050.562,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.446.436.867,21	70.038.377.021,89
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.677.563.443,60	43.648.432.279,63
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.025.222.811,00	8.409.927.669,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	184.143.550,00	971.490.520,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi		196.554.645.695,81	227.251.278.052,52

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp33.125.000,00 menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim/tuntutan pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 5 - 539 Arus Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	139.318.500,00	33.125.000,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		139.318.500,00	33.125.000,00

5.5.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 dan tahun 2020 sebesar Rp33.125.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 540 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	139.318.500,00	33.125.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan		139.318.500,00	33.125.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 dan tahun 2020 sebesar Rp33.125.000,00 merupakan penerimaan pokok atas pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu dan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 541 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	68.158.500,00	0,00
2.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	71.160.000,00	0,00
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Diskoperindag	0,00	33.125.000,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		139.318.500,00	33.125.000,00

5.5.9 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 sebesar nihil dan tahun 2020 sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 542 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00

5.5.10 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 sebesar Rp67.497.952,96 dan tahun 2020 sebesar Rp36.130.500,88 merupakan penerimaan dan pengeluaran kas berupa pajak, potongan ataupun penerimaan lainnya yang menjadi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dari Kas Daerah/BUD dan langsung dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 543 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	137.266.791.907,73	141.460.299.090,08
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	137.199.293.954,77	141.424.168.589,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		67.497.952,96	36.130.500,88

5.5.11 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 sebesar Rp137.266.791.907,73 dan tahun 2020 sebesar Rp141.460.299.090,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 544 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	116.628.064.667,73	114.377.632.873,08
2.	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	20.638.727.240,00	27.082.666.217,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		137.266.791.907,73	141.460.299.090,08

1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp116.628.064.667,73 dan tahun 2020 sebesar Rp114.377.632.873,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 545 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	PFK 1 % (BPJS - Akun 811113)	6.091.107.385,00	6.076.586.402,00
2.	Taperum	0,00	464.986.000,00
3.	811412 Setoran PFK IW PEMDA 4 %	22.055.104.518,00	19.416.975.329,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 21	25.235.619.663,00	24.066.515.260,00
5.	Pajak Penghasilan Ps 22	1.384.037.374,00	1.667.612.739,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 23	310.319.769,00	292.341.035,00
7.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.034.737.341,00	2.905.297.090,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.507.436.414,00	25.672.186.746,00
9.	PFK 8 % (PT TASPEN - Akun 811114)	29.529.260.531,00	30.388.186.507,00
10.	PFK - JKK	813.786.016,00	833.116.638,00
11.	PFK - JKM	2.441.355.532,00	2.499.327.047,00
12.	PFK - 1 % (BPJS - Akun 811115) Gaji Bupati/Wk. Bup	1.368.840,00	1.370.880,00
13.	PFK - 8 % (PT TASPEN - Akun 811116) Gaji Bupati	4.211.520,00	4.227.840,00
14.	PFK - 1 % (BPJS - Akun 811153) PPPK	52.063.294,00	0,00
15.	PFK - 8 % (PT TASPEN - Akun 811114) PPPK	224.207.961,00	0,00
16.	811154 Setoran PFK IW PEMDA 4 % PPPK	208.252.719,00	0,00
17.	PFK - JKK PPPK	15.200.940,00	0,00
18.	PFK - JKM PPPK	45.600.987,00	0,00
19.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2020	0,00	88.903.360,08
20.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2021	1.674.393.863,73	0,00
Jumlah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.628.064.667,73	114.377.632.873,08

Penerimaan Perhitungan UP dan TU pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp20.638.727.240,00 dan tahun 2020 sebesar Rp27.082.666.217,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 546 Rincian Penerimaan Perhitungan UP dan TU

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP)	12.290.000.000,00	13.655.700.000,00
2.	Penerimaan Perhitungan Tambah Uang (TU)	8.348.727.240,00	13.426.966.217,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		20.638.727.240,00	27.082.666.217,00

5.5.12 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 sebesar Rp137.199.293.954,77 dan tahun 2020 sebesar Rp141.424.168.589,20 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 547 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	116.560.566.714,77	114.341.502.372,20
2.	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	20.638.727.240,00	27.082.666.217,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris		137.199.293.954,77	141.424.168.589,20

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp116.560.566.714,77 dan tahun 2020 sebesar Rp114.341.502.372,20 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 548 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	PFK 1 % (BPJS - Akun 811113)	6.091.107.385,00	6.076.586.402,00
2.	Taperum	0,00	464.986.000,00
3.	811412 Setoran PFK IW PEMDA 4 %	22.055.104.518,00	19.416.975.329,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 21	25.235.619.663,00	24.066.515.260,00
5.	Pajak Penghasilan Ps 22	1.384.037.374,00	1.667.612.739,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 23	310.319.769,00	292.341.035,00
7.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.034.737.341,00	2.905.297.090,00
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.507.436.414,00	25.672.186.746,00
9.	PFK 8 % (PT TASPEN - Akun 811114)	29.529.260.531,00	30.388.186.507,00
10.	PFK - JKK	813.786.016,00	833.116.638,00
11.	PFK - JKM	2.441.355.532,00	2.499.327.047,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
12.	PFK - 1 % (BPJS - Akun 811115) Gaji Bupati/Wk. Bup	1.368.840,00	1.370.880,00
13.	PFK - 8 % (PT TASPEN - Akun 811116) Gaji Bupati	4.211.520,00	4.227.840,00
14.	PFK - 1 % (BPJS - Akun 811153) PPPK	52.063.294,00	0,00
15.	PFK - 8 % (PT TASPEN - Akun 811114) PPPK	224.207.961,00	0,00
16.	811154 Setoran PFK IW PEMDA 4 % PPPK	208.252.719,00	0,00
17.	PFK - JKK PPPK	15.200.940,00	0,00
18.	PFK - JKM PPPK	45.600.987,00	0,00
19.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2021	1.474.405.818,73	0,00
20.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2020	87.487.240,08	0,00
21.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2019	45.002.851,96	43.540.759,20
22.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) FKTP Sumber Wringin Tahun 2019	0,00	9.231.600,00
23.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) FKTP Cermee Tahun 2019	0,00	500,00
Jumlah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.560.566.714,77	114.341.502.372,20

Penerimaan Perhitungan UP dan TU pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp20.638.727.240,00 dan tahun 2020 sebesar Rp27.082.666.217,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 549 Rincian Pengeluaran Perhitungan (UP) dan (TU)

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP)	12.290.000.000,00	13.655.700.000,00
2.	Penerimaan Perhitungan Tambah Uang (TU)	8.348.727.240,00	13.426.966.217,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris		20.638.727.240,00	27.082.666.217,00

5.5.13 Kenaikan /(Penurunan) Kas

Kenaikan/ (Penurunan) Kas merupakan hasil penjumlahan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan kas sebesar Rp90.755.639.670,32 sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan kas sebesar Rp15.554.713.011,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 550 Rincian Kenaikan dan Penurunan Kas

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	286.538.501.557,17	211.226.771.861,32
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(195.989.678.339,81)	(226.850.740.373,52)
3.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	139.318.500,00	33.125.000,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	67.497.952,96	36.130.500,88
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas		90.755.639.670,32	(15.554.713.011,32)

5.5.14 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp227.796.515.381,93 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp137.040.875.711,61 merupakan penjumlahan Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Saldo Awal Kas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 - 551 Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas	90.755.639.670,32	(15.554.713.011,32)
2.	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	137.040.875.711,61	152.595.588.722,93
Jumlah Saldo Akhir Kas		227.796.515.381,93	137.040.875.711,61

Jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp227.796.515.381,93 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp137.040.875.711,61 terdiri dari :

Tabel 5 - 552 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	179.556.601.565,89	104.040.569.665,12
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	18.433.000,00	7.875.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	317.407.530,00
4.	Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi	43.083.972.311,47	23.661.575.848,16
5.	Kas Lainnya	5.137.508.504,57	9.013.447.668,33
Jumlah Saldo Akhir Kas		227.796.515.381,93	137.040.875.711,61

1. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp179.556.601.565,89 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp104.040.569.665,12 terdiri dari :

Tabel 5 - 553 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di BUD	179.556.601.565,89	104.040.569.665,12
Jumlah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		179.556.601.565,89	104.040.569.665,12

2. Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.433.000,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.875.000,00 terdiri dari :

Tabel 5 - 554 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas LHP	18.433.000,00	7.875.000,00
Jumlah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		18.433.000,00	7.875.000,00

3. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar nihil dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp317.407.530,00 terdiri dari :

Tabel 5 - 555 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,00	317.407.530,00
Jumlah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	317.407.530,00

4. Jumlah Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.083.972.311,47 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.661.575.848,16 terdiri dari :

Tabel 5 - 556 Rincian Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di BLUD RSUD dr H Koesnadi	38.070.271.751,47	8.651.738.240,16
2.	Deposito di BLUD RSUD	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr H Koesnadi	13.700.560,00	9.837.608,00
Jumlah Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi		43.083.972.311,47	23.661.575.848,16

5. Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.137.508.504,57 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.013.447.668,33 terdiri dari :

Tabel 5 - 557 Rincian Kas Lainnya

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di FKTP	4.677.675.195,48	7.086.358.233,88
2.	Kas di Dana BOS	459.833.309,09	1.927.089.434,45
Jumlah Saldo Akhir Kas Lainnya		5.137.508.504,57	9.013.447.668,33

- a) Jumlah Kas di FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.677.675.195,48 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.086.358.233,88 terdiri dari :

Tabel 5 - 558 Rincian Kas di FKTP

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di FKTP Curahdami	234.968.840,00	330.979.771,00
2.	Kas di FKTP Binakal	124.327.671,00	173.933.633,00
3.	Kas di FKTP Grujugan	133.552.900,00	235.253.492,00
4.	Kas di FKTP Maesan	282.065.585,00	648.450.435,00
5.	Kas di FKTP Tamanan	334.286.818,00	414.162.208,00
6.	Kas di FKTP Jambesari	178.490.940,00	190.193.660,00
7.	Kas di FKTP Pujer	412.797.193,48	900.896.978,48
8.	Kas di FKTP Tlogosari	470.726.959,00	545.394.569,00
9.	Kas di FKTP Wonosari	203.553.361,00	196.677.898,00
10.	Kas di FKTP Tapen	371.215.440,00	646.130.768,00
11.	Kas di FKTP Nangkaan	250.724.535,04	167.977.507,04
12.	Kas di FKTP Sukosari	88.041.657,00	112.774.569,00
13.	Kas di FKTP Sumber Wringin	329.185.428,00	450.680.326,00
14.	Kas di FKTP Klabang	42.374.849,00	49.590.805,00
15.	Kas di FKTP Sempol	21.034.227,04	131.127.353,04
16.	Kas di FKTP Prajekan	25.552.851,60	169.937.463,00
17.	Kas di FKTP Botolinggo	123.559.342,00	231.327.620,00
18.	Kas di FKTP Cermee	242.485.461,35	646.018.651,35
19.	Kas di FKTP Kotakulon	72.589.685,70	52.239.906,70
20.	Kas di FKTP Kademangan	74.948.018,00	103.708.082,00
21.	Kas di FKTP Tenggarang	73.098.459,00	277.317.046,00
22.	Kas di FKTP Tegalampel	54.900.734,27	54.631.607,27
23.	Kas di FKTP Taman Krocok	70.575.204,00	36.691.427,00
24.	Kas di FKTP Wringin	285.180.028,00	230.507.479,00
25.	Kas di FKTP Pakem	177.439.008,00	89.754.979,00
Jumlah Saldo Akhir Kas di FKTP		4.677.675.195,48	7.086.358.233,88

- b) Jumlah Kas di Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp459.833.309,09 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.927.089.434,45 terdiri dari :

Tabel 5 - 559 Rincian Kas di Dana BOS

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di Dana BOS - SD	139.000.366,80	902.935.452,11
2.	Kas di Dana BOS - SMP	119.428.777,29	890.148.720,30
3.	Kas di Dana BOS untuk Penerimaan Pajak Restoran (Catering)	0,00	99.050,00
4.	Kas di Dana BOS untuk Perhitungan PFK Tahun 2021	201.404.165,00	0,00
5.	Kas di Dana BOS untuk Perhitungan PFK Tahun 2020	0,00	88.903.360,08
6.	Kas di Dana BOS untuk Perhitungan PFK Tahun 2019	0,00	45.002.851,96
Jumlah Saldo Akhir Kas di Dana BOS		459.833.309,09	1.927.089.434,45

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.6.1 Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp2.863.888.254.252,79 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2020.
- 5.6.2 Surplus/(Defisit) LO sebesar Rp14.660.659.846,53 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021.
- 5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp3.572.230.221,40 disebabkan oleh koreksi kesalahan mendasar.
- 5.6.4 Koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp3.572.230.221,40 disebabkan oleh koreksi ekuitas dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.6.4.1 Koreksi penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.009.136,40 merupakan pengurangan penyisihan piutang pajak air tanah.
 - 5.6.4.2 Koreksi penyisihan piutang retribusi sebesar Rp25.500,00 merupakan pengurangan penyisihan piutang retribusi sewa kios pasar.
 - 5.6.4.3 Koreksi penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.025.742.669,24 terdiri dari pengurangan penyisihan piutang BLUD sebesar Rp3.024.338.294,30 dan pengurangan penyisihan piutang jasa giro BOS sebesar Rp1.404.374,94.
 - 5.6.4.4 Koreksi penyisihan piutang lain-lain sebesar Rp143.731.100,00 terdiri dari pengurangan penyisihan piutang lain-lain Kredit Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp72.333.500,00 dan pengurangan penyisihan piutang lain-lain Kredit Pembelian Gabah sebesar Rp71.397.600,00.
 - 5.6.4.5 Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp401.721.815,76 dengan rincian sebagai berikut :

a. Koreksi Penambahan Ekuitas	Rp	607.164.412,76
b. Koreksi Pengurangan Ekuitas	Rp	205.442.597,00
Jumlah	Rp	401.721.815,76
a. Koreksi Penambahan Ekuitas sebesar Rp37.253.381.551,43 terdiri dari :		
1 Koreksi Pengakuan Pengurangan Akumulasi Kerugian Penambahan Modal yang berasal dari PDAM Tahun Buku 2021	Rp	607.164.412,00
2 Koreksi saldo awal Penyertaan Modal pada PT Bondowoso Gemilang	Rp	0,76
Jumlah	Rp	607.164.412,76

b. Koreksi Pengurangan Ekuitas sebesar Rp205.442.597,00 terdiri dari :

1	Koreksi utang transfer dana bagi hasil tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021	Rp	205.442.597,00
---	--	----	----------------

Jumlah	Rp	205.442.597,00
---------------	-----------	-----------------------

5.6.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp2.882.121.144.320,72 dengan rincian sebagai berikut :

-	Ekuitas Awal	Rp	2.863.888.254.252,79
-	Surplus/ Defisit LO	Rp	14.660.659.846,53
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	3.572.230.221,40
-	Ekuitas Akhir	Rp	2.882.121.144.320,72

5.7 Pengungkapan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, nilai surplus/(defisit) adalah defisit sebesar Rp90.548.823.217,36 dan Laporan Operasional Tahun 2021, nilai surplus/(defisit) adalah defisit sebesar Rp14.660.659.846,53. Nilai tersebut memiliki perbedaan sebesar Rp75.888.163.370,83.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Penyelesaian Kerugian Daerah.

Adapun mutasi atas saldo kerugian daerah selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kasus Daerah Semester II Tahun 2021

No	Jenis Kerugian	Kerugian		Pembayaran				Sisa Kasus		Ket.		
		Jml	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
I	Kasus yang Telah Diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM/Putusan Pengadilan											
	1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	240	5.337.487.900,43	57	856.649.727,00	167	1.972.303.548,43	0	0,00	59	2.508.534.625,00	Sisa kasus terdiri dari 43 kasus yang diangsur namun belum lunas sebesar Rp1.755.715.541,00 dan 16 kasus yang belum dibayar sebesar Rp752.819.084,00
	3. Pihak Ketiga (P.III)	410	10.567.140.982,92	37	1.406.758.197,60	373	9.085.482.785,32	0	0,00	17	74.900.000,00	Sisa Kasus merupakan 17 kasus yang diangsur namun belum lunas sebesar Rp74.900.000,00
	Sub Jumlah I	650	15.904.628.883,35	94	2.263.407.924,60	540	11.057.786.333,75	0	0,00	76	2.583.434.625,00	
II	Kasus yang Masih Dalam Proses Pembebanan											
	1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	3. Pihak Ketiga (P.III)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Sub Jumlah II	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
III	Kasus yang Masih Berupa Informasi											
	1. HP BPK	39	2.616.232.028,12	3	1.542.529.372,54	30	972.426.781,58	0	0,00	6	101.275.874,00	Sisa kasus merupakan 6 kasus yang sama sekali belum ada pembayaran sebesar Rp101.257.874,00
	2. HP APIP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Sub Jumlah III	39	2.616.232.028,12	3	1.542.529.372,54	30	972.426.781,58	0	0,00	6	101.275.874,00	
	J U M L A H (I + II + III)	689	18.520.860.911,47	97	3.805.937.297,14	570	12.030.213.115,33	0	0,00	82	2.684.710.499,00	

BAB VII

Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Tahun 2021 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tahun 2021 merupakan tahun ketujuh Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan akuntansi berbasis akrual. Terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam. Namun dengan berbekal komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan

diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun 2021 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya-upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang lebih baik.

Bondowoso, Mei 2022

BUPATI BONDOWOSO
SALWA ARIFIN